

BUKU INI TIDAK DIPERJUALBELIKAN

**Buku Panduan Guru**  
**EKONOMI SMA/MA**  
**Muatan Kebanksentralan**

Disusun Berdasarkan Kurikulum 2013



BANK INDONESIA



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

The top of the page features a photograph of the Bank Indonesia building, showing its classical architectural style with columns and a large sign that reads "BANK INDONESIA". Below the photograph is a red horizontal bar containing the title in white text, and a blue horizontal bar below that.

## SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menyambut baik penerbitan buku “Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan” yang dapat digunakan oleh para guru ekonomi SMA/MA sebagai salah satu sumber ajar mata pelajaran Ekonomi SMA/MA. Buku ini diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai implementasi Kurikulum 2013 yang memuat materi kebanksentralan dalam mata pelajaran Ekonomi SMA/MA. Seiring dengan penyempurnaan kurikulum pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bank Indonesia berkeinginan untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pengetahuan, wawasan dan pemahaman yang utuh tentang fungsi dan peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia. Di samping itu, adanya peralihan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dan dinamika perkembangan fungsi dan peran Bank Indonesia di sistem pembayaran serta kebijakan moneter perlu diinformasikan sedini mungkin kepada dunia pendidikan.

Kami mengikuti perkembangan dunia pendidikan khususnya Pengembangan Kurikulum 2013 yang mengangkat kembali filosofi pendidikan yang berbasis nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Fokus Pengembangan Kurikulum 2013 antara lain penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara holistik dalam pembelajaran serta penguatan penilaian proses dan hasil.

Melalui buku ini diharapkan para guru dan peserta didik dapat memahami dengan baik peran dan fungsi Bank Indonesia, perkembangan sistem pembayaran dan alat pembayaran, pengelolaan uang rupiah dan kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sehingga pada saatnya nanti apabila anak didik terjun ke dalam masyarakat telah memiliki keutuhan penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia dalam memajukan perekonomian Indonesia.

Akhir kata, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penulis, Narasumber Bank Indonesia, Tim *Review* Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Tim *Review* Bank Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita semua dan negara Indonesia menjadi negara yang makmur, adil dan sejahtera.

Jakarta, Februari 2014

Gubernur  
Bank Indonesia



Agus D.W. Martowardojo



## SAMBUTAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Penyediaan buku ini oleh Pemerintah, baik untuk peserta didik maupun untuk guru, merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanahkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, saya menyambut baik penerbitan buku “Panduan Guru Ekonomi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) tentang Muatan Kebanksentralan”, sebagai hasil kerja antara Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan terbitnya buku tersebut, saya mengharapkan: pertama, bisa menjadi sarana yang efektif untuk mensosialisasikan muatan kebanksentralan kepada peserta didik di SMA/MA sesuai dengan dinamika dan perkembangan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia, antara lain lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan sistem dan alat pembayaran serta kebijakan moneter yang merupakan ranah otoritas dari Bank Indonesia; dan kedua, bisa menjadi sarana pendukung implementasi Kurikulum 2013 untuk SMA/MA yang dimulai pada tahun pelajaran 2013/2014.

Hal penting dari kerjasama antara Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sesama komponen negara yaitu kehendak bersama untuk merealisasikan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam tujuan pendidikan nasional. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.



Buku “Panduan Guru Ekonomi SMA/MA tentang Muatan Kebanksentralan” telah memenuhi Kriteria Kurikulum 2013 untuk dipakai oleh guru sebagai referensi. Kriteria yang dimaksud yaitu buku ini berbasis pada aktivitas yang mendorong peserta didik bisa memperoleh pengalaman belajar langsung terkait dengan muatan kebanksentralan.

Upaya penerbitan buku ini selaras dengan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Sosialisasi Jasa Perbankan di Sekolah, Nomor 14/6/GBI/DPNP dan Nomor 8/VI/NK/2012. Atas dasar ini, Bank Indonesia berinisiatif untuk menyiapkan Buku Panduan Bermuatan Substansi Kebanksentralan untuk Guru Ekonomi SMA/MA yang disusun berdasarkan Kurikulum 2013

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim dari Bank Indonesia, Tim dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, dan Tim Penulis yang telah bekerjasama untuk mewujudkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para guru mata pelajaran Ekonomi SMA/MA dalam menyampaikan pesan substansi Kebanksentralan.

Jakarta, Januari 2014



**Prof. Dr. Furqon**

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



## KATA PENGANTAR BANK INDONESIA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, Bank Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan penulisan buku “Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebansentralan”. Buku ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Fungsi dan tujuan di atas, menunjukkan bahwa pendidikan di setiap satuan pendidikan harus diselenggarakan dengan baik dan mencapai hasil sebagaimana diharapkan kepada peserta didik. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan mulia pendidikan adalah dengan terus-menerus meningkatkan kemampuan guru-guru ekonomi SMA/MA dalam bidang pengetahuan mengenai kebanksentralan. Buku pedoman guru ini diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para guru agar pada gilirannya, dapat menularkan pengetahuan ini untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami peran dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Adanya dinamika terhadap peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang independen melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, membawa amanat terhadap kedudukan Bank Indonesia. Lahirnya Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga membawa pengaruh terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Begitu pula perkembangan teknologi telah menciptakan sistem pembayaran dan alat pembayaran nontunai seperti *e-money*, kartu kredit, dan kartu debit. Pemahaman kepada peserta didik tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah dan bagaimana Bank Indonesia menjalankan fungsinya di bidang pengelolaan uang rupiah diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan penghargaan peserta didik kepada Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan Rupiah sebagai lambang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua pengetahuan tersebut perlu disampaikan kepada guru secara sistematis, sederhana dan menarik. Selanjutnya guru diharapkan dapat melakukan alih pengetahuan dan menumbuhkembangkan sikap kepedulian peserta didik.

Rintisan untuk memberikan materi pengetahuan terkait dengan kebanksentralan telah dimulai pada Kurikulum 2006. Dalam upaya membantu peningkatan kompetensi guru, Bank Indonesia telah merintis untuk melaksanakan berbagai program edukasi tentang kebanksentralan kepada guru ekonomi SMA dan MA. Pada tahun 2010 Bank Indonesia bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi telah melakukan pengembangan silabus mata pelajaran ekonomi SMA/MA dengan muatan materi Kebanksentralan yang bersifat sebagai pengayaan mata pelajaran ekonomi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut berjalan dengan baik, sehingga cakupan kerjasama diperluas. Pada tahun 2012, Bank Indonesia bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengembangan standar isi mata pelajaran ekonomi MA dengan muatan materi Kebanksentralan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program edukasi tersebut, pada tingkat nasional, Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam penyempurnaan kurikulum SMA/MA yang dilakukan oleh Pusat

Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bank Indonesia secara aktif telah ikut serta memberikan masukan dalam pengembangan substansi kurikulum Ekonomi yang terkait dengan kebanksentralan, antara lain dalam kegiatan penyusunan kompetensi dasar dan silabus serta pemetaan materi mata pelajaran ekonomi.

Materi Kebanksentralan dalam Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Ekonomi SMA/MA telah dinilai baik oleh Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini juga telah melalui serangkaian uji keterbacaan di beberapa wilayah Indonesia. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi guru, penerbit dan penulis yang akan menulis tentang Kebanksentralan.

Dalam penulisan buku ini, Bank Indonesia telah menugaskan Tim Penulis yang mempunyai pengalaman menulis buku-buku pelajaran SMA/MA. Adapun untuk menjaga kebenaran materi dan kesesuaian sebagai buku panduan guru, Bank Indonesia bertindak sebagai Narasumber dan bekerja sama dengan Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk Tim *Review*. Ke depan, buku ini akan senantiasa disempurnakan seiring dengan perkembangan pengetahuan mengenai kebanksentralan.

Jakarta, Januari 2014

**Lambok Antonius Siahaan**

Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang

**Iskandar Simorangkir**

Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral

## TIM PENULIS

Puji dan syukur penulis sampaikan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pemilik segala ilmu pengetahuan dan pencerah kepada setiap umat yang memiliki tekad untuk berbagi ilmu melalui tulisan. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis akhirnya dapat menyajikan buku ini hingga sampai di hadapan pembaca semua.

Buku Panduan Guru Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan ini diperuntukkan bagi guru SMA/MA yang mengajar di kelas X dan kelas XI. Buku ini disusun berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) serta Silabus kelas X dan kelas XI yang dikembangkan oleh Tim Pengembang Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013. KI dan KD yang bermuatan kebanksentralan tersebut secara khusus berhubungan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Dalam buku ini dikembangkan materi-materi yang berhubungan dengan tiga KD di kelas X dan dua KD di kelas XI. Untuk KD kelas X yang materinya dikembangkan dalam buku ini yaitu KD 3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya, KD 3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan KD. 3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran. Adapun KD kelas XI yang materinya dikembangkan dalam buku ini terdiri atas dua KD, yaitu KD 3.6 Menganalisis indeks harga dan inflasi, serta KD 3.7 Mendeskripsikan kebijakan moneter dan fiskal.

Keseluruhan isi Buku terdiri atas enam bab. Bab 1 menyajikan pendahuluan yang berisi tentang karakteristik Kurikulum 2013, rambu-rambu, tujuan dan ruang lingkup mata pelajaran Ekonomi dalam Kurikulum 2013, strategi & model umum pembelajaran serta konstruksi isi buku panduan guru ekonomi. Adapun Bab 2 menyajikan materi

yang mendukung KD 3.5/KD 4.5 kelas X, Bab 3 menyajikan materi yang mendukung KD 3.6/KD.4.6 kelas X, sementara itu, Bab 4 menyajikan materi yang mendukung KD 3.2/KD 4.2 kelas X khususnya salah satu materi pokok dari KD tersebut yaitu tentang pengelolaan keuangan. Selanjutnya, Bab 5 menyajikan materi yang mendukung KD 3.6/KD 4.6 kelas XI, dan Bab 6 menyajikan materi yang mendukung KD 3.7/KD 4.7 kelas XI.

Selain materi-materi pokok, buku ini dilengkapi pula dengan materi pengayaan kontekstual, forum diskusi, *review* materi, eksplorasi pendidikan nilai keagamaan dan nilai sosial. Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk menyampaikan misi yang dipesankan KI 1/KD 1 dan KI 2/KD 2, simpulan, refleksi dan glosarium pada setiap babnya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah memberikan bantuannya selama penyusunan buku ini, khususnya Tim *Reviewer* dari Kantor Pusat Bank Indonesia dan Tim Puskurbuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga setiap partisipasi yang diberikan menjadi investasi berharga bagi pengembangan khasanah keilmuan mata pelajaran Ekonomi, khususnya yang bermuatan kebanksentralan serta ilmu Ekonomi pada umumnya di lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) di Indonesia.

Jakarta, Januari 2014

Tim Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Sambutan Gubernur Bank Indonesia .....</b>	<b>ii</b>
<b>Sambutan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia .....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar Bank Indonesia .....</b>	<b>vi</b>
<b>Tim Penulis.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>xi</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>xiv</b>
<b>Daftar Grafik.....</b>	<b>xv</b>
<b>Daftar Bagan .....</b>	<b>xvi</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1    Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
Bagian I : Petunjuk Umum .....	1
A.   Ekonomi sebagai Disiplin Ilmu.....	1
B.   Peranan Kebanksentralan dalam Konteks Ekonomi .....	5
C.   Ekonomi sebagai Mata Pelajaran dalam Kurikulum SMA/MA.....	6
Bagian II : Petunjuk Khusus.....	13
D.   Pembelajaran dan Penilaian dalam Mata Pelajaran Ekonomi .....	13
E.   Sistematika Buku .....	22
<b>BAB 2    Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Bank Sentral dan OJK.....</b>	<b>25</b>
Kompetensi Inti .....	25
Kompetensi Dasar .....	26
Tujuan Pembelajaran.....	26
Alokasi Waktu.....	26
Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran .....	26
Peta Konsep.....	27
Kata Kunci.....	27
A.   Bank .....	28
B.   Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) .....	46
C.   Bank Sentral .....	58
D.   Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .....	68



Simpulan.....	73
Refleksi .....	74
Glosarium .....	75
Penilaian .....	79
Penugasan .....	79
<b>BAB 3 Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran .....</b>	<b>83</b>
Kompetensi Inti .....	83
Kompetensi Dasar .....	84
Tujuan Pembelajaran.....	84
Alokasi Waktu.....	84
Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran .....	84
Peta Konsep.....	85
Kata Kunci.....	85
A. Sistem Pembayaran .....	86
B. Uang .....	93
C. Alat Pembayaran Non Tunai .....	112
Simpulan.....	117
Refleksi .....	117
Glosarium .....	118
Penilaian .....	120
Penugasan .....	121
<b>BAB 4 Pengelolaan Keuangan.....</b>	<b>123</b>
Kompetensi Inti .....	123
Kompetensi Dasar .....	124
Tujuan Pembelajaran.....	124
Alokasi Waktu.....	124
Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran .....	124
Peta Konsep.....	125
Kata Kunci.....	125
A. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan .....	126
B. Kegiatan Menabung dalam Pengelolaan Keuangan .....	132
C. Kegiatan Berinvestasi dalam Pengelolaan Keuangan .....	136
D. Produk Keuangan untuk Menabung dan Berinvestasi.....	137
E. Risiko yang Harus Diperhatikan Saat Menabung dan Berinvestasi.....	138
Simpulan.....	140
Refleksi .....	141
Glosarium .....	141
Penilaian .....	144
Penugasan .....	144

<b>BAB 5</b>	<b>Indeks Harga dan Inflasi .....</b>	<b>147</b>
	Kompetensi Inti .....	147
	Kompetensi Dasar .....	148
	Tujuan Pembelajaran.....	148
	Alokasi Waktu.....	148
	Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran .....	148
	Peta Konsep.....	149
	Kata Kunci.....	149
	A. Permintaan dan Penawaran Uang.....	150
	B. Indeks Harga .....	154
	C. Inflasi.....	160
	Simpulan.....	176
	Refleksi .....	176
	Glosarium .....	177
	Penilaian .....	178
	Penugasan .....	178
<b>BAB 6</b>	<b>Kebijakan Moneter dan Fiskal.....</b>	<b>181</b>
	Kompetensi Inti .....	181
	Kompetensi Dasar .....	182
	Tujuan Pembelajaran.....	182
	Alokasi Waktu.....	182
	Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran .....	182
	Peta Konsep.....	183
	Kata Kunci.....	183
	A. Kebijakan Moneter.....	184
	B. Kebijakan Fiskal.....	191
	Simpulan.....	194
	Refleksi .....	195
	Glosarium .....	196
	Penilaian .....	197
	Penugasan .....	197
<b>Indeks</b>	<b>.....</b>	<b>199</b>
<b>Daftar Pustaka</b> .....		<b>200</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b> .....		<b>205</b>
1. Peta Materi Ekonomi SMA/MA Kurikulum 2013.....		206
2. Silabus Mata Pelajaran Ekonomi Kurikulum 2013 .....		211
<b>Biodata Penulis</b> .....		<b>238</b>



## DAFTAR TABEL

### Bab 1

Tabel 1.1	
Struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) Mata Pelajaran Ekonomi Kurikulum 2013 .....	9
Tabel 1.2	
Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran Tradisional .....	17

### Bab 2

Tabel 2.1	
Perbedaan Bank Umum dan BPR .....	32
Tabel 2.2	
Produk dan Layanan Bank .....	41
Tabel 2.3	
Karakteristik Produk Pendanaan Bank Syariah .....	42
Tabel 2.4	
Tujuan, Fungsi dan Tugas OJK .....	72

### Bab 4

Tabel 4.1	
Contoh Tabel untuk Mencatat Harta Aset ..	127
Tabel 4.2	
Contoh Tabel untuk Mencatat Pengeluaran	128
Tabel 4.3	
Identifikasi Pengeluaran Bulanan dan Tahunan .....	128
Tabel 4.4	
Prioritas Kebutuhan dan Keinginan .....	130
Tabel 4.5	
Buku Catatan Menabung .....	131
Tabel 4.6	
Perencanaan Program Masa Depan .....	131

### Bab 5

Tabel 5.1	
Jenis-Jenis Inflasi .....	166



## DAFTAR GRAFIK

### **Bab 5**

#### Grafik 5.1

Inflasi Tarikan Permintaan ..... 164

#### Grafik 5.2

Inflasi Dorongan Biaya ..... 165

#### Grafik 5.3

Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen)  
berdasarkan Perhitungan Inflasi Tahunan .. 175

### **Bab 6**

#### Grafik 6.1

Siklus Kegiatan Ekonomi ..... 185



## DAFTAR BAGAN

### Bab 2

Bagan 2.1	
Jenis dan Prinsip Kegiatan Bank .....	35
Bagan 2.2	
Tugas Bank Indonesia .....	61
Bagan 2.3	
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).....	67
Bagan 2.4	
Migrasi Tugas BI dan BAPEPAM-LK ke OJK..	69

### Bab 3

Bagan 3.1	
Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran .....	87
Bagan 3.2	
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran .....	89
Bagan 3.3	
Alur Transaksi dengan Menggunakan BI-RTGS .....	90
Bagan 3.4	
Tahapan Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia .....	99
Bagan 3.5	
Jenis-jenis Alat Pembayaran Nontunai .....	113

### Bab 4

Bagan 4.1	
Prioritas Pengeluaran .....	129

### Bab 6

Bagan 6.1	
Kebijakan Moneter sebagai Bagian dari Kebijakan Makroekonomi.....	184
Bagan 6.2	
Kebijakan Moner Ekspansif dan Kontraktif oleh Bank Indonesia .....	186
Bagan 6.3	
Kerangka Operasional Kebijakan Moneter...	189
Bagan 6.4.....	
Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif oleh Pemerintah.....	193



## DAFTAR GAMBAR

<b>Bab 2</b>		
Gambar 2.1		
Warkat Kliring.....	39	
<b>Bab 3</b>		
Gambar 3.1		
Sentral Sistem BI-RTGS .....	90	
Gambar 3.2		
Penyelenggaraan Sistem Kliring.....	92	
Gambar 3.3		
Uang Kertas .....	94	
Gambar 3.4		
Uang Logam.....	98	
Gambar 3.5		
Laboratorium Klarifikasi Keaslian		
Uang Rupiah .....	105	
Gambar 3.6		
Warna Uang pada Uang Kertas Rp50.000 ..	106	
Gambar 3.7		
<i>Optically Variable Ink (OVI)</i>		
pada Uang Kertas Rp50.000 .....	106	
Gambar 3.8		
Cetak Pelangi pada Uang Kertas		
Rp100.000 .....	106	
Gambar 3.9		
Benang Pengaman.....	107	
Gambar 3.10		
Gambar Tersembunyi pada Uang Kertas		
Rp20.000 .....	107	
Gambar 3.11		
Cetak <i>Intaglio</i> pada Uang Kertas		
Rp100.000 .....	107	
Gambar 3.12		
Kode Tunanetra pada Uang Kertas		
Rp50.000 .....	108	
Gambar 3.13		
Tanda Air pada Uang Kertas Rp50.000 .....	108	
Gambar 3.14		
Gambar Saling Isi pada Uang Kertas		
Rp50.000 .....	108	
Gambar 3.15		
Tulisan Mikro pada Uang Kertas		
Rp100.000 .....	109	
Gambar 3.16		
Tinta Tidak Tampak pada Uang Kertas		
Rp50.000 .....	109	

Gambar 3.17 Tinta Tampak pada Uang Kertas Rp100.000 .....	110	Gambar 3.21 Contoh Bilyet Giro .....	114
Gambar 3.18 Nomor Seri pada Uang Kertas Rp100.000 ..	110	Gambar 3.22 Contoh Mesin EDC ( <i>Electronic Data Capture</i> ) .....	115
Gambar 3.19 Aktivitas Penukaran Uang Rusak/ Uang Tidak Layak Edar.....	111	Gambar 3.23 Contoh Kartu ATM & Kartu Kredit yang ada di Indonesia saat ini.....	115
Gambar 3.20 Contoh Cek.....	113	Gambar 3.24 Contoh Uang Elektronik yang ada di Indonesia saat ini.....	116





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### BAGIAN I : PETUNJUK UMUM

#### **A. Ekonomi sebagai Disiplin Ilmu**

Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan tidak terbatas serta berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Xenophon (440-355 SM) mengungkapkan bahwa secara etimologi, kata ekonomi berasal dari Bahasa Yunani, *Oikonomia*, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga, dan *nomos* yang berarti aturan, kaidah atau pengelolaan. Oleh karena itu, secara sederhana pengertian ekonomi adalah aturan-aturan, kaidah-kaidah atau cara pengelolaan suatu rumah tangga. Adapun Paul A. Samuelson (2001) mendefinisikan ekonomi sebagai kajian masyarakat

menggunakan sumber daya yang langka, untuk memproduksi komoditi-komoditi berharga dan mendistribusikannya kepada masyarakat luas. Sementara itu, Alfred Marshall sebagaimana dikutip oleh Mubyarto (1987) mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai suatu studi tentang manusia dalam kehidupannya sehari-hari, yang mempelajari tindakan individu atau kelompok yang berkaitan erat dengan pencapaian atau pemenuhan alat kebutuhan materi bagi kesejahteraan hidup.

Melengkapi pendapat para ahli di atas, Dominick Salvatore dan Eugene A. Diulio (2004) mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu sosial yang mempelajari individu-individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Adapun Hermawan Kertajaya mengartikan ekonomi sebagai suatu keadaan dimana suatu sektor industri melekat padanya. Sementara itu, John S. Mill mengartikan ekonomi sebagai ilmu pengetahuan praktik tentang penagihan dan pengeluaran, dan Adam Smith mengartikan ekonomi sebagai penyelidikan tentang sebab dan keadaan kekayaan suatu negara.

Berdasarkan pengertian ekonomi menurut para ahli di atas dapat ditarik benang merahnya, bahwa ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka mencapai kesejahteraan atau kemakmuran. Dalam kajian ilmu pengetahuan, ekonomi dimasukkan ke dalam bagian ilmu-ilmu sosial. Hal ini karena ekonomi terkait dengan masalah manusia yang merupakan kompetensi dasar dalam kajian ilmu sosial.

Ilmu ekonomi sendiri dibagi ke dalam tiga bidang. Bidang *pertama* adalah bidang tata buku atau lebih dikenal dengan nama akuntansi. Bidang *kedua* terkait dengan teknik penataan sistem organisasi atau yang dikenal dengan manajemen. Bidang *ketiga* adalah konsep ilmu ekonomi yang membahas tentang masalah ekonomi negara atau yang dikenal dengan ekonomi pembangunan.

Bidang akuntansi dan manajemen digolongkan sebagai ilmu ekonomi mikro. Hal ini disebabkan kompetensi dasarnya lebih terkait pada ruang lingkup perusahaan semata. Sementara itu, ekonomi pembangunan digolongkan sebagai ekonomi makro, karena kajian bahasanya lebih luas dan terkait dengan kebijakan sebuah negara di bidang ekonomi, misalnya tentang inflasi, penentuan suku bunga dan sistem perekonomian yang digunakan oleh suatu negara. Terdapat beberapa istilah mendasar yang digunakan dalam kajian ekonomi, di antaranya sebagai berikut:

## **1. Tindakan Ekonomi**

Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Tindakan ekonomi dapat diartikan juga sebagai usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan dalam memenuhi setiap kebutuhannya.

## **2. Motif Ekonomi**

Motif ekonomi adalah dorongan yang menjadikan individu atau masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat diartikan juga sebagai alasan atau tujuan seseorang dalam melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi terdiri atas motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Motif intrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan sendiri. Adapun motif ekstrinsik adalah suatu keinginan untuk melakukan tindakan ekonomi atas dorongan lingkungan.

## **3. Prinsip Ekonomi**

Prinsip ekonomi adalah garis-garis penuntun yang digunakan oleh pelaku ekonomi dalam melaksanakan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi dapat diartikan juga sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi tersebut adalah dengan pengorbanan tertentu memperoleh hasil maksimal atau dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu.

Prinsip ekonomi yang sebelumnya pernah berkembang yakni “dengan pengorbanan yang minimal dapat menghasilkan hasil yang maksimal” sudah tidak tepat, karena hanya akan melahirkan manusia liberal yang serakah dan menghalalkan segala cara.

## **4. Faktor Produksi**

Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna barang dan jasa. Faktor produksi tersebut terdiri atas faktor-faktor produksi asli, yang terdiri atas sumber daya alam (tanah) dan sumber daya manusia (tenaga kerja), serta faktor produksi turunan yang terdiri atas sumber daya modal dan kewirausahaan.

Faktor sumber daya alam adalah sumber daya yang tersedia di alam semesta, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya; tanah, air, sinar matahari, dan barang-barang tambang. Sementara itu, faktor sumber daya manusia meliputi; tenaga jasmani dan rohani yang dipergunakan

untuk mengambil dan mengolah sumber alam, hingga menjadi benda yang lebih bernilai guna.

Adapun faktor sumber daya modal adalah segala sarana yang digunakan untuk menghasilkan barang lain, misalnya; uang, bahan mentah, mesin, dan perkakas. Sementara itu, faktor sumber daya wirausaha adalah sumber daya manusia yang memiliki keahlian (*skill*) atau keterampilan untuk mengelola ketiga sumber daya produksi lainnya (alam, tenaga kerja, dan modal) serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi.

## 5. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah sistem yang dianut oleh sebuah negara dalam menentukan kebijakan perekonomian. Fungsi sistem ekonomi yaitu untuk menjawab masalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa). Sistem ekonomi yang berkembang terdiri atas sistem ekonomi kapitalis/liberal, sistem ekonomi komando/terpusat, sistem ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam.

Sistem ekonomi kapitalis/liberal atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memiliki ciri pengakuan yang luas terhadap kegiatan ekonomi perseorangan. Pengaturan ekonomi didasarkan pada mekanisme pasar, sehingga kedudukan pemerintah sangat minim, yakni hanya sebagai pengamat dan pelindung dalam perekonomian. Prinsip keadilan pada sistem ini yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi kerjanya.

Adapun sistem ekonomi komando disebut juga sistem ekonomi sosialis. Sistem ini memiliki ciri-ciri dimana penguasaan sumber daya alam atau faktor produksi dikuasai oleh negara. Imbalan yang diberikan pada perseorangan didasarkan pada kebutuhannya, bukan berdasarkan jasa yang diberikannya. Prinsip keadilan pada sistem ekonomi terpusat adalah setiap orang mendapatkan imbalan yang sama. Kebutuhan-kebutuhan pokok ekonomi sepenuhnya direncanakan oleh pemerintah.

Sementara itu, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memberikan pengakuan sama kepada sektor swasta dan pemerintah. Hal ini berarti, di samping sektor swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan arah dan perkembangan ekonomi. Sistem ini umumnya digunakan oleh negara-negara dunia ketiga dengan bobot yang berbeda, misalnya saja di Philipina, bobot sistem ekonomi pasarnya lebih tinggi dibandingkan bobot sistem sosialisnya atau di India, bobot sistem sosialisnya lebih tinggi dari pada bobot sistem ekonomi pasarnya. Dalam kenyataan dewasa ini, tidak ada suatu negara yang murni menganut sistem ekonomi pasar dan

sistem ekonomi terpusat, melainkan campuran dari keduanya dengan bobot masing-masing yang berbeda.

Selanjutnya, sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bercirikan memasukkan nilai-nilai Islam sebagai variabel dalam kegiatan dan kebijakan ekonomi. Prinsip keadilan pada sistem ini yaitu setiap orang berhak menerima imbalan sesuai prestasi selama tidak merugikan orang lain, berupa kecurangan (*ghoror*) dan judi/untung-untungan (*maysir*). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Islam yang universal.

## **B. Peranan Kebanksentralan dalam Konteks Ekonomi**

Perkembangan ekonomi dunia menunjukkan kemajuan yang pesat ditopang oleh sistem keuangan yang stabil. Bank sentral mempunyai peran yang sangat penting dikarenakan posisinya berada di sentral sistem keuangan melalui fungsinya sebagai otoritas moneter. Selaku otoritas moneter bank sentral memiliki kekuatan politik untuk memenuhi kecukupan likuiditas keuangan yang dibutuhkan oleh perekonomian. Secara umum, tidak hanya terbatas pada fungsi moneter bank sentral juga berperan sebagai otoritas dalam sistem pembayaran dan perbankan. Ketiga fungsi ini saling memiliki keterkaitan, karena kebijakan moneter hanya dapat efektif dilakukan bila memiliki sistem pembayaran yang stabil dan perbankan yang sehat. Transmisi kebijakan moneter dilakukan melalui perbankan, untuk itu kondisi perbankan yang sehat merupakan prasyarat utama.

Selanjutnya untuk menjamin terciptanya kondisi perbankan yang sehat maka diperlukan pengaturan dan pengawasan. Di Indonesia fungsi pengaturan dan pengawasan bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 berada di Bank Indonesia (UU BI). Namun, amandemen Undang-Undang terakhir mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Hal ini dilegitimasi dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan termasuk perbankan menjadi wewenang OJK. Hal ini berdampak pada perubahan peran dan fungsi Bank Indonesia, khususnya terkait dengan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan. Dalam penjelasan Pasal 7 UU OJK disebutkan

bahwa fungsi pengaturan dan pengawasan makroprudensial, yakni pengaturan dan pengawasan selain kewenangan OJK, merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan makroprudensial, OJK membantu Bank Indonesia untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.

Sementara itu peran Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran yang mencakup pengaturan dan menjaga kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai tidak hanya diatur di dalam UU BI tetapi juga diatur dalam Undang-Undang lainnya seperti Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Transfer Dana. Perkembangan sistem pembayaran modern telah melahirkan uang elektronik (*e-money*), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan kegiatan transfer dana sehingga materi ajar bagi peserta didik perlu untuk disempurnakan. Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran ekonomi lebih kontekstual dan aplikatif.

Di lain pihak wewenang Pemerintah sebagai otoritas fiskal dan kebijakan sektor riil dan wewenang Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memerlukan penjelasan lebih dalam kepada peserta didik mengingat terdapat perbedaan yang jelas terhadap peran masing-masing lembaga negara tersebut. Kedudukan Bank Indonesia sebagai badan hukum publik memberikan kewenangan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara independen bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain tanpa kecuali secara tegas diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU BI. Terlebih dalam Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran ekonomi kurikulum 2006 terjadi ketidaksesuaian, dimana kebijakan fiskal dan kebijakan moneter menjadi wewenang Pemerintah.

## **C. Ekonomi sebagai Mata Pelajaran dalam Kurikulum SMA/MA**

### **1. Rasional**

Fenomena empirik sebagaimana sudah dijelaskan di atas mendorong untuk dilakukannya pengembangan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran ekonomi, sehingga lahir KD baru sebagaimana menjadi bagian dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang KI dan KD SMA/MA Kurikulum 2013, khususnya KD yang erat kaitnya dengan Bank, LKNB, Bank Sentral, dan OJK (KD. 3.5/4.5), sistem pembayaran dan alat pembayaran (KD. 3.6/4.6) untuk kelas X, indeks harga dan inflasi (KD. 3.6/4.6) serta kebijakan moneter

dan kebijakan fiskal (KD. 3.7/4.7) untuk kelas XI yang dalam buku ini diistilahkan dengan muatan Kebanksentralan.

Mata pelajaran ekonomi yang diberikan pada tingkat pendidikan dasar merupakan bagian integral dari Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Sementara itu, pada tingkat pendidikan menengah, ekonomi diberikan sebagai mata pelajaran peminatan. Materi pelajaran ekonomi yang tertuang dalam buku ini sebagai strategi untuk memberikan jaminan terhadap kualitas isi/bahan ajar dan penyajian buku serta kontekstualitas dari bahan ajar yang akan disampaikan guru kepada peserta didik.

## 2. Tujuan

Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Mensyukuri karunia Tuhan YME atas limpahan sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia serta hubungan dengan lingkungan sosial dan alam.
- b. Memahami konsep ekonomi untuk mengaitkan peristiwa dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi di lingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara.
- c. Menampilkan sikap rasa ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi.
- d. Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan proaktif) dan membentuk sikap bijak.
- e. Rasional dan bertanggung jawab dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, dan Negara
- f. Membuat keputusan yang bertanggung jawab dilandasi nilai-nilai sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun internasional.

## 3. Ruang Lingkup

Secara umum, ruang lingkup materi ekonomi yang terdapat dalam Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai berikut:

- a. Konsep Dasar Ilmu Ekonomi
  - Prinsip ekonomi
  - Permasalahan ekonomi
  - Pelaku ekonomi



- b. Pasar Uang dan Pasar Modal, Pengelolaan Koperasi dan Pembangunan Ekonomi
  - Pertumbuhan ekonomi
  - Ketenagakerjaan
  - Pendapatan nasional
  - APBN
  - APBD
  - Pajak
  - Inflasi
  - Kebijakan moneter dan fiskal
  - Perdagangan internasional
  - Kerjasama ekonomi internasional
- c. Sistem Akuntansi
  - Sistem informasi akuntansi
  - Persamaan dasar akuntansi
  - Siklus akuntansi perusahaan jasa
  - Siklus akuntansi perusahaan dagang

#### 4. Kompetensi

Kompetensi mata pelajaran Ekonomi, yang mencakup Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI dan KD), adalah sebagaimana yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.



**Tabel 1.1. Struktur Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)  
Mata Pelajaran Ekonomi Kurikulum 2013**

**1. KI/KD Kelas X**

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan 1.2 Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan produk bank dan lembaga keuangan non bank, serta dalam pengelolaan koperasi
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 3.3 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi 3.4 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian 3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran 3.7 Mendeskripsikan konsep manajemen 3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi 4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 4.3 Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi 4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian 4.5 Menyajikan peran dan produk bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran 4.7 Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah 4.8 Menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi sekolah

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## 2. KI/KD Kelas XI

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1.1 Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia 2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	3.1 Mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara mengatasinya. 3.2 Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia 3.3 Mendeskripsikan pendapatan nasional 3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan 3.5 Menganalisis peran, fungsi dan manfaat pajak 3.6 Menganalisis indeks harga dan inflasi 3.7 Mendeskripsikan kebijakan moneter dan fiskal 3.8 Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia 3.9 Mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif,	4.1 Menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya. 4.2 Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia

serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>4.3 Menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional</li> <li>4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan</li> <li>4.5 Mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak</li> <li>4.6 Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi</li> <li>4.7 Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal</li> <li>4.8 Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia</li> <li>4.9 Mensimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal</li> </ul>
---	---

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

### 3. KI/KD Kelas XII

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Mensyukuri karunia Tuhan YME atas keragaman dan keunggulan antar bangsa</li> <li>1.2 Mensyukuri manfaat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan</li> </ul>
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif dan proaktif dalam melakukan kegiatan perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional, serta dalam melakukan tahapan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang</li> </ul>
3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual,	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional</li> <li>3.2 Menganalisis kerjasama ekonomi internasional</li> </ul>

<p>prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah</p>	<p>3.3 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi 3.4 Mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi 3.5 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa 3.6 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang</p>
<p>4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan</p>	<p>4.1 Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional 4.2 Menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional 4.3 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi 4.4 Menerapkan konsep persamaan dasar akuntansi 4.5 mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa 4.6 mempraktikkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang</p>

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KD Ekonomi diorganisasikan ke dalam empat KI, dimana KI 1 berkaitan dengan sikap diri (spiritual) terhadap Tuhan Yang Maha Esa; KI 2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial; KI 3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar; dan KI 4 berisi KD tentang penyajian keterampilan. KI 1, KI 2, dan KI 4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran. Setiap materi pokok yang tercantum dalam KI 3, KI 1 dan KI 2 tidak diajarkan langsung (*direct teaching*), tetapi bersifat *indirect teaching* pada setiap kegiatan pembelajaran.

KI dijabarkan menjadi 20 KD untuk kelas X dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran per minggu, 21 KD untuk kelas XI dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran per minggu, dan 15 KD untuk kelas XII dengan alokasi waktu 4 jam pelajaran per minggu. Seluruh KD yang dirancang merupakan bahan kajian yang akan ditransformasikan dalam kegiatan pembelajaran selama dua semester di kelas X, dua semester di kelas XI dan dua semester di kelas XII.

## BAGIAN II: PETUNJUK KHUSUS

### D. Pembelajaran dan Penilaian dalam Mata Pelajaran Ekonomi

#### 1. Belajar dan Pembelajaran

Pembelajaran ekonomi di SMA/MA menggunakan pendekatan pemecahan masalah, peserta didik dapat memahami permasalahan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat dan mencari alternatif pemecahannya. Agar pembelajaran lebih bermakna, maka materi dimulai dari mengidentifikasi fakta tentang peristiwa dan permasalahan ekonomi, pemahaman beberapa konsep dasar ilmu ekonomi, mencari alternatif pemecahan masalah ekonomi, serta menilai kebaikan dan keburukan kebijakan pemerintahan dalam mengatasi masalah ekonomi.

Belajar merupakan proses psikologis yang hanya dapat diamati dari adanya perubahan tingkah laku peserta didik, yang disebabkan oleh berkembangnya skema dan struktur kognitif, penambahan pengalaman, intensitas interaksi dengan lingkungan dan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Dengan asumsi bahwa konsep belajar merupakan kontinum dari berbagai teori, prinsip belajar ekonomi dilandasi oleh semua teori belajar yang berorientasi pada aktivitas peserta didik.

Peranan pendidik dalam prinsip belajar ekonomi bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator, sedangkan peserta didik aktif untuk mencari tahu. Keterlibatan peserta didik di dalam belajar tidak hanya keterlibatan kognitif semata, tetapi juga keterlibatan emosional sehingga terjadi penghayatan dan internalisasi nilai-nilai. Untuk menciptakan kondisi belajar di atas, prinsip-prinsip belajar yang perlu diperhatikan oleh peserta didik dan pendidik adalah prinsip kesiapan belajar, motivasi, perhatian, persepsi positif dan konstruktivistik baik mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, maupun nilai-nilai.

Pembelajaran didasarkan pada upaya menguasai kompetensi pada tingkat yang memuaskan. Hal tersebut dilakukan dengan memerhatikan karakteristik konten kompetensi, dimana pengetahuan merupakan konten yang bersifat tuntas (*mastery*). Keterampilan kognitif dan psikomotorik adalah kemampuan penguasaan konten yang dapat dilatihkan, sedangkan sikap adalah kemampuan penguasaan konten yang lebih sulit dikembangkan dan memerlukan proses pendidikan yang tidak langsung dan berkelanjutan.



Dengan landasan prinsip belajar di atas, langkah pembelajaran ekonomi yang tepat yaitu dengan pendekatan belajar sains. Pendekatan tersebut terdiri atas lima langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengamati (*Observing*), yaitu kegiatan melalui indera penglihat (membaca, menyimak), membau, mendengar, mengecap dan meraba pada waktu mengamati suatu objek dengan ataupun tanpa alat bantu. Alternatif kegiatan mengamati antara lain observasi lingkungan, mengamati gambar, video, tabel dan grafik data, menganalisis peta, membaca berbagai informasi yang tersedia di media masa dan internet maupun sumber lain.
- b. Menanya (*Questioning*), yaitu kegiatan peserta didik untuk mengungkapkan apa yang ingin diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, peristiwa, maupun suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya, peserta didik mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri dengan bimbingan guru, sampai dengan peserta didik mandiri, sehingga menjadi suatu kebiasaan. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan, serta dapat membangkitkan motivasi peserta didik untuk tetap aktif dan menyenangkan. Bentuknya dapat berupa kalimat pertanyaan dan kalimat hipotesis.
- c. Mengumpulkan data (*Experimenting*), yaitu kegiatan peserta didik untuk mencari informasi sebagai bahan yang dapat dianalisis dan disimpulkan. Kegiatan mengumpulkan dapat dilakukan dengan cara membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi lapangan, uji coba (eksperimen), wawancara, menyebarkan kuesioner dan lain-lain.
- d. Mengasosiasi (*Associating*), yaitu kegiatan peserta didik (mengolah, menganalisis) untuk membandingkan ataupun menentukan hubungan antara data yang telah diolahnya dengan teori yang ada, sehingga dapat disimpulkan dan atau ditemukannya prinsip dan konsep penting. Hal ini bermakna dalam menambah skema kognitif, meluaskan pengalaman dan wawasan pengetahuannya sampai dengan mencipta.
- e. Mengomunikasikan (*Communicating*), yaitu kegiatan peserta didik dalam mendeskripsikan dan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan dan mengolah data, serta mengasosiasi, yang ditujukan kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk diagram, bagan, gambar dan sejenisnya, dengan bantuan perangkat teknologi sederhana dan atau teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun berkaitan dengan pembelajaran yang berorientasi kepada pengembangan sikap diri (spiritual) terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sikap sosial, apa yang disarankan Zainal Abidin Bagir, dkk (2005)



dapat menjadi referensi para pendidik. Menurutnya, terdapat empat tataran implementasi pendidikan nilai, yaitu **tataran konseptual, institusional, operasional dan arsitektural**. Dalam tataran **konseptual**, internalisasi pendidikan sikap diri (spiritual) terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sikap sosial dapat diwujudkan melalui perumusan visi, misi, tujuan dan program sekolah (rencana strategis sekolah). Adapun secara **institusional**, pengembangan dapat diwujudkan melalui pembentukan *institution culture*, yang mencerminkan adanya misi pengembangan sikap diri (spiritual) terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sikap sosial, sedangkan dalam tataran **operasional**, rancangan kurikulum dan ekstrakurikuler harus diramu sedemikian rupa, sehingga nilai-nilai fundamental agama dan sosial yang terdapat dalam KI dan KD terpadu secara koheren. Sementara itu, secara **arsitektural**, internalisasi dapat diwujudkan melalui pembentukan lingkungan fisik yang berbasis pembelajaran sikap diri (spiritual) terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sikap sosial.

Dalam konteks pendidikan nilai, pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*) merupakan pendekatan yang lebih tepat diterapkan dalam praktik pendidikan nilai spiritual dan sosial melalui pembelajaran ekonomi. Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Tujuan pendidikan nilai menurut pendekatan ini, yaitu: *pertama*, diterimanya nilai-nilai spiritual dan sosial tertentu oleh peserta didik; *kedua*, berubahnya nilai-nilai peserta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan sosial yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menurut pendekatan ini antara lain keteladanan, pembiasaan, *reward* dan *punishment*, penguatan positif dan negatif, simulasi, bermain peran dan lain-lain.

## 2. Pendekatan dan Model Pembelajaran

Paradigma belajar bagi peserta didik menurut Kurikulum 2013 adalah peserta didik aktif mencari bukan lagi peserta didik menerima. Oleh karena itu, pembelajaran harus dikembangkan menjadi pembelajaran yang aktif, inovatif dan kreatif. Indonesia sebenarnya sudah lama mengembangkan pendekatan pembelajaran yang dikenal dengan **Paikem**. Pendekatan ini sangat relevan dengan model pembelajaran yang mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013. Begitu juga pembelajaran Ekonomi, sangat cocok dengan pendekatan Paikem. Paikem merupakan singkatan dari prinsip pembelajaran: **Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan**.

- a. **Aktif**, pendidik berusaha menciptakan suasana sedemikian rupa, agar peserta didik aktif melakukan serta mencari pengetahuan dan pengalamannya sendiri.

- b. **Inovatif**, pembelajaran harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada, tidak monoton. Pendidik selalu mencari model yang kontekstual yang dapat menarik peserta didik.
- c. **Kreatif**, pendidik harus mengembangkan kegiatan belajar yang beragam, menciptakan pembelajaran baru yang penuh tantangan, pembelajaran berbasis masalah, sehingga mendorong peserta didik untuk merumuskan masalah dan cara pemecahannya.
- d. **Efektif**, pendidik harus secara tepat memilih model dan metode pembelajaran sesuai dengan tujuan, materi dan situasi sehingga tujuan dapat tercapai dan bermakna bagi peserta didik.
- e. **Menyenangkan**, pendidik harus berusaha dan menciptakan proses pembelajaran ekonomi menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Apabila suasana menyenangkan, maka peserta didik akan memerhatikan pembelajaran yang sedang berlangsung.

Selain pendekatan Paikem, pendekatan kontekstual (*Contextual Teaching and Learning /CTL*) juga menjadi pendekatan yang sangat relevan dengan semangat perubahan kurikulum 2013. CTL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam aktivitas penting dan membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis, dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Johnson (2010) menjelaskan bahwa CTL adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para peserta didik melihat di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Sistem CTL meliputi delapan komponen berikut: membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian yang autentik.

Pembelajaran kontekstual memiliki beberapa karakteristik yang khas, yang membedakan dengan pendekatan pembelajaran tradisional. Ditjen Dikdasmen (2003) menyebutkan tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yaitu: konstruktivisme (*constructivism*), menemukan (*inquiry*), bertanya (*questioning*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modelling*), refleksi (*reflection*) dan penilaian yang sebenarnya (*authentic assessment*). Adapun Komalasari (2010) mengidentifikasi karakteristik pembelajaran kontekstual meliputi pembelajaran yang menerapkan konsep keterkaitan (*relating*), konsep pengalaman langsung (*experiencing*), konsep aplikasi (*applying*), konsep kerjasama (*cooperating*), konsep pengaturan diri (*self-regulating*) dan konsep penilaian autentik (*authentic assessment*).

Tabel 1.2

Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran Tradisional

Pendekatan CTL	Pendekatan Tradisional
Peserta didik secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran	Peserta didik penerima informasi secara pasif
Peserta didik belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi dan saling mengoreksi	Peserta didik belajar secara individual
Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata dan atau masalah yang disimulasi	Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis
Perilaku dibangun atas kesadaran diri	Perilaku dibangun atas kebiasaan
Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman	Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan
Hadiah untuk perilaku baik adalah kepuasan	Hadiah untuk perilaku baik berupa pujian atau nilai (angka) lapor
Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia sadar hal itu keliru dan merugi	Seseorang tidak melakukan yang jelek karena dia takut dihukum
Bahasa diajarkan dengan pendekatan komunikatif, yakni peserta didik diajak menggunakan bahasa dalam konteks nyata	Bahasa diajarkan dengan pendekatan struktural: rumus diterangkan sampai paham, kemudian dilatihkan ( <i>drill</i> )
Pemahaman rumus dikembangkan atas dasar skema yang sudah ada dalam diri peserta didik	Rumus ini ada di luar diri peserta didik, yang harus diterangkan, diterima, dihafalkan dan dilatihkan
Pemahaman rumusan itu relatif berbeda antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan skema peserta didik ( <i>on going process of development</i> )	Rumusan adalah kebenaran absolut (sama untuk semua orang). Hanya ada dua kemungkinan, yaitu pemahaman penulisan salah dan benar
Peserta didik diminta bertanggung jawab memonitor dan mengembangkan pembelajaran mereka masing-masing	Guru adalah penentu jalannya proses pembelajaran

Penghargaan terhadap pengalaman peserta didik sangat diutamakan	Pembelajaran tidak memperhatikan pengalaman
Hasil belajar diukur dengan berbagai cara: proses bekerja, hasil karya, penampilan, rekaman, tes, dll.	Hasil belajar hanya diukur dengan tes
Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks dan <i>setting</i>	Pembelajaran hanya terjadi di dalam kelas
Penyesalan adalah hukuman dari perilaku jelek	Sanksi adalah hukuman dari perilaku jelek
Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik	Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik
Seseorang berperilaku baik karena dia terbiasa melakukan begitu.	Kebiasaan ini dibangun dengan hadiah yang menyenangkan.

Sumber: Ditjen Dikdasmen (2003: 7-9)

Dalam implementasinya di sekolah, diperlukan strategi implementasi pendidikan berbasis CTL. Bern dan Ericksan (2001) mengemukakan lima strategi dalam mengimplementasikan pembelajaran kontekstual, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*)
- 2) Pembelajaran kooperatif (*cooperative learning*)
- 3) Pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*)
- 4) Pembelajaran pelayanan (*service learning*)
- 5) Pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*)

Sementara Ditjen Dikdasmen (2003) menegaskan bahwa pembelajaran kontekstual menempatkan peserta didik dalam konteks bermakna, yang menghubungkan pengetahuan awal peserta didik, dengan materi yang sedang dipelajari dan sekaligus memerhatikan faktor kebutuhan individual peserta didik dan peran pendidik. Sehubungan dengan itu, pendekatan pembelajaran kontekstual harus menekankan pada hal-hal di bawah ini:

- 1) Belajar berbasis masalah (*problem-based learning*)
- 2) Pengajaran autentik (*authentic instruction*)
- 3) Belajar berbasis inquiri (*inquiry-based learning*)
- 4) Belajar berbasis proyek/tugas terstruktur (*project-based learning*)
- 5) Belajar berbasis kerja (*work-based learning*)

- 6) Belajar jasa layanan (*service learning*)
- 7) Belajar kooperatif (*cooperative learning*)

Melalui pendekatan tersebut di atas, banyak model pembelajaran yang dapat dikembangkan dalam proses pembelajaran ekonomi, di antaranya *Group Investigation*, *Jigsaw*, *Snawball Throwing*, *STAD (Student Teams-Achievement Divisions)*, *Examples Non Examples*, *Picture and Picture*, *Cooperatve Script*, *Problem Based Introduction (PBI)*, *Role Playing*, *Think Pair and Share*, *Talking Stik*, *TGT (Team- Game-Tournament)*, *TAI (Team-Assisted Individualization)*, *CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)*, dan sebagainya (selengkapnya baca Robert E. Slavin, *Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik*).

### 3. Penilaian

Penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, meng-analisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian dapat dimaknai juga sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.

Dengan langkah pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik di atas, prinsip penilaian yang digunakan adalah penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan suatu kegiatan pendidik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik yang melibatkan proses dan hasil pembelajaran. Penilaian kelas merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti, yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik.

Penilaian berbasis kelas dilaksanakan melalui berbagai teknik/ cara, seperti penilaian unjuk kerja (*performance*), penilaian sikap, penilaian tertulis (*paper and pencil test*), penilaian proyek, penilaian produk, penilaian melalui kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (*portofolio*) dan penilaian diri. Aspek peserta didik yang dinilai adalah aspek kognitif, aspek psikomotorik dan afektif. Teknik penilaian yang digunakan antara lain:

#### a. Tes Tertulis

Tes adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang jawabannya dapat benar atau salah. Tes dapat berupa tes tertulis, tes lisan dan tes praktik

atau tes kinerja. Tes tertulis adalah tes yang menuntut peserta tes memberi jawaban secara tertulis berupa pilihan dan/atau isian. Tes yang jawabannya berupa pilihan meliputi pilihan ganda, benar-salah dan menjodohkan. Sementara itu, tes yang jawabannya berupa isian dapat berbentuk isian singkat dan/atau uraian. Tes lisan adalah tes yang dilaksanakan melalui komunikasi langsung (tatap muka) antara peserta didik dengan pendidik. Pertanyaan dan jawaban diberikan secara lisan. Tes praktik (kinerja) adalah tes yang meminta peserta didik melakukan perbuatan/mendemonstrasikan/menampilkan keterampilan.

#### b. Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Misalnya menilai kemampuan diskusi/presentasi laporan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- 2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- 3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- 4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati.
- 5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan yang akan diamati.

#### c. Penilaian Produk

Penilaian produk dilakukan untuk menilai hasil pembuatan tugas tertentu seperti menyusun skala prioritas kebutuhan dan pengelolaan keuangan. Produk (hasil karya) adalah penilaian yang meminta peserta didik menghasilkan suatu hasil karya. Penilaian produk dilakukan terhadap persiapan, pelaksanaan/ proses pembuatan, dan hasil.

#### d. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio dilakukan untuk menilai kemampuan mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat, seperti mengevaluasi peran APBN/APBD, peran dan manfaat pajak dalam pembangunan, menilai

kemampuan menganalisis hasil temuan indeks harga dan inflasi, penawaran dan permintaan uang.

Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam bidang tertentu, yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi dan kreativitas peserta didik (Popham, 1999). Bentuk ini cocok untuk mengetahui perkembangan unjuk kerja peserta didik dengan menilai bersama karya-karya atau tugas-tugas yang dikerjakannya. Peserta didik dan pendidik perlu melakukan diskusi untuk menentukan skor. Pada penilaian portofolio, peserta didik dapat menentukan karya-karya yang akan dinilai, melakukan penilaian sendiri kemudian hasilnya dibahas. Perkembangan kemampuan peserta didik dapat dilihat pada hasil penilaian portofolio. Teknik ini dapat dilakukan dengan baik, apabila jumlah peserta didik yang dinilai sedikit.

#### e. Penilaian Proyek

Penilaian proyek dilakukan untuk menilai tugas melakukan aktivitas lapangan seperti penelitian sederhana tentang peran pasar dalam perekonomian. Proyek adalah tugas yang diberikan kepada peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Peserta didik dapat melakukan penelitian melalui pengumpulan, pengorganisasian, dan analisis data, serta pelaporan hasil kerjanya. Penilaian proyek dilaksanakan terhadap persiapan, pelaksanaan, dan hasil.

Prinsip-prinsip penilaian hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Ekonomi sebagai berikut:

- a. Sahih, penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- b. Objektif, penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- c. Adil, penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik, karena berkebutuhan khusus, serta perbedaan latar belakang agama, suku, ras, aliran kepercayaan, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi dan gender.
- d. Terpadu, penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- e. Terbuka, prosedur penilaian, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- f. Menyeluruh dan berkesinambungan, penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dilaksanakan secara terus menerus.
- g. Menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.



- h. Sistematis, penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- i. Beracuan kriteria, penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- j. Akuntabel, penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- k. Mendidik, penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik.

Penilaian hasil belajar mencakup seluruh aspek kompetensi, bersifat formatif dan hasilnya segera diikuti dengan pembelajaran remedial, untuk memastikan penguasaan kompetensi pada tingkat memuaskan (Kriteria Ketuntasan Minimal/KKM dapat dijadikan tingkat memuaskan) serta pengayaan bagi peserta didik yang sudah dapat melampaui tingkat memuaskan.

Untuk menilai aspek afektif yakni terkait dengan penilaian atas sikap keagamaan (KI/KD 1) dan sikap sosial (KI/KD 2), instrumen yang dapat digunakan di antaranya adalah melalui pembuatan *anecdotal record* oleh guru. *Anecdotal record* adalah catatan tentang kejadian khusus yang bertalian dengan masalah yang sedang menjadi pusat perhatian pengamat, terutama tingkah laku individu yang sifatnya kritis (Depdikbud, 1975). Model *anecdotal record* (catatan) ini dibuat pendidik ketika melihat adanya perilaku yang berkenaan dengan nilai yang dikembangkan, maupun memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian, yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya.

## **E. Sistematika Buku**

Buku ini merupakan panduan guru untuk menyampaikan materi ajar agar lebih akurat, terkini (*up to date*), kontekstual dan lengkap, terutama dalam memfasilitasi peserta didik untuk memahami materi-materi ekonomi yang bermuatan kebanksentralan. Materi ajar bab 1 merupakan panduan bagi guru ekonomi untuk semua tingkatan. Materi ajar bab 2, bab 3 dan bab 4 untuk diajarkan guru ekonomi di kelas X, sedangkan materi ajar bab 5 dan bab 6 untuk diajarkan guru ekonomi di kelas XI.

Bab 1 merupakan petunjuk umum bagi guru ekonomi dalam menyampaikan bahan ajar sesuai dengan karakteristik kurikulum 2013. Melalui penjelasan isi bab 1 diharapkan dapat membantu guru untuk melaksanakan proses pembelajaran ekonomi, yang sesuai dengan semangat perubahan dari Kurikulum 2013.

Bab 2 menyajikan materi yang berhubungan dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.5 kelas X. Ruang lingkup isi dari bab 2 meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran, Peta Konsep, Kata Kunci, Uraian Materi Pokok sesuai dengan Silabus yaitu Bank, Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), Bank Sentral, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Simpulan, Refleksi dan Glosarium. Penilaian sesuai dengan rancangan Silabus yang sudah disusun Pemerintah. Guru diharapkan menyelesaikan proses pembelajaran bab 2 ini selama 5 x 3 Jam Pelajaran (15 JP).

Bab 3 menyajikan materi yang berhubungan dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.6 kelas X. Ruang lingkup isi dari bab 3 meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran, Peta Konsep, Kata Kunci, Uraian Materi Pokok sesuai dengan Silabus, yaitu Sistem Pembayaran, Uang dan Alat Pembayaran Nontunai, Simpulan, Refleksi dan Glosarium. Penilaian sesuai dengan rancangan Silabus yang sudah disusun Pemerintah. Guru diharapkan menyelesaikan proses pembelajaran bab 3 ini selama 4 x 3 Jam Pelajaran (12 JP).

Bab 4 menyajikan materi yang berhubungan dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.2 kelas X. Ruang lingkup isi dari bab 4 meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran, Peta Konsep, Kata Kunci, Uraian Materi Pokok sesuai dengan Silabus yaitu Pengelolaan Keuangan, Simpulan, Refleksi dan Glosarium. Penilaian sesuai dengan rancangan Silabus yang sudah disusun Pemerintah. Guru diharapkan menyelesaikan proses pembelajaran bab 4 ini selama 1 x 3 Jam Pelajaran (3 JP).

Bab 5 menyajikan materi yang berhubungan dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.6 kelas XI. Ruang lingkup isi dari bab 5 meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran, Peta Konsep, Kata Kunci, Uraian Materi Pokok sesuai dengan Silabus, yaitu Indeks Harga, Inflasi, Permintaan dan Penawaran Uang, Simpulan, Refleksi dan Glosarium. Penilaian sesuai dengan rancangan Silabus yang sudah disusun Pemerintah. Guru diharapkan menyelesaikan proses pembelajaran bab 5 ini selama 4 x 4 Jam Pelajaran (16 JP).

Bab 6 menyajikan materi yang berhubungan dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.7 kelas XI. Ruang lingkup isi dari bab 6 meliputi Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, Tujuan Pembelajaran, Alokasi Waktu, Pendekatan dan Alternatif Model Pembelajaran, Peta Konsep,

Kata Kunci, Uraian Materi Pokok sesuai dengan Silabus, yaitu Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal, Simpulan, Refleksi dan Glosarium. Penilaian sesuai dengan rancangan Silabus yang sudah disusun Pemerintah. Guru diharapkan menyelesaikan proses pembelajaran bab 6 ini selama 3 x 4 Jam Pelajaran (12 JP).



# BAB 2

## BANK, LEMBAGA KEUANGAN NON BANK, BANK SENTRAL DAN OJK

### KOMPETENSI INTI:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang **spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.**
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KOMPETENSI DASAR

1. Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Menyajikan peran dan produk bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
2. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi;
3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi;
4. Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
5. Menyajikan peran dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

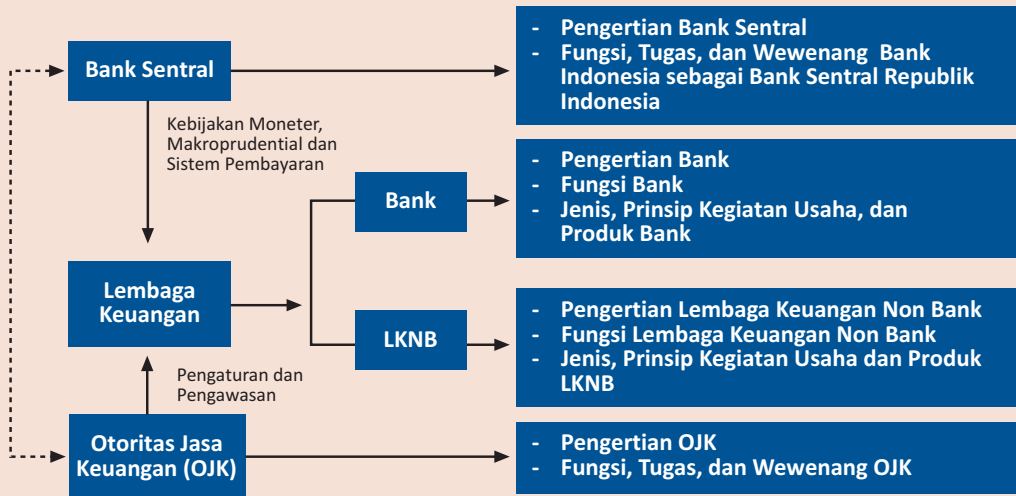
## ALOKASI WAKTU

5 x 3 Jam Pelajaran (15 JP / 5 Pertemuan)

## PENDEKATAN DAN ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN:

1. Pendekatan Pembelajaran:
  - a. Pendekatan Belajar Sains (*observing, questioning, experimenting, associating, communicating*)
  - b. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
  - c. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/ CTL*)
2. Alternatif Model Pembelajaran:
  - a. *Snowball Throwing*
  - b. *Demonstration*
  - c. *The Power of Two*
  - d. Model lainnya yang relevan

## PETA KONSEP (CONCEPT MAP)



## KATA KUNCI (KEY WORDS)

Bank, LKNB, Bank Sentral, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk memenuhi kebutuhan keuangan di kemudian hari, sebagian dari pendapatan Anda biasanya disimpan dalam bentuk tabungan di bank. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpunan dana dari bank. Selain bank, Anda juga dapat memanfaatkan produk-produk Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) seperti asuransi, *leasing*, dan dana pensiun. Sejak Januari 2014, pengaturan dan pengawasan bank dan LKNB dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahukah Anda apa itu OJK? OJK merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi Pasar Modal, Perbankan dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) khususnya Pasal 34 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan). Dalam Undang-Undang tersebut, tugas pengaturan dan pengawasan bank yang semula dilakukan oleh Bank Indonesia, kini beralih kepada OJK.

Dalam bab ini, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan bank, LKNB, bank sentral dan OJK.

## Pojok Perbankan

Di Eropa, bank sudah mulai dikenal sejak abad ke-11, yaitu Bank Venesia (1171), Bank Barcelona dan Bank Genoa 1320, sedangkan di daratan Inggris bank mulai dikenal pada abad ke-16. Ketika negara-negara Eropa seperti Belanda, Spanyol, Inggris, dan Prancis memperluas wilayah perdagangannya yang kemudian menjadi daerah jajahan, maka perkembangan perbankan ikut terbawa ke daerah negara-negara jajahan.

## A. BANK

### 1. Pengertian Bank

Istilah bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banco* yang berarti **meja atau bangku**. Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dana dari masyarakat baik dalam bentuk tabungan, deposito, maupun giro. Selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman (kredit) atau dalam istilah bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Kegiatan bank pertama kali adalah sebagai tempat penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan bank berkembang menjadi tempat penyimpanan atau penitipan emas atau perak untuk menghindari pencurian. Sebagai bukti bagi seseorang yang menitipkan uang atau emas, maka ia menerima selembar kertas yang disebut *goldsmith notes*. Dalam praktik perbankan sekarang hal tersebut disebut uang giral.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia, perkembangan perbankan semakin pesat dan peranannya semakin penting. Hal tersebut disebabkan perkembangan perbankan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan perdagangan dunia. Bank berperan sebagai jantungnya perdagangan, sehingga kehidupan ekonomi dunia tetap berlangsung.

### 2. Fungsi Bank

Setelah mendapat penjelasan tentang pengertian bank pada pokok bahasan sebelumnya, menurut Anda apa sesungguhnya fungsi bank itu? Secara umum, bank berfungsi sebagai lembaga *intermediasi*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa fungsi bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana.

Bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai salah satu roda penggerak dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional. Bank dapat mendorong upaya peningkatan

## Pojok Perbankan

Cari bahan dari sumber yang relevan, termasuk dari internet, sejarah perkembangan perbankan di Indonesia! Analisis, diskusikan dan buat simpulannya!



pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama suatu bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut ini:

#### a. Menghimpun Dana

Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana, bank memiliki beberapa sumber dana, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Dana sendiri berupa setoran modal waktu pendirian dan penjualan saham di bursa efek jika bank tersebut sudah *go public*.
- 2) Dana masyarakat yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti tabungan, giro dan deposito.
- 3) Dana Pasar Uang Antar Bank (PUAB).

#### b. Menyalurkan Kredit

Bank menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan usaha (investasi, modal kerja) atau untuk kegiatan konsumsi. Dengan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau bunga kredit. Dalam menyalurkan dana kepada masyarakat, bank memegang prinsip kehati-hatian serta memerhatikan prinsip 5 C yakni sebagai berikut:

- 1) *Character*, yaitu tabiat dan kemauan pemohon untuk memenuhi kewajiban. Perlu diteliti tentang kepribadian, cara hidup dan keadaan keluarga serta moral pemohon kredit.
- 2) *Capacity*, yaitu kemampuan, kepandaian dan keterampilan menggunakan kredit yang diterima, sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya.
- 3) *Capital*, yaitu modal seseorang atau badan usaha penerima kredit. Tidak semua modal harus bersumber dari kredit.
- 4) *Collateral*, yaitu kepastian berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Agunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.
- 5) *Condition of economies*, yaitu yaitu kondisi ekonomi yang terjadi pada saat proses kredit dilakukan dan prakiraan kondisi ekonomi di masa depan, baik kondisi ekonomi secara umum maupun kondisi ekonomi pihak yang mengajukan kredit.

#### Pojok Perbankan

*Go Public* adalah menjual sebagian sahamnya ke publik/masyarakat luas dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

### Pojok Perbankan

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain, dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal). Sejak tahun 2007, Bursa Efek di Indonesia hanya satu yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan hasil merger antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES).

### Pojok Perbankan

Persyaratan Kredit 7P (*Personality, Party, Porpose, Prospek, Paymant, Profitable, Protection*)

Dalam pemberian kredit, biasanya terkandung berbagai unsur. Berikut unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit.

- 1) **Kepercayaan**  
Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- 2) **Kesepakatan**  
Kesepakatan biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya. Kesepakatan tersebut dituangkan pula dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak.
- 3) **Jangka waktu**  
Setiap kredit yang diberikan biasanya memiliki jangka waktu. Jangka waktu ini merupakan masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kredit dan penerima kredit.
- 4) **Risiko**  
Risiko kredit terjadi karena adanya tenggang waktu. Adanya tenggang waktu ini memungkinkan pengembalian kredit menjadi macet atau yang dikenal dengan kredit macet. Semakin panjang jangka waktu kredit, semakin besar pula risikonya.
- 5) **Balas jasa**  
Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit. Pada bank konvensional, balas jasa ini dikenal dengan bunga. Sementara itu, bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah, balas jasanya ditentukan dengan margin bagi hasil. Selain bunga, bank juga mendapatkan keuntungan lain karena membebaskan biaya administrasi kredit kepada nasabah.

### c. Memberikan Pelayanan Jasa

Bank juga berfungsi sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran” berupa transfer dana, inkaso, cek, kartu kredit, uang elektronik (*e-money*) dan pelayanan lainnya.

#### VALUES EXPLORER

“Berkata jujur dalam satu menit bisa menghilangkan beban seribu tahun; dan berkata dusta selamanya akan mengemban beban seribu abad.”

### 3. Jenis, Prinsip Kegiatan Usaha dan Produk Bank

#### a. Jenis-Jenis Bank

Bank dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, diantaranya sebagai berikut:

##### 1) Berdasarkan Kelembagaan

Berdasarkan aspek kelembagaannya, terdapat dua jenis bank yakni bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan sebagai berikut:

##### a) Bank umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan usahanya, bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pinjaman (kredit), seperti kredit produktif yang biasanya terdiri atas kredit modal kerja dan kredit investasi, serta kredit konsumtif contohnya Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKKB) dan sebagainya.

Berdasarkan ruang lingkup usahanya, bank umum dapat dikelompokkan menjadi dua macam sebagai berikut:

- (1) Bank umum devisa, yaitu bank umum yang memiliki ijin untuk melakukan transaksi pembayaran dalam valuta asing. Contohnya Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA dan Bank BII.
- (2) Bank umum non devisa, yaitu bank umum yang tidak memiliki ijin melakukan transaksi dalam valuta asing. Contohnya BTPN, Bank Jasa Jakarta dan Bank Kesejahteraan Ekonomi.

##### b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam menjalankan usahanya, BPR tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian dan mengikuti

#### Pojok Perbankan

Peranan Bank diantaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Produk bank berupa fasilitas kredit dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usahanya, sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berkembang.

#### Forum Perbankan

Coba Anda amati kegiatan bank yang ada disekitar Anda, bagaimana peran bank tersebut dalam mengembangkan kegiatan ekonomi di daerah, khususnya sektor pertanian, perdagangan dan sektor industri kreatif! Analisis, diskusikan, dan buat simpulannya!

### Pojok Perbankan

Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai (a) pendorong terciptanya tingkat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, (b) pemegang Kas Daerah dan atau menyimpan Uang Daerah dan (c) salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

kliring. Khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali BPR yang sudah memiliki ijin usaha *money changer* dari Bank Indonesia. Contoh BPR diantaranya BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Eka Bumi Artha dan BPR Sri Artha Lestari.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Umum dan BPR**

No.	Bank Umum	BPR
1.	Memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.	Tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro.	Umumnya tidak diperbolehkan menghimpun dana dalam bentuk giro, menjalankan usaha perasuransian, dan mengikuti kliring. Khusus untuk melakukan transaksi valuta asing, tidak semua BPR bisa melakukannya, kecuali yang sudah mendapat ijin <i>money changer</i> dari Bank Indonesia.
3.	Contohnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA dan Bank BII.	Contoh BPR Karyajatnika Sadaya, BPR Eka Bumi Artha dan BPR Sri Artha Lestari.

### Pojok Perbankan

Berdasarkan kepemilikannya, bank bersifat dinamis, terlebih bank yang sudah *go public* atau menjual sebagian sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), suatu saat bisa dimiliki oleh swasta nasional, tapi pada waktu lainnya bisa dibeli oleh asing sehingga merubah status kepemilikannya.

## 2) Berdasarkan Kepemilikan

Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu sebagai berikut:

- a) Bank persero  
Bank persero yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dan Bank BTN.
- b) Bank swasta nasional  
Bank swasta nasional yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya Bank Mega dan Bank Bukopin.
- c) Bank pembangunan daerah  
Bank pembangunan daerah yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh pemerintah daerah. Contohnya Bank Jabar Banten (Bank BJB), Bank DKI, Bank Kaltim, Bank Jatim, Bank Aceh, Bank Sumut, Bank Sulsel dan Sulbar, dan sebagainya.

- d) **Bank campuran**  
Bank campuran yaitu bank yang sahamnya (modalnya) dimiliki oleh swasta nasional Indonesia dan asing. Contoh Bank CIMB Niaga, Bank BNP Paribas Indonesia, Bank DBS Indonesia, dan sebagainya.
- e) **Bank asing**  
Bank asing yaitu bank yang sahamnya (modalnya) seluruhnya dimiliki oleh asing. Contohnya Bank of Tokyo-Mitsubishi, Citibank, HSBC, Standard Chartered, dan sebagainya.

## b. Prinsip Kegiatan Usaha Bank

Prinsip kegiatan usaha bank yang berkembang di Indonesia terdiri atas prinsip konvensional dan prinsip syariah.

### 1) Bank Konvensional

Bank konvensional adalah bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada prinsip bunga. Imbalan yang diterima oleh pemilik tabungan, deposito, atau giro dihitung berdasarkan bunga yang diberikan oleh bank. Baik produk simpanan (misalnya tabungan, deposito atau giro) maupun pinjaman, keduanya menggunakan bunga. Untuk produk simpanan disebut dengan bunga simpanan, sedangkan untuk produk pinjaman disebut bunga pinjaman. Umumnya bank memberlakukan ketentuan bahwa bunga pinjaman harus lebih besar daripada bunga simpanan. Selisih positif antara bunga pinjaman dan bunga simpanan itulah yang menjadi salah satu sumber keuntungan bank.

Bunga merupakan suatu prosentase tertentu terhadap besarnya uang yang dipinjamkan atau disimpan. Besarnya bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa mempertimbangkan apakah proyek/usaha yang dijalankan oleh nasabah untung atau rugi. Penentuan bunga oleh bank konvensional mempertimbangkan ketentuan bunga acuan dari Bank Indonesia yang biasa disebut BI Rate.

### 2) Bank Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip

#### Pojok Perbankan

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.

## Pojok Perbankan

Sampai dengan bulan September 2013, Bank Umum Syariah di Indonesia berjumlah 11 yakni BNI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Bukopin dan Bank Victoria Syariah, Bank Panin Syariah, dan Maybank Indonesia Syariah. Adapun BPR Syariah di Indonesia sampai dengan tahun 2012 berjumlah 160 dan Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 23.

syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank komersial lainnya yang sudah ada di masyarakat, perbedaannya terletak pada kegiatan operasionalnya. Bank syariah, operasionalnya berdasarkan prinsip syariah sedangkan bank komersial lainnya menggunakan prinsip konvensional. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah bahwa dalam perjanjian perbankan digunakan hukum Islam antara pihak bank dengan pihak nasabah untuk penyimpanan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan prinsip syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa berdasarkan jenisnya, Bank Syariah terbagi menjadi dua, yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun BPR Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

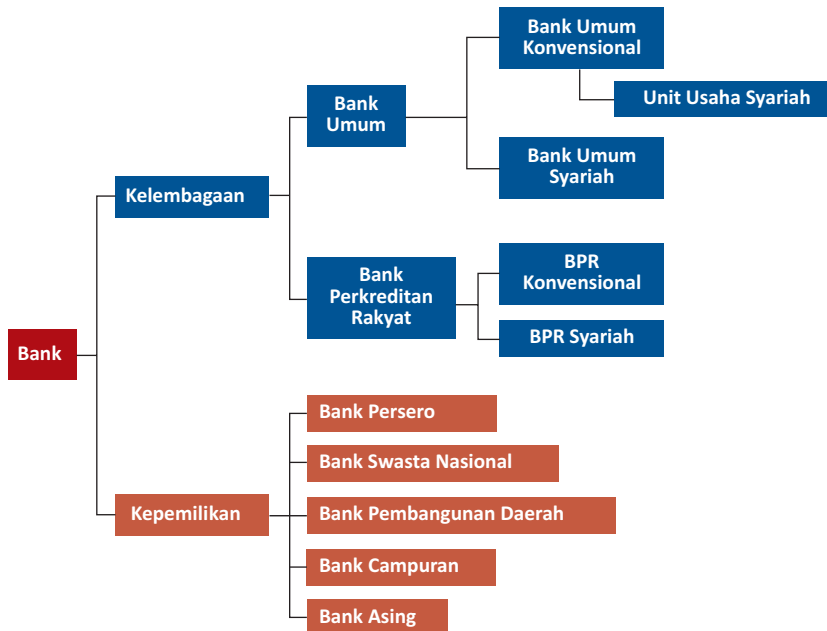
Selain Bank Umum Syariah dan BPR Syariah, terdapat pula Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah.

Hal yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional terletak pada prinsip hukumnya yaitu bersumber dari hukum Islam yang melarang hal-hal sebagai berikut:

- a) Perniagaan atas barang-barang yang haram,
- b) Bunga (*riba*),
- c) Perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta
- d) Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*)

Dalam operasionalnya, perbedaan utama antara bank syariah dan bank konvensional adalah Bank Syariah tidak menggunakan bunga melainkan bagi hasil.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang jenis dan prinsip kegiatan usaha perbankan, benang merahnya dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 2.1 Jenis dan Prinsip Kegiatan Usaha Bank**

**VALUES EXPLORER**

Rahasia dari disiplin adalah motivasi. Jika seseorang termotivasi secara cukup, disiplin akan berjalan dengan sendirinya (Sir Alexander Paterson)

Terdapat beberapa keuntungan menabung di Bank:

- **Aman**  
Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
- **Terjamin**  
Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang ada.
- **Berkembang**  
Bank akan memberikan bunga atau bagi hasil yang dihitung berdasarkan saldo tabungan
- **Praktis**  
Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari, antara lain ATM, SMS Banking, Internet Banking, Phone Banking dan Call Center.
- **Hemat**  
Kalau terbiasa menabung, Anda dapat menyisihkan uang dan terhindar dari kebiasaan membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.

**c. Produk dan Layanan Bank**

Produk bank dapat dikelompokkan menurut kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat (*funding*), produk bank terdiri atas tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka dan giro yang secara umum disebut dengan produk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tahukah Anda apa bedanya tabungan dengan giro? Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut



## Pojok Perbankan

Bilyet Giro (BG) merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan Cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melakukan pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan. Bilyet Giro akan berfungsi sama dengan Cek Silang

syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan dapat diartikan juga sebagai simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang Anda lakukan dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN/*Personal Identification Number*).

Adapun giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Rekening Giro (*Current Account*) dapat diartikan juga sebagai salah satu produk perbankan berupa simpanan dari nasabah perseorangan maupun badan usaha dalam Rupiah maupun mata uang asing yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja, selama jam kerja dengan menggunakan warkat Cek dan Bilyet Giro.

Tahukah Anda apa itu cek? Cek adalah surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening Giro. Cek terdiri atas tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

### 1) Cek Atas Nama (*Order Cheque*)

Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang tertera pada cek tersebut.

### 2) Cek Atas Unjuk (*Bearer Cheque*)

Cek Atas Unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Pembayaran dilakukan paling cepat sesuai tanggal yang diterima pada cek tersebut.

### 3) Cek Silang (*Cross Cheque*)

Cek Silang adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas. Cek Silang tidak dapat diuangkan secara tunai, tetapi hanya dapat dimasukkan ke dalam rekening penerima cek.

Selain tabungan dan giro, dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat, bank menyediakan produk deposito. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.

Dalam produk deposito, dikenal adanya istilah deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito Berjangka merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 2, 3, 6 dan 12 sampai dengan 24 bulan. Deposito Berjangka diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito, baik perorangan atau lembaga. Kepada setiap depositan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setiap jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Pembayaran bunga dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai (pemindahbukuan). Kepada setiap depositan dengan nilai deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterima dan jika dilakukan pencairan sebelum jatuh tempo, maka umumnya dikenakan denda.

Adapun sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat Deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Sertifikat Deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Pembayaran bunga Sertifikat Deposito dapat dilakukan di muka, setiap bulan atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun nontunai.

Disisi lain, dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat (*lending*), bank memiliki produk kredit. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Beberapa bentuk kredit bank diantaranya kredit investasi, kredit modal kerja, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit konsumtif.

Selain produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga menyediakan jasa-jasa lainnya diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Transfer* (Kiriman Dana); Transfer Dana adalah jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Pengiriman uang dapat dilakukan dari satu bank ke bank lain, atau pada bank yang sama, baik dalam satu kota atau kota yang berlainan, bahkan sampai keluar negeri.
- 2) *Safe Deposit Box* (SDB); SDB adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta, termasuk emas dan surat-surat berharga



Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal yakni mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini mengandung dua aspek yakni kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi; dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.

dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Biasanya barang yang disimpan di dalam SDB adalah barang yang bernilai tinggi dan pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpan di rumah. Pada umumnya biaya penyimpanan barang yang disimpan di SDB bank relatif lebih murah.

- 3) Bank Garansi; Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban.
- 4) Inkaso (*Collection*); Inkaso adalah jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga. Inkaso dapat diartikan juga sebagai kegiatan jasa Bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang telah ditunjuk oleh si pemberi amanat. Sebagai imbalan jasa atas jasa tersebut biasanya bank menerapkan sejumlah tarif atau *fee* tertentu kepada nasabah atau calon nasabahnya. Tarif tersebut dalam dunia perbankan disebut dengan biaya inkaso.
- 5) Kliring (*Clearing*); Kliring adalah penyelesaian utang piutang antar bank. Kliring dapat diartikan juga sebagai suatu cara penyelesaian utang-piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga disuatu tempat tertentu. Warkat kliring antara lain: cek, bilyet giro, nota debit dan nota kredit. Warkat harus dinyatakan dalam mata uang rupiah, bernilai nominal penuh dan telah jatuh tempo.
- 6) Bank Insurance (*Bancassurance*); Bank Insurance adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Bank Insurance merupakan produk investasi dengan potensi hasil yang lebih tinggi, namun dengan risiko dan hasil investasi yang lebih besar.
- 7) Kartu ATM/Kartu Debit; Kartu Debit merupakan sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM. Jika seseorang memiliki sejumlah uang di rekening bank, maka ia dapat meminta kartu ATM atau kartu debit (sesuai dengan fasilitas yang diberikan bank). Setiap saat pemegang kartu dapat mengambil uang tunai di ATM atau digunakan sebagai sarana pembayaran dengan jumlah maksimal sesuai dengan uang yang tersimpan di bank. Kartu ini bukanlah merupakan alat pembayaran, tetapi



Sumber : Dokumentasi BI

**Gambar 2.1 Warkat Kliring**

hanya untuk memberikan kemudahan pada nasabah bank dalam melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai.

- 8) Kartu Kredit (*Credit Card*); Kartu Kredit merupakan alat pembayaran dengan cara kredit, dimana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang *cash*. Kewajiban penggunaannya adalah membayar dengan mencicil sejumlah minimum tertentu dari total transaksi (10 persen total tagihan) yang harus dibayar pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan setiap bulan. Kartu ini berbeda dengan kartu debit, karena setiap kali menggunakannya, pemilik berhutang dengan kewajiban membayarnya dengan bunga. Apabila pemilik kartu terlambat melakukan pembayaran maka akan dikenakan denda keterlambatan.
- 9) *Banknotes*; *Banknotes* adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia). *Banknotes* dikenal juga dengan istilah valas (*valuta asing*). *Banknotes* yang dapat dipertukarkan mempunyai catatan kurs resmi dari Bank Indonesia, serta bukan merupakan uang logam.
- 10) Referensi Bank; Referensi Bank adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan. Referensi bank diterbitkan oleh bank atas dasar permintaan nasabah karena nasabah tersebut mempunyai rekening di bank.

#### Pojok Perbankan

Deposito adalah sebutan bagi nasabah yang memiliki rekening dalam bentuk deposito, baik deposito berjangka maupun sertifikat deposito

- 11) *Bank Draft; Bank Draft (Cashier Check)* sebenarnya adalah cek yang diterbitkan oleh bank. Penjual sering meminta *bank draft* kepada calon pembeli untuk perjanjian awal pada transaksi nominal besar, misalnya transaksi pembelian mobil dan rumah. Hal ini memberikan rasa aman kepada penjual bahwa calon pembeli benar-benar memiliki uang untuk membayar dan tidak memberikan cek kosong. Dalam praktiknya, bank akan meminta nasabahnya untuk mengisi formulir aplikasi dan menetapkan tarif untuk penerbitan *bank draft* tersebut. Selanjutnya, bank akan mendebet secara langsung rekening nasabah sebelum memberikan *bank draft* kepada nasabahnya.
- 12) *Letter of Credit (L/C); L/C* adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi/ persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. L/C dapat diartikan juga sebagai sebuah cara pembayaran internasional yang memungkinkan eksportir menerima pembayaran setelah barang dan berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri (kepada pemesan). Fungsi L/C diantaranya sebagai suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional, memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan, memastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan L/C telah dipenuhi, dan membantu memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir serta memonitor penggunaannya.
13. *Traveller's Cheque; Traveller's Cheque (TC)* adalah *cheque* yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan nonbank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri. TC atau dalam bahasa Indonesia di kenal dengan istilah cek pelawat dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran semacam cek yang diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak yang ditunjuk. Cek pelawat dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu serta dijamin dari kehilangan atau pencurian. TC berfungsi sebagai pengganti uang tunai oleh para penerima dan dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu.
14. *Money Changer; Money Changer* adalah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.

Cara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga dengan pemindahbukuan.

Berdasarkan penjelasan di atas tentang produk dan layanan bank, dapat disederhanakan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.2**  
**Produk dan Layanan Bank**

No.	Simpanan	Penyaluran Dana	Produk Lainnya
1.	Tabungan	Kredit Konsumtif	Transfer Dana
2.	Deposito Berjangka	Kredit Produktif (modal Kerja dan investasi)	<i>Safe Deposit Box (SDB)</i>
3.	Sertifikat Deposito		Bank Garansi
4.	Giro		Inkaso ( <i>Collection</i> ) Kliring ( <i>Clearing</i> ) <i>Bancassurance</i> Kartu Debit ( <i>Debit Card</i> ) Kartu Kredit ( <i>Credit Card</i> ) Valuta Asing ( <i>Banknotes</i> ) Referensi Bank <i>Bank Draft</i> <i>Letter of Credit (L/C)</i> <i>Traveller's Cheque (TC)</i> <i>Money Changer</i>

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Khusus untuk bank syariah, produknya memiliki karakteristik khusus. Secara umum produk bank syariah tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*services*)

Dalam penyediaan produk penghimpunan dana dari nasabahnya, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal sebagaimana yang diterapkan di bank konvensional. Menurut Adiwarmanto A. Karim (2004), prinsip operasional syariah yang dapat diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat di bank syariah adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*.

#### 1) Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *Wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah*

berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan, sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

## 2) Prinsip *Mudharabah*

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah*. Tujuan akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan bukanlah *lender* atau kreditor bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan transaksi dalam bentuk akad *mudharabah* atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam praktik perbankan syariah, prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito.

### Pojok Perbankan

*Nisbah* adalah besaran bagian yang menjadi hak nasabah dibandingkan dengan bank pada proses distribusi bagi hasil

**Tabel 2.3 Karakteristik Produk Pendanaan Bank Syariah**

Karakteristik	Akad Pendanaan		
	<i>Mudharabah</i>	<i>Wadi'ah Amanah</i>	<i>Wadi'ah Dhamanah</i>
- Jangka waktu pengembalian	- Sesuai perjanjian	- Setiap saat	- Sesuai perjanjian
- Pemanfaatan oleh penerima simpanan	- Dbolehkan	- Tidak boleh	- Dbolehkan dengan persetujuan
- Keuntungan	- Bagi Hasil	- Tidak ada	- Bonus
- Prinsip syariah	- Berserikat	- Titipan murni	- Titipan
- Penanggung Risiko	- Penyimpan	- Penyimpan	- Penerima Simpanan
- Jenis barang	- Uang	- Uang dan barang	- Uang dan barang

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dalam menyalurkan dananya kepada para nasabah, sebagaimana dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim (2004), secara umum produk penyaluran dana atau biasa disebut dengan pembiayaan bank syariah dapat dikelompokkan menjadi empat yakni:



Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tahun 1991, yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Mulai beroperasi pada tahun 1992, yang didukung oleh cendekiawan muslim dan pengusaha, serta masyarakat luas. Pada tahun 1994, telah menjadi bank devisa. Produk pendanaan yang ada menggunakan prinsip *Wadiah* (titipan) dan *Mudharabah* (bagi-hasil). Sedangkan penanaman dananya menggunakan prinsip jual beli, bagi-hasil, dan sewa.

## 1) Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Rukun jual beli terdiri atas lima yakni; 1) penjual, 2) pembeli, 3) barang yang dijual, 4) harga dan 5) *ijab qabul* (perjanjian/persetujuan). Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya menjadi tiga, yakni pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istishna'*.

*Murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya dalam bentuk barang yang dibutuhkan nasabah. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa *Murabahah* adalah transaksi jual beli dengan mekanisme pembayaran yang dapat ditangguhkan, baik itu ditangguhkan untuk dicicil sampai lunas atau ditangguhkan dengan dibayar lunas pada akhir periode. Namun, biasanya bank menggunakan pembayaran cicilan untuk menjaga kesehatan kondisi keuangannya.

Adapun *Salam* adalah pembiayaan jual beli dimana pembeli memberikan uang terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli yang telah disebutkan spesifikasinya dengan pengantaran kemudian. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa *Salam* adalah transaksi jual beli dengan cara memesan dan membayar lunas di muka, sementara produknya diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan pada akad.

Sementara itu, *Istishna'* adalah perjanjian sewa yang memberikan hak kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan setelah masa sewa berakhir, maka barang dikembalikan kepada pemilik. Ahmad Gozali (2005) berpendapat bahwa *Istishna'* adalah transaksi jual beli dengan pesanan, dimana pihak pembeli memesan suatu barang untuk dibuatkan baginya, dan mengenai pembayarannya dapat dilakukan di muka sekaligus, bertahap sesuai dengan perkembangan pengerjaan, atau dicicil dalam jangka panjang sesuai dengan perjanjian.

## 2) Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Pada dasarnya, prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Dalam jual beli, objek transaksinya adalah barang, sedangkan pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Transaksi *Ijarah* dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat, bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam

waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam *Ijarah* tidak ada perpindahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Adapun jenis barang/jasa yang dapat menjadi objek *ijarah* di antaranya sebagai berikut:

- a. Barang modal;
- b. Barang produksi;
- c. Barang kendaraan transportasi;
- d. Jasa untuk membayar ongkos; seperti uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel dan transportasi.

### 3) Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

#### a) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *Musyarakah* adalah kontrak pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, dimana bank dan nasabah secara bersama-sama membiayai suatu usaha yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil.

#### b) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak, dimana *shahibul maal* menyediakan dana sedangkan *mudharib* menjadi pengelola dana, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. *Mudharabah* dapat dibagi menjadi dua yakni *mudharabah al mutlaqah* dan *mudharabah muqqayadah*. *Mudharabah al mutlaqah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan dana dan memberikan kewenangan penuh kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka. Adapun *mudharabah muqqayadah* adalah kerja sama antara dua pihak dimana *shahibul maal* menyediakan dana dan memberikan kewenangan terbatas kepada *mudharib* dalam menentukan jenis dan tempat investasi, dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan di muka.

### 4) Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Akad pelengkap tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Dalam akad pelengkap ini, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan

untuk melaksanakan akad. Akad pelengkap di Bank Syariah diantaranya adalah *hiwalah* (alih utang-piutang), *rahn* (gadai), *qardh*, *wakalah* dan *kafalah*.

a) *Wakalah*

*Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. *Wakalah* dapat dimaknai juga sebagai akad perwakilan antara kedua belah pihak (bank dan nasabah) dimana nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu. Atas hal tersebut, bank berhak meminta imbalan berupa *fee* yang ditetapkan di awal. Ketentuan tentang *wakalah* ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

b) *Qardh*

*Qardh* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada bank syariah pada waktu yang telah disepakati tanpa adanya tambahan yang ditentukan, baik di awal maupun didepan. Dengan kata lain, *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al Qardh* menjelaskan bahwa *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Peminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Peminjam dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam akad.

c) *Rahn* (Gadai)

*Rahn* (gadai) adalah akad menjadikan barang yang mempunyai nilai ekonomis sebagai jaminan utang, hingga pemilik barang yang bersangkutan boleh mengambil utang. *Ar Rahn* berarti juga *pawn* (gadai) yaitu kontrak penjaminan dan mengikat pada saat hak penguasaan atas barang jaminan berpindah tangan. Muhammad Syafi' Antonio (2001) mengartikan bahwa *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memiliki jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Ketentuan tentang *rahn* ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.

Selain menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank syariah dapat pula melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan.

### Uji Kompetensi

1. Apakah kegiatan seseorang untuk menyisihkan sebagian uangnya dengan cara menabung di bank termasuk upaya mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME!
2. Untuk membujuk masyarakat menyimpan dananya di bank, beberapa bank menyelenggarakan program undian berhadiah kendaraan, baik motor maupun mobil. Jelaskan tanggapan Anda atas tindakan bank tersebut!
3. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan?
4. Jelaskan dengan bahasa sendiri fungsi bank!
5. Jelaskan perbedaan antara bank umum dengan BPR!
6. Buat matrik perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah!
7. Sebutkan minimal 3 jenis produk penghimpunan dana bank!
8. Jelaskan perbedaan antara kredit dan pembiayaan!
9. Berikan tiga contoh bank milik persero dan bank milik asing!

### VALUES EXPLORER

“Jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri adalah mata uang paling berharga yang berlaku dimanapun dan kapanpun”

## B. LEMBAGA KEUANGAN NON BANK (LKNB)

### 1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank

Lembaga Keuangan Non Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.

### 2. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank

Secara umum, fungsi dan peranan lembaga keuangan non bank hampir sama dengan lembaga keuangan yang berbentuk bank. Berikut merupakan fungsi dan peranan lembaga keuangan non bank:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana.
- b. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa.
- c. Memperlancar distribusi barang/jasa.
- d. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan.

### **3. Jenis, Prinsip Kegiatan Usaha dan Produk Lembaga Keuangan Non Bank**

#### **a. Pegadaian**

Kegiatan pegadaian atau usaha gadai berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Dalam PP tersebut, pegadaian atau usaha gadai diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha kegiatan gadai antara lain sebagai berikut:

- a. Melayani jasa penaksiran
- b. Melayani jasa titipan barang
- c. Memberikan pinjaman dengan jaminan

Adapun menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150 disebutkan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.

PT. Pegadaian (Persero) atau Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang salah satu misinya adalah ikut membantu program Pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah. Misi tersebut dilakukan dengan kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 1971, tugas pokok Pegadaian adalah sebagai berikut:

- 1) Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada para petani, nelayan, pedagang

## Pojok LKNB

Sejarah Pegadaian dimulai pada saat Pemerintah Belanda (VOC) mendirikan *Bank van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10/1990 (yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (Perum). Kemudian pada tahun 2011, perubahan status kembali terjadi yakni dari Perum menjadi Perseroan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51/2011 yang ditandatangani pada 13 Desember 2011.

## Pojok LKNB

Rukun gadai syariah: ijab dan kabul; adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahn*) dan yang menerima gadai (*murtahin*); adanya jaminan (*marhun*) berupa barang atau harta; adanya utang (*marhun bih*).

kecil, dan industri kecil yang bersifat produktif, kaum buruh/pegawai negeri dengan ekonomi lemah dan bersifat konsumtif.

- 2) Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.
- 3) Menyalurkan kredit maupun usaha-usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat
- 4) Membina pola perkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya.

Pegadaian merupakan lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat.

Dewasa ini, seiring dengan perkembangan produk-produk berbasis syariah di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syariah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank syariah dengan Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Dalam menjalankan operasional usahanya, pegadaian syariah berpegang kepada prinsip syariah. Sama seperti halnya produk perbankan syariah, produk-produk pegadaian syariah memiliki karakteristik tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, serta melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Dasar hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas. Sementara itu, dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990.

Menurut Andri Soemitera (2009) bahwa pada dasarnya, pegadaian syariah berjalan dengan dua akad transaksi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Akad *Rahn*, yaitu akad menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau

sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atau utang nasabah.

2. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

## b. Perusahaan Sewa Guna Usaha (*Leasing*)

Industri Pembiayaan (*multi finance*) di Indonesia mulai tumbuh pada 1974. Kelahirannya didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan. Setahun setelah dikeluarkannya SKB tersebut, berdirilah PT Pembangunan Armada Niaga Nasional pada tahun 1975. Dalam perkembangannya, perusahaan tersebut mengganti namanya menjadi PT (Persero) PANN *Multi Finance*. Selanjutnya, melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 61/1988, yang ditindaklanjuti dengan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988, Pemerintah membuka lebih luas lagi bagi bisnis pembiayaan, dengan cakupan kegiatan meliputi *leasing*, *factoring*, *consumer finance*, modal ventura dan kartu kredit.

Dalam perkembangannya, keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia semakin kuat dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK-017/2000 yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang berkembang pesat di Indonesia adalah Sewa Guna Usaha (*Leasing*). Istilah *leasing* berasal dari bahasa Inggris yakni *to lease* yang berarti menyewakan. Perusahaan *leasing* di Indonesia disebut perusahaan sewa guna usaha. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*), untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Objek sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak *lessee* memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa.

### Pojok LKNB

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan pendiri perusahaan pembiayaan (*leasing*) syariah pertama di Indonesia yakni Al Ijarah Indonesia Finance pada tahun 2007. Pemegang saham dari perusahaan pembiayaan syariah tersebut adalah International Leasing Islamic Company (ILIC) sebagai anak perusahaan IDB, Bank Boubyan of Kuwait dan Bank Muamalat Indonesia (BMI).



Berdasarkan pengertian sewa guna usaha di atas dapat diketahui bahwa kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara:

- 1) *Finance lease*, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee*, dengan ketentuan (a) jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di-*lease* harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-*lease*-kan dan keuntungan bagi pihak *lessor*, (b) dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi *lessee*.
- 2) *Operating lease*, yaitu sewa guna usaha tanpa hak opsi, dengan ketentuan (a) jumlah pembayaran selama *leasing* pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal ditambah keuntungan bagi *lessor*, (b) dalam perjanjian *leasing* tidak memuat mengenai hak opsi bagi *lessee*.

Dalam perkembangannya, di Indonesia berkembang pula perusahaan sewa guna usaha (*leasing*) dengan prinsip syariah. Menurut Andri Soemitra (2009) bahwa *leasing* syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip operasional usaha *leasing* syariah di Indonesia berlandaskan kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* serta Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik*.

### c. Perusahaan Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yakni *assurantie* yang dalam bahasa Indonesia diartikan asuransi. Namun, menurut Andri Soemitra (2009) bahwa istilah *assurantie* itu sendiri sebenarnya bukanlah istilah asli bahasa Belanda, melainkan berasal dari bahasa Latin, yaitu *assecurare* yang berarti “meyakinkan orang”. Sementara itu, dalam bahasa Belanda istilah asuransi yang sering diartikan “pertanggunggaan” dapat diterjemahkan menjadi *insurance* dan *assurance*. Kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, *insurance* mengandung arti segala sesuatu yang mungkin terjadi, sedangkan *assurance* lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggunggaan yang berkaitan dengan jiwa seseorang.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu penjajahan Belanda yang pada waktu itu disebut *Nederlands Indie*. Keberadaan asuransi di Indonesia sebagai akibat berhasilnya bangsa Belanda dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan itu adalah:

- Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang Belanda.
- Perusahaan-perusahaan yang merupakan kantor cabang dari perusahaan asuransi yang berkantor pusat di Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (*risk transfer mechanism*), yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Kegiatan usaha asuransi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Jenis-jenis asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi. Adapun contoh perusahaan asuransi diantaranya Asuransi Kesehatan (ASKES), JAMSOSTEK, Prudential, Axa Life, dan lain-lain.

Seseorang yang memanfaatkan produk asuransi biasanya memegang polis asuransi. Polis asuransi adalah suatu kontrak perjanjian yang sah antara penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) dengan tertanggung, pihak penanggung bersedia menanggung sejumlah kerugian yang mungkin timbul di masa yang akan datang dengan imbalan pembayaran (premi) tertentu dari tertanggung.

Terdapat dua bentuk perjanjian dalam menetapkan jumlah pembayaran pada saat jatuh tempo asuransi yaitu: kontrak nilai (*valued contract*) dan kontrak indemnitas (*contract of indemnity*). Kontrak nilai adalah perjanjian dimana jumlah pembayarannya telah ditetapkan di muka, seperti nilai Uang Pertanggungan (UP) pada asuransi jiwa. Adapun kontrak indemnitas adalah perjanjian yang jumlah santunannya didasarkan atas jumlah kerugian finansial yang sesungguhnya, seperti biaya perawatan rumah sakit.

Seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah, di Indonesia berkembang pula perusahaan asuransi dengan prinsip kegiatan usaha berbasis syariah. Secara operasional, perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada SK Dirjen Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan KMK Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah* pada Asuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

Asuransi syariah menurut Fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *Tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Menurut Andri Soemitra (2009) bahwa asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebijakan yang disebut *Tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk tranfer*) di mana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) yang para pesertanya saling menanggung. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus selaras dengan hukum Islam (syariah), artinya akad yang dilakukan harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), dan *risywah* (suap). Disamping itu, investasi dana harus pada objek yang *halal-thoyyibah* bukan barang haram dan maksiat.

#### **d. Perusahaan Anjak Piutang**

Kegiatan anjak piutang (*factoring*) merupakan jenis perusahaan yang relatif baru di Indonesia. Dalam operasinya, anjak piutang mengacu kepada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 1251/KMK.013/1998. Dalam KMK tersebut, dikatakan bahwa anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Anjak piutang adalah transaksi pembelian dan atau penagihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek *klien* (penjual) kepada perusahaan *factoring*, yang kemudian akan ditagih oleh perusahaan

anjak piutang kepada pembeli karena adanya pembayaran kepada klien oleh perusahaan factoring (*factor*). Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Bank biasanya memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini *supplier*. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*. Mekanisme anjak piutang ini sebenarnya diawali dari adanya transaksi jual beli barang atau jasa yang pembayarannya secara kredit.

Secara umum, jasa-jasa anjak piutang dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jasa pembiayaan (*financing services*) dan jasa nonpembiayaan (*non financing services*). Adapun kegiatan anjak piutang meliputi:

- 1) Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan *fee* tertentu.
- 2) Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga sesuai kesepakatan.
- 3) Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, yang berarti perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan.

Bank pada prinsipnya dapat memberikan jasa anjak piutang sebagai bagian dari produknya tanpa perlu membentuk badan usaha baru. Namun demikian, karena volume usaha anjak piutang yang biasanya relatif besar, maka umumnya bank-bank cenderung memisahkan kegiatan anjak piutang ini dari operasional sehari-hari dengan membentuk suatu badan hukum terpisah. Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank antara lain sebagai berikut:

- 1) Kredit bank melibatkan praktik-praktik dalam perkreditan umum termasuk mengenai jaminan. Sementara itu, anjak piutang pada prinsipnya merupakan transaksi jual beli piutang.
- 2) Kredit bank dimulai dari timbulnya utang melalui mobilisasi dana kemudian dialihkan menjadi aktiva produktif, sedangkan anjak piutang berkaitan dengan pengalihan dari suatu aktiva produktif, yaitu tagihan menjadi kas pada saat jatuh tempo.
- 3) Kredit bank memberikan tambahan aktiva dalam bentuk kas pada debitor. Anjak piutang tidak memberikan tambahan kas, akan tetapi hanya memperlancar arus kas dengan menggunakan piutang yang belum jatuh tempo.
- 4) Kredit bank biasanya dalam jumlah tetap dan memiliki syarat pelunasan tetap, sedangkan fasilitas anjak piutang mengubah penjualan kredit menjadi uang tunai.
- 5) Kredit bank hampir selalu dikaitkan dengan agunan, sementara bagi anjak piutang agunan bukan merupakan hal mutlak.

Kegiatan anjak piutang dimulai di wilayah Amerika Utara pada sektor industri tekstil. Kegiatan anjak piutang merupakan bidang usaha yang relatif baru di Indonesia. Kelembagaan anjak piutang dimulai sejak Paket Kebijakan 20 Desember 1988 atau Pakdes 20 pada tahun 1988. Usaha anjak piutang ini dimaksudkan untuk memperoleh sumber-sumber pembiayaan alternatif di luar sektor perbankan. Kegiatan usaha anjak piutang dapat dilakukan oleh *multi finance company* yaitu lembaga pembiayaan yang dapat melakukan kegiatan usaha di bidang anjak piutang, sewa guna usaha, modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pokok anjak piutang meliputi:

- Pembelian dana atau pengalihan piutang jangka pendek dari transaksi perdagangan.
- Mengurus administrasi penjualan kredit.
- Penagihan piutang perusahaan klien.

- 6) Keahlian perusahaan anjak piutang dalam memelihara atau mengurus pembukuan penjualan klien dan penyediaan informasi manajemen menjadikan anjak piutang lebih sebagai mitra usaha.

#### e. Perusahaan Modal Ventura

Istilah ventura berasal dari kata *venture* yang secara bahasa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat juga diartikan sebagai usaha. Dengan demikian, secara bahasa modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Adapun definisi perusahaan modal ventura menurut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

Pembiayaan modal ventura lahir sejak didirikannya PT. Bahana Pembina Usaha Indonesia. Perusahaan tersebut lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah dengan tujuan:

- 1) Menumbuhkan dan merangsang pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, serta memberikan berbagai macam bantuan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah berusaha yang sehat.
- 2) Membantu pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara:
  - a) Turut serta sebagai penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan
  - b) Mengidentifikasi proyek dan membantu menyusun *feasibility studies* perusahaan; dan
  - c) Menyediakan dana dan SDM serta membantu dalam pemasaran.

Pembiayaan modal ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Modal ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayai. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal ventura disebut Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau *investee company*. Jenis pembiayaan modal ventura diantaranya sebagai berikut:

- 1) *Equity financing*, yaitu penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan cara mengambil alih sebagian saham PPU.
- 2) *Semi equity financing*, yaitu penyertaan dengan cara membeli obligasi konversi yang diterbitkan PPU

#### Pojok LKNB

Istilah ventura berasal dari kata *venture*, yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal ventura (*venture capital*) adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu.

- 3) Bagi hasil, yaitu pembiayaan kepada perusahaan kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Adapun kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 dengan tujuan:

- 1) Memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru.
- 2) Membantu membiayai perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam mengembangkan usahanya, terutama tahap-tahap awal.
- 3) Membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk maupun pada tahap mengalami kemunduran.
- 4) Membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap dipasarkan.
- 5) Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
- 6) Mendorong pengembangan proyek *research and development*.
- 7) Membantu pengembangan teknologi baru dan memperlancar terjadinya alih teknologi.
- 8) Membantu dan memperlancar pengalihan kepemilikan suatu perusahaan.

Ciri-ciri utama modal ventura adalah pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity financing*) dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan modal tersebut dapat dimodifikasi menjadi *semi equity financing*. Di samping itu, karakteristik lain modal ventura adalah tingginya risiko yang mungkin dihadapi oleh pemodal. Modal ventura adalah kumpulan dana (*pool of funds*) yang berasal dari investor, dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme modal ventura, paling sedikit ada tiga unsur yang terlibat secara langsung, yaitu:

- 1) Pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk untuk itu; atau disebut *venture capital funds*.
- 2) Profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau *management venture capital fund company*
- 3) Perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut *investee company* atau perusahaan pasangan usaha. Sama halnya dengan LKNB lainnya, prinsip kegiatan usaha perusahaan

#### Pojok LKNB

Perusahaan modal ventura syariah yang terdaftar di Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI adalah PT Bahama Artha Ventura dan PT Sumut Ventura.

modal ventura juga ada yang berbasis syariah. Modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah diakui. Adapun karakteristik khusus yang dikembangkan perusahaan modal ventura syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya Dewan Pengawasan Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:
  - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b) Lembaga keuangan konvensional (*ribawi*), termasuk perbankan dan asuransi konvensional.
  - c) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
  - d) Produsen, distributor, dan/atau penyediaan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
  - e) Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

#### **f. Dana Pensiun**

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Undang-Undang Dana Pensiun) bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Adapun jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain:

- 1) Pensiun normal
- 2) Pensiun dipercepat
- 3) Pensiun ditunda
- 4) Pensiun cacat

Sedangkan jenis-jenis dana pensiun menurut Pasal 2 Undang-Undang Dana Pensiun digolongkan menjadi dua yakni:



- 1) Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Ketentuan tentang DPPK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992. DPPK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun dengan manfaat pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian, dana pensiun jenis ini disediakan langsung oleh pemberi kerja. Pendirian DPPK ini harus mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan.
- 2) Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Ketentuan tentang DPLK selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 1992. DPLK adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari DPPK bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Bagi masyarakat pekerja mandiri seperti dokter, petani, nelayan, dan sebagainya dimungkinkan untuk memanfaatkan DPLK. Tidak tertutup kemungkinan pula bagi para karyawan di suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan DPLK sesuai dengan kemampuannya. Pendirian DPLK oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan.

Program Dana Pensiun mengupayakan suatu manfaat pensiun, dengan cara sebagai berikut:

- 1) Membayar iuran pensiun setiap bulan,
- 2) Selanjutnya dikembangkan (diinvestasikan),
- 3) Akhirnya akan membentuk saldo atau manfaat pensiun

#### Pojok LKNB

Di Indonesia, pengembangan dana pensiun diantaranya dilakukan oleh Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI). ADPI didirikan pada tahun 1985 dengan program-program yang dapat di akses di <http://www.adpi.or.id>

#### Uji Kompetensi

1. Berikan dua contoh upaya mensyukuri sumber daya modal sebagai karunia Tuhan YME!
2. Selain *leasing* konvensional, dewasa ini banyak berkembang *leasing* dengan prinsip kegiatan usaha syariah. Menurut Anda, seperti apa dampak dari perkembangan tersebut, khususnya dihubungkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak dan terkadang menimbulkan kemacetan!
3. Apa yang dimaksud dengan LKNB?
4. Sebutkan minimal tiga jenis LKNB dan jelaskan perbedaan dari ketiganya!
5. Produk LKNB apa saja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat!
6. Jelaskan dengan bahasa sendiri fungsi LKNB!
7. Menurut Anda, apa perbedaan antara bank dan LKNB?
8. Sebutkan dan jelaskan tiga kegiatan utama dari pegadaian!
9. Menurut Anda, apa manfaat dari adanya program dana pensiun!

## VALUES EXPLORER

“Orang yang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif, proaktif, dan peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi akan menjadi orang modal sosial bagi percepatan pembangunan suatu bangsa”

## C. BANK SENTRAL

### 1. Pengertian Bank Sentral

Bank sentral merupakan lembaga yang memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, fungsi, tujuan, dan tugas yang dijalankan serta bagaimana operasi dan organisasi bank sentral, merupakan bagian penting yang harus diketahui. Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar istilah bank sentral? Apakah sama dengan bank pada umumnya, masyarakat bisa menyimpan dan meminjam uang di bank sentral? Jika terdapat pemahaman bahwa bank sentral termasuk salah satu jenis bank yang dapat menerima simpanan dan pinjaman, itulah pandangan yang sangat keliru. Bagaimana sesungguhnya bank sentral itu?

Dilihat dari sisi kelembagaannya, Hawke (1973) menjelaskan bahwa bank sentral adalah sebuah organisasi yang berada di antara pemerintah dan perbankan. Lebih lanjut, Kisch and Elkin (1932) menyimpulkan bahwa bank sentral adalah suatu alat dari kebijakan publik bukan alat dari kepentingan individu. Bank sentral adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan publik melalui sektor perbankan guna memengaruhi variabel ekonomi.

Dari aspek usaha, bank sentral memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan yang lain. Dalam menjalankan kegiatannya, bank sentral sebagai lembaga publik tidak mengedepankan prinsip maksimalisasi laba, tetapi menekankan efisiensi guna mendapatkan keuntungan bagi masyarakat yang sebesar-besarnya.

Untuk lebih memahami pengertian bank sentral, Singleton *et al* (2006) berpendapat bahwa berdasarkan aktivitas yang dilakukannya, bank sentral memiliki sepuluh fungsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penerbit uang atau alat pembayaran yang sah guna memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Pelaksana dan perumus kebijakan moneter;
- c. Penyedia jasa perbankan dan agen kepada pemerintah dan sering sebagai pengelola pinjaman pemerintah;
- d. *Custodian* dari cadangan bank umum dan pembantu penyelesaian akhir transaksi kliring antarbank;

- e. Penjaga keutuhan sistem keuangan dan pada beberapa situasi/ keadaan bertindak sebagai *an emergency lender of last resort* dan pengawas kehati-hatian perbankan;
- f. Pelaksana dari kebijakan pemerintah di bidang nilai tukar dan sebagai Kustodian dari cadangan devisa negara dan membantu negara dalam mengelola cadangan devisa;
- g. Pembuat kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang, bank sentral sering diberi mandat lebih luas untuk memperkuat pembangunan ekonomi;
- h. Penasehat pemerintah terkait dengan kebijakan ekonomi. Bank sentral dipandang memiliki keahlian mengenai hal-hal yang terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan;
- i. Lembaga yang berpartisipasi dalam kerjasama pengaturan moneter internasional; dan
- j. Lembaga yang memiliki hubungan erat dengan pemerintah sehingga memungkinkan bank sentral mendapat tugas lain, seperti memberi layanan perbankan kepada publik, dan memberikan perlindungan nasabah.

Pada periode awal perkembangannya, bank sentral lebih berfungsi sebagai bankirnya sistem perbankan. Dalam hal ini, bank sentral memberikan pinjaman jangka pendek kepada perbankan untuk menutupi kebutuhan dana jangka pendeknya. Selain itu, bank-bank sentral pada periode awal juga melakukan aktivitas komersial layaknya bank umum biasa.

Dalam perkembangannya, bank sentral dewasa ini dirancang sebagai lembaga kebijakan publik yang tujuan utamanya adalah mempertahankan stabilitas moneter dan mendorong stabilitas sistem keuangan. Bank sentral juga menyediakan komponen inti dalam sistem pembayaran, yaitu uang kartal untuk masyarakat dan penyelesaian transfer antarbank melalui rekening bank di bank sentral. Bank sentral juga kerap berfungsi sebagai pengelola emas atau cadangan devisa negara. Dalam hal kerja sama dengan otoritas lainnya, bank sentral juga melakukan peranan penting dalam pengawasan dan pengembangan sistem keuangan di negaranya. Bank sentral juga tidak melakukan lagi aktivitas-aktivitas komersial yang dapat mengurangi perannya sebagai lembaga kebijakan publik.

Selain fungsi-fungsi di atas, bank sentral di beberapa negara juga berperan dalam tugas lain, seperti melayani jasa perbankan dan manajemen aset serta utang kepada pemerintah. Bank sentral juga sering diminta untuk melakukan analisis dan saran terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pembangunan di negara tersebut.



**Pojok  
Bank Sentral**

Sebagian besar bank sentral yang ada di dunia didirikan pada abad ke-20

Secara historis, bank sentral tertua di dunia ialah *Sveriges Riskbank* (Swedia) dan *Bank of England* (Inggris) yang memulai sejarahnya di abad ketujuh belas. Ketika pertama kali didirikan, *Sveriges Riskbank* masih jauh dari gambaran bank sentral yang ada pada saat ini. Perjalanan sejarah bank sentral mengalami perubahan yang signifikan pada abad kedelapan belas, sembilan belas dan dua puluh.

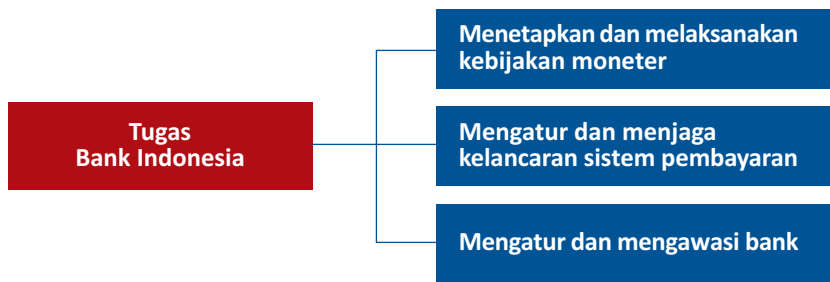
Adapun bank sentral di Indonesia dimulai pada saat Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *De Javasche Bank* sebagai bank sirkulasi di Hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1828. *De Javasche Bank* bertugas antara lain menerbitkan uang kertas (*banknotes*), memberikan kredit kepada perusahaan-perusahaan, memperdagangkan logam mulia dan bertindak sebagai kasir Pemerintah. Setelah kemerdekaan Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953, *De Javasche Bank* dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dan berada di bawah Pemerintah. Pada periode awal ini, Bank Indonesia juga masih diberi tugas untuk menjaga stabilitas Rupiah, menyelenggarakan peredaran uang di Indonesia, memajukan perkembangan urusan kredit dan melakukan pengawasan pada urusan kredit tersebut.

Pada periode awal, Bank Indonesia juga memiliki usaha-usaha komersial antara lain seperti memindahkan uang (melalui surat atau pemberitahuan, dengan telegram, wesel tunjuk dan lain-lain), menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, surat order dan surat-surat utang, serta beberapa usaha lainnya. Dalam perkembangannya, usaha-usaha komersial itu dihentikan. Terlebih setelah krisis yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, Bank Indonesia diberikan independensi dan hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.

## **2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 4 bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Lebih lanjut Pasal 7 UU tersebut menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia

adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah itu terdiri atas dua aspek yaitu, *pertama*, kestabilan terhadap barang dan jasa, *kedua*, kestabilan terhadap mata uang negara lain (kurs). Kestabilan nilai Rupiah terhadap barang dan jasa tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin pada perkembangan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap mata uang negara lain. Penetapan tujuan memelihara stabilitas nilai Rupiah memberikan batas tanggung jawab yang jelas bagi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dan dalam menetapkan sasaran yang harus dicapai.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 2.2 Tugas Bank Indonesia**

Untuk mewujudkan tujuan dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, Undang-Undang Bank Indonesia Pasal 8 menjelaskan bahwa Bank Indonesia mempunyai tiga tugas sebagai berikut:

- a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan
- c) mengatur dan mengawasi bank.

Tugas *pertama* adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tugas ini diarahkan dalam rangka mengendalikan jumlah uang yang beredar dan /atau suku bunga agar dapat mendukung pencapaian tujuan kestabilan nilai uang, sekaligus mendorong perekonomian nasional. Dalam melaksanakan tugas kebijakan moneter, bank sentral senantiasa memantau perkembangan dan kecenderungan berbagai variabel ekonomi makro, moneter, dan keuangan. Bank sentral juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Pemerintah agar terjadi kerjasama yang padu antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal serta kebijakan ekonomi makro lainnya. Hasil analisis dan pemantauan digunakan oleh bank sentral dalam melaksanakan kebijakan moneternya,



Dibentuknya OJK telah menjadikan otoritas keuangan dan otoritas moneter di Indonesia menjadi dua lembaga yang terpisah. Apakah perbedaan antara otoritas keuangan dengan otoritas moneter? Bagaimana pola hubungan diantara keduanya? Kumpulkan informasi dari sumber yang relevan termasuk dari internet, diskusikan dan buat simpulannya!!



Tiga tugas Bank Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia merupakan evolusi, semula hanya terbatas sebagai bank sirkulasi yang dilakukan oleh De Javasche Bank NV, selanjutnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Bank Indonesia melahirkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia dengan tugas pokok menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang, dan mengembangkan sistem pembayaran, serta berperan sebagai agen pembangunan, kasir pemerintah, dan sebagai *bankers bank*. Namun, tetap menjalankan beberapa fungsi bank komersial.

Visi dan Misi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral adalah

**Visi**

Menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.

**Misi**

1. Mencapai stabilitas nilai Rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/ pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

baik melalui pengendalian jumlah uang beredar maupun suku bunga. Pembahasan lebih lanjut tentang kebijakan moneter akan diuraikan pada bab 6.

Tugas *kedua* adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yang mencakup sekumpulan kesepakatan, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan dalam mengatur peredaran uang. Sistem pembayaran dapat berlangsung, baik secara tunai maupun nontunai. Sistem pembayaran tunai menyangkut pencetakan dan pengedaran uang agar jumlah, denominasi, kelayakan, ataupun keamanan uang sebagai alat pembayaran yang sah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan berbagai aktivitas ekonomi. Adapun sistem pembayaran nontunai menyangkut peredaran uang yang pada umumnya dalam bentuk giral dan produk-produk perbankan lainnya, baik melalui proses kliring antarbank, kartu kredit, ataupun anjungan tunai mandiri (ATM). Pembahasan lebih lanjut tentang sistem pembayaran akan diuraikan pada bab 3.

Tugas *ketiga* adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Peran penting perbankan terutama terletak pada fungsinya sebagai lembaga kepercayaan dalam memobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan alternatif pembiayaan lainnya untuk dunia usaha. Perbankan mempunyai peran vital dalam pelaksanaan kebijakan moneter karena sebagian besar peredaran uang dalam perekonomian berlangsung melalui perbankan.

Aktivitas perbankan sangat erat kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pembayaran, karena peredaran uang ataupun pelaksanaan sistem pembayaran nontunai pada umumnya melalui perbankan. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pengaturan perbankan saling terkait dan saling mendukung dalam pencapaian tujuan kestabilan nilai Rupiah yang menjadi tujuan dan tanggung jawab bank sentral. Dengan pertimbangan tersebut, wajar apabila aktivitas perbankan pada umumnya diatur dan diawasi secara ketat oleh bank sentral. Bentuk pengaturan dan pengawasan perbankan mencakup perizinan, penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan, baik secara langsung di perbankan maupun secara tidak langsung melalui pemantauan laporan, dan penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan cara itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi untuk mendukung perekonomian nasional dapat tetap terjaga dan terpelihara.

Pelaksanaan ketiga tugas di atas saling terkait dalam mencapai kestabilan nilai Rupiah. Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu, untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut

diperlukan sistem perbankan yang sehat. Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter sebab pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan.

Adapun wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam rangka melaksanakan tiga tugas di atas adalah sebagai berikut.

- a. Wewenang terkait dengan tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter meliputi:
  - 1) menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memerhatikan sasaran laju inflasi,
  - 2) melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik Rupiah maupun valuta asing; dan
  - 3) menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan minimum, dan mengatur kredit atau pembiayaan.
- b. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran meliputi:
  - 1) melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran;
  - 2) mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya; dan
  - 3) menetapkan penggunaan alat/instrumen pembayaran.
- c. Wewenang terkait dengan tugas mengatur dan mengawasi bank meliputi:
  - 1) menetapkan peraturan;
  - 2) memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank;
  - 3) mengawasi bank, baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan; dan
  - 4) mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), fungsi Bank Indonesia di bidang pengaturan dan pengawasan perbankan beralih ke OJK sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 55 ayat 2 UU OJK.

### VALUES EXPLORER

Disiplin adalah jembatan antara *goal* dan penyampaianya (Jim Rohn)



#### Pojok Bank Sentral

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Gubernur dan Deputy Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)



#### Forum Bank Sentral

Menurut Anda, peran apa saja yang harus dilakukan Bank Sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara? Kumpulkan informasi yang relevan, termasuk dari internet. Analisislah informasi yang terkumpul, diskusikan serta buat simpulannya!



### 3. Stabilitas Sistem Keuangan

Seiring dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tugas pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan *macroprudential*, sedangkan tugas pengaturan dan pengawasan *microprudential* perbankan sepenuhnya dilakukan OJK. Tujuan pengawasan *macroprudential* adalah menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan merupakan suatu kondisi dimana seluruh lembaga keuangan, pasar keuangan serta sarana pendukungnya memiliki ketahanan dan mampu mengatasi ketidakseimbangan keuangan. Kondisi ketidakseimbangan keuangan bersumber dari proses intermediasi yang mengalami masalah.

Upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Hal tersebut karena masalah yang terjadi terkait dengan stabilitas sistem keuangan dapat membahayakan perekonomian secara keseluruhan. Tercapainya stabilitas sistem keuangan semakin penting dalam mendukung perekonomian nasional. Hal tersebut mengingat krisis di lembaga dan pasar keuangan memiliki dampak yang tinggi terhadap perekonomian serta berdampak pada terciptanya ekonomi biaya tinggi. Indonesia pernah mengalaminya pada tahun 1998 dimana biaya untuk stabilitas sistem keuangan dan rekapitalisasi perbankan mencapai 51% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Biaya tersebut belum mencakup biaya sosial dan biaya politik yang timbul sebagai dampak ketidakseimbangan sistem keuangan.

Salah satu usaha untuk menjaga stabilitas sistem keuangan adalah melalui kebijakan *macroprudential*. Hal tersebut dilakukan untuk menggantikan tugas mengatur dan mengawasi bank yang sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan *macroprudential*? Kebijakan *macroprudential* secara umum adalah kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam memelihara keseimbangan sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan beberapa tugas sebagai berikut:

#### a. Merumuskan Kebijakan *Macroprudential*

Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus dari kebijakan *macroprudential* adalah pada sistem keuangan secara keseluruhan. Kebijakan *macroprudential* bersifat lintas sektor untuk seluruh sektor keuangan baik perbankan, pasar modal maupun lembaga keuangan lainnya. Kebijakan *macroprudential* bertujuan

#### Pojok Bank Sentral



Biaya krisis sistemik terjadi jika permasalahan yang terjadi pada suatu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. Contohnya jika bank X mengalami kepailitan usaha, maka bank Y, bank N, bank M dan bank-bank lainnya terhambat likuiditasnya sehubungan aktivitas usahanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha bank X yang mengalami masalah.

#### Pojok Perbankan

**Risiko Sistemik** (*systemic risk*) adalah risiko kegagalan salah satu peserta pasar dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo sehingga menyebabkan peserta lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya (Serfianto, et al. 2012).

untuk membatasi risiko sistemik yang dapat membahayakan sistem keuangan secara keseluruhan.

### b. Melakukan Proses *Surveillance* atau Monitoring Sistem Keuangan

Proses monitoring dilakukan terhadap lembaga keuangan, pasar dan sarana pendukung keuangan. Hal tersebut guna mendeteksi secara dini ancaman terhadap sistem keuangan secara keseluruhan, sehingga tindakan korektif yang bersifat segera dapat dilakukan oleh Bank Indonesia.

### c. Memfasilitasi Perluasan Akses Keuangan

Perluasan akses keuangan dapat memberikan manfaat yang besar bagi keseimbangan sistem keuangan. Perluasan akses keuangan memungkinkan jasa keuangan yang lebih merata terhadap seluruh penduduk. Selain itu, mendorong berkembangnya berbagai instrumen keuangan yang memungkinkan pelaku ekonomi untuk memiliki pilihan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan risiko. Instrumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam memelihara keseimbangan sistem keuangan terus dikembangkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di pasar keuangan dan perekonomian secara keseluruhan.

Bank Indonesia memiliki lima peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah:

*Pertama*, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *Inflation Targeting Framework* (ITF). Konsep ITF akan dijelaskan lebih lanjut pada bab 5.

*Kedua*, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Penciptaan kinerja lembaga perbankan seperti itu dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Seperti halnya di negara-negara lain, sektor perbankan memiliki pangsa yang dominan dalam sistem keuangan. Oleh sebab itu, kegagalan di sektor ini dapat menimbulkan ketidakstabilan keuangan dan mengganggu perekonomian. Untuk



5 Peran Utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas sistem keuangan

1. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka.
2. Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan.
3. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
4. Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan.
5. Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR).



Pada 24 Januari 1828, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan bank sirkulasi dengan nama De Javasche Bank (DJB). Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949 mengakhiri konflik Indonesia dan Belanda, ditetapkan kemudian DJB sebagai Bank Sentral bagi Republik Indonesia Serikat (RIS). Status ini terus bertahan hingga masa kembalinya RI dalam negara kesatuan. Berikutnya sebagai bangsa dan negara yang berdaulat, RI menasionalisasi bank sentralnya. Maka sejak 1 Juli 1953 berubahlah DJB menjadi Bank Indonesia, Bank Sentral bagi Republik Indonesia.

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

mencegah terjadinya kegagalan tersebut, sistem pengawasan dan kebijakan perbankan yang efektif haruslah ditegakkan. Khusus terkait dengan peran kedua ini, Undang-Undang Bank Indonesia mengamanahkan untuk dimandatkan kepada OJK. Hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

*Ketiga*, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar (*failure to settle*) pada salah satu peserta dalam sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup serius dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Kegagalan tersebut dapat menimbulkan risiko yang bersifat menular (*contagion risk*), sehingga menimbulkan gangguan yang bersifat sistemik. Bank Indonesia mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat. Antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross Settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki informasi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.

*Keempat*, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi tekanan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Melalui riset, Bank Indonesia dapat mengembangkan instrumen dan indikator *macroprudential* untuk mendeteksi kerentanan sektor keuangan. Hasil riset dan pemantauan tersebut, selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

*Kelima*, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *lender of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR merupakan peran tradisional Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan. Fungsi sebagai LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank

#### Pojok Bank Sentral



*Moral hazard* adalah perilaku seseorang saat risiko akibat tindakannya ditanggung oleh pihak lain, bukan dia sendiri. *Moral hazard* dapat diartikan juga sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sifat, pembawaan dan karakter manusia yang dapat menambah besarnya kerugian seperti penipuan, ketidakjujuran dan sebagainya.

Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia, dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang terdiri atas:

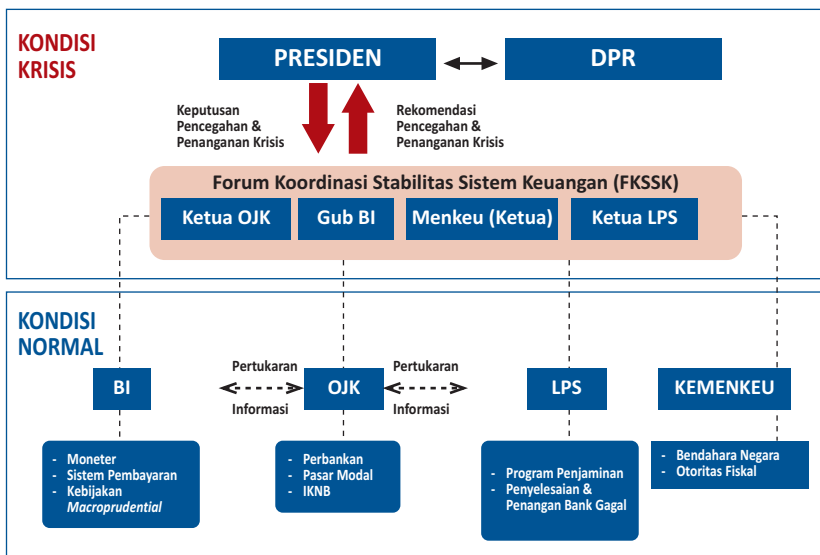
- Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
- Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
- Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota; dan
- Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota.

yang mengalami kesulitan likuiditas temporer namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Dalam menjalankan fungsinya sebagai LoLR, Bank Indonesia harus menghindari terjadinya *moral hazard*. Oleh karena itu, pertimbangan risiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Dalam pencegahan dan penanganan krisis sektor keuangan, tugas Bank Indonesia sesuai kewenangannya dalam JPSK meliputi:

- Melakukan koordinasi dengan OJK, Pemerintah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
- Melakukan pemeriksaan terhadap Bank dan LKNB.
- Mewajibkan pihak keuangan atau pihak terkait lainnya untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Mekanisme koordinasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan stabilis sistem keuangan sebagai berikut.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 2.3**  
**Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)**

### Uji Kompetensi

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mensyukuri karunia Tuhan YME berupa uang yang setiap bulan Anda terima!
2. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank beralih dari Bank Indonesia kepada OJK. Menurut Anda, apakah dengan pengalihan tugas tersebut peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai lembaga negara menjadi lemah!
3. Jelaskan pengertian bank sentral!
4. Jelaskan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia!
5. Jelaskan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia!
6. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar masyarakat dapat memahami tugas utama Bank Indonesia dalam perekonomian!
7. Apakah produk Bank Indonesia sama dengan produk bank umum! Jelaskan!
8. Jelaskan perbedaan kebijakan mikroprudensial dengan makropudensial!
9. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan!
10. Buatlah bagan tentang proses kerja Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) ketika perekonomian dalam kondisi krisis!

### VALUES EXPLORER

Isilah pikiran Anda dengan buku-buku inspiratif. Bekerjalah dengan keras, dengan cerdas dan pada akhirnya jadilah seorang pencipta pekerjaan, bukan pengambil pekerjaan (Greg S. Reid)

### Forum OJK

Undang-Undang Bank Indonesia dan Undang-Undang OJK menjelaskan bahwa tugas pengaturan dan pengawasan bank dilakukan oleh OJK, setujuhkan Anda dengan kebijakan tersebut? Bagaimana hubungan kerja antara Bank Sentral dan OJK terkait dengan keberadaan bank di Indonesia ke depan? Kumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk dari internet, analisis, diskusikan dan buat simpulannya!

## D. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

### 1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang OJK), OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang OJK.

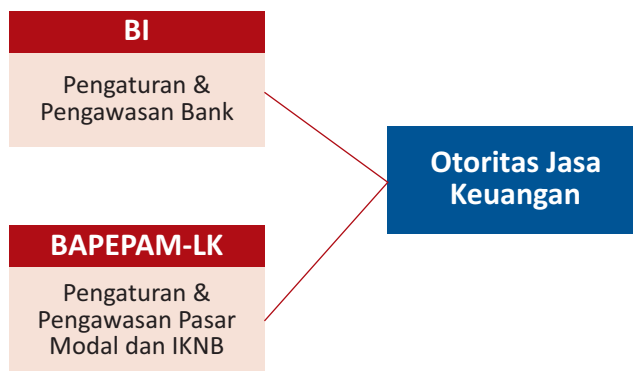
Adanya OJK menjadikan otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana

pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) ke OJK. Demikian pula, otoritas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa OJK adalah lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan yang diatur dan diawasinya adalah perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang terdiri atas asuransi, dana pensiun dan lembaga pembiayaan.

### Pojok OJK

OJK dipimpin oleh Dewan Komisiner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisiner beranggotakan sembilan orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. **Muliaman D. Hadad** merupakan Ketua Dewan Komisiner OJK pertama.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 2.4 Migrasi Tugas BI dan BAPEPAM-LK ke OJK**

## 2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Berdasarkan pengertian OJK yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Anda, bagaimana sesungguhnya fungsi, tugas dan wewenang OJK? OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terpadu terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Adapun tujuan dibentuknya OJK adalah sebagai berikut:

- Kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan fungsi dan tujuan di atas, OJK memiliki tiga tugas utama, yaitu: *pertama*, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; *kedua*, tugas

pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; *ketiga*, tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Khusus terkait dengan pengawasan bank, tugas OJK meliputi empat hal sebagai berikut:

- a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank;
- c. Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian bank; serta
- d. Pemeriksaan bank.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam Undang-Undang OJK merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank meliputi; perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- b. Wewenang yang berhubungan dengan tugas pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank meliputi; likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pengujian kredit (*credit testing*); dan standar akuntansi bank.
- c. Wewenang yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan aspek kehati-hatian bank meliputi; manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; serta pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
- d. Wewenang untuk melakukan pemeriksaan bank.

Khusus terkait dengan tugas pengaturan industri jasa keuangan, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

#### Pojok Bank Sentral



Bank Indonesia melaksanakan kebijakan makroprudensial sedangkan OJK melaksanakan kebijakan mikroprudensial. Kebijakan makroprudensial secara umum adalah kebijakan untuk membatasi risiko dan biaya krisis sistemik dalam rangka memelihara keseimbangan sistem keuangan secara keseluruhan.



- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Adapun khusus terkait dengan tugas pengawasan industri jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
  - 1) izin usaha;
  - 2) izin orang perseorangan;
  - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - 4) surat tanda terdaftar;
  - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;

## Pojok OJK

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindak pidana yang dimaksud adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanaan; cukai; perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

## Pojok OJK

LPS adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan nasabah bank syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah.

## Forum OJK

Salah satu jenis Koperasi menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dilihat dari kegiatannya, KSP terdiri atas simpanan dan pinjaman, dengan demikian KSP melakukan aktivitas sebagai lembaga keuangan nonbank. Menurut Anda, apakah keberadaan KSP perlu diatur dan diawasi oleh OJK atau cukup oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)? Kumpulkan informasi dari sumber yang relevan termasuk dari internet, diskusikan dan buat simpulannya!

- 6) pengesahan;
- 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8) penetapan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan, fungsi dan tugas OJK dapat disederhanakan dalam Tabel 2.4 berikut ini:

**Tabel 2.4**  
**Tujuan, Fungsi dan Tugas OJK**

Tujuan	Fungsi	Tugas
1. Agar kegiatan jasa keuangan di sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Agar mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. 3. Agar mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.	Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.	1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lain.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK berkoordinasi dengan otoritas lain, yaitu Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Jika bank bermasalah dalam kesehatannya, OJK memberikan informasi kepada LPS. LPS juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya melalui koordinasi dengan OJK. Demikian pula apabila bank mengalami kesulitan likuiditas atau kesehatan bank memburuk, OJK menginformasikan bank tersebut ke Bank Indonesia agar melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dengan kewenangannya.

Koordinasi OJK dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan, antara lain meliputi:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, atau kegiatan usaha bank lain;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

### Uji Kompetensi

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan dalam mensyukuri karunia Tuhan YME sumber daya alam yang melimpah!
2. Tugas mengatur dan mengawasi bank sudah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Namun, wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang sebagai instrumen kegiatan bank masih berada di Bank Indonesia sehingga operasionalisasi perbankan memiliki dua garis koordinasi yakni ke BI dan OJK. Menurut Anda, apa dampak dari kondisi tersebut terhadap perkembangan usaha perbankan!
3. Menurut Anda, upaya apa saja yang harus dilakukan agar masyarakat dapat semakin mengetahui dan memahami peran dan fungsi OJK!
4. Jelaskan pengertian Otoritas Jasa Keuangan (OJK)!
5. Jelaskan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengembangkan industri jasa keuangan di Indonesia!
6. Jelaskan tugas OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011!
7. Jelaskan wewenang OJK, khususnya terkait dengan tugas pengaturan industri jasa keuangan!
8. Bagaimana pendapat Anda tentang dialihkannya tugas pengaturan dan pengawasan bank dari Bank Indonesia kepada OJK!
9. Buatlah peta konsep tentang peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengatur dan mengawasi perbankan, IKNB dan pasar modal!

### SIMPULAN (SUMMARY)

- Lembaga keuangan adalah badan usaha yang berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan terdiri atas bank dan LKNB.
- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif.
- Undang-Undang Bank Indonesia menjelaskan bahwa tujuan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.
- Tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia terdiri atas a) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b) mengatur dan menjaga kelancaran

- sistem pembayaran; dan c) mengatur dan mengawasi bank. Tugas mengatur dan mengawasi bank dialihkan kepada OJK.
- OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.
  - Bank Indonesia melaksanakan kebijakan makroprudensial, sedangkan OJK melaksanakan kebijakan mikroprudensial.
  - Hubungannya dengan lembaga keuangan, Bank Indonesia berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, sedangkan OJK berperan dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan, pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

### REFLEKSI (REFLECTION)

Apakah *learning goals* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk internet. Di antaranya Anda dapat mengunjungi *website* Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan *website* OJK [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke kantor Bank Indonesia.

## GLOSARIUM (*Glossary*)

- Akad : Kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.
- Asuransi : Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.
- Anjak Piutang : Badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
- Bank : Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- Bank Umum : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- BPR : Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- Bank Konvensional : Bank yang dalam menjalankan usahanya berbasis pada perhitungan bunga.
- Bank Syariah : Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Sentral	:	Sebuah bank tempat bank-bank lain menaruh dana (rekening) dan mempergunakan dana tersebut untuk penyelesaian akhir ( <i>settlement</i> ) dari transaksi antarbank.
Bank Indonesia	:	Bank Sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.
Bank Garansi	:	Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajiban.
<i>Banknotes</i>	:	Uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di negara penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia).
<i>Bancassurance</i>	:	Layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.
Cek	:	Surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Dikeluarkan oleh bank apabila penabung mempunyai rekening Giro.
<i>Credit card</i>	:	Merupakan alat pembayaran dengan cara kredit, dimana seseorang dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa menggunakan uang <i>cash</i> .
Dana Pensiun	:	Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.
<i>Debit card</i>	:	Merupakan sejenis kartu plastik yang dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai.
Deposito	:	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Deposito Berjangka	:	Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu
Giro	:	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
<i>Go Public</i>	:	Menjual sebagian sahamnya ke publik/masyarakat luas dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Inkaso	:	Jasa yang diberikan bank atas permintaan nasabah untuk menagihkan pembayaran surat-surat atau dokumen berharga kepada pihak ketiga.
Kartu ATM	:	Merupakan sejenis kartu plastik yang dapat digunakan untuk menarik uang tunai melalui ATM.
Kredit	:	Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Kliring	:	Penyelesaian utang piutang antar bank.
<i>Letter of Credit (L/C)</i>	:	Sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut.
Koperasi Simpan Pinjam (KSP)	:	Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.
Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)	:	Semua badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, untuk usaha produktif.
Modal Ventura	:	Badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.
<i>Money Changer</i>	:	Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin menjual atau membeli mata uang asing tertentu, yang mempunyai catatan kurs pada Bank Indonesia.
Gadai	:	Kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.



Referensi Bank	:	Keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Bank atas permintaan nasabah untuk tujuan tertentu dan bersifat tidak mengikat, tidak menjanjikan dan tidak memberikan jaminan.
Sewa guna usaha ( <i>leasing</i> )	:	Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ( <i>finance lease</i> ) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ( <i>operating lease</i> ) untuk digunakan oleh <i>lease</i> selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Sertifikat deposito	:	Simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dengan jangka waktu 1,3, 6 dan 12 bulan.
<i>Safe Deposit Box</i> (SDB)	:	Jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya.
Tabungan	:	Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Transfer (Kiriman Dana)	:	Jasa yang diberikan bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada penerima, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing.
<i>Traveller's Cheque/TC</i> (Cek Pelawat)	:	Cek yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank yang berwenang dalam bentuk pecahan tertentu untuk dipergunakan dalam perjalanan di dalam maupun di luar negeri.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	:	Lembaga negara yang independen yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia

## PENILAIAN

### 1. Test Tulis:

Dalam bentuk objektif dan uraian: untuk menilai kemampuan kognitif materi tentang bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan OJK.

### 2. Unjuk Kerja:

Menilai kemampuan mendemonstrasikan fungsi dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan OJK.

### 3. Penilaian Produk:

Menilai laporan dan bahan presentasi siswa tentang peran dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan OJK.

## PENUGASAN

### 1. Tugas Terstruktur

- Buatlah kepanitiaan untuk berkunjung langsung ke tempat yang berhubungan dengan tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral RI, yakni:
  - a. Gedung Bank Indonesia (baik BI Pusat di Jakarta maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Daerah).
  - b. Museum Bank Indonesia di Jakarta.
- Diskusikan rencana kunjungan bersama guru bidang studi dan pimpinan sekolah
- Koordinasilah dengan Humas Bank Indonesia dan Museum Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kunjungan, menentukan kepastian tanggal dan jumlah peserta yang akan berkunjung.
- Setelah kunjungan dilakukan, buat laporan hasil kunjungan per kelompok (satu kelompok 5-7 siswa) dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Cover
  - b. Kata Pengantar
  - c. Daftar Isi

- d. BAB I Pendahuluan (Latar Belakang Kegiatan, Tujuan dan Manfaat Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Kepesertaan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan)
  - e. BAB II Deskripsi Hasil Kunjungan (Gambaran Umum Profil Kelembagaan (sejarah, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi pengelola dan sarana/fasilitas), Produk, dan Program-program Objek Kunjungan)
  - f. BAB III Simpulan dan Saran
  - g. Lampiran (foto-foto kegiatan)
- Laporan kelompok kumpulkan maksimal seminggu sebelum pelaksanaan UAS.

## 2. Tugas Mandiri

- Buatlah kelompok belajar dengan anggota kelompok 4-5 siswa
- Buatlah rencana kunjungan ke bank terdekat secara mandiri dengan waktu dan pilihan bank ditentukan oleh kesepakatan kelompok.
- Seminggu menjelang kunjungan dilakukan, mintalah surat pengantar kepada pimpinan sekolah dengan dibantu oleh guru bidang studi ekonomi.
- Buatlah pedoman wawancara untuk menggali hal-hal sebagai berikut:
  - a. Sejarah berdiri
  - b. Struktur organisasi pengelola bank
  - c. Nama-nama produk penghimpunan
  - d. Nama-nama produk penyaluran/kredit/pembiayaan
  - e. Peran bank tersebut dalam pembangunan ekonomi di daerah
- Buat laporan hasil kunjungan dan kumpulkan kepada guru bidang studi

## Cara Mengembangkan Disiplin Diri

### 1. Pengetahuan Diri

Disiplin berarti berperilaku sesuai dengan apa yang Anda telah putuskan, terlepas dari apa yang Anda rasakan pada saat ini. Oleh karena sifat pertama disiplin adalah pengetahuan diri, Anda perlu memutuskan apa perilaku terbaik yang mencerminkan tujuan dan nilai-nilai. Proses ini memerlukan introspeksi dan analisis-diri, dan yang paling efektif sediakanlah waktu untuk menulis tujuan, mimpi, dan ambisi Anda. Bahkan tuliskan sebuah pernyataan misi pribadi. Misalnya dengan kata “saya melakukan hal ini agar bisa membahagiakan keluarga saya” ini akan bisa memberi Anda pemahaman yang lebih besar tentang siapa anda, apa yang akan anda fokuskan, dan apa yang anda harus hargai.

### 2. Kesadaran

Disiplin diri tergantung pada kesadaran apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk Anda lakukan. Pikirkan tentang hal ini. Jika Anda tidak menyadari perilaku Anda tidak disiplin, bagaimana Anda tahu apa tindakan Anda selanjutnya? Ketika Anda mulai membangun disiplin diri, Anda mungkin mendapati diri Anda berada dalam tindakan yang tidak disiplin. Misalnya bermain *game*, menghindari hal-hal penting, dan menonton televisi terus-menerus. Mengembangkan disiplin diri membutuhkan waktu, dan kuncinya adalah Anda menyadari perilaku tidak disiplin Anda. Dengan cara ini memberi Anda kesempatan untuk membuat keputusan yang lebih baik sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai.

### 3. Komitmen

Tidaklah cukup hanya menulis tujuan dan nilai-nilai. Anda harus membuat komitmen internal untuk hal itu. Misalnya ketika jam alarm Anda berbunyi pada jam 5 pagi namun Anda menekan tombol snooze untuk bisa tidur 5 menit lagi atau ketika antusiasme Anda telah mulai memudar.

Jika Anda berjuang dengan komitmen, mulailah dengan membuat keputusan sadar untuk menindaklanjuti apa yang Anda katakan, akan Anda lakukan, baik ketika Anda mengatakan Anda akan melakukannya dan bagaimana melakukannya.

### 4. Keberanian

Jangan salah, disiplin diri seringkali sangat sulit. Suasana hati, selera, dan gairah dapat menjadi kekuatan besar untuk melawannya. Oleh karena itu, disiplin diri sangat bergantung pada keberanian. Jangan berpura-pura mengatakan ini adalah hal mudah untuk dilakukan namun sebenarnya sangat sulit atau menyakitkan. Sebaliknya, menemukan keberanian untuk menghadapi rasa sakit dan kesulitan ketika Anda mulai mengumpulkan kemenangan-kemenangan kecil, maka rasa percaya diri Anda akan tumbuh dan keberanian yang mendukung disiplin diri akan datang lebih alami.

### 5. Melatih diri

*Self-talk* (berbicara pada diri sendiri dalam hati) sering kali berbahaya, tetapi juga bisa sangat menguntungkan jika Anda mampu mengontrolnya. Jika Anda merasa Anda sedang diuji oleh Tuhan dengan kondisi, saya sarankan Anda berbicara pada diri sendiri, dengan memotivasi dan meyakinkan diri sendiri karena itu adalah bentuk *self-talk* yang memiliki kemampuan untuk mengingatkan tujuan Anda, membentuk keberanian, memperkuat komitmen dan membuat Anda sadar akan tugas dan peran Anda. Cobalah mengatakan dalam hati “tidak ada yang turun dari langit dengan cuma-cuma”. Semua butuh usaha dan doa atau Anda memiliki kalimat lain, dan ingatlah itu setiap kali Anda menemukan diri Anda sedang diuji. Ini dapat mengubah hidup Anda.

Emas yang paling bagus adalah emas yang suhu pembakarannya paling tinggi, untuk mendapatkan apa yang Anda ingin capai mungkin akan penuh dengan cobaan, baik itu datang dari diri Anda sendiri atau dari orang lain, namun disiplin membantu Anda menjadi emas dengan kualitas terbaik.

Sumber: <http://www.sitenar.com/cara-membentuk-disiplin-diri>

Halaman ini sengaja dikosongkan

A close-up photograph of a person's hand, wearing a brown leather watch, interacting with a black credit card payment terminal. The hand is pressing one of the buttons on the terminal's keypad. The terminal has a small screen at the top and a card slot. The background is blurred, showing a person in a red shirt.

# BAB 3

## SISTEM PEMBAYARAN DAN ALAT PEMBAYARAN

### KOMPETENSI INTI:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KOMPETENSI DASAR

1. Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran
2. Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
2. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi;
3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi;
4. Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran
5. Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran

## ALOKASI WAKTU

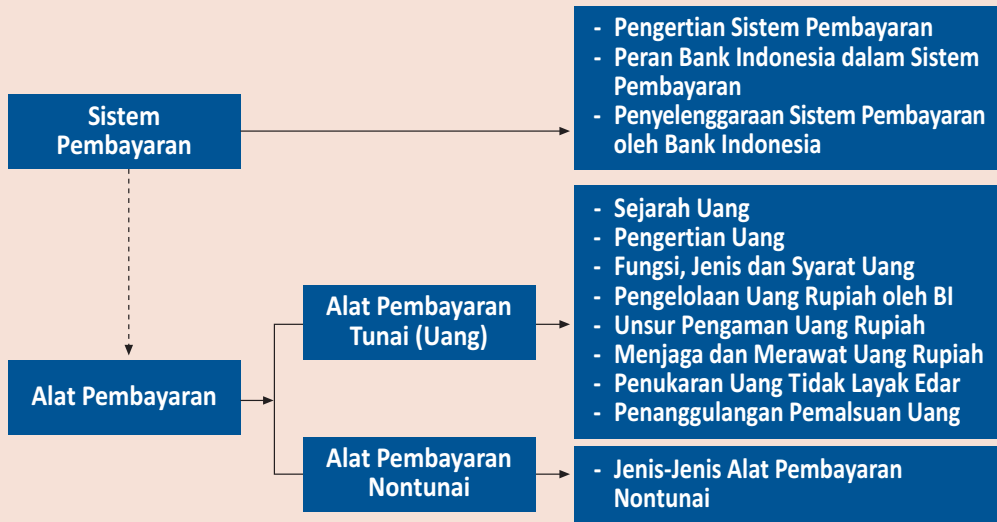
4 x 3 Jam Pelajaran (12 JP/ 4 pertemuan)

## PENDEKATAN DAN ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN:

1. Pendekatan Pembelajaran:
  - a. Pendekatan Belajar Sains (*observing, questioning, experimenting, associating, communicating*)
  - b. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
  - c. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/ CTL*)
2. Alternatif Model Pembelajaran:
  - a. *Jigsaw*
  - b. *Role Playing*
  - c. *Demonstration*
  - d. Model lain yang relevan



## PETA KONSEP (CONCEPT MAP)



## KATA KUNCI (KEY WORDS)

Uang, Sistem Pembayaran, Alat Pembayaran

Setiap hari Anda pasti selalu melakukan transaksi, seperti membayar ongkos angkutan umum, membeli bubur ayam untuk sarapan pagi, membeli minuman mineral pada saat istirahat, dan membeli Alat Tulis. Setiap Anda melakukan transaksi umumnya menggunakan alat pembayaran yang disebut dengan uang. Tahukan Anda sejak kapan uang digunakan sebagai alat pembayaran? Siapakah yang diberi hak untuk mencetak dan mengedarkan uang? Bisakah Anda membedakan antara uang asli dengan uang palsu? Uang kertas dan uang logam merupakan alat pembayaran tunai. Selain uang, kini berkembang alat pembayaran nontunai yakni Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) seperti kartu debit, kartu ATM, kartu kredit dan uang elektronik (*e-money*). Tahukan Anda apa bedanya kartu debit/kartu ATM dan kartu kredit? Apa yang dimaksud dengan uang elektronik?

Pada bab ini Anda akan mendapatkan penjelasan tentang sistem dan alat pembayaran, baik alat pembayaran tunai (uang) maupun nontunai.

## A. SISTEM PEMBAYARAN

### 1. Pengertian Sistem Pembayaran

Salah satu tugas bank sentral sebagaimana sudah dijelaskan pada Bab 2, khususnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tahukah Anda apa itu sistem pembayaran? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Kelancaran sistem pembayaran dalam suatu perekonomian akan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia.

Berdasarkan alat yang digunakan dalam sistem pembayaran, secara umum alat pembayaran dapat terbagi atas:

- a. Alat pembayaran tunai, yaitu pembayaran yang menggunakan uang kartal/uang tunai yang meliputi Uang Kertas (UK) dan Uang Logam (UL).
- b. Alat pembayaran nontunai, yaitu pembayaran yang menggunakan berbagai media atau instrumen selain uang tunai, seperti kartu kredit, ATM, kartu debit, dan uang elektronik.

#### Pojok Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran berkaitan dengan proses perpindahan nilai antara dua pihak (pembeli dan penjual) yang secara bersamaan terjadi pula perpindahan barang dan jasa secara berlawanan.

#### VALUES EXPLORER

Kalau Anda harus bekerja, maka bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang  
(Robert T. Kiyosaki)

### 2. Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Bank Indonesia bahwa Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan, mengatur, melaksanakan, memberi persetujuan, perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Untuk lebih jelasnya perhatikan Bagan 3.1 berikut ini:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 3.1**  
**Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran**

Berdasarkan Bagan 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa terdapat lima peranan Bank Indonesia dalam sistem pembayaran yakni sebagai berikut:

**a. Regulator**

Bank Indonesia berperan dalam membuat peraturan-peraturan yang mendukung kelancaran sistem pembayaran. Contohnya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana dan Surat Edaran (SE) Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana yang diantaranya menegaskan bahwa penyelenggaraan transfer dana harus Badan Hukum Indonesia.

**b. Perizinan**

Bank Indonesia berperan dalam memberikan izin terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pembayaran. Seperti izin terhadap lembaga yang akan melakukan kegiatan transfer dana, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik.

**c. Pengawasan**

Agar kegiatan pembayaran berjalan dengan baik, maka Bank Indonesia perlu melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap proses pembayaran maupun terhadap aktivitas para pelaku yang terlibat dalam sistem pembayaran. Dalam menjalankan fungsi pengawasan sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang

**Forum Sistem Pembayaran**

Menurut Anda, apa saja kelebihan dan kekurangan dari sistem pembayaran tunai dan nontunai! Cari informasi dari sumber yang relevan, termasuk dari internet, diskusikan dan buat simpulannya!

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pembayaran, melalui kegiatan monitoring (pemantauan) penilaian dan melakukan upaya yang mendorong penyelenggaraan Sistem Pembayaran ke arah yang lebih baik.

#### d. Operator

Bank Indonesia menyediakan layanan sistem pembayaran yakni Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, mulai 31 Mei 2013 batas nilai nominal transfer kredit yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI mengalami peningkatan menjadi maksimal Rp500.000.000,00 Adapun untuk Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS), BI menyediakan layanan sarana penatausahaan dan setelmen surat berharga.

#### e. Fasilitator

Agar penyelenggaraan sistem pembayaran semakin aman dan efisien, maka Bank Indonesia memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran oleh industri yang bergerak dalam bidang jasa keuangan.

Selain melaksanakan peran sebagaimana digambarkan dalam Bagan 3.1 di atas, Bank Indonesia juga melakukan transaksi-transaksi seperti operasi pasar terbuka, menyelesaikan tagihan-tagihan, serta transaksi yang terkait dengan rekening Pemerintah dan lembaga keuangan internasional yang ada di Bank Indonesia. Bank Indonesia juga berperan sebagai pengguna dan sebagai anggota sistem pembayaran.

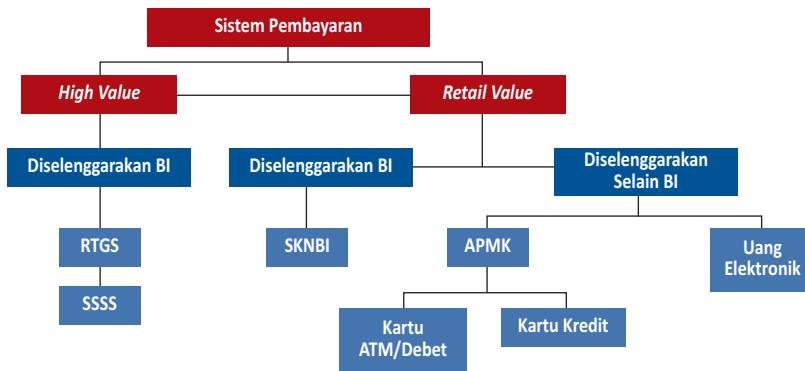
### 3. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia

Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia dilakukan dengan dua cara yakni; *Pertama*, transaksi yang bernilai besar (*high value*) diselenggarakan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia *Real Times Gross Settlement* (BI-RTGS) dan Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS); *Kedua*, transaksi yang bernilai kecil (*retail value*) diselenggarakan dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Untuk lebih jelasnya perhatikan Bagan 3.2 sebagai berikut:

#### Pojok Sistem Pembayaran

BI berperan sebagai penyelenggara kegiatan penyelesaian transaksi-transaksi (*settlement*) melalui tiga sistem yang utama, yaitu:

1. Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS)
2. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)
3. Bank Indonesia *Scripless Securities Settlement System* (BI-SSSS)



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 3.2**  
**Penyelenggaraan Sistem Pembayaran**

Berdasarkan Bagan 3.2 di atas, dapat diketahui bahwa penyelenggaraan transaksi oleh Bank Indonesia terdiri atas BI-RTGS, BI-SSSS dan SKNBI. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut:

#### a. Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*.

Transaksi pembayaran bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran suatu negara. Berjalannya kegiatan pasar uang dan pasar modal yang aman dan efisien bergantung kepada kelancaran sistem pembayaran yang bernilai besar. Sistem pembayaran bernilai besar yang digunakan oleh banyak negara termasuk Indonesia adalah *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi. Sistem BI-RTGS pertama kali digunakan pada tanggal 17 November 2000. Sistem BI-RTGS mampu menjadi sumber informasi yang sangat bermanfaat, baik dalam rangka pengawasan bank maupun pelaksanaan kebijakan moneter. Pengembangan sistem BI-RTGS antara lain bertujuan:

- 1) Menyediakan sarana transfer dana antarbank yang lebih cepat, efisien, andal, dan aman kepada bank dan nasabahnya.
- 2) Memberikan kepastian setelmen dan penatausahaan dapat diperoleh dengan segera.
- 3) Menyediakan informasi rekening bank secara *real time* dan menyeluruh.
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya.
- 5) Mengurangi risiko-risiko setelmen dan penatausahaan.

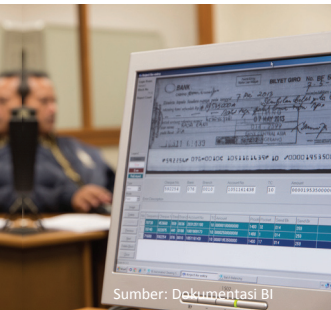
#### Pojok Sistem Pembayaran

Tips bagi Anda dalam bertransaksi melalui sistem BI-RTGS

1. Agar perintah transfer dana BI-RTGS dapat diterima pada hari yang sama, sebaiknya Anda mendatangi bank lebih awal. Jika perintah dana BI-RTGS melalui *internet banking* atau sarana elektronik lainnya, teliti jam layanan atau tanyakan terlebih dahulu ke *Call Center*.
2. Isilah formulir transfer dana BI-RTGS dengan lengkap dan benar, karena kekeliruan dalam pengisian data dapat menyebabkan terlambatnya dana diterima oleh Nasabah Penerima.

#### Pojok Sistem Pembayaran

- *Real Time* atau waktu nyata adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggang waktu (*deadline*) yang jelas. ([www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))
- Sistem *Real Time* adalah suatu sistem yang memberikan informasi suatu keadaan dimana informasi yang ditampilkan pada sisi penerima sesuai dan sama dengan sisi yang diamati baik dalam waktu maupun keadaannya. ([www.digilib.itelkom.ac.id](http://www.digilib.itelkom.ac.id))



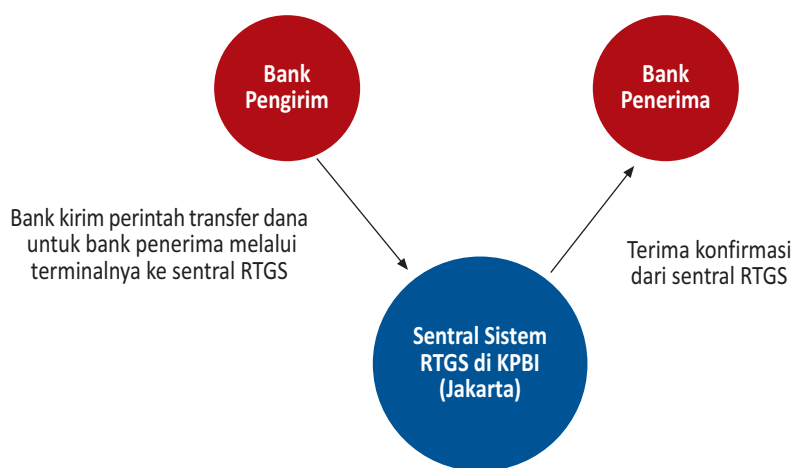
Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.1**  
Sentral Sistem BI-RTGS

Tersedianya sistem BI-RTGS dapat mendorong bank untuk menjalankan manajemen likuiditas secara lebih baik. Dengan sistem setelmen/penatausahaan yang didasarkan pada kecukupan saldo rekening bank di Bank Indonesia, risiko kemungkinan kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dapat dihindari, sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik terhadap bank lainnya. Dampak sistemik terjadi jika permasalahan yang terjadi dalam suatu bank mengakibatkan dampak buruk bagi bank lain yang memiliki keterkaitan usaha dengan bank tersebut. Contohnya jika bank X mengalami kepailitan usaha, maka bank Y, bank N, bank M dan bank-bank lainnya terhambat likuiditasnya sehubungan aktivitas usahanya memiliki keterkaitan dengan aktivitas usaha bank X yang mengalami masalah.

Penyelenggara sistem BI-RTGS adalah Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI). Penyelenggara bertugas melakukan pengendalian sistem terhadap semua aktivitas kegiatan transfer dana yang dilakukan peserta, sedangkan peserta sistem BI-RTGS adalah seluruh bank umum di Indonesia. Lembaga-lembaga selain bank yang memiliki rekening giro di Bank Indonesia dapat menjadi peserta sistem BI-RTGS dengan persetujuan Bank Indonesia, untuk memperlancar sistem pembayaran nasional. Kantor Pusat Bank Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri secara otomatis menjadi peserta sistem BI-RTGS.

Secara sederhana, alur penyelenggaraan transaksi nontunai melalui BI-RTGS dapat dilihat dalam Bagan 3.3 sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 3.3**  
Alur Transaksi dengan Menggunakan BI-RTGS

### Pojok Sistem Pembayaran

Bank Indonesia melaksanakan transaksi RTGS dengan periode waktu yang seragam untuk 3 zona waktu di Indonesia (untuk kepentingan nasabah saat ini dibatasi mulai pukul 06.30-16.30 WIB). Adapun jam pelayanan pada masing-masing bank bergantung kondisi dan standar bank masing-masing.

BI-RTGS dapat membantu untuk melakukan cek saldo kecukupan pengirim. Jika cukup, dana langsung dipindahkan dari rekening peserta pengirim ke rekening peserta penerima. Jika tidak cukup, transaksi akan ditempatkan pada antrian dan tidak diproses sampai dananya mencukupi.

### b. Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*

Selain sistem BI-RTGS, Bank Indonesia memiliki sebuah sarana khusus untuk mencatat dan menatausahakan transaksi surat berharga secara elektronik yang dikenal dengan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. BI-SSSS adalah sarana transaksi Bank Indonesia untuk setelmen dan penatausahaan surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara, dan sistem BI-RTGS.

Penatausahaan surat berharga meliputi kegiatan pencatatan kepemilikan, melakukan kliring dan setelmen serta pembayaran bunga atau imbalan dan nilai pokok/nominal surat berharga. Transaksi BI-SSSS, meliputi antara lain transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT), pemberian Fasilitas Pendanaan dari Bank Indonesia kepada bank umum dan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama Pemerintah. Pihak-pihak yang dapat menjadi peserta BI-SSSS adalah:

- 1) Bank Indonesia.
- 2) Kementerian Keuangan.
- 3) Bank.
- 4) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- 5) Perusahaan Pialang Pasar Uang Rupiah dan Valuta Asing.
- 6) Perusahaan Efek.
- 7) Pialang Pasar Modal.
- 8) Lembaga lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

#### VALUES EXPLORER

Belajarlah dari masa lalu, hiduplah untuk masa depan. Yang terpenting adalah tidak berhenti bertanya (Albert Einstein)

### c. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Jika sistem pembayaran yang bernilai besar merupakan urat nadi sistem pembayaran, sistem pembayaran yang bernilai kecil diibaratkan sebagai jaringan pembuluh darah yang menghubungkan seluruh perekonomian suatu negara. Sistem kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta, yang perhitungannya

#### Pojok Sistem Pembayaran

Kegiatan transaksi Bank Indonesia yang menggunakan BI-SSSS mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan operasi pasar terbuka (OPT)
2. Pemberian fasilitas pendanaan Bank Indonesia kepada bank, dan
3. Pelaksanaan transaksi Surat Berharga Negara (SBN) untuk dan atas nama Pemerintah

Sumber : Bank Indonesia

#### Pojok Sistem Pembayaran

Untuk meningkatkan layanan transfer dana antarbank melalui SKNBI yang lebih cepat, sejak 7 Januari 2011 Bank Indonesia telah menerapkan empat siklus setelmen transfer dana melalui kliring kredit setiap dua jam sekali, yaitu pada 10.00 WIB, 12.00 WIB, 14.00 WIB, dan 16.00 WIB.





Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.2**  
Penyelenggaraan Sistem Kliring

diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi kliring yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Transfer debit (menggunakan cek, bilyet giro, atau warkat debit lainnya).
- 2) Transfer kredit (mengisi formulir isian yang disediakan oleh bank) yang kemudian akan dikirim oleh bank melalui data keuangan elektronik yang disediakan dalam SKNBI.

Untuk transfer kredit, batas nilai nominal yang dapat dikliringkan melalui kliring kredit dalam penyelenggaraan SKNBI maksimal adalah Rp500.000.000,00 Adapun manfaat layanan SKNBI, di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelayanan yang cepat, rasa aman dalam bertransaksi dan biaya relatif murah.
- 2) Mendapat alternatif pelayanan jasa transfer dana yang kompetitif.

Adapun penyelenggara SKNBI dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelenggara Kliring Nasional (PKN), yaitu Unit Kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional.
- 2) Penyelenggara Kliring Lokal (PKL), yaitu unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu wilayah kliring tertentu.

Setiap bank dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu wilayah kliring, kecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Kantor Bank yang akan menjadi peserta wajib menyediakan perangkat kliring, antara lain meliputi perangkat terminal pusat kliring dan jaringan komunikasi data untuk menjamin kelancaran kepada nasabah dalam bertransaksi.

Dalam pelaksanaannya, bank wajib mencantumkan biaya kliring, baik biaya yang dikenakan Bank Indonesia kepada bank maupun biaya yang dikenakan bank kepada nasabah, pada lokasi yang dapat dibaca dengan jelas oleh nasabah/masyarakat. Besarnya biaya kliring yang dikenakan bank kepada nasabah/masyarakat sesuai ketentuan masing-masing bank.

### Forum Sistem Pembayaran

Jika terjadi permasalahan dalam melakukan transaksi dengan perangkat BI-RTGS dan SKNBI, bagaimana prosedur penyelesaiannya? Cari referensi yang relevan termasuk dari internet, analisis, diskusikan, dan buat simpulannya!

## VALUES EXPLORER

Waktu terus berjalan, belajarlah dari masa lalu, bersiaplah untuk masa depan, berikanlah yang terbaik untuk hari ini.

### Uji Kompetensi

1. Jelaskan yang dimaksud dengan sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia?
2. Peran apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam mendukung kelancaran sistem pembayaran!
3. Jelaskan perbedaan antara BI-RTGS dan SKNBI!
4. Manfaat apa saja yang dapat dirasakan dari layanan SKNBI!
5. Gambarkan dan jelaskan alur transaksi dengan menggunakan BI-RTGS!
6. Jelaskan perbedaan antara Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) dengan Penyelenggara Kliring Lokal (PKL)!

## B. UANG

### 1. Sejarah Uang

Tahukah Anda sejak kapan uang digunakan sebagai alat pembayaran? Dari pertanyaan tersebut Anda akan dihadapkan pada persoalan kapan, siapa, dan bagaimana perkembangan uang. Uang dikenal pertama kali di negeri Cina lebih kurang 2700 SM oleh Huang (Kaisar Kuning). Namun, sejarah purba juga telah mencatat bahwa orang Assyria, Phunisia, dan Mesir juga telah menggunakan uang sebagai alat tukar. Cikal bakal uang diawali dengan kegiatan tukar menukar barang atau disebut dengan istilah **barter**. Tetapi seiring dengan semakin banyaknya kebutuhan manusia, maka barter mulai mengalami kesulitan. Di antara faktor yang menyebabkan sulitnya barter, di antaranya adalah:

- a) Kesulitan untuk menemukan orang yang memiliki barang yang dibutuhkan dan mau menukarkan barangnya.
- b) Tidak adanya standar nilai untuk dipertukarkan.

Dengan kesulitan tersebut di atas, akhirnya cara barter pun ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain untuk dipergunakan dalam proses pertukaran. Setidaknya terdapat beberapa syarat agar sebuah benda dapat digunakan sebagai uang, yakni; (1) dapat diterima; (2) setiap waktu dapat ditukar dengan barang apa saja; (3) sulit mendapatkannya.



Sumber: Dokumentasi BI

Gambar 3.3. Uang Kertas

Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran berupa kulit binatang, kerang dari laut dan benda-benda yang memiliki syarat di atas. Benda itu kemudian disebut uang barang. Uang barang tidak dapat terus dipergunakan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut disebabkan karena ada kesulitan dalam ukuran, berat dan bentuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, orang mulai mencari benda/logam yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak mudah rusak.
- 2) Diterima oleh umum.
- 3) Mudah disimpan dan mudah dibawa-bawa.
- 4) Harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil.
- 5) Sifatnya sama dan dapat saling mengganti.
- 6) Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai.
- 7) Harganya tetap dalam jangka waktu panjang.

Berdasarkan persyaratan di atas, alternatif benda yang dijadikan alat tukar adalah emas dan perak. Misalnya mata uang India, Rupee yang artinya perak atau mata uang Belanda, Gulden yang artinya emas. Uang emas dan perak tersebut dinamakan uang logam dan disebut *full bodied money* yang mengandung arti bahwa nilai uang tersebut dijamin penuh (100%) oleh *body*-nya, artinya antara nilai nominal dan nilai bahan sama.

Dalam perkembangannya, sehubungan dengan terbatasnya jumlah logam, orang mencari benda lain untuk dijadikan uang. Akhirnya, dibuatlah uang dari bahan kertas, hal tersebut karena beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Jumlahnya dapat memadai sesuai dengan kebutuhan
- 2) Biaya pembuatannya tidak terlalu mahal.
- 3) Mudah disimpan dan dibawa-bawa.
- 4) Penerimaan uang kertas oleh masyarakat diantaranya karena adanya kepercayaan.

#### Forum Sistem Pembayaran Tunai

Cari informasi dari sumber yang relevan, termasuk internet, tentang sejarah penggunaan uang di Indonesia, diskusikan, dan buat simpulannya!

## VALUES EXPLORER

Persahabatan itu seperti uang, lebih mudah dicari daripada dipertahankan  
(Samuel Butler)

## 2. Pengertian Uang

Melalui penjelasan sebelumnya, Anda sudah mengetahui bahwa uang dapat diartikan sebagai segala benda yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Salah satu definisi mengenai uang diungkapkan oleh Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer dan Richard Startz dalam bukunya *Macroeconomics* (1998) bahwa uang adalah instrumen pembayaran atau media yang digunakan dalam pertukaran. Batasan mengenai uang yang lebih kongkrit dijelaskan dalam buku saku Bank Sentral Amerika (*Federal Reserve*) yang mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai media pertukaran, standar nilai atau sarana untuk menabung atau menyimpan daya beli.

Dengan demikian, uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran sah dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan. Agar masyarakat menerima dan menyetujui penggunaan benda sebagai uang, maka harus memenuhi dua persyaratan sebagai berikut:

- a) Persyaratan psikologis, yaitu benda tersebut harus dapat memuaskan bermacam-macam keinginan dari orang yang memilikinya, sehingga semua orang mau mengakui dan menerimanya.
- b) Persyaratan teknis, yaitu syarat yang melekat pada uang, di antaranya:
  - 1) Tahan lama dan tidak mudah rusak
  - 2) Mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai.
  - 3) Mudah disimpan dan dibawa.
  - 4) Nilainya relatif stabil.
  - 5) Jumlahnya tidak berlebihan.
  - 6) Terdiri atas berbagai nilai nominal.
  - 7) Harganya tetap dalam jangka panjang

## VALUES EXPLORER

Orang miskin dan kelas menengah bekerja untuk uang, orang kaya mempunyai uang yang bekerja untuk mereka (Robert T. Kiyosaki)

### Forum Sistem Pembayaran Tunai

Menurut Anda, apa saja yang menjadi kelemahan dan kelebihan sistem barter? Mengapa manusia dahulu menggunakan sistem barter? Cari informasi pendukung dari sumber yang relevan, diskusikan dan buat simpulannya!

Ketika negara mengalami **defisit anggaran**, mengapa solusinya tidak dilakukan pencetakan uang baru? Cari informasi pendukung yang relevan, diskusikan, dan buat simpulannya!

### 3. Fungsi Uang

Fungsi uang dibagi atas dua jenis, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Fungsi Asli

Fungsi asli disebut juga fungsi primer dari uang. Fungsi asli ini terdiri atas:

- 1) Uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*)  
Uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan kepercayaan masyarakat, sehingga bersedia dan rela menerimanya.
- 2) Uang sebagai satuan hitung (*a unit of account*)  
Untuk menentukan harga suatu barang diperlukan satuan hitung. Dengan adanya uang, seseorang dapat mengadakan perbandingan harga satu barang dengan barang lain.

#### b. Fungsi Turunan

Fungsi turunan adalah fungsi uang sebagai akibat dari fungsi asli. Fungsi tersebut terdiri atas:

- 1) Uang sebagai alat pembayaran yang sah.  
Uang kartal adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, sedangkan uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Uang tersebut dapat digunakan sebagai alat pembayaran bagi masyarakat untuk melakukan transaksi. Contohnya untuk melakukan pembayaran angkutan umum, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran barang yang dibeli, pembayaran biaya sekolah, dan sebagainya.
- 2) Uang sebagai alat penyimpan kekayaan dan pemindah kekayaan.  
Masyarakat dapat menyimpan uang sebagai salah satu bentuk kekayaan. Selain itu, uang juga dapat digunakan sebagai alat pemindah kekayaan. Contohnya Bambang Suroso ingin membeli tanah, untuk mendapatkannya ia menjual mobil yang dimilikinya, uang hasil penjualan mobil ia belikan tanah. Kegiatan yang dilakukan Bambang Suroso menunjukkan uang berfungsi sebagai alat pemindah kekayaan.
- 3) Uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi.  
Uang yang beredar di masyarakat dapat mendorong daya beli, peningkatan daya beli mendorong permintaan terhadap

suatu barang di pasar. Tingginya permintaan dapat memicu produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Kejadian tersebut menunjukkan uang berfungsi sebagai pendorong kegiatan ekonomi.

4) Uang sebagai standar pencicilan utang.

Uang dapat berfungsi sebagai standar untuk melakukan pembayaran atas transaksi yang dilakukan secara kredit. Dengan kata lain, uang dapat digunakan untuk melakukan cicilan utang.

#### VALUES EXPLORER

Impian kita biasanya berada pada empat atau lima langkah di depan jangkauan pengetahuan dan pengalaman kita. Namun, melalui kerja keras, tekad yang membara, juga ikhtiar coba-coba, terkadang di sana kita mampu mencari cara untuk mencapai impian kita (Albert Einstein)

## 4. Jenis-Jenis Uang

Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral.

### a. Uang Kartal

Uang kartal adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran. Uang kartal berbentuk logam dan kertas yang benar-benar beredar sebagai alat pembayaran dalam masyarakat.

#### 1) Uang Logam

Berdasarkan sejarah perkembangannya, uang logam merupakan uang yang pertama dibuat. Menurut macamnya mata uang logam dibagi tiga macam:

##### a) Mata Uang Standar (*Full Bodied Money*)

Mata uang standar adalah mata uang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal uang sama dengan nilai intrinsiknya (bahannya). Contohnya uang logam emas atau perak.

##### b) Mata Uang Tandap (*Token Money*)

Mata uang tandap (bercap) adalah mata uang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal yang tidak sama dengan nilai intrinsiknya. Contohnya uang logam. Rp100 Rp200 atau Rp500.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.4. Uang Logam**

## 2) Uang Kertas

Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank dan bank memberikan surat bukti deposito. Uang kertas pada dasarnya surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu selalu dapat ditukar dengan emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan utang bank ini beredar sebagai uang. Saat ini uang kertas yang beredar disebut uang kepercayaan dan terdiri atas beberapa nilai pecahan, seperti Rp1.000, Rp2000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, hingga Rp100.000. Uang kertas dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan.

### b. Uang Giral (*Demand Deposit*)

Uang giral merupakan saldo rekening koran yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang yang sah, namun hanya berlaku pada kalangan tertentu saja. Contoh uang giral adalah cek dan bilyet giro (BG).

#### VALUES EXPLORER

Sedikit ketidaknyamanan dan kehati-hatian hari ini akan menyelamatkan banyak uang bagi Anda di kemudian hari (Michael LeBouf)

## 5. Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Sentral

Tahukah Anda, siapa yang bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah kita? Salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana sudah Anda ketahui melalui pembahasan Bab 2 adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Bank Indonesia adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran, baik tunai maupun nontunai. Sehubungan dengan kewenangan menetapkan uang sebagai

#### Forum Sistem Pembayaran Tunai

Mengapa pecahan uang kertas jumlahnya lebih banyak dibanding dengan uang logam? Cari informasi dari sumber yang relevan, diskusikan, dan buat simpulannya!

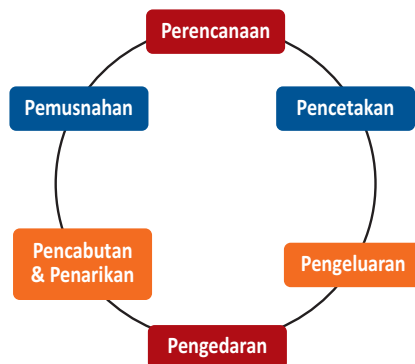


alat pembayaran tunai, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan uang rupiah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-Undang Mata Uang) pada Bab IV Pasal 11, kegiatan pengelolaan uang rupiah mencakup **perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan** dan **penarikan**, serta **pemusnahan** uang rupiah. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan uang rupiah tersebut, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengeluaran, pengedaran, serta pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran di masyarakat. Sementara itu, untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan uang lainnya yaitu perencanaan, pencetakan dan pemusnahan uang rupiah, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah.

Kegiatan pengelolaan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjaga ketersediaan uang rupiah sebagai alat pembayaran tunai di masyarakat. Untuk itu, agar uang rupiah tersedia di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tepat waktu serta dalam kondisi uang yang layak edar, maka kegiatan pengelolaan uang rupiah harus dilakukan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pojok Sistem Pembayaran Tunai	
Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.	



Sumber : Dokumentasi BI

**Bagan 3.4**  
**Tahapan Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia**

Berdasarkan Bagan 3.4 di atas dapat diketahui bahwa tahapan kegiatan pengelolaan uang rupiah adalah sebagai berikut:

**a. Perencanaan**

Perencanaan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan uang berdasarkan perkiraan kebutuhan uang rupiah dalam suatu periode

tertentu. Perencanaan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara jumlah uang yang beredar dengan kebutuhan uang di masyarakat. Jumlah uang yang berlebihan di masyarakat akan mendorong masyarakat untuk membelanjakan ataupun melakukan tindakan spekulatif yang akibatnya dapat memicu inflasi ataupun penurunan nilai tukar Rupiah. Sementara itu, apabila jumlah uang yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, akan menyebabkan terganggunya transaksi pembayaran masyarakat yang berdampak pada kegiatan perekonomian nasional.

Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat, mengganti uang rupiah yang sudah tidak layak edar serta menjaga kecukupan persediaan uang yang dimiliki, Bank Indonesia setiap tahunnya melakukan penyusunan perencanaan kebutuhan uang rupiah atau Estimasi Kebutuhan Uang (EKU). EKU merupakan proyeksi perhitungan kebutuhan tambahan uang rupiah dalam suatu periode tertentu yang meliputi jumlah dan komposisi pecahan uang rupiah. Penyusunan EKU ini kemudian digunakan oleh Bank Indonesia untuk menetapkan besarnya jumlah pengadaan bahan baku uang maupun jumlah uang rupiah yang akan dicetak atau Rencana Cetak Uang (RCU). Selain itu, EKU juga digunakan sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan pengiriman uang rupiah ke seluruh Kantor Bank Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Mata Uang, penyusunan EKU dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak atau RCU, dilakukan oleh Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tukar-menukar informasi yang antara lain terkait dengan asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kebutuhan uang. Selain itu, Bank Indonesia juga menyampaikan informasi mengenai rencana tentang macam dan harga Rupiah, proyeksi jumlah Rupiah yang perlu dicetak, serta jumlah Rupiah yang rusak dan yang ditarik dari peredaran.

## b. Pencetakan

Pencetakan uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mencetak uang rupiah yang dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan realisasi pencetakan uang. Tujuan pencetakan uang adalah agar Bank Indonesia mempunyai stok uang yang cukup dalam berbagai pecahan dengan kondisi layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pencetakan uang sendiri mempunyai fungsi yang penting untuk memperlancar pembayaran tunai dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah karena selalu tersedianya uang rupiah di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

### Pojok Sistem Pembayaran Tunai

**Redenominasi** adalah penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Adapun Redenominasi Rupiah adalah menyederhanakan denominasi (pecahan) mata uang rupiah menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi digit (angka nol) tanpa mengurangi nilai mata uang tersebut. Misalnya uang Rp1.000 menjadi Rp 1 dan uang Rp10.000 menjadi Rp10.

transaksi. Kegiatan pencetakan uang dilakukan untuk mendukung penerbitan uang rupiah emisi baru maupun pencetakan rutin tahunan terhadap pecahan uang rupiah yang telah beredar di masyarakat.

Jumlah uang yang akan dicetak pada suatu periode tertentu ditetapkan berdasarkan suatu rencana cetak uang atau RCU tahunan. RCU ini dihitung berdasarkan proyeksi kebutuhan uang yang diperoleh dari penyusunan EKU dan memuat rencana jumlah dan jenis pecahan uang, baik uang rupiah kertas maupun uang rupiah logam yang akan dicetak. Adapun untuk memenuhi kebutuhan pencetakan uang rupiah pada suatu periode tertentu, Bank Indonesia melaksanakan pengadaan bahan baku uang berupa kertas uang dan logam uang.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Mata Uang, pencetakan uang rupiah dilaksanakan di dalam negeri oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Saat ini, Perum Peruri merupakan satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang pencetakan uang rupiah. Pencetakan uang rupiah dilakukan oleh Perum Peruri sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dengan disertai kewajiban untuk selalu mengedepankan mutu, keamanan dan harga yang bersaing. Hasil cetak uang yang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan tersebut akan diedarkan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan hasil cetak uang yang tidak sesuai dengan spesifikasi akan dimusnahkan. Tambahan hasil cetak uang yang diperoleh melalui kegiatan pencetakan uang akan memperkuat persediaan uang yang dimiliki Bank Indonesia yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masyarakat.

### **c. Pengeluaran**

Pengeluaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengeluaran uang rupiah oleh Bank Indonesia dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu penerbitan uang rupiah emisi baru, penerbitan uang rupiah desain baru atau *up-grading* uang rupiah emisi lama, maupun dalam bentuk penerbitan uang rupiah khusus atau uang rupiah peringatan. Pengeluaran uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui suatu perencanaan yang matang dan komprehensif. Hal ini dilakukan agar uang yang diterbitkan memiliki mutu yang baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap uang tetap terjaga.

Pengeluaran uang rupiah baik uang rupiah emisi baru ataupun penerbitan uang rupiah khusus, dilakukan oleh Bank Indonesia

berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang mendasari pengeluaran uang rupiah emisi baru diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyederhanaan satuan hitung untuk memperlancar transaksi pembayaran tunai dengan menata kembali jenis pecahan yang ada, sehingga lebih praktis dan efisien, baik untuk penetapan harga, perhitungan maupun pencatatan.
- 2) Perkembangan faktor ekonomi, seperti tingkat inflasi dan perubahan nilai tukar, sehingga diperlukan nominal pecahan baru untuk memudahkan satuan hitung dalam transaksi pembayaran tunai.
- 3) Perubahan-perubahan pada uang, baik perubahan pada bahan uang maupun teknik cetaknya, yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas uang ataupun efisiensi dari sisi pengadaannya. Termasuk dalam pertimbangan ini diantaranya adalah tingkat pemalsuan uang rupiah yang semakin meningkat, sehingga membahayakan perekonomian nasional maupun kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah. Pertimbangan lainnya adalah kebijakan Bank Indonesia untuk melakukan perubahan baik terhadap ukuran, teknik cetak, unsur pengaman maupun desain uang agar kualitas uang menjadi lebih baik.

Sementara itu, pengeluaran uang rupiah khusus didasarkan pada pertimbangan untuk memperingati suatu kejadian tertentu yang bersifat monumental. Kejadian tertentu yang dapat dipertimbangkan bagi pengeluaran uang rupiah khusus adalah hari ulang tahun kemerdekaan NKRI yang telah mencapai kurun waktu tertentu. Selain itu, kejadian atau momentum lain yang dapat dipertimbangkan bagi penerbitan uang rupiah khusus adalah flora/fauna tertentu yang sangat menonjol, sehingga dapat meningkatkan citra Indonesia di mata internasional ataupun peringatan monumental lainnya seperti hari anak sedunia.

#### d. Pengedaran

Pengedaran uang rupiah merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan uang rupiah di wilayah NKRI. Kegiatan pengedaran uang terdiri dari pengiriman uang rupiah dan layanan kas yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan uang di masyarakat, Bank Indonesia melakukan pengiriman uang dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke setiap Kantor Bank Indonesia yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar seluruh Kantor Bank Indonesia memiliki persediaan uang yang cukup untuk melayani kebutuhan pembayaran, penukaran

#### Pojok Sistem Pembayaran Tunai

Masyarakat luas sering kali menganggap pengertian “redenominasi” sama dengan “sanering”. Padahal kedua istilah tersebut jauh berbeda. Titik berat dari perbedaan keduanya berada pada nilai mata uang dan daya belinya, dimana kebijakan redenominasi sama sekali tidak mengubah nilai mata uang dan daya belinya. Sementara itu, kebijakan sanering mengurangi nilai mata uang terhadap daya belinya atas suatu barang dan jasa.

dan penggantian uang rupiah selama jangka waktu tertentu. Dari Kantor Bank Indonesia inilah seluruh bank akan melakukan pengambilan, penyetoran dan penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya.

Agar kegiatan pengiriman uang dapat terlaksana secara efisien, efektif, cepat, tepat waktu dan sesuai dengan kebutuhan, maka pengiriman uang dilakukan berdasarkan suatu Rencana Distribusi Uang (RDU). RDU sendiri memuat rencana jumlah dan jenis pecahan uang yang akan dikirimkan dari Kantor Pusat Bank Indonesia ke seluruh Kantor Bank Indonesia. Adapun pelaksanaan pengiriman uang dilakukan selain dengan menggunakan armada transportasi milik Bank Indonesia, dilakukan juga melalui kerjasama dengan operator penyedia jasa transportasi baik darat, laut maupun udara.

Pengedaran uang rupiah melalui kegiatan layanan kas Bank Indonesia secara garis besar terdiri dari penerimaan setoran dari perbankan, pembayaran atas pengambilan uang perbankan, dan penukaran uang masyarakat. Keseluruhan layanan kas ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan uang dan menjaga agar uang rupiah yang beredar dalam kondisi layak edar.

#### e. Pencabutan dan Penarikan

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah atau menetapkan uang rupiah tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Tujuan dari pencabutan dan penarikan uang dari peredaran adalah untuk mencegah dan menekan peredaran uang rupiah palsu, serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan uang rupiah. Adapun dasar pertimbangan yang menentukan suatu pecahan tertentu harus dicabut dan ditarik dari peredaran diantaranya adalah tingginya tingkat pemalsuan terhadap jenis pecahan tersebut, dan pecahan dimaksud telah cukup lama beredar di masyarakat.

Pelaksanaan pencabutan dan penarikan uang rupiah dilakukan melalui suatu Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tidak akan dibayarkan kembali meskipun kondisinya masih layak edar dan akan dimusnahkan oleh Bank Indonesia. Untuk itu, masyarakat diberi kesempatan untuk menukarkan uang rupiah yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut selama sepuluh tahun sejak diumumkan.

Selama lima tahun pertama, masyarakat dapat melakukan penukaran di seluruh bank umum dan di seluruh Kantor Bank Indonesia. Selanjutnya, pada lima tahun berikutnya, masyarakat hanya

#### Forum Sistem Pembayaran Tunai

Apa saja yang membedakan antara redenominasi dengan sanering? Kebijakan manakah yang paling efektif? Setujukah Anda dengan kebijakan redenominasi Rupiah secara bertahap? Kumpulkan informasi dari sumber yang relevan, diskusikan, dan buat simpulannya!

dapat menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia. Setelah itu, hak masyarakat untuk memperoleh penggantian terhadap uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran tersebut tidak berlaku lagi.

#### **f. Pemusnahan**

Undang-Undang Mata Uang menyebutkan pemusnahan uang rupiah sebagai suatu rangkaian meracik, melebur atau cara lain memusnahkan uang rupiah, sehingga tidak lagi menyerupai uang rupiah. Kegiatan pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap uang rupiah kertas dan uang rupiah logam yang sudah tidak layak edar ataupun yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Uang rupiah dikategorikan sebagai uang tidak layak edar ketika uang tersebut dalam kondisi lusuh ataupun rusak (terpotong atau robek). Selain itu, uang hasil cetak tidak sempurna atau hasil cetak uang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, juga dikategorikan sebagai uang tidak layak edar, sehingga akan dimusnahkan. Kegiatan pemusnahan uang ini dilakukan secara rutin di seluruh Kantor Bank Indonesia. Uang rupiah kertas akan dimusnahkan dengan menggunakan mesin, sementara uang rupiah logam akan dimusnahkan melalui proses peleburan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mata Uang, pemusnahan uang rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia melalui koordinasi dengan Pemerintah. Jumlah dan nilai nominal pemusnahan uang rupiah yang dilakukan oleh Bank Indonesia selama tahun tertentu akan disampaikan kepada Pemerintah untuk ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

#### **VALUES EXPLORER**

Uang receh yang engkau jatuhkan ke dalam tangan-tangan yang rapuh yang terulur di hadapanmu adalah satu-satunya rantai emas yang mengikat hatimu yang mulia dengan hati Tuhan (Kahlil Gibran)

## **6. Unsur Pengaman Uang Rupiah**

Apakah uang rupiah perlu dikenali keasliannya? Tentu saja perlu, karena uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah dan merupakan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuai dengan amanah Undang-Undang Mata Uang, NKRI sebagai suatu negara yang merdeka dan berdaulat, memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warganya. Simbol kedaulatan negara tersebut adalah mata uang. Mata uang NKRI adalah Rupiah atau disingkat Rp. Selain simbol Rp dikenal

juga sebutan IDR atau Indonesian Rupiah. Simbol tersebut biasanya digunakan dalam perdagangan Valuta Asing (Valas), baik dilaksanakan di dalam maupun di luar negeri.

Uang rupiah dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) di wilayah NKRI yang meliputi seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia lainnya di luar negeri.

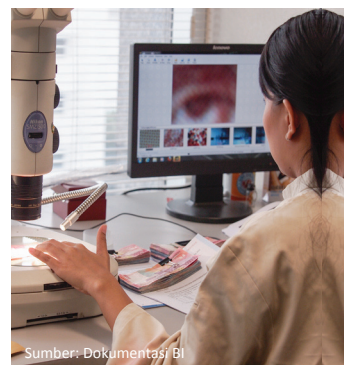
Dalam perekonomian suatu negara, peranan uang sangatlah penting karena uang mempunyai beberapa fungsi sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain sebagai alat penukar atau alat pembayar dan satuan hitung, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah satu alat utama perekonomian. Dengan uang, perekonomian suatu negara akan berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. Karena peranannya yang sangat penting, maka uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Di sinilah peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sangat diperlukan untuk menentukan ciri, desain dan bahan baku uang rupiah.

Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat. Agar uang rupiah aman dari pemalsuan, maka Bank Indonesia menetapkan unsur-unsur pengaman pada setiap pecahan uang rupiah, baik pada bahan uang ataupun pada waktu proses pencetakan. Bank Indonesia senantiasa melakukan penelitian dalam upaya meningkatkan unsur pengaman uang rupiah agar lebih handal dan sulit dipalsukan. Pada umumnya pemilihan unsur pengaman mempertimbangkan dua hal sebagai berikut:

- a. Semakin besar nominal uang rupiah, maka diperlukan unsur pengaman yang semakin kompleks dan semakin baik;
- b. Untuk uang rupiah nominal besar, diupayakan penerapan satu atau beberapa unsur pengaman yang canggih yang memungkinkan hasil pemalsuan tidak sempurna.

Secara umum, Bank Indonesia membagi unsur pengaman uang rupiah dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. Terbuka (*overt*) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi tanpa bantuan alat panca indra. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi masyarakat biasa agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan cara 3D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Unsur-unsur pengaman yang bersifat terbuka (*overt*), yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu:



Sumber: Dokumentasi BI  
**Gambar 3.5**  
Laboratorium Klarifikasi  
Keaslian Uang Rupiah



- 1) Warna Uang terlihat terang dan jelas



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.6. Warna Uang pada Uang Kertas Rp50.000**

- 2) *Optically Variable Ink (OVI)*, yaitu hasil cetak dengan tinta khusus berupa logo BI dalam bidang tertentu, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.7. *Optically Variable Ink (OVI)* pada Uang Kertas Rp50.000**

- 3) Cetak Pelangi (*Rainbow Printing*), yaitu cetak pelangi dalam bidang tertentu yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.8. Cetak Pelangi pada Uang Kertas Rp100.000**

- 4) Benang Pengaman (*Security Thread*), yaitu bahan tertentu yang ditanam pada kertas uang dan tampak sebagai suatu garis melintang atau beranyam. Pada pecahan Rp100.000 dan



Rp50.000, benang pengaman akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.9. Benang Pengaman**

- 5) Gambar Tersembunyi (*Latent Image*), yaitu teknik cetak dimana terdapat tulisan tersembunyi yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.10. Gambar Tersembunyi pada Uang Kertas Rp20.000**

- 6) Cetak *Intaglio*, yaitu hasil cetak berbentuk relief yang terasa kasar bila diraba. Cetak *intaglio* terdapat pada angka nominal, huruf terbilang, tulisan Bank Indonesia, gambar utama dan Lambang Negara Burung Garuda.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.11. Cetak *Intaglio* pada Uang Kertas Rp100.000**

- Kode Tunanetra (*Blind Code*), yaitu kode tertentu untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra. Pada umumnya, kode tunanetra terletak di bagian muka uang di atas tulisan Bank Indonesia.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.12.** Kode Tunanetra pada Uang Kertas Rp50.000

- Tanda Air (*Watermark*), yaitu suatu gambar tertentu pada bahan kertas uang yang akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya, umumnya berupa gambar pahlawan.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.13.** Tanda Air pada Uang Kertas Rp50.000

- Gambar Saling Isi (*Rectoverso*), yaitu hasil cetak pada bagian muka dan belakang uang yang beradu tepat dan saling mengisi, menghasilkan gambar logo BI secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.14.** Gambar Saling Isi pada Uang Kertas Rp50.000

b. Semi tertutup (*semicovert*) adalah unsur pengaman yang dapat dideteksi dengan menggunakan alat bantu yang sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultra violet. Unsur pengaman ini diperuntukkan bagi profesional seperti kasir bank, kasir supermarket dan bendahara, agar dapat dengan mudah mengenali keaslian uang rupiah dengan menggunakan alat bantu tersebut. Unsur-unsur pengaman yang bersifat semi tertutup (*semicovert*) yang saat ini terdapat pada uang rupiah yaitu:

- 1) Tulisan Mikro (*Micro Text*), yaitu tulisan berukuran sangat kecil yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.15. Tulisan Mikro pada Uang Kertas Rp100.000**

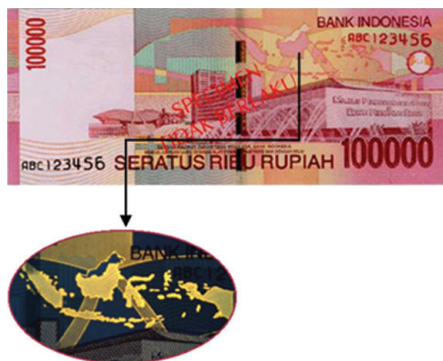
- 2) Tinta Tidak Tampak (*Invisible Ink*), yaitu hasil cetak tidak kasat mata yang akan memendar di bawah sinar ultra violet.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.16. Tinta Tidak Tampak pada Uang Kertas Rp50.000**

- 3) Tinta Tampak (*Visible Ink*), yaitu gambar tertentu yang dicetak dengan tinta tampak dan akan terlihat memendar apabila disinari dengan lampu ultra violet.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.17. Tinta Tampak pada Uang Kertas Rp100.000**

- 4) Nomor seri (*Serial Number*), yaitu nomor seri uang yang pada umumnya dibuat asimetris dan apabila disinari lampu ultra violet akan memendar berubah warna dari merah menjadi orange dan hitam menjadi hijau.



ABC 123456

Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.18. Nomor Seri pada Uang Kertas Rp100.000**

- c. Tertutup (*covert/forensic*) adalah unsur pengaman yang hanya dapat dideteksi dengan menggunakan media peralatan laboratorium/forensik.

## 7. Menjaga dan Merawat Uang Rupiah

Unsur-unsur pengaman uang rupiah yang bersifat terbuka dan semi tertutup tersebut dapat dikenali dengan mudah kalau fisik uang rupiah masih dalam kondisi yang baik dan bersih. Untuk itu, kepedulian masyarakat, termasuk anak sekolah untuk merawat fisik uang rupiah agar tidak cepat rusak, lusuh dan kotor merupakan keharusan. Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Undang-

### Forum Sistem Pembayaran Tunai

Bank Indonesia sudah menetapkan unsur-unsur pengaman uang rupiah. Namun, kasus-kasus pemalsuan uang seringkali terjadi di masyarakat. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan solusi apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah? Cari referensi dari sumber yang relevan, termasuk internet, diskusikan dan buat simpulannya!

Undang Mata Uang), setiap orang yang merusak, memotong, menghancurkan dan atau mengubah uang rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## 8. Penukaran Uang Tidak Layak Edar

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap uang rupiah, Bank Indonesia memberikan pelayanan penukaran uang tidak layak edar (UTLE). Uang rupiah yang masuk katagori uang tidak layak edar adalah uang lusuh, uang cacat, uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dan uang rusak. UTLE dapat ditukar apabila masih dapat dikenali ciri-ciri keasliannya. Sementara itu, penggantian uang rusak yaitu uang rupiah yang hilang sebagian karena robek, terbakar atau sebab lain dapat ditukar sesuai nilai nominal apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Uang rupiah kertas; apabila sisa fisiknya lebih dari  $\frac{2}{3}$  bagian ukuran uang aslinya.
- b. Uang rupiah logam; apabila sisa fisiknya masih lebih dari  $\frac{1}{2}$  bagian ukuran aslinya.

## 9. Penanggulangan Pemalsuan Uang Rupiah

Untuk memerangi peredaran uang rupiah palsu, Bank Indonesia melakukan kegiatan preventif dengan cara memberikan penjelasan kepada masyarakat bagaimana mengenali unsur pengaman uang rupiah. Selain upaya tersebut, Bank Indonesia juga secara aktif turut serta memberikan bantuan teknis berupa pemberian keterangan ahli dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh POLRI. Agar uang rupiah palsu tidak merugikan orang lain dan menghambat kegiatan perekonomian negara, maka masyarakat apabila menemukan uang rupiah palsu dapat melapor kepada kantor kepolisian terdekat atau ke kantor Bank Indonesia. Sesuai Undang-Undang Mata Uang, sanksi pidana penjara bagi:

- a. Membuat uang rupiah palsu, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Mengedarkan uang rupiah palsu, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).



**Gambar 3.19**  
Aktivitas Penukaran  
Uang Rusak/Uang Tidak  
Layak Edar



- c. Menyimpan uang rupiah palsu, dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### VALUES EXPLORER

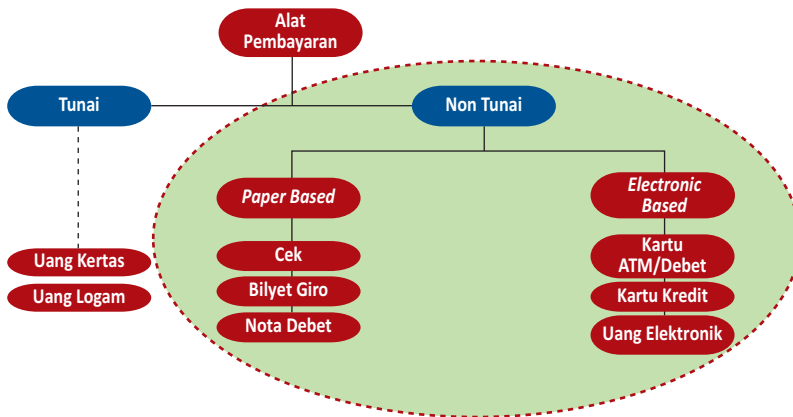
Menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan memperlakukannya dengan baik dan benar merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan memiliki rasa kebanggaan nasional.

#### Uji Kompetensi

1. Bagaimana cara mensyukuri uang yang diperoleh sebagai karunia Tuhan YME kepada Anda sehingga kebutuhan sehari-hari Anda terpenuhi dengan baik!
2. Berikan tiga contoh wujud pengamalan ajaran agama dalam memanfaatkan uang yang Anda miliki!
3. Berikan dua contoh upaya yang dapat dilakukan agar oknum pelaku pemalsuan uang tidak berkembang di masyarakat!
4. Langkah-langkah apa saja yang dapat Anda lakukan jika menemukan uang kertas yang rusak!
5. Jelaskan pengertian uang menurut beberapa ahli!
6. Terdapat dua jenis fungsi asli uang. Jelaskan!
7. Jelaskan perbedaan antara uang kartal dan uang giral!
8. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, terdapat enam tahapan pengelolaan uang rupiah. Sebutkan dan jelaskan!
9. Bank Indonesia membagi unsur pengaman uang rupiah menjadi tiga tingkatan. Sebutkan dan jelaskan!
10. Tuliskan sanksi pidana terhadap pembuat, pengedar dan penyimpan uang palsu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang!

## C. ALAT PEMBAYARAN NONTUNAI

Alat pembayaran secara umum dibagi menjadi dua, yakni alat pembayaran tunai dan alat pembayaran nontunai. Alat pembayaran tunai tiada lain adalah uang rupiah sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan alat pembayaran nontunai secara umum dibagi menjadi dua, yakni: 1. Alat Pembayaran Berbasis Kertas (*Paper Based*) yaitu cek, bilyet giro, dan nota debit. 2. Alat Pembayaran Berbasis Elektronik (*Electronic Based*) yaitu Kartu ATM/Debet, kartu kredit dan uang elektronik (*e-money*). Untuk lebih jelasnya, perhatikan Bagan 3.5 sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 3.5**  
**Jenis-jenis Alat Pembayaran Nontunai**

**Cek** merupakan suatu perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah dana. Cek dikenal ada tiga macam, yaitu cek atas unjuk, cek atas nama, dan cek silang. Sementara itu, **Giro Bilyet** adalah surat perintah nasabah bank untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya kepada rekening nasabah yang lain yang ditunjuk. Giro bilyet tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai di bank penerimanya.

Adapun **Nota Debet** adalah warkat atau surat yang digunakan untuk menagih nasabah bank lain melalui kliring. Nota debet juga digunakan untuk keperluan transaksi antarkantor, baik nota debet dengan surat maupun nota debet dengan telegram. Nota debet dengan surat atau dengan telegram disampaikan melalui kantor pos. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Kliring Nasional Bank Indonesia.



Sumber: Dokumentasi BI

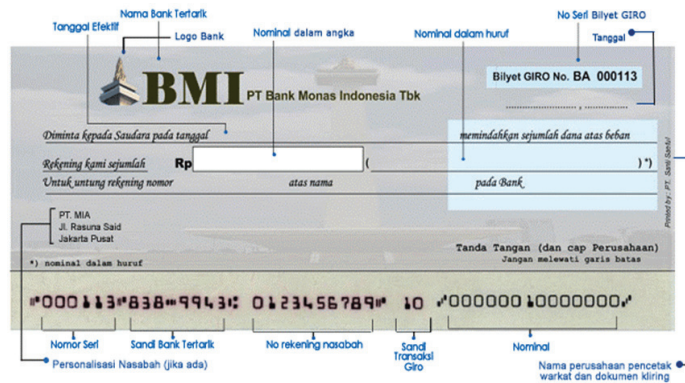
**Gambar 3.20. Contoh Cek**

**Pojok Sistem  
Pembayaran Nontunai**

Cek Atas Nama adalah cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Adapun Cek Atas Unjuk adalah cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut. Sedangkan Cek Silang adalah Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada unjuk kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari unjuk kiri bawah keujung kanan atas.

**Pojok Sistem  
Pembayaran Nontunai**

Ketentuan tentang Bilyet Giro (BG) diatur dalam Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 28/32/KEP/DIR dan Surat Edaran BI Nomor 28/32/UPG tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro.



Sumber: Dokumentasi BI

Gambar 3.21. Contoh Bilyet Giro

### Pojok Sistem Pembayaran Nontunai

Logo yang tertera pada Kartu Debet dan Kartu ATM menunjukkan bahwa kartu tersebut memiliki akses di jaringan yang tertera logo yang sama. Jaringan tersebut adalah:

1. Jaringan lokal: Link, ALTO, ATM Bersama, PRIMA.
2. Jaringan internasional: CIRRUS, MAESTRO, Mastercard Electronic, VISA Plus, VISA Electron.

### Pojok Sistem Pembayaran Nontunai

Jasa *electronic banking* melalui internet dan telepon telah disediakan oleh sejumlah bank besar sejak pertengahan 1999. Penggunaan instrumen berbasis internet untuk melakukan transaksi memerlukan verifikasi pengaman seperti PIN, password, dan komputer/laptop/HP yang dapat dilakukan tanpa atau dengan *proprietary software* yang disediakan oleh bank kepada nasabah.

Adapun Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran berupa kartu kredit dan kartu ATM/Debet. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang, yang sumber dananya berasal dari pinjaman (kredit) yang diberikan penerbit serta dikenakan bunga/denda jika membayar setelah jatuh tempo atau angsuran. Kartu kredit dapat diartikan juga sebagai kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran.

Sementara itu, Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan tarik tunai, cek saldo, transfer dana antar dan intra bank. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Layanan ATM di Indonesia mulai diperkenalkan pada awal tahun 1990-an.

Sedangkan Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk berbelanja pada pedagang dan debet tunai. Sumber dana berasal dari simpanan dan saldo simpanan akan berkurang secara langsung pada saat transaksi. Kartu debet dapat diartikan juga sebagai alat pembayaran berbasis kartu yang pembayarannya dilakukan dengan pendebitan langsung ke rekening nasabah pada bank penerbit kartu. Beberapa bank penerbit kartu telah mengombinasikan kartu debet dan kartu ATM dalam satu kartu (kartu debet ATM).

Pada saat kartu debet digunakan untuk bertransaksi, maka secara otomatis akan langsung mengurangi dana yang tersedia pada rekening. Jika kartu debet digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM, maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu ATM. Namun, apabila digunakan untuk transaksi pembayaran dan pembelanjaan nontunai dengan menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*), maka kartu tersebut dikenal sebagai kartu debet.





Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.22. Contoh Mesin EDC (Electronic Data Capture)**

Setiap pemegang kartu diberikan nomor pribadi (*Personal Identification Number* - PIN) yang bersifat rahasia untuk keamanan dan kewenangan melakukan transaksi. Untuk kartu debit, selain otorisasi dengan PIN, dimungkinkan pula otorisasi dengan tanda tangan seperti halnya kartu kredit. Batas (limit) transaksi kartu kredit dan kartu ATM bergantung dari jenis kartunya. Umumnya, limit transaksi meliputi penarikan tunai, belanja dan transfer.



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.23. Contoh Kartu ATM & Kartu Kredit yang ada di Indonesia saat ini**

Selain kartu kredit dan kartu ATM/debit, terdapat pula apa yang disebut dengan uang elektronik. Tahukah Anda apa itu uang elektronik? Uang Elektronik adalah APMK yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit uang elektronik. Nilai Uang disimpan secara elektronik dalam suatu *media server* atau *chip*. Uang elektronik dapat digunakan sebagai alat pembayaran



#### Pojok Sistem Pembayaran Nontunai

Saat ini, pembayaran nontunai semakin berkembang menjadi pembayaran secara virtual, seperti *phone banking*, *mobile banking*, *internet banking*, dan *sms banking*. Selain bank, perusahaan telekomunikasi ikut menciptakan instrumen pembayaran nontunai dengan mengeluarkan produk yang dapat digunakan untuk transaksi *retail* dengan nominal kecil, yaitu uang elektronik.

kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang kartu bukan simpanan, artinya tidak mendapatkan bunga dan tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).



Sumber: Dokumentasi BI

**Gambar 3.24. Contoh Uang Elektronik yang ada di Indonesia saat ini**

### Pojok Sistem Pembayaran Nontunai

**Uang Elektronik** atau *electronic money* sesuai PBI Nomor 11/12/PBI/2009 diartikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik di Indonesia mulai berkembang sejak April tahun 2007. Alat pembayaran nontunai yang praktis, ekonomis, dan menunjang gaya hidup menjadi pemicu semakin berkembangnya uang elektronik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari tumbuhnya penyelenggara uang elektronik yang bukan bank, seperti PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk (Telkom), PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT. Indosat, Tbk (Indosat), PT. XL Axiata, Tbk (XL).

Penggunaan uang elektronik masih terbatas karena antar penerbit uang elektronik harus menjalin kerjasama dengan unit usaha/pedagang/*merchant* yang mau menerima pembayaran transaksi di tempat usahanya dengan uang elektronik. Biasanya penerbit uang elektronik bekerjasama dengan mini-market, mal, kafe, atau tempat anak muda berkumpul. Penggunaan uang elektronik ini masih terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

## SIMPULAN (SUMMARY)

- Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup pengaturan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran “nilai” antarperorangan, bank, dan lembaga lainnya baik lembaga domestik maupun *cross border* (antarnegara).
- Penyelenggaraan transaksi nontunai oleh BI dilakukan dengan dua cara yakni; *Pertama*, transaksi yang bernilai besar (*high value*) yang diselesaikan dengan menggunakan perangkat Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), *Kedua*, transaksi yang bernilai kecil (*retail value*) yang diselesaikan dengan menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).
- Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan.
- Secara umum, uang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral yang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan.
- Undang-Undang Nomor 7 tentang Mata Uang Tahun 2011 Bab IV Pasal 11 tentang Pengelolaan Rupiah bahwa pengelolaan rupiah meliputi tahap Perencanaan; Pencetakan; Pengeluaran; Pengedaran; Pencabutan dan Penarikan; dan Pemusnahan.
- Keaslian uang rupiah dapat dikenali melalui hal-hal sebagai berikut: bahan yang digunakan, disain, ukuran, dan teknik cetak.
- Alat pembayaran terdiri atas alat pembayaran tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam, serta alat pembayaran nontunai dalam bentuk *paper based*, contohnya cek, bilyet giro, dan nota debit, serta *elecronic based* contohnya kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, dan uang elektronik.

## REFLEKSI (REFLECTION)

Apakah *learning goals* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk internet, di antaranya Anda dapat mengunjungi *website* Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) atau Anda dapat merencanakan untuk berkunjung ke Museum Bank Indonesia.

## GLOSARIUM (*Glossary*)

- Anjungan Tunai Mandiri (ATM) : Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut, nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar rekening, dan transaksi rutin lainnya.
- Bank Indonesia-  
*Scriptless Securities Settlement System* : Sarana transaksi Bank Indonesia untuk pengadministrasian surat berharga secara elektronik yang terhubung langsung antara peserta, penyelenggara dan sistem BI-RTGS.
- Bunga Bank  
(*Bank Interest*) : Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.
- Bilyet Giro (BG) : Merupakan cara pembayaran yang berbeda dengan cek, dimana penerima dana tidak dapat melakukan pencairan secara tunai, tetapi harus melakukan pemindahbukuan ke rekening yang bersangkutan.
- Cek (*Cheque*) : Surat berharga atau alat transaksi pembayaran yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai. Cek dikeluarkan oleh bank apabila Anda mempunyai rekening giro
- Cek Atas Nama  
(*Order Cheque*) : Cek yang mencantumkan nama penerima dana dan bank akan melakukan pembayaran kepada nama yang tertera pada cek tersebut.
- Cek Atas Unjuk  
(*Bearer Cheque*) : Cek yang tidak mencantumkan nama penerima dan bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.
- Cek Silang  
(*Cross Cheque*) : Cek Atas Nama dan/atau Cek Atas Unjuk yang diberikan tanda garis menyilang pada ujung kiri atas warkat atau dapat juga diberi tanda garis menyilang sepanjang cek dari ujung kiri bawah ke ujung kanan atas.
- Daftar Hitam  
(*Black List*) : Daftar nama nasabah perseorangan atau perusahaan yang terkena sanksi, karena telah melakukan tindakan tertentu yang merugikan bank atau masyarakat.

- Inkaso (*Collection*) : Penagihan cek, wesel, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (*paying bank*).
- Jaminan Bank (*Bank Guarantee*) : Jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya.
- Kartu Debit (*Debit Card*): Kartu bank yang dapat digunakan untuk membayar suatu transaksi dan/atau menarik sejumlah dana atas beban rekening pemegang kartu yang bersangkutan dengan menggunakan PIN (*Personal Identification Number*).
- Kartu Kredit (*Credit Card*): Kartu yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit yang memberikan hak kepada orang yang memenuhi persyaratan tertentu yang namanya tertera dalam kartu untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran secara kredit atas perolehan barang atau jasa, atau untuk menarik uang tunai dalam batasan kredit sebagaimana telah ditentukan oleh bank atau perusahaan pengelola kartu kredit.
- Kliring (*Clearing*) : Perhitungan utang piutang antara para peserta kliring secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) : Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
- PIN (*Personal Identification Number*) : Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
- Redenomisasi : Penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya.
- Sistem Informasi Debitur (SID) : Sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari lembaga pelapor.
- Sistem Pembayaran : Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Sistem Bank Indonesia : <i>Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)</i>	: Suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual. Nilai transaksi yang diproses dengan menggunakan BI-RTGS adalah Rp500.000.000,00 ke atas.
Transfer ( <i>Remittance</i> )	: Jasa mengirimkan uang dari pemilik rekening satu ke pemilik rekening lainnya atau pemilik rekening yang sama, dari kota satu ke kota lainnya atau ke kota yang sama, dalam mata uang rupiah atau mata uang asing.
Uang Elektronik	: Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit.
Uang Giral	: Saldo rekening koran yang ada di bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan.
Uang Kartal	: Uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat bayar.
Unit Pelayanan Nasabah : ( <i>Customer Relation</i> )	: Bagian atau unit bank yang bertanggungjawab untuk menjawab pertanyaan dan memecahkan keluhan yang dihadapi nasabah. Unit ini biasanya disebut unit pelayanan nasabah atau untuk pelayanan nasabah melalui telepon disebut <i>call center</i> .
Warkat	: Instrumen perbankan, antara lain cek dan inkaso, yang menggambarkan dana yang belum diterima; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti, seperti warkat kliring, warkat inkaso, warkat dalam penyelesaian, kuitansi, dan kartu pegawai.

## PENILAIAN

### 1. Tes Tulis:

Dalam bentuk objektif dan uraian: untuk menilai kemampuan kognitif materi tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran.

### 2. Unjuk Kerja:

Menilai kemampuan menyimulasikan sistem dan alat pembayaran.

### 3. Penilaian Produk:

Menilai laporan dan bahan penyajian tentang sistem pembayaran alat pembayaran dan unsur pengamanan uang rupiah.

### 1. Tugas Terstruktur

- Buat kelompok sebanyak 5-7 orang
- Buat rencana kunjungan ke bank terdekat
- Buatlah pedoman wawancara untuk mendapat informasi tentang
  - a. Langkah-langkah melakukan transfer kredit dan transfer debit dengan memanfaatkan SKNBI yang biasa dilaksanakan oleh bank bersangkutan
  - b. Langkah-langkah melakukan transfer dana dengan memanfaatkan BI-RTGS yang biasa dilaksanakan oleh bank bersangkutan
  - c. Presentase nasabah yang memanfaatkan fasilitas SKNBI dan BI-RTGS di bank bersangkutan
  - d. Keuntungan dan hambatan dalam menggunakan fasilitas SKNBI dan BI-RTGS yang dirasakan bank bersangkutan
  - e. Mintalah contoh formulir transfer
  - f. Buatlah laporan hasil kunjungan dengan sistematika :
    - Cover
    - Kata Pengantar
    - Daftar Isi
    - BAB I Pendahuluan (Latar Belakang Kegiatan, Tujuan dan Manfaat Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Kepesertaan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan)
    - BAB II Deskripsi Hasil Kunjungan (Nama bank, Nama dan Jabatan Orang yang Diwawancarai, Ringkasan Hasil Wawancara tentang SKNBI, Ringkasan Hasil Wawancara tentang BI-RTGS)
    - BAB III Simpulan dan Saran
    - Lampiran (foto-foto kegiatan)

### 2. Tugas Mandiri

- a. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang unsur-unsur pengaman uang rupiah, wawancarilah tiga anggota keluarga Anda (Ayah, Ibu, dan Kakak/Adik)
- b. Hal-hal yang diwawancarai antara lain tentang:
  - Unsur pengaman uang rupiah apa yang sudah diketahui

- Darimana mereka mengetahui informasi tersebut
  - Unsur pengaman uang rupiah apa yang belum diketahui
  - Faktor apa saja yang menyebabkan unsur-unsur tersebut belum diketahui
  - Upaya apa yang Anda lakukan untuk menyampaikan unsur-unsur pengaman uang rupiah yang belum diketahui kepada mereka
- c. Tuangkan hasil wawancara Anda dalam sebuah artikel dengan ketentuan
- Maksimal 2 halaman kertas A4 (4.000 karakter)
  - Spasi 1,5
  - Ketentuan margin 4-3-4-3
  - Jenis huruf *Times New Roman*
  - Beri Judul Artikel dan Nama Siswa/Penulis
- d. Serahkan kepada guru ekonomi untuk mendapatkan nilai tugas mandiri

### VALUES EXPLORER

#### 10 Ciri Orang Kreatif

1. Orang-orang kreatif memiliki tingkat energi yang tinggi.
2. Orang-orang kreatif pada umumnya juga cerdas.
3. Orang-orang kreatif adalah orang yang *playful*.
4. Pikiran orang-orang kreatif selalu penuh imajinasi dan fantasi.
5. Orang-orang kreatif cenderung bersifat introvert dan ekstrovert.
6. Orang-orang kreatif biasanya rendah hati.
7. Orang-orang kreatif adalah androgini.
8. Orang-orang kreatif adalah pemberontak.
9. Orang-orang kreatif sangat bersemangat mendalami pekerjaannya.
10. Orang-orang kreatif pada umumnya lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan sensitif pada lingkungan.

Sumber: *The Creative Personality – Psychology Today* . [www. http://nurra.abatasa.co.id](http://nurra.abatasa.co.id)





# BAB 4

## PENGELOLAAN KEUANGAN

### KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KOMPETENSI DASAR

1. Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya
2. Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan;
2. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi;
3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif dan proaktif, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi;
4. Menganalisis pengelolaan keuangan sebagai salah satu cara mengatasi masalah ekonomi;
5. Melaporkan hasil analisis pengelolaan keuangan.

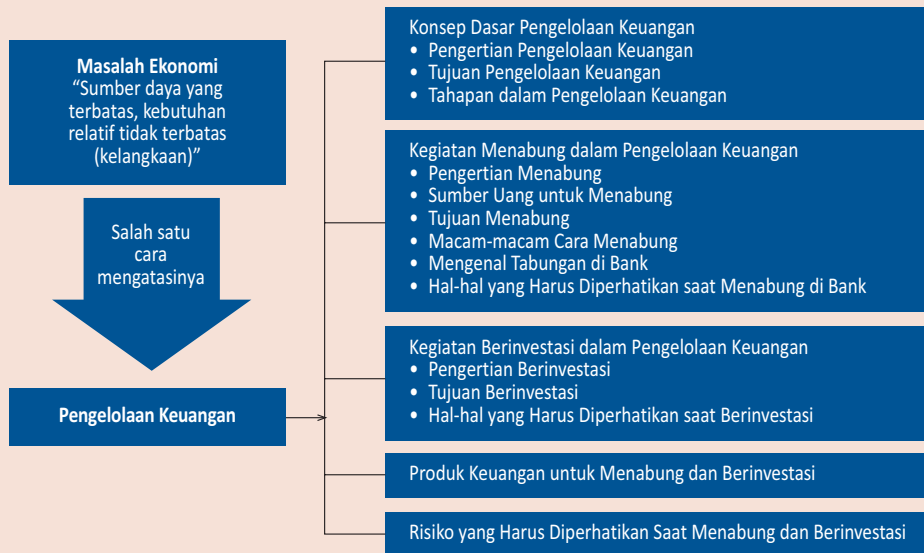
## ALOKASI WAKTU

1 x 3 Jam Pelajaran (3 JP / 1 pertemuan)

## PENDEKATAN DAN ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN:

1. Pendekatan Pembelajaran:
  - a. Pendekatan Belajar Sains (*observing, questioning, experimenting, associating, communicating*)
  - b. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
  - c. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/ CTL*)
2. Alternatif Model Pembelajaran:
  - a. *Jigsaw*
  - b. *Demonstration*
  - c. *The Power of Two*
  - d. Model lainnya yang relevan

## PETA KONSEP (CONCEPT MAP)



## KATA KUNCI (KEY WORDS)

Pengelolaan Keuangan, Tabungan, Investasi

Setiap orang pasti mencita-citakan kehidupannya sejahtera. Terpenuhinya seluruh kebutuhan (*needs*) dan keinginan (*want*) dalam hidupnya merupakan bagian dari wujud kesejahteraan yang dicita-cita setiap orang. Namun demikian, dalam kehidupan nyata, tidak setiap kebutuhan dan keinginan dapat diwujudkan. Sumber daya yang dimiliki setiap orang, baik itu berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal maupun keahlian (*skill*), seringkali mengalami keterbatasan, baik dari segi ruang, waktu, jumlah, tempat maupun akses untuk memperolehnya. Dalam konsep ekonomi, hal tersebut dikenal dengan istilah kelangkaan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang agar kebutuhan dan keinginannya tercapai adalah dengan cara mengelola keuangan yang dimilikinya dengan baik. Tidak sedikit ditemukan orang yang berpenghasilan tinggi, namun serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Di sisi lain, sering pula ditemukan adanya orang yang berpenghasilan pas-pasan, namun tidak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apa yang membedakan dari keduanya? Diantaranya adalah pengelolaan keuangan, baik pengelolaan keuangan individu maupun pengelolaan keuangan keluarganya.

### Forum Pengelolaan Keuangan

Setujukah Anda jika terdapat pernyataan bahwa pengusaha mikro dan pengusaha kecil, sulit mengalami perkembangan karena pemiliknya tidak cakap dalam melakukan pengelolaan keuangan usahanya!

Dalam bab ini, Anda akan mendapat penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan (khususnya pengelolaan keuangan individu)? mengapa perlu dilakukan pengelolaan keuangan? bagaimana tahapannya serta bagaimana pentingnya menabung dan berinvestasi dalam pengelolaan keuangan?

## A. KONSEP DASAR PENGELOLAAN KEUANGAN

### 1. Pengertian Pengelolaan Keuangan

Menurut Anda apa yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan? Pengelolaan keuangan adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan keluarga, dan pengelolaan keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan merupakan bagian penting dalam mengatasi masalah ekonomi, baik masalah ekonomi individu, keluarga maupun perusahaan.

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Kita harus melakukan *financial check up* atau pemeriksaan keuangan dan investasi secara berkala agar tidak terjadi hal-hal buruk di kemudian hari (Aidil Akbar, 2013)

#### VALUES EXPLORER

Uang yang sudah hilang dapat dicari kembali, tetapi waktu yang sudah berlalu tidak dapat kembali” (Bong Chandra, 2012)

### 2. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Mengapa keuangan perlu dikelola? Tentu memiliki tujuan yang diharapkan tercapai. Secara umum, tujuan dari pengelolaan keuangan meliputi:

- Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang.
- Melindungi dan meningkatkan kekayaan yang dimiliki.
- Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang).
- Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik.
- Mengelola utang piutang.

#### VALUES EXPLORER

Knowledge is nothing, applying what your know is everything

### 3. Tahapan dalam Pengelolaan Keuangan

Setelah Anda mengetahui tentang pengertian dan tujuan pengelolaan keuangan, selanjutnya Anda harus mengetahui tentang

#### Forum Pengelolaan Keuangan

Menurut Anda, apakah semua harta dapat diarahkan untuk bersifat produktif? Bagaimana caranya! Diskusikan!

tahapan yang harus dilakukan dalam pengelolaan keuangan. Tahapan dalam melakukan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

### a. Mencatat Aset/Harta yang Sudah Dimiliki

Setiap orang pasti memiliki harta/aset yang dicatat sebagai harta produktif maupun konsumtif. Harta produktif adalah harta yang memberikan penghasilan rutin atau keuntungan pada saat harta tersebut dijual kembali. Contohnya tabungan (yang tidak dipakai untuk belanja atau keperluan konsumtif), deposito, reksadana, dan rumah (yang dikontrakkan bukan yang ditempati).

Adapun harta konsumtif merupakan harta yang tidak memberikan penghasilan, baik penghasilan secara rutin maupun keuntungan ketika dijual kembali. Contohnya perlengkapan dan peralatan rumah tangga (televisi, meja makan, sofa, dan lain-lain), perhiasan yang dipakai, mobil, dan motor.

**Tabel 4.1**  
Contoh Tabel untuk Mencatat Harta Aset

No.	Nama Harta	Kelompok Harta		Nilai Perolehan	Tahun Pembelian	Kondisi
		Produktif	Konsumtif			

Keterangan:

- Kolom No, isi dengan nomor harta
- Kolom Nama Harta, isi dengan nama harta yang dicatat
- Kolom Kelompok Harta, untuk mengelompokkan harta yang dicatat, apakah produktif atau konsumtif, isi dengan tanda check list (√)
- Kolom Nilai Perolehan, isi dengan harga perolehan harta, yakni harga pada saat mendapatkan harta tersebut
- Kolom Tahun Pembelian, isi dengan tahun pada saat harta tersebut diperoleh
- Kolom Kondisi, isi dengan kondisi harta pada saat dilakukan pencatatan, apakah kondisinya baik atau rusak

### b. Mulailah Mencatat Semua Pengeluaran

Setelah Anda mencatat semua harta/aset, Anda mendapatkan informasi tentang posisi keuangan Anda saat ini. Hal tersebut sangat berguna dalam melakukan langkah selanjutnya yaitu mencatat semua pengeluaran dan merencanakan pengeluaran.

Kegiatan mencatat semua pengeluaran akan memberikan informasi tentang banyaknya uang yang telah dikeluarkan. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi seseorang untuk mengontrol pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Pencatatan pengeluaran juga membantu untuk mengetahui frekuensi pengeluaran untuk suatu pos tertentu, sehingga dapat membedakan mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan.

#### Forum Pengelolaan Keuangan

Menurut Anda, bagaimana cara mengendalikan pengeluaran yang dilakukan seseorang sehingga tidak mengganggu persediaan keuangan yang ada! Diskusikan!

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Untuk investasi jangka panjang, *financial check up* atau pemeriksaan keuangan harus dilakukan minimal satu tahun sekali. Untuk investasi jangka menengah, *financial check up* atau pemeriksaan keuangan harus dilakukan minimal enam bulan sekali. Untuk investasi jangka pendek, *financial check up* atau pemeriksaan keuangan harus dilakukan minimal satu bulan sekali (Aidil Akbar, 2013)

#### Forum Pengelolaan Keuangan

Menurut Anda, apa saja yang membedakan antara pengeluaran bulanan dengan pengeluaran tahunan, berikan contoh minimal masing-masing tiga. Diskusikan!

**Tabel 4.2**  
Contoh Tabel untuk Mencatat Pengeluaran

Waktu		Keterangan	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
Bulan/Tahun	Tanggal			

Keterangan:

- Kolom Bulan/Tahun, isi dengan bulan dan tahun ketika dilakukan pencatatan (periode pencatatan)
- Kolom Tanggal, isi dengan tanggal pada saat terjadinya pengeluaran
- Kolom Keterangan, isi dengan jenis atau peruntukan pengeluaran yang terjadi
- Kolom Jumlah, isi dengan jumlah uang yang dikeluarkan
- Kolom Total, isi dengan rekapan jumlah pengeluaran yang terjadi setiap tanggal terjadinya transaksi pengeluaran.

**Pojok  
Pengelolaan Keuangan**

4 Tips Pengelolaan Keuangan Menurut Safir Sinduk (2012)

1. Tentukan sumber penghasilan yang ingin anda dapatkan
2. Buatlah aset produktif
3. Hati-hati dengan tawaran barang konsumtif yang semakin menggila
4. Selektif dengan tawaran kredit

**c. Identifikasi Pengeluaran Rutin, Bulanan, dan Tahunan**

Setiap orang atau keluarga biasanya punya pola pengeluaran yang mirip dari bulan ke bulan, termasuk dari tahun ke tahun. Setelah memiliki catatan pengeluaran, coba identifikasi apa saja yang menjadi pengeluaran rutin dan bagaimana frekuensinya. Kegiatan ini dilakukan untuk membuat pemetaan pengeluaran, apakah pengeluaran tersebut sifatnya rutin bulanan atau tahunan. Hal tersebut akan berguna sebagai bahan dalam membuat perencanaan keuangan.

**Tabel 4.3**  
Identifikasi Pengeluaran Bulanan dan Tahunan

No.	Nama Pengeluaran	Jumlah Rata-rata (Rp)	Frekuensi	
			Bulanan	Tahunan

Keterangan:

- Kolom No, isi dengan nomor pengeluaran yang dicatat
- Kolom Nama Pengeluaran, isi dengan nama pengeluaran yang diidentifikasi
- Kolom Jumlah Rata-Rata, isi dengan rata-rata uang yang keluar untuk memenuhi jenis pengeluaran yang dicatat
- Kolom Frekuensi, isi dengan frekuensi pengeluaran apakah bulanan atau tahunan, isi dengan tanda check list (v)

**d. Menyusun Rencana Pengeluaran (*Budgeting*)**

Dalam menyusun rencana pengeluaran, hal-hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

**1) Membedakan Kebutuhan dan Keinginan**

Dari segi bahasa, **butuh** adalah kata sifat yang menunjukkan mau tidak mau harus melakukan satu hal karena kalau tidak dilakukan akan mengganggu aktivitas sehari-hari, sehingga memerlukan prioritas.

Secara ideal, total cicilan utang yang diambil oleh seseorang tidak boleh lebih dari 30% jumlah penghasilan bersih bulanan (Aidil Akbar, 2013)

Sementara itu, **ingin** menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan karena menginginkan sesuatu hal, padahal belum tentu dibutuhkan. Dengan kata lain, **kebutuhan (need)** adalah sesuatu yang sifatnya mendasar dan harus dipenuhi karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, sedangkan **keinginan (want)** adalah kebutuhan yang sudah dipengaruhi oleh faktor lingkungan, pendidikan, selera, dan faktor lainnya. Kebutuhan sesungguhnya bersifat relatif terbatas, sedangkan hal yang menjadikannya tidak terbatas adalah keinginan.

Dalam membuat perencanaan keuangan, seseorang harus cermat dalam memilah kebutuhan dan keinginan, sehingga tidak terjadi kesalahan pengalokasian anggaran dan kebutuhan-kebutuhan mendasar dapat terpenuhi. Kebutuhan harus menjadi prioritas dibanding keinginan.

## 2) Pilihlah Prioritas Pengeluaran terlebih Dahulu

Dalam menentukan prioritas pengeluaran, seseorang dapat membagi pos-pos pengeluaran ke dalam tiga kelompok: **Biaya Hidup**, **Cicilan Utang** dan **Premi Asuransi**. **Biaya hidup** adalah semua pos pengeluaran yang biasa dilakukan seseorang agar dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Contohnya membeli sembako, membayar telepon, listrik, air, biaya sekolah anak dan lain-lain.

Adapun **cicilan utang** adalah semua pos pembayaran utang yang biasa dilakukan setiap bulan. Seperti pembayaran cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan kartu kredit dan cicilan-cicilan lainnya. Menurut Aidil Akbar (2013), secara umum utang dapat dibagi menjadi **utang produktif** dan **utang konsumtif**. Utang produktif adalah segala jenis utang yang mempunyai ciri nilai aset yang dibeli dengan cara berutang dan meningkat seiring dengan berjalannya waktu, sedangkan utang konsumtif adalah segala jenis utang yang mempunyai ciri nilai aset yang dibeli dengan cara berutang dan menurun seiring dengan berjalannya waktu.



Bagan 4.1. Prioritas Pengeluaran

Sementara itu, **premi asuransi** adalah semua pengeluaran yang dilakukan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran asuransi seperti asuransi jiwa, kesehatan dan asuransi kerugian (rumah dan kendaraan). Khusus untuk pos pengeluaran asuransi, biasanya tidak semua orang memiliki pos ini. Premi asuransi biasanya hanya bagi mereka yang sudah memiliki pendapatan tertentu dan memahami pentingnya asuransi sebagai upaya preventif dalam menanggugung risiko di kemudian hari.

Jika semua pengeluaran ternyata masuk ke dalam tiga kelompok tersebut, maka harus disusun skala prioritas. Prioritas pertama adalah cicilan utang, mengapa? karena cicilan utang mempunyai akibat tersendiri berupa denda. Selain itu, saldo utang yang belum terbayar akibat sering terlambat akan terkena bunga kembali, walaupun hanya telat bayar beberapa hari.

Prioritas kedua adalah membayar pos-pos premi asuransi, mengapa? karena jika terlambat membayar, maka proteksi yang dimiliki dari program asuransi dapat hilang. Prioritas ketiga adalah membayar biaya hidup. Karena biaya hidup tidak akan menimbulkan bahaya jika telat membayar 3-4 hari. Misalnya belanja bulanan dapat di tangguhkan 3-4 hari waktu pembeliannya.

### 3) Ketahuilah Cara yang Baik dalam Mengeluarkan Uang untuk Setiap Pos Pengeluaran.

Cara yang baik dalam mengeluarkan uang untuk setiap pos pengeluaran adalah dengan melakukan penghematan. Hemat adalah mencari cara agar dapat mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk mencapai tujuan yang sama. Contohnya jika akan melakukan perjalanan Bandung-Surabaya dengan pesawat, maka Anda dapat mencari maskapai penerbangan yang menawarkan tarif paling rendah dibandingkan maskapai penerbangan yang lain, bukan mengganti dengan perjalanan darat, karena tetap akan rugi dari sisi waktu.

**Tabel 4.4**  
**Prioritas Kebutuhan dan Keinginan**

No.	Nama Pengeluaran	Kategori Pengeluaran	
		Kebutuhan	Keinginan

Keterangan:

- Kolom No, isi dengan nomor pengeluaran yang dicatat
- Kolom Nama Pengeluaran, isi dengan nama pengeluaran yang diidentifikasi
- Kolom Kategori Pengeluaran, isi dengan pengelompokan nama pengeluaran yang dicatat, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan, isi dengan tanda check list (v)

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Menyisihkan uang untuk menabung sebaiknya menjadi bagian yang diprioritaskan, sehingga Anda memiliki ketersediaan dana ketika terjadi kebutuhan yang sifatnya mendesak dikemudian hari. Menabung juga membiasakan Anda untuk memiliki sikap hidup hemat.



### e. Menabung secara Periodik

Menabung yang baik dilakukan segera setelah Anda mendapatkan penghasilan. Jadi begitu gaji tiba, sesuai rencana yang telah dibuat, segera simpan sejumlah tertentu untuk ditabungkan. Agar aman, pisahkan rekening bank untuk tabungan dan bila perlu jangan dibuatkan kartu ATM, sehingga Anda tidak tergoda untuk mengambilnya kembali.

**Tabel 4.5**  
**Buku Catatan Menabung**

Tanggal	Keterangan	Mutasi		Saldo
		Debit	Kredit	

### f. Perencanaan Program untuk Masa Depan

Rencanakan keperluan atau rencana khusus untuk masa depan, Prakirakan jumlah pengeluaran yang dibutuhkan dan sisihkan setiap bulan, sehingga mencapai jumlah yang cukup ketika waktunya tiba.

**Tabel 4.6**  
**Perencanaan Program Masa Depan**

No.	Program Masa Depan	Target Periode Pencapaian (Tahun....)	Prakiraan Dana yang Dibutuhkan (Rp)	Target Menyisihkan Dana Per Hari/ Per Bulan (Rp)

Keterangan:

- Kolom No, isi dengan nomor program masa depan yang dicatat
- Kolom Program Masa Depan, isi dengan nama program yang akan direncanakan
- Kolom Target Periode Pencapaian, isi dengan target tahun realisasi program
- Kolom Prakiraan Dana yang Dibutuhkan, isi dengan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk memenuhi program yang ditargetkan
- Kolom Target Menyisihkan Dana Per Hari/Per Bulan, isi dengan sejumlah dana yang ditargetkan untuk disisihkan Per Bulan/Per Hari

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Tabungan adalah produk investasi yang memiliki risiko terendah.

#### VALUES EXPLORER

Musuh terburuk kreativitas adalah keraguan (Sylvia Plath)

### Pojok Pengelolaan Keuangan

Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan, pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Reksadana adalah wadah yang akan dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek.

### Pojok Pengelolaan Keuangan

Bank Indonesia bersama dengan perbankan telah mengeluarkan produk TabunganKu, yaitu tabungan dengan biaya murah dan persyaratan mudah. Produk ini ditujukan dalam rangka meningkatkan budaya menabung masyarakat Indonesia sejak dini, khususnya pelajar. Jumlah setoran awal pun relatif terjangkau, yaitu sebesar Rp20.000 (untuk Bank Umum) atau Rp10.000 (untuk BPR). Selain itu, TabunganKu tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya.

### Uji Kompetensi

Dengan menggunakan tabel-tabel yang di contohkan, buatlah tabel pengelolaan keuangan individu Anda sebagai berikut:

1. Catatan Harta/Aset Pribadi
2. Catatan Pengeluaran-Pengeluaran
3. Identifikasi Pengeluaran Bulanan dan Tahunan
4. Catatan Prioritas Kebutuhan
5. Catatan Perencanaan Program Masa Depan

## B. KEGIATAN MENABUNG DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

### 1. Pengertian Menabung

Apakah Anda sudah memiliki tabungan di bank? Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan menabung? Menabung merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Menabung adalah kegiatan menyisihkan uang untuk dikumpulkan guna mencapai target dana tertentu agar kelak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kegiatan menabung dapat dilakukan dimanapun, tidak hanya melalui produk tabungan di bank, melainkan dapat juga melalui reksadana, emas, atau saham.

### 2. Sumber Uang untuk Menabung

Uang yang ditabung dapat berasal dari dua sumber, antara lain:

- a. Uang yang memang sengaja disisihkan untuk ditabung yang berasal dari uang saku, dan/atau
- b. Uang yang didapatkan karena melakukan sesuatu atau pemberian seseorang.

### 3. Tujuan Menabung

Perlu disadari bahwa masih banyak masyarakat yang belum terbiasa untuk menabung dan bahkan masih ada masyarakat yang tidak menyadari betapa pentingnya menabung. Di antara tujuan menabung adalah untuk membiayai kejadian yang tidak terduga dan untuk merencanakan keuangan di masa depan.

## 4. Macam-macam Cara Menabung

Menabung dapat dilakukan secara tradisional dan modern.

### a. Menabung Secara Tradisional

Menabung secara tradisional, yaitu menabung dengan menyimpan uang di bawah tumpukan pakaian, selipan buku atau celengan. Cara ini tentu mudah untuk dilakukan karena tidak ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penabung, tetapi banyak risikonya, antara lain risiko uang hilang, rusak, terbakar, dan basah.

### b. Menabung Secara Modern

Menabung secara modern salah satunya dapat dilakukan di bank. Bank merupakan pihak ketiga yang membantu masyarakat untuk menyimpan dana. Bank merupakan tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selain menabung di bank, menabung secara modern dapat juga dilakukan dengan menggunakan produk keuangan lainnya, seperti reksa dana, emas, dan saham.

#### VALUES EXPLORER

Tips Bijak Menggunakan Tabungan

- Pilih bank yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan Anda.
- Pastikan tabungan Anda memenuhi syarat untuk dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- Baca dan perhatikan ketentuan produk tabungan yang akan Anda pilih.
- Simpan uang yang tidak digunakan di tabungan dan lakukan penarikan sesuai dengan keperluan saja.
- Jaga saldo tabungan Anda, agar bunga yang diperoleh setiap bulannya lebih besar dari biaya administrasi bulanan, sehingga tabungan Anda tidak berkurang.
- Gunakan layanan transaksi perbankan elektronik, agar hemat biaya, energi dan waktu, karena tidak perlu datang ke kantor cabang bank.

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Minimum saldo (*buffer*) yang harus ada di dalam rekening pengeluaran bulanan adalah sebesar dua bulan pengeluaran (Aidil Akbar, 2013)

## 5. Mengenal Tabungan di Bank

Apa sesungguhnya tabungan itu? Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya bank akan memberikan buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan. Selain buku tabungan, penabung juga akan diberikan kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) lengkap dengan *Personal Identification Number* (PIN).

## Pojok Pengelolaan Keuangan

Jenis transaksi yang tersedia dalam kartu ATM antara lain:

1. Penarikan tunai
2. Setoran tunai
3. Transfer dana
4. Pembayaran
5. Pembelanjaan

Jenis informasi yang tersedia dalam kartu ATM antara lain:

1. Informasi saldo
2. Informasi kurs

Tabungan merupakan salah satu jenis simpanan di bank yang banyak disukai karena pengambilan kembali uangnya bisa dengan memakai buku tabungan atau menggunakan kartu ATM.

Beberapa keuntungan yang akan diperoleh dengan menabung di bank, diantaranya sebagai berikut:

- a. **Aman.** Uang disimpan dengan aman di bank, tidak mudah dicuri maupun tercecer.
- b. **Terjamin.** Tabungan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Saat ini jumlah simpanan nasabah di bank yang dijamin LPS adalah sampai dengan maksimal Rp2 Milyar.
- c. **Berkembang.** Bank akan memberikan bunga yang dihitung berdasarkan rata-rata saldo tabungan.
- d. **Praktis.** Terdapat kemudahan layanan perbankan elektronik 24 jam per hari antara lain ATM, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Phone Banking* dan *Call Centre*.

## 6. Hal-hal yang Harus Diperhatikan saat Menabung di Bank

Agar tujuan menabung dapat dicapai secara optimal, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat menabung di bank:

### a. Pembukaan Tabungan

Membuka tabungan dimulai dengan mengisi formulir yang telah disediakan bank. Isilah formulir dengan lengkap dan benar serta sampaikan dokumen yang diperlukan.

### b. Setoran Awal

Melakukan penyetoran uang yang akan ditabung, minimal sejumlah tertentu yang ditetapkan oleh bank.

### c. Saldo Minimum

Memperhatikan saldo minimum yang harus disisakan dalam tabungan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh bank.

### d. Buku Tabungan

Saat membuka tabungan, penabung akan mendapatkan buku tabungan yang digunakan untuk mencatat jumlah uang yang disetor atau diambil, sehingga sisa tabungan yang ada di bank dapat diketahui.

## Pojok Pengelolaan Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-Undang tersebut mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005.

Perbedaan antara menabung dan berinvestasi terletak pada tujuan yang ingin dicapai.

- Menabung dilakukan untuk mencapai target dana tertentu agar kelak dapat dipakai untuk tujuan tertentu di masa yang akan datang.
- Berinvestasi dilakukan untuk meningkatkan nilai aset yang kita miliki (tidak untuk dipakai).

### e. Kartu ATM

Selain mendapat buku tabungan, bank juga dapat memberikan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN) yang bisa digunakan untuk mengambil uang di mesin ATM, yaitu mesin otomatis penarikan dan penyetoran uang. Selanjutnya, buku tabungan, kartu ATM, dan nomor PIN harus dijaga kerahasiaannya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

### f. Bunga atau Bagi Hasil

Bunga atau bagi hasil adalah keuntungan yang diberikan atas uang yang sudah disimpan di bank. Biasanya bank menghitung bunga atau bagi hasil sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku, banyaknya uang yang disimpan atau ditabung dan lamanya tabungan tersebut tersimpan di bank.

### g. Biaya Administrasi

Setiap akhir bulan bank akan menghitung biaya administrasi yang harus dibayar, caranya dengan mengurangi secara langsung jumlah tabungan. Jika tabungan bersaldo minimum, maka biasanya uang tabungan akan terus berkurang karena jumlah bunga yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya administrasi yang harus dibayar.

#### Uji Kompetensi

1. Menurut Anda, apakah kegiatan Anda untuk menyisihkan sebagian uang untuk menabung termasuk bagian dari upaya mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME!
2. Agar menabung menjadi bagian dari upaya mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan produk bank, apa yang harus Anda lakukan!
3. Jelaskan minimal tiga manfaat menabung dalam mendukung sikap mandiri seseorang!
4. Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang petugas/pegawai yang mengelola tabungan di bank maupun LKNB!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan menabung?
6. Darimana saja dana yang dapat digunakan untuk menabung?
7. Ada dua cara menabung, jelaskan!
8. Hal-hal apa saja harus diperhatikan saat menabung di bank!
9. Jelaskan yang dimaksud dengan istilah-istilah sebagai berikut:
  - a. *SMS Banking*
  - b. *Mobile Banking*
  - c. *Internet Banking*
  - d. *Phone Banking*
  - e. *Call Centre*

## Pojok Pengelolaan Keuangan

Investasi hanya dilakukan untuk tujuan keuangan jangka menengah dan jangka panjang, inilah yang membedakan dengan menabung (Aidil Akbar, 2013)

## Pojok Pengelolaan Keuangan

Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu investasi yang dilakukan guna mengurangi atau meniadakan risiko atas investasi lain. Misalnya seseorang melakukan investasi yang memiliki nilai fluktuatif, agar terhindar dari risiko kerugian, ia di *back-up* oleh investasi yang memiliki nilai relatif stabil. *Passive Income* merupakan kondisi dimana seseorang melakukan investasi dan mendapatkan hasilnya secara berkala dan terus menerus, sehingga ia tidak perlu lagi bekerja mencari penghasilan karena hasil investasinya sudah memenuhi segala kebutuhan sehari-hari.

## C. KEGIATAN BERINVESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN

### 1. Pengertian Berinvestasi

Apakah Anda sudah pernah berinvestasi? Berinvestasi merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan keuangan. Berinvestasi adalah sebuah tindakan untuk meningkatkan nilai harta yang dimiliki agar dikemudian hari dapat lebih berkembang.

Sama seperti kegiatan menabung, berinvestasi dapat dilakukan di manapun. Produk investasi yang dapat digunakan antara lain tabungan berjangka, deposito, reksa dana, emas, dan saham.

Secara umum, kegiatan berinvestasi menurut jangka waktunya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- Investasi jangka pendek, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari satu bulan sampai satu tahun;
- Investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara satu tahun sampai lima tahun;
- Investasi jangka panjang, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu di atas lima tahun.

### 2. Tujuan Berinvestasi

Mengapa seseorang melakukan investasi? Secara umum, tujuan berinvestasi adalah untuk mencapai target dana tertentu pada masa yang akan datang, serta memaksimalkan dana/aset yang menganggur (aset tidak produktif) sehingga memberikan keuntungan bagi yang memilikinya. Menurut Ganjar Isnawan (2012), bahwa terdapat enam tujuan seseorang berinvestasi, yaitu:

- Mendapat laba sebesar mungkin
- Jaminan kondisi di masa depan
- Lindung nilai (*hedging*)
- Passive Income*
- Perencanaan mewujudkan keinginan
- Tujuan akhirat yang memicu keuntungan usaha dunia

#### VALUES EXPLORER

“Orang Sukses selalu kelebihan CARA, orang gagal selalu kelebihan ALASAN”  
(Bong Chandra, 2012)

### 3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan saat Berinvestasi

Agar kegiatan investasi dapat sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Pelajari dengan baik lembaga keuangan tempat berinvestasi.
- Ketahui dan pahami setiap risiko yang melekat pada produk keuangan yang akan dimanfaatkan.
- Sesuaikan jenis simpanan dan investasi dengan tingkat risiko yang diterima.
- Bersikap rasional dalam menghadapi penawaran investasi yang memberikan imbal hasil tinggi dalam waktu singkat.

#### VALUES EXPLORER

“Gengsi tidak membuat Anda kaya, namun jika Anda kaya akan bergengsi”

#### Uji Kompetensi

- Menurut Anda, apakah kegiatan Anda untuk menyisihkan sebagian uang untuk berinvestasi termasuk bagian dari upaya bersyukur sumber daya sebagai karunia Tuhan YME!
- Agar berinvestasi menjadi bagian dari upaya mengamalkan ajaran agama, apa yang harus Anda perhatikan jika akan melakukan investasi!
- Jelaskan minimal tiga manfaat berinvestasi dalam mendukung sikap mandiri seseorang!
- Sikap apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer investasi agar dapat memberikan kepuasan kepada pihak yang berinvestasi!
- Jelaskan yang dimaksud dengan berinvestasi!
- Jelaskan tujuan dari kegiatan berinvestasi!
- Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ketika akan berinvestasi!
- Jelaskan perbedaan antara menabung dan berinvestasi!

## D. PRODUK KEUANGAN UNTUK MENABUNG DAN BERINVESTASI

Produk keuangan untuk menabung dan berinvestasi dapat memberikan penghasilan baik berupa penghasilan rutin, *tentative* (sesekali), maupun sekali saja. Produk keuangan yang dapat memberikan penghasilan rutin biasanya berbentuk produk keuangan berpendapatan tetap, contohnya deposito. Deposito merupakan produk untuk menyimpan uang di bank dalam jangka waktu tertentu, kemudian pada saat jatuh tempo akan mendapatkan bunga yang dapat disimpan kembali di bank.

Produk keuangan yang dapat memberikan penghasilan secara *tentative* (sesekali) akan memberikan keuntungan dari pertumbuhan nilainya, contohnya saham dan reksadana. Saham adalah surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Hal pertama yang harus dilihat dalam sebuah produk investasi adalah apakah rata-rata hasil investasi di masa lampau melebihi inflasi rata-rata 10 tahun (Aidil Akbar, 2013)

#### Pojok Pengelolaan Keuangan

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*).



## Pojok Pengelolaan Keuangan

Keuntungan Reksa Dana diantaranya adalah

1. Biaya relatif rendah
2. Cocok untuk pemula dan investor dengan kemampuan finansial yang tidak terlalu besar, serta tidak terlalu menguasai teknik-teknik portofolio.
3. Dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional.

semakin besar kekuasaannya di perusahaan tersebut. Pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Adapun reksadana adalah wadah yang akan dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Keuntungan yang diperoleh berupa kenaikan nilai investasi pemodal seiring dengan berjalannya waktu penyimpanan. Uraian lebih jauh tentang saham dan reksadana akan Anda dapatkan pada penjelasan materi Kompetensi Dasar (KD) 3.9 kelas XI.

Sementara itu, produk keuangan yang dapat memberikan keuntungan sekali, akan memberikan penghasilan pada saat produk tersebut dijual kembali, sehingga penghasilan yang diperoleh hanya satu kali. Contohnya emas dan tanah.

### Uji Kompetensi

Carilah referensi langsung dari bank terdekat di sekitar Anda tentang jenis-jenis produk tabungan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya oleh Anda sebagai pelajar. Buat laporannya dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda!

## E. RISIKO YANG HARUS DIPERHATIKAN SAAT MENABUNG DAN BERINVESTASI

Dalam menabung dan berinvestasi ada beberapa risiko yang harus diperhatikan, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Risiko yang Melekat (*Inherent Risk*)

Setiap produk yang ditawarkan oleh bank, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Produk-produk tersebut selain menjanjikan hasil keuntungan tertentu, juga mengandung risiko yang melekat, misalnya banknya sedang bermasalah. Oleh karena itu, setiap orang yang akan menabung dan berinvestasi perlu memahami karakteristik produk sebelum menabung dan berinvestasi.

Perlu diketahui bahwa tidak semua produk yang ditawarkan oleh bank murni produk bank. Produk yang murni perbankan diantaranya tabungan, giro, deposito, kredit, dan pembiayaan syariah, sedangkan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan lain dan dipasarkan melalui bank, contohnya reksadana dan *bancassurance*. Dalam hal ini, bank bertindak hanya sebagai agen penjualan, sehingga bank tidak bertanggung jawab atas kinerja produk tersebut.

Risiko yang melekat pada tabungan, giro, dan deposito diantaranya berupa kemungkinan terjadinya kesulitan penarikan atau pencairan dana jika terdapat permasalahan pada bank tempat menyimpan dana tersebut.

## 2. Risiko Eksternal

Selain risiko yang melekat, setiap produk juga memiliki risiko eksternal yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dalam negeri dan luar negeri, serta kondisi psikologis masyarakat. Risiko eksternal antara lain karena adanya pergerakan indeks harga saham, pergerakan nilai tukar mata uang, pergerakan tingkat suku bunga, krisis keuangan di negara lain, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kondisi keuangan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas politik.

### VALUES EXPLORER

Hal yang paling berisiko adalah tidak mengambil risiko itu sendiri  
(Bong Chandra, 2012)

## 3. Mengurangi Risiko Menabung dan Berinvestasi

Sebelum memanfaatkan produk yang ditawarkan bank, perlu memahami risiko yang mungkin timbul, serta mengetahui cara mengurangi risiko tersebut. Pemerintah telah menyediakan sarana untuk mengurangi risiko produk tabungan, giro dan deposito melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Salah satu syarat penjaminan LPS adalah suku bunga yang diberlakukan sesuai dengan yang ditetapkan LPS.

LPS dibentuk oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana sudah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS (Undang-Undang LPS). Fungsi LPS menurut UU LPS Pasal 4 adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Adapun tugas LPS adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
2. Melaksanakan penjaminan simpanan.
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif

### Pojok Pengelolaan Keuangan

*Bancassurance* adalah layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah. Keuntungan *Bancassurance* diantaranya sebagai berikut:

- Dapat digunakan untuk berbagai tujuan investasi, misalnya untuk dana pendidikan, tabungan atau dana hari tua. Produk ini dapat memenuhi kebutuhan untuk menabung, perencanaan keuangan, proteksi, sekaligus untuk investasi.
- Pilihan dana investasi yang beragam sesuai dengan besarnya toleransi terhadap risiko dan potensi keuangan yang sesuai dengan keinginan.
- Jumlah perlindungan jiwa dapat dipilih sesuai kebutuhan dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- Kebebasan untuk melakukan penambahan maupun penarikan dana sewaktu-waktu dan perlindungan asuransi tetap berjalan.

- memelihara stabilitas sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik.
  5. Melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Untuk produk reksadana, perlu membaca dan memahami dengan teliti risiko produk tersebut, serta mempertimbangkan apakah besarnya risiko produk tersebut sesuai dengan yang diperkirakan.

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, setiap orang berhak meminta bank atau lembaga keuangan lainnya yang akan menjadi tempat berinvestasi untuk menjelaskan syarat dan ketentuan yang berlaku mengenai produk investasi yang akan dipilih.

#### VALUES EXPLORER

Orang kaya itu sombong, orang yang sangat kaya itu rendah hati, janganlah menjadi orang yang kaya, jadilah orang yang sangat kaya (Bong Chandra, 2012)

#### Uji Kompetensi

Carilah referensi melalui internet tentang risiko berinvestasi dalam bentuk tabungan, reksadana dan saham. Hasilnya, diskusikan bersama kelompok belajar Anda!

#### SIMPULAN (SUMMARY)

- Pengelolaan keuangan merupakan suatu rencana bagaimana penghasilan yang didapatkan dikelola untuk berbagai keperluan baik di masa lalu, masa kini, dan masa depan.
- Pengelolaan keuangan merupakan salah satu bagian dari upaya mengatasi masalah ekonomi, baik bagi individu, keluarga maupun perusahaan.
- Masa lalu terkait dengan tindakan melakukan pengeluaran tanpa membayar secara penuh atau berhutang. Masa kini adalah menyusun anggaran belanja rutin dan memastikan pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Masa depan adalah membuat rencana untuk pemenuhan suatu pengeluaran yang akan terjadi di masa mendatang, beberapa bulan ke depan atau bahkan beberapa tahun.
- Tujuan dari pengelolaan keuangan diantaranya sebagai berikut, yaitu:

1. Mencapai target dana tertentu di masa yang akan datang.
2. Melindungi dan meningkatkan aset kekayaan yang dimiliki
3. Mengatur arus kas (pemasukan dan pengeluaran uang).
4. Melakukan manajemen risiko dan mengatur risiko investasi dengan baik
5. Mengelola utang piutang.

### REFLEKSI (REFLECTION)

Apakah *learning goals* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk internet.

### GLOSARIUM (GLOSSARY)

- Aset (*Asset*) : Produk bernilai yang dikuasai atau dimiliki satu perusahaan atau seseorang berupa harta benda (properti), hak atau suatu tuntutan terhadap aktiva maupun jasa yang dimiliki.
- Agunan (*Collateral*) : Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
- Anjungan Tunai Mandiri (ATM) : Mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. Melalui mesin tersebut, nasabah dapat menabung, mengambil uang tunai, mentransfer dana antar rekening dan transaksi rutin lainnya.
- Arus Kas (*Cash Flow*) : Arus masuk (*cash inflow*) dan arus keluar kas (*cash outflow*) karena adanya aktivitas seseorang atau perusahaan yang merubah jumlah nominal uang tunai dan uang dalam simpanan di bank.

Bagi hasil	:	Suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemilik dana dengan pengelola dana.
Berinvestasi	:	Sebuah tindakan untuk meningkatkan nilai harta yang dimiliki agar dikemudian hari dapat lebih berkembang.
<i>Bancassurance</i>	:	Layanan bank dalam menyediakan produk asuransi yang memberi perlindungan dan produk investasi untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang nasabah.
Bunga Bank ( <i>Bank Interest</i> )	:	Sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpan di bank yang dihitung sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan bank kepada debiturnya.
<i>Call Centre</i>	:	Suatu kantor informasi yang terpusat yang digunakan untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon.
<i>Internet Banking</i>	:	Melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan <i>website</i> milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak bank yang menyediakan layanan atau jasa <i>internet banking</i> yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
Lembaga Keuangan	:	Lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain, termasuk di dalamnya adalah bank dan lembaga keuangan non bank.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	:	Badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah.
Menabung	:	Kegiatan menyisihkan uang untuk dikumpulkan guna mencapai target dana tertentu agar kelak dapat digunakan untuk tujuan tertentu.
<i>Mobile Banking</i>	:	Layanan berbasis internet nirkabel yang memungkinkan perbankan yang aman dan nyaman di mana saja melalui perangkat ponsel.

Saham	: Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Saham merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan.
Surat Berharga	: Surat pengakuan utang, wesel, saham obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
<i>SMS Banking</i>	: Layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui layanan pesan singkat (SMS) dari perangkat ponsel.
Utang	: Seluruh kewajiban keuangan perusahaan atau seseorang kepada pihak lain sebagai konsekuensi atas suatu manfaat yang diterima perusahaan atau seseorang dari pihak tersebut.
Pengelolaan Keuangan	: Sebuah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan di masa yang akan datang.
<i>Phone Banking</i>	: Suatu cara melakukan transaksi perbankan lewat telepon.
Piutang	: Tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan), yang timbul akibat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit atau akibat pemberian pinjaman kepada pihak lain.
PIN ( <i>Personal Identification Number</i> )	: Nomor rahasia yang diberikan kepada pemegang kartu (kartu kredit, kartu ATM, kartu debit, dan sebagainya) yang nomor kodenya dapat diberikan oleh bank atau perusahaan pembiayaan atau ditentukan sendiri oleh pemegang kartu.
Tabungan	: Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

## PENILAIAN

### 1. Tes tertulis :

Dalam bentuk objektif dan uraian: untuk menilai kemampuan kognitif tentang pengelolaan keuangan dalam bentuk objektif dan uraian.

### 2. Unjuk kerja :

Menilai kemampuan diskusi/presentasi laporan hasil penyusunan rencana pengelolaan keuangan individu.

### 3. Penilaian produk :

Menilai hasil pembuatan tugas menyusun rencana pengelolaan keuangan individu.

## PENUGASAN

### 1. Tugas Terstruktur

- Buat kelompok belajar 5-7 orang per kelompok.
- Dari anggota kelompok yang ada, bagi menjadi dua tim.
- Tim pertama merencanakan untuk kunjungan ke bank syariah terdekat dan tim kedua bertugas untuk berkunjung ke bank konvensional terdekat.
- Mintalah informasi tentang syarat-syarat, kelebihan dan kekurangan dari produk tabungan yang dikeluarkan bank tersebut.
- Diskusikan hasil kunjungan terutama sisi manfaat produk tabungan di bank syariah dan bank konvensional dalam mendukung pengelolaan keuangan seseorang.
- Buat laporan tertulis tentang hasil kunjungan dan hasil diskusi kelompok.
- Sampaikan laporan tertulis kelompok Anda kepada guru ekonomi, maksimal satu minggu sebelum pelaksanaan Ulangan Tengah Semester (UTS).

### 2. Tugas Mandiri

- Carilah referensi dari internet atau sumber lain yang relevan tentang trik mengelola keuangan pribadi secara bijak.
- Buatlah resume/ringkasan hasil pencarian Anda dan sampaikan kepada guru ekonomi Anda sebagai tugas mandiri.



### 10 Cara Cerdas Pengelolaan Keuangan Pribadi

1. Tetapkan tujuan keuangan
2. Buat rencana pengeluaran
3. Tahan diri terhadap godaan tawaran penjualan
4. Lacak pengeluaran pribadi
5. Mencari produk serupa yang menawarkan harga lebih murah
6. Lakukan riset online sebelum mengunjungi toko
7. Cari pendapatan lebih dari satu sumber
8. Mulai bisnis sendiri
9. Negosiasikan gaji kembali
10. Jangan menghindar dari utang

Sumber: Laman US News tentang *personal finance*, Selasa (11/6/2013) sebagaimana dikutip oleh <http://bisnis.liputan6.com/read/609338/10-cara-cerdas-mengatur-keuangan-pribadi>.

Halaman ini sengaja dikosongkan



# BAB 5

## INDEKS HARGA DAN INFLASI

### KOMPETENSI INTI

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KOMPETENSI DASAR

1. Menganalisis indeks harga dan inflasi
2. Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

1. Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
2. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia;
3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi;
4. Menganalisis indeks harga dan inflasi;
5. Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi;

## ALOKASI WAKTU

4 x 4 Jam Pelajaran (16 JP/Pertemuan)

## PENDEKATAN DAN ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN:

1. Pendekatan Pembelajaran:
  - a. Pendekatan Belajar Sains (*observing, questioning, experimenting, associating, communicating*)
  - b. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
  - c. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/ CTL*)
2. Alternatif Model Pembelajaran:
  - a. *Group Investigation*
  - b. *Problem Based Introduction (PBI)*
  - c. *Think Pair and Share*
  - d. Model lainnya yang relevan

## PETA KONSEP (CONCEPT MAP)



## KATA KUNCI (KEY WORDS)

Indeks Harga, Inflasi, Permintaan Uang, Penawaran Uang

Harga kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras dan minyak goreng seringkali mengalami perubahan dan kecenderungan perubahannya adalah naik. Harga satu kilogram beras pada bulan Januari 2013, cenderung lebih tinggi dibanding harga bulan Januari 2012, begitu pula pada periode lainnya. Jika kenaikan harga barang-barang tersebut berimbas kepada harga barang-barang lainnya dan berlangsung secara terus menerus, maka kondisi tersebut disebut dengan inflasi.

Apakah inflasi merugikan? Dalam batas tertentu, inflasi sangat diperlukan, mengapa? Jika tidak ada inflasi, maka tentu para produsen kurang terdorong untuk terus melakukan kegiatan produksinya. Namun, bagaimana dampak inflasi bagi konsumen? Bagaimana pula peran pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi? Apakah terdapat hubungan antara inflasi dengan jumlah uang yang beredar? Anda akan menemukan jawabannya dalam pembahasan bab ini.

### Pojok Inflasi

Komoditas barang dan jasa yang dipilih dalam perhitungan IHK didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2007. Data SBH tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan paket komoditas, penimbang dan tahun dasar dalam pengolahan IHK.

## A. PERMINTAAN DAN PENAWARAN UANG

### 1. Teori Permintaan dan Penawaran Uang

Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang. Adapun penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Permintaan uang dan penawaran uang yang saling berinteraksi di pasar uang menentukan harga dan kuantitas uang. Jika jumlah permintaan uang melebihi jumlah penawaran uang, maka akan cenderung mengakibatkan gejala deflasi. Sementara itu, jika jumlah permintaan uang lebih rendah dibanding jumlah penawaran uang, maka akan cenderung mengakibatkan gejala inflasi.

Untuk lebih memahami tentang konsep permintaan dan penawaran uang, maka Anda harus mengetahui teori permintaan dan penawaran uang. Secara umum, teori permintaan dan penawaran uang dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

#### a. Teori Uang Statis

Teori ini disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Teori uang statis terdiri atas:

- 1) Teori Metalisme (*Intrinsik*). Menurut teori ini, uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu, contoh: uang emas dan uang perak.
- 2) Teori Konvensi (Perjanjian). Menurut teori ini, uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran.
- 3) Teori Nominalisme. Menurut teori ini, uang diterima berdasarkan nilai pertukarannya, yaitu daya belinya.
- 4) Teori Negara. Menurut teori ini, asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi, uang bernilai karena pengumuman negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan.

#### b. Teori Kuantitas.

- 1) Teori Kuantitas dari David Ricardo  
Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang

beredar menjadi dua kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula, dan juga sebaliknya. Secara rumus, teori ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$M = K \cdot P \text{ atau } P = 1/ K \times M$$

Keterangan:

- M = Jumlah uang
- K = Pembanding tetap/konstanta
- P = Tingkat harga

## 2) Teori Kuantitas dari Irving Fisher

Teori kuantitas Irving Fisher merupakan penyempurnaan atas teori kuantitas David Ricardo. Irving Fisher memasukkan unsur kecepatan peredaran uang dan jumlah transaksi atas barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Fisher mengajukan rumus yang lazim disebut *Fishers Equation* sebagai berikut:

$$M V = P T$$

Keterangan:

- M = Jumlah uang yang beredar
- V = Kecepatan peredarannya
- P = Tingkat harga
- T = Jumlah transaksi

Contoh Kasus:

Jumlah uang beredar 200 juta, kecepatan peredaran uang 0,5 dan jumlah transaksi 500 ribu, berapakah:

- a. Nilai uang
- b. Jika uang naik 2 kali yang lain tetap, berapa nilai uang?

**Jawab:**

- a. Nilai uang  
 $M = 200.000.000 \quad V = 0,5 \quad T = 500.000$   
 $P = M \cdot V/T$   
 $P = 200.000.000 \times 0,5 : 500.000$   
 $= 100.000.000 : 500.000$   
 $= 200$
- b. Nilai uang jika uang naik 2 kali lipat  
 $M = 2 \times 200.000.000 = 400.000.000$   
 $V = 0,5 \quad T = 500.000$

### Pojok Inflasi

Teori kuantitas uang menggambarkan analisis hubungan langsung yang sistematis antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi yang dinyatakan dalam "the equation of exchange"  
 $MV=PT$ . Dimana  
M=jumlah uang beredar,  
V=tingkat perputaran uang, T=volume output,  
P=tingkat harga.  
Berdasarkan teori ini, dalam jangka panjang pertumbuhan jumlah uang beredar tidak berpengaruh pada perkembangan output, tetapi akan mendorong kenaikan tingkat harga secara proporsional.

### Forum Inflasi

Jumlah uang beredar 500 juta, kecepatan peredaran uang 0,7 dan jumlah transaksi 1.000.000, berapakah:  
a. Nilai Uang  
b. Jika uang naik 3 kali yang lain tetap, berapa nilai uang?

$$\begin{aligned}
 P &= M \cdot V/T \\
 &= 400.000.000 \times 0,5 : 500.000 \\
 &= 400
 \end{aligned}$$

### Pojok Inflasi

Menurut Keynes, tinggi rendahnya permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga secara positif ditentukan oleh pendapatan yang diterima, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi secara negatif ditentukan oleh tingkat bunga.

### c. Teori Keynes

Tidak semua ekonom sependapat dengan teori kuantitas uang yang dikembangkan Irving Fisher. Diantaranya adalah J.M. Keynes yang menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi *full employment* (kapasitas ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka penambahan uang beredar justru akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja serta tidak akan meningkatkan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, penambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap terhadap variabel-variabel riil, seperti *output* dan suku bunga.

Teori Keynes lainnya dikenal dengan Teori Preferensi Likuiditas yang mengungkapkan bahwa penawaran uang ditentukan oleh otoritas moneter atau bank sentral, sedangkan permintaan uang ditentukan oleh tiga motif orang memiliki uang, yakni motif transaksi (*Transaction Motive*), motif berjaga-jaga (*Precautionary Motive*) dan motif spekulasi (*Speculative Motive*).

### d. Teori Strukturalis

Teori strukturalis menyatakan bahwa inflasi, terutama di negara berkembang, lebih disebabkan oleh faktor-faktor struktural dalam perekonomian. Menurut teori struktural, terdapat dua masalah struktural dalam perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan inflasi.

*Pertama*, penerimaan ekspor tidak elastis, yaitu pertumbuhan ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh kecenderungan perdagangan yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang peka terhadap kenaikan harga. Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan mengakibatkan harga barang yang tinggi, sehingga menimbulkan inflasi.

*Kedua*, produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat pertumbuhan penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga harga

### Pojok Inflasi

Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga mencerminkan fungsi uang sebagai *medium of exchange*, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi mencerminkan fungsi uang sebagai *store of value*.



makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi dari pada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal tersebut mendorong timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri, yang berdampak akan meningkatkan biaya produksi dan menimbulkan inflasi.

## **2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan dan Penawaran Uang**

### **a. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan Uang**

Permintaan uang dipengaruhi oleh hasrat atau motif seseorang memegang uang tunai. J.M. Keynes mengatakan bahwa hasrat atau motif seseorang memegang uang (*liquidity preference*) karena didorong oleh tiga motif sebagai berikut:

1) **Motif Transaksi (*Transaction Motive*)**

Motif ini didasarkan penggunaan uang untuk transaksi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Misalnya pembelian bahan pokok, pembayaran listrik dan telepon, dan lain sebagainya.

2) **Motif Berjaga-jaga (*Precautionary Motive*)**

Motif ini didasarkan kepada pemenuhan kebutuhan darurat yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Misalnya pembayaran biaya pengobatan di rumah sakit karena kecelakaan yang mendadak.

3) **Motif Spekulasi (*Speculative Motive*)**

Motif ini ditujukan memperoleh keuntungan secara cepat karena mengetahui peluang ekonomi yang menguntungkan di masa mendatang. Seseorang menyimpan uang tunai karena ia berharap dengan uang tunai yang dimilikinya ia akan mudah mendapat keuntungan yang sifatnya tidak terduga. Misalnya, Anda membeli saham dengan uang tunai seharga Rp2.000,00 per lembar. Kemudian, suatu saat nanti Anda bisa menjualnya lagi pada saat harga saham per lembarnya naik. Dengan demikian, akan diperoleh keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual saham tersebut yang biasa disebut *capital gain*.

### **b. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran Uang**

Penawaran uang adalah persediaan uang tunai dalam suatu perekonomian. Dalam hal ini, bank sentral memiliki wewenang untuk mencetak dan mengedarkan uang tunai. Di Indonesia, sebagaimana diamanahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia), lembaga yang memiliki kewenangan tunggal untuk membuat dan mengedarkan uang adalah Bank Indonesia, sehingga faktor yang menentukan penawaran uang merupakan faktor eksogen, yaitu faktor yang ditentukan di luar model. Dalam hal ini kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

### Uji Kompetensi

1. Agar daya beli masyarakat miskin meningkat, mengapa Bank Indonesia tidak mencetak dan mengedarkan uang secara langsung diberikan kepada masyarakat miskin secara besar-besaran!
2. Menurut Anda, upaya apa yang harus dilakukan Bank Indonesia dan Pemerintah agar permintaan uang untuk transaksi yang tinggi tidak berdampak kepada terjadinya *demand pull inflation* yang menurunkan daya beli masyarakat!
3. Jelaskan teori penawaran uang menurut Irving Fisher!
4. Menurut J.M. Keynes terdapat tiga motif seseorang melakukan permintaan uang. Jelaskan!
5. Jelaskan faktor yang memengaruhi penawaran uang!

### Pojok Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

## B. INDEKS HARGA

### 1. Pengertian Indeks Harga

Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan angka indeks? Angka Indeks merupakan suatu konsep yang dapat memberikan gambaran tentang perubahan-perubahan variabel dari suatu periode ke periode berikutnya. Angka Indeks dapat diartikan juga sebagai angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk angka. Adapun Indeks Harga (*Price Index*) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya. Indeks harga dapat diartikan juga sebagai angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang pada periode dan tempat tertentu. Indeks harga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Indeks harga sebagai pedoman nilai standar untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu.
- b. Penetapan indeks harga didasarkan pada hasil pengumpulan data dari sumber yang relevan.
- c. Indeks harga ditetapkan tidak dari seluruh barang atau populasi barang melainkan dari sampel.
- d. Indeks harga ditetapkan dalam bentuk angka.
- e. Penetapan tahun dasar didasarkan situasi normal atau kondisi ekonomi stabil.

Adapun jenis indeks harga secara umum dapat dibagi menjadi enam sebagai berikut:

- a. Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks yang umum digunakan untuk menggambarkan pergerakan harga. Dengan kata lain, IHK adalah indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai harga barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Perhitungan IHK dilakukan untuk merekam perubahan harga beli di tingkat konsumen (*purchasing cost*) dari sekelompok tetap barang dan jasa (*fixed basket*) yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.
- b. Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (*raw materials*) produk antara (*intermediate products*) dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan.
- c. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indeks yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditi-komoditi yang diperdagangkan di suatu daerah. Dengan kata lain, IHPB adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di pasar. Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa IHPB menggambarkan besaran perubahan harga pada tingkat perdagangan besar dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu wilayah.
- d. Indeks harga yang diterima petani, yaitu indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan (harga pokok) yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani.
- e. Indeks harga yang dibayar petani, yaitu indeks harga yang meliputi pembelian/biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya.
- f. Indeks harga saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal.

## 2. Tujuan Perhitungan Indeks Harga

Secara umum, perhitungan angka indeks bertujuan untuk mengukur perubahan atau membandingkan perubahan antara variabel-variabel ekonomi seperti harga konsumen, harga saham dan sebagainya. Perhitungan tentang indeks harga sangat diperlukan dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Hasil perhitungan biasanya digunakan

### Pojok Inflasi

Perhitungan IHK dilakukan oleh BPS setiap bulan berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2007 yang dilaksanakan di 66 kota yang terdiri dari 33 ibukota provinsi dan 33 kota/kabupaten. Barang dan jasa yang dipilih bervariasi antara 284 jenis komoditas per kota dan secara keseluruhan terdiri dari 774 komoditas yang diklasifikasikan menjadi 7 kelompok. Jumlah komoditas terendah di Kota Tarakan sebanyak 284 komoditas, sedangkan yang terbanyak di Kota Jakarta yaitu 441 komoditas.

### Pojok Inflasi

Untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa kebutuhan hidup dipergunakan Indeks Biaya Hidup (IBH), untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan dikenal Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), untuk mengukur perubahan harga bagi produsen dikenakan adanya Indeks Biaya Produsen (IBP), untuk mengukur perubahan harga properti dihitung Indeks Harga Properti.

Data harga barang dan jasa yang dikumpulkan/dicacah adalah harga di tingkat pedagang eceran dan merupakan harga transaksi. Observasi harga dilakukan secara harian, mingguan, dua mingguan, dan bulanan. Dari setiap kota, data harga dikumpulkan pada beberapa pasar tradisional maupun pasar modern yang mewakili harga di kota tersebut. Data dari masing-masing komoditas diperoleh dari 3 atau 4 outlet dan dikumpulkan langsung dari pemantauan harga (*direct interview*).

sebagai bahan informasi untuk mengetahui perkembangan ekonomi dan salah satu dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain tujuan umum di atas, perhitungan indeks harga juga memiliki beberapa tujuan khusus sebagai berikut:

- a. Sebagai pedoman untuk melakukan perbandingan harga dari waktu ke waktu.
- b. Sebagai petunjuk untuk mengukur perkembangan ekonomi secara umum.
- c. Sebagai gambaran perkembangan perdagangan pada periode tertentu.
- d. Sebagai dasar penetapan gaji, termasuk dasar untuk mengubahnya.
- e. Sebagai gambaran daya tukar petani.
- f. Sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan ekonomi Pemerintah dan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia.

### 3. Metode Perhitungan Indeks Harga

Secara umum terdapat dua metode perhitungan indeks harga, yaitu sebagai berikut:

#### a. Metode Tidak Tertimbang (Agregatif Sederhana)

Metode Tidak Tertimbang (Agregatif Sederhana) diperoleh dengan cara menjumlahkan harga barang dan jasa setiap tahun dibagi dengan harga tahun dasar dikali 100. Jika dibuat persamaan matematikanya sebagai berikut:

$$IA = \frac{\sum P_n}{\sum P_o} \times 100$$

Keterangan :

IA : indeks agregatif tidak tertimbang sederhana

$\sum P_n$  : jumlah harga pada tahun yang di hitung indeks harganya

$\sum P_o$  : jumlah harga pada tahun dasar

Contoh Kasus:

Jika diketahui data harga barang tahun 2012 dan 2013 sebagai berikut:

Macam Barang	Harga 2012 (Po)	Harga 2013 (Pn)
A	Rp. 200	Rp. 300
B	Rp. 300	Rp. 350
C	Rp. 500	Rp. 500
D	Rp. 100	Rp. 50
E	Rp. 200	Rp. 300
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1.300</b>	<b>Rp. 1.500</b>

Hitunglah indeks harga tahun 2013 dengan metode tidak tertimbang!

Jawab :

$$IA = \frac{\sum P_n}{\sum P_o} \times 100$$

$$IA = \frac{1.500}{1.300} \times 100$$

$$IA = 115,38$$

### b. Metode Tertimbang

Metode Tertimbang memiliki tiga cara perhitungan sebagai berikut:

#### 1. Metode Laspeyres

Metode Laspeyres diperoleh dengan cara menjumlahkan harga barang dan jasa setelah dikalikan dengan kuantitasnya setiap tahun dan dibagi dengan harga barang dikali kuantitasnya pada tahun dasar, rasionya dikali 100%. Persamaan matematisnya sebagai berikut:

$$IL = \frac{\sum (P_n \cdot Q_o)}{\sum (P_o \cdot Q_o)} \times 100$$

Keterangan :

IL : Indeks harga Laspeyres

P<sub>n</sub> : Harga pada tahun yang dihitung indeks harganya

P<sub>o</sub> : Harga pada tahun dasar

Q<sub>o</sub> : Kuantitas pada tahun dasar

Contoh Kasus:

Jika diketahui data harga dan kuantitas barang tahun 2012 dan 2013 di Kota Malang sebagai berikut:

**Forum Indeks Harga**

Menurut Anda, faktor apa saja yang menjadikan naik turunnya Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia?

**Pojok Inflasi**

Perkembangan kenaikan harga sejumlah barang dan jasa secara umum dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya disebut laju inflasi (*inflation rate*). Laju inflasi pada umumnya dinyatakan dalam angka persentase (%)

IHK adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Dalam menyusun IHK di Indonesia, data harga konsumen atau retail diperoleh dari 66 kota dan mencakup antara 284 - 441 barang dan jasa.

Macam Barang	P		Q		Pn . Qo	Po . Qo
	2012	2013	2012	2013		
A	200	300	50	100	15.000	10.000
B	300	350	100	100	35.000	30.000
C	500	500	200	250	100.000	100.000
D	100	50	300	450	15.000	30.000
E	200	300	150	100	45.000	30.000
Σ	<b>1300</b>	<b>1500</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>210.000</b>	<b>200.000</b>

Hitung Indeks Harga tahun 2013 di Kota Malang dengan metode Laspeyres!

$$IL = \frac{210.000}{200.000} \times 100$$

$$= 105$$

## 2. Metode Paasche

Metode Paasche diperoleh dengan cara menggunakan faktor penimbang kuantitas barang pada tahun yang dihitung angka indeksinya. Persamaan matematisnya sebagai berikut:

Rumus :

$$IP = \frac{\sum(P_n.Q_n)}{\sum(P_o.Q_n)} \times 100$$

Keterangan :

IP : Indeks harga Paasche

Pn : Harga pada tahun yang dihitung indeks harganya

Po : Harga pada tahun dasar

Qn : Kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya

Contoh Kasus:

Jika diketahui data harga dan kuantitas barang tahun 2012 dan 2013 di Kota Bandung sebagai berikut:

Macam Barang	P		Q		Pn . Qn	Po . Qn
	2012	2013	2012	2013		
A	200	300	50	100	30.000	20.000
B	300	350	100	100	35.000	30.000
C	500	500	200	250	125.000	125.000
D	100	50	300	450	22.500	45.000
E	200	300	150	100	30.000	20.000
Σ	<b>1300</b>	<b>1500</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>242.500</b>	<b>240.000</b>

Hitunglah indeks harga tahun 2013 di Kota Bandung dengan menggunakan metode Paasche!

$$IP = \frac{242.500}{240.000} \times 100$$

$$= 101,04$$

### 3. Metode Marshall

Metode Marshall diperoleh dengan cara menjumlahkan kuantitas pada tahun dasar dengan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dengan harga pada tahun yang dihitung indeks harganya. Hasilnya dibagi dengan hasil penjumlahan antara kuantitas pada tahun dasar dengan kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya dikali dengan harga pada tahun dasar, rasionya dikali 100%. Persamaan matematisnya sebagai berikut:

$$IM = \frac{\Sigma(Q_0+Q_n).P_n}{\Sigma(Q_0+Q_n).P_0} \times 100$$

Keterangan :

IM : Indeks harga Marshall

P<sub>n</sub> : Harga pada tahun yang dihitung indeks harganya

P<sub>0</sub> : Harga pada tahun dasar

Q<sub>n</sub> : Kuantitas pada tahun yang dihitung indeks harganya

Q<sub>0</sub> : Kuantitas pada tahun dasar

Contoh Kasus:

Jika diketahui data harga dan kuantitas barang tahun 2012 dan 2013 di Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Macam Barang	P		Q		(Q <sub>0</sub> + Q <sub>n</sub> ) . P <sub>n</sub>	(Q <sub>0</sub> + Q <sub>n</sub> ) . P <sub>0</sub>
	2012	2013	2012	2013		
A	200	300	50	100	45.000	30.000
B	300	350	100	100	70.000	60.000
C	500	500	200	250	225.000	225.000
D	100	50	300	450	37.500	75.000
E	200	300	150	100	75.000	50.000
Σ	<b>1300</b>	<b>1500</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>	<b>452.500</b>	<b>440.000</b>

Hitunglah indeks harga tahun 2013 di Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode Marshall !

Jawab:

#### Forum Indeks Harga

Bagaimana pengaruh kenaikan harga BBM terhadap inflasi di daerah? Diskusikan

$$IM = \frac{452.500}{440.000} \times 100$$

$$= 102,8$$

### Uji Kompetensi

1. Menurut Anda, apakah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 sesuai dengan harapan rakyat!
2. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan agar program pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah tidak mendorong inflasi yang tinggi!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan indeks harga?
4. Jelaskan perbedaan antara IHK, IHPB, IBH, dan IBP!
5. Jelaskan tujuan dilakukannya perhitungan indeks harga!
6. Jelaskan perbedaan antara metode perhitungan angka indeks tidak terimbang dengan indeks tertimbang!

## C. INFLASI



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Gambar 5.2. Karakteristik Inflasi

### 1. Pengertian Inflasi

Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari besar lainnya biasanya harga barang-barang cenderung mengalami kenaikan. Apakah kondisi tersebut bisa disebut sebagai gejala inflasi? Apa sesungguhnya inflasi itu? Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat tiga komponen utama yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan inflasi:

#### a. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi daripada harga periode sebelumnya. Adanya kenaikan harga suatu



barang menjadi suatu gejala terjadinya inflasi, walaupun tidak setiap kenaikan harga dapat disebut inflasi.

### **b. Bersifat Umum**

Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan berdampak inflasi, jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga-harga secara umum naik. Dengan kata lain, inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi dalam suatu perekonomian.

### **c. Berlangsung Terus-Menerus**

Kenaikan yang bersifat umum juga belum akan menimbulkan inflasi, jika terjadinya hanya sesaat. Oleh karena itu, perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab, dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Rentang waktu yang lebih panjang adalah triwulan dan tahunan.

Untuk mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu pada umumnya dipergunakan angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya angka inflasi. Perubahan angka indeks dari suatu waktu ke waktu lainnya yang dinyatakan dalam angka persentase adalah besarnya angka inflasi dalam periode tersebut.

## **2. Penyebab Inflasi**

Secara umum, inflasi dapat disebabkan oleh naiknya permintaan terhadap barang dan jasa secara signifikan atau bisa juga disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Naiknya permintaan dan naiknya biaya produksi mendorong produsen untuk menaikkan harga, jika kenaikan harga berlangsung secara terus menerus, maka terjadilah apa yang disebut dengan inflasi.

Secara umum terdapat tiga faktor penyebab inflasi yakni permintaan, penawaran dan ekspektasi. Untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan sebagai berikut:

### **a. Permintaan**

Adanya kenaikan permintaan agregat (*agregat demand*) yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran agregat (*agregat supply*) atas barang dan jasa dapat menyebabkan inflasi permintaan (*demand pull*

*inflation*). Permintaan agregat adalah total permintaan barang dan jasa untuk keperluan konsumsi dan investasi dalam suatu perekonomian. Jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi dan diinvestasikan tersebut digambarkan oleh Produksi Domestik Bruto (PDB) perekonomian bersangkutan. Adapun penawaran agregat adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh suatu perekonomian untuk dapat memenuhi permintaan agregat.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Gambar 5.3. Tiga Penyebab Utama Inflasi**

Perbedaan antara permintaan dan penawaran agregat disebut *output gap*. Apabila permintaan agregat lebih besar dibanding penawaran yang tersedia, maka tekanan terhadap inflasi akan semakin besar, dan sebaliknya. *Output gap* dapat terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang sudah mencapai tingkat maksimum, sedangkan kondisi tersebut dalam jangka pendek tidak dapat ditingkatkan, sehingga pada akhirnya permintaan yang semakin meningkat tidak dapat diimbangi dengan penawaran.

#### **b. Penawaran**

Adanya kenaikan biaya produksi atau biaya pengadaan barang dan jasa menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran (*supply*) ke pasar. Kondisi tersebut dapat menyebabkan inflasi penawaran (*cost push inflation*). Inflasi dari sisi penawaran bisa juga disebabkan distribusi yang kurang lancar, cuaca buruk, gagal panen, dan sebagainya.

Adanya faktor penawaran lainnya yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah seperti harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL), dapat pula menyebabkan inflasi dari sisi penawaran.

### c. Ekspektasi atau Prakiraan tentang Masa Depan

Adanya ekspektasi para pelaku ekonomi tentang prakiraan masa depan dapat menyebabkan ekspektasi inflasi. Perubahan harga dapat terjadi akibat prakiraan perubahan harga di masa depan oleh pelaku ekonomi. Contohnya apabila pelaku ekonomi, baik secara individu maupun lembaga, berfikir bahwa laju inflasi yang terjadi di waktu-waktu yang lalu masih akan terjadi pada waktu yang akan datang, maka hal tersebut akan berpotensi menimbulkan inflasi.

Ekspektasi inflasi juga dapat disebabkan oleh ekspektasi pelaku ekonomi yang didasarkan pada kebijakan yang dilakukan pemerintah dan otoritas moneter pada saat ini. Misalnya, dengan adanya kebijakan moneter ketat yang dilakukan otoritas moneter pada saat ini, pelaku usaha akan mengambil keputusan usahanya didasarkan ekspektasi mereka terhadap dampak kebijakan moneter ketat tersebut pada masa yang akan datang. Jika masyarakat memperkirakan bahwa dengan adanya kebijakan moneter ketat inflasi akan menurun, maka mereka akan mengambil keputusan usahanya berdasarkan prakiraan tingkat inflasi yang diperkirakan akan menurun tersebut.

### 3. Jenis-Jenis Inflasi

Secara umum, inflasi dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Inflasi Inti (*Core Inflation*), yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, serta ekspektasi atau prakiraan masa depan tentang inflasi dari pedagang dan konsumen
- b. Inflasi Noninti (*Noise Inflation*), yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Dalam hal ini terdiri atas:
  - 1) Inflasi *Volatile Food*  
Inflasi yang dipengaruhi tekanan (*shocks*) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan gangguan penyakit.
  - 2) Inflasi *Administered Prices*  
Inflasi yang dipengaruhi tekanan (*shocks*) berupa kebijakan harga pemerintah, seperti harga BBM, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Selain dua jenis inflasi di atas, inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa sudut pandang sebagai berikut:

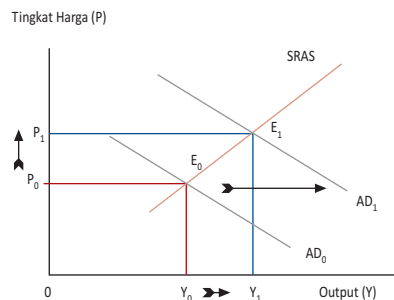
#### a. Inflasi Berdasarkan Faktor Pemicunya

- 1) Inflasi Tarikan Permintaan (*Demand Pull Inflation*).

#### Pojok Inflasi

Selain faktor permintaan dan penawaran, inflasi dapat disebabkan oleh ekspektasi. Gordon (1997) menjelaskan determinan inflasi dari tiga sisi tersebut, yaitu permintaan, penawaran dan ekspektasi ("the triangle model"). Pentingnya ekspektasi dalam mempengaruhi inflasi juga dinyatakan sebelumnya oleh Chopra (1985).

Inflasi tarikan permintaan atau bisa juga disebut inflasi sisi permintaan (*demand side inflation*) atau inflasi karena guncangan permintaan (*demand shock inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi barang-barang. Kondisi tersebut di atas terjadi karena pemanfaatan sumber daya yang telah mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat ditingkatkan secepatnya dalam rangka mengimbangi permintaan yang semakin meningkat. Secara grafik, inflasi tarikan permintaan dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Grafik 5.1. Inflasi Tarikan Permintaan**

Berdasarkan Grafik 5.1 dapat diketahui bahwa perekonomian mula-mula berada pada titik  $E_0$ . Dengan kenaikan permintaan agregat (AD) dari  $AD_0$  ke  $AD_1$  menyebabkan tingkat harga (P) naik dari  $P_0$  ke  $P_1$ , dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dari titik  $E_0$  ke  $E_1$ , sehingga dalam jangka pendek output naik dari  $Y_0$  ke  $Y_1$ .

2) Inflasi Dorongan Biaya (*Cost Push Inflation*).

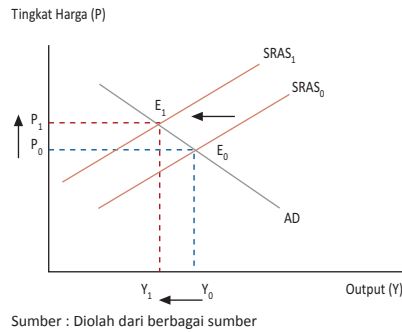
Inflasi dorongan biaya atau juga sering disebut inflasi sisi penawaran (*Supply Side Inflation*) atau inflasi karena guncangan penawaran (*Supply Shock Inflation*) adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa ke pasar.

Dengan kata lain, inflasi sisi penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumber daya, atau inflasi yang terjadi apabila harga dari satu atau lebih sumber daya

**Pojok Inflasi**

Masalah sosial yang disebabkan oleh terjadinya inflasi yang tinggi diantaranya; menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat, makin buruknya distribusi pendapatan dan terganggunya stabilitas ekonomi.

mengalami kenaikan atau dinaikkan. Secara grafik, inflasi sisi penawaran dapat digambarkan sebagai berikut:



**Grafik 5.2. Inflasi Dorongan Biaya**

Berdasarkan Grafik 5.2 di atas ditunjukkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula berada di titik  $E_0$ . Dengan adanya kenaikan biaya produksi menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) bergeser sepanjang kurva permintaan agregat (AD), yaitu dari  $SRAS_0$  ke  $SRAS_1$ . Hal tersebut mendorong perekonomian bergerak dari titik  $E_0$  ke titik  $E_1$ . Akibatnya, harga naik dari  $P_0$  ke  $P_1$ , dan sebaliknya output turun dari  $Y_0$  ke  $Y_1$ .

3) **Inflasi Struktural (*Structural Inflation*)**

Inflasi struktural (*Structural Inflation*), yaitu inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural yang menyebabkan penawaran dalam perekonomian menjadi kurang atau tidak peka terhadap permintaan yang meningkat.

**b. Inflasi Berdasarkan Tingkatannya**

- 1) Inflasi Ringan, inflasi yang tingkatannya masih di bawah 10% per tahun.
- 2) Inflasi Sedang, inflasi yang tingkatannya berada di antara 10% - 30% per tahun.
- 3) Inflasi Berat, inflasi yang tingkatannya berada di antara 30% - 100% per tahun.
- 4) Hiper Inflasi, inflasi yang tingkatannya berada di atas 100% per tahun.

**c. Inflasi Berdasarkan Asalnya**

- 1) *Domestic Inflation* atau inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang

PojoK Inflasi
Inflasi yang rendah dan stabil merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter.

## Pojok Inflasi

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir kali diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, tujuan kebijakan moneter lebih difokuskan pada sasaran tunggal (*single objective*) yaitu untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan stabilitas nilai Rupiah, implementasi tujuan kebijakan moneter difokuskan untuk mencapai stabilitas internal, yaitu kestabilan tingkat harga yang diukur dengan tingkat inflasi yang rendah.

terjadi di dalam negeri, misalnya terjadinya defisit anggaran belanja negara yang secara terus menerus dan diatasi dengan mencetak uang. Hal tersebut menyebabkan jumlah uang yang dibutuhkan di masyarakat melebihi transaksinya dan menyebabkan nilai uang menjadi rendah dan harga barang meningkat.

- 2) *Imported Inflation* atau inflasi yang terjadi sebagai imbas dari kenaikan harga barang impor. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan harga barang impor, seperti baja, mesin-mesin produksi, dan barang modal lainnya, yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Tabel 5.1 Jenis-Jenis Inflasi

No	Sudut Tinjauan	Jenis Inflasi	Keterangan
1	Tingkatannya	1. Inflasi ringan 2. Inflasi sedang 3. Inflasi berat 4. Hyperinflasi	10% 10%-30% 30%-100% Di atas 100%
2	Faktor Pemicu	1. <i>Demand pull inflation</i> 2. <i>Cost push inflation</i> 3. <i>Structural Inflation</i>	Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat atas berbagai barang yang sangat kuat. Inflasi yang timbul karena adanya kenaikan ongkos produksi. Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya berbagai kendala atau kekuatan struktural.
3	Asal inflasi	1. <i>Domestic Inflation</i> 2. <i>Imported Inflation</i>	Inflasi berasal dari dalam negeri: defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru, panen gagal, dan sebagainya. Inflasi berasal dari luar negeri: memakai barang impor, kenaikan ongkos produksi yang menggunakan bahan impor.

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

## 4. Menghitung Inflasi

Untuk mengetahui tingkat inflasi pada suatu periode tertentu, maka digunakan konsep indeks harga. Secara umum, terdapat tiga

indeks harga yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi yakni sebagai berikut:

**a. Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index* atau *CPI*).**

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indeks harga yang mengukur biaya sekelompok barang-barang dan jasa-jasa di pasar termasuk harga-harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, perawatan, kesehatan, pendidikan, dan komoditi lain, yang dibeli untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

Untuk menghitung laju inflasi dengan IHK, terlebih dahulu dilakukan perhitungan angka indeks dengan menggunakan sejumlah barang dan jasa yang dipergunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat. Di Indonesia, pada awalnya hanya digunakan sembilan bahan pokok, meliputi sandang, pangan, dan perumahan yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi sandang, pangan, dan perumahan, tetapi juga mencakup jasa kesehatan dan pendidikan.

Indeks Harga Konsumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IHK = \frac{P_n}{P_o} \times 100$$

Keterangan :

P<sub>n</sub> = Harga sekarang

P<sub>o</sub> = Harga pada tahun dasar

Contoh Kasus:

Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2012 adalah Rp20.000,00 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar Rp15.000,00 per unit maka indeks harga pada tahun 2012 dapat dihitung sebagai berikut:

$$IHK = \frac{\text{Rp. 20.000,00}}{\text{Rp. 15.000}} \times 100 = 133$$

Ini berarti pada tahun 2012 telah terjadi kenaikan IHK sebesar 33% dari harga dasar yaitu 133-100 (sebagai tahun dasar). Sedangkan untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Inflasi} = \frac{IHK_n - IHK_o}{IHK_o} \times 100\%$$

**Pojok  
Inflasi**

IHK merupakan sasaran inflasi yang digunakan Bank Indonesia. Terdapat beberapa alasan yang mendasari dipilihnya inflasi IHK sebagai target Bank Indonesia. Pertama, IHK merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen. Kedua, inflasi IHK relatif lebih populer di masyarakat. Komponen inflasi IHK terdiri atas inflasi inti dan inflasi noninti, hanya inflasi inti yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter.

Keterangan :

IHK<sub>n</sub> = Indeks Harga Konsumen Periode Ini

IHK<sub>o</sub> = Indeks Harga Konsumen Periode Lalu

#### Contoh Kasus

Jika IHK Tahun 2012 sebesar 133 dan IHK tahun 2011 sebesar 127, maka laju inflasi tahun 2012 perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Laju Inflasi} = ((133-127))/127 \times 100\% = 4,72\%$$

#### **b. Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index* atau *PPI*).**

Indeks Harga Produsen (IHP) adalah suatu indeks dari harga bahan-bahan baku (*raw materials*), produk antara (*intermediate products*), dan peralatan modal mesin yang dibeli oleh sektor bisnis atau perusahaan. IHP hanya mencakup bahan baku dan barang antara atau barang setengah jadi saja. Sementara itu, barang-barang jadi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.

Indek Harga Produsen dapat digunakan untuk melihat laju inflasi. Namun untuk memperoleh perhitungannya harus melihat data Indeks Harga Perdagangan Besar dari sejumlah komoditas tertentu yang diperdagangkan di suatu negara atau daerah. Rumus yang digunakan dalam menghitung laju inflasi, yaitu sebagai berikut.

$$\text{IHPB} = \frac{\text{IHPB}_n - \text{IHPB}_{n-1}}{\text{IHPB}_{n-1}} \times 100\%$$

Misalnya IHPB bulan Oktober 2012 untuk Kota Bandung sebesar 282 dan IHPB pada bulan September 2012 sebesar 275, maka laju inflasi dari sisi produsen bulan Oktober 2012 sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IHPB} &= \frac{\text{IHPB}_n - \text{IHPB}_{n-1}}{\text{IHPB}_{n-1}} \times 100\% \\ \text{IHPB} &= \frac{282-275}{275} \times 100\% \\ &= 2,55\% \end{aligned}$$

#### **c. *Gross National Product* (GNP) Deflator.**

GNP Deflator adalah suatu Indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP riil dikalikan dengan 100.



GNP riil adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan di dalam perekonomian yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar (*base year*). Oleh karena itu, GNP riil sering disebut juga dengan GNP berdasarkan tahun dasar (*GNP at base year price*). Pada tahun dasar tersebut, angka indeks ditetapkan sebesar 100. Sementara itu, GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku (*GNP at current market prices*).

$$GNP\ Deflator = \frac{GNP\ Nominal}{GNP\ Riil} \times 100$$

## 5. Dampak Inflasi

Inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak, di antaranya sebagai berikut:

- Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
- Inflasi mendorong redistribusi pendapatan di antara anggota masyarakat. Hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi (*redistribution effect of inflation*). Inflasi akan memengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan turun. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi. Hal tersebut karena inflasi yang tinggi menjadikan pendapatan riil mereka menjadi turun.
- Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja (*employment*). Hal tersebut terjadi karena inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini. Inilah yang disebut dengan "*output and employment effect inflation*".
- Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil (*unstable environment*) bagi kondisi ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang

### Pojok Inflasi

Stagflasi menerangkan kombinasi dari dua keadaan buruk, yaitu stagnasi dan inflasi. Stagnasi adalah kondisi di mana tingkat pertumbuhan ekonomi sekitar nol persen per tahun. Jumlah output relatif tidak bertambah. Sayangnya, kondisi ini disertai inflasi. Stagflasi akan terjadi jika permintaan agregat (AD) bertambah, sedangkan penawaran agregat (AS) berkurang.

### Forum Inflasi

Menjelang Hari Raya Idul Fitri atau hari besar nasional lainnya, pemerintah daerah bisanya melakukan operasi pasar untuk produk-produk tertentu seperti beras, minyak goreng, telur, dan daging. Menurut Anda apa tujuan kegiatan pemerintah tersebut? Jelaskan dampak yang timbul dari kegiatan tersebut? Apakah kebijakan tersebut efektif dalam mengendalikan laju inflasi?

- daripada mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi. Begitu pula halnya dengan bank, jika mereka menduga bahwa tingkat inflasi akan naik di masa mendatang, mereka akan menaikkan tingkat bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah proteksi dalam menghadapi penurunan pendapatan riil dan kekayaan (*losses of real income and wealth*).
- e. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investasi sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

## 6. Cara Mengendalikan Inflasi

### a. Peran Bank Sentral dalam Mengendalikan Inflasi

Melalui amanat yang tercakup di Undang Undang tentang Bank Indonesia, tujuan Bank Indonesia fokus pada pencapaian sasaran tunggal atau '*single objective-nya*', yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai oleh Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Bank Indonesia dituntut untuk mampu menetapkan kebijakan moneter secara tepat dan berimbang. Hal ini mengingat gangguan stabilitas moneter memiliki dampak langsung terhadap berbagai aspek ekonomi. Kebijakan moneter melalui penerapan suku bunga yang terlalu ketat, akan cenderung bersifat mematikan kegiatan ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, untuk menciptakan stabilitas moneter, Bank Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.

*Inflation Targeting Framework* merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya (i) pernyataan resmi dari bank sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah serta (ii) pengumuman target inflasi kepada publik. Pengumuman tersebut mengandung arti bahwa bank sentral memberikan komitmen dan jaminan kepada publik bahwa

setiap kebijakan moneternya selalu mengacu pada pencapaian target tersebut dan bank sentral mempertanggungjawabkan kebijakannya apabila target tersebut tidak tercapai.

Alasan Bank Indonesia memilih *Inflation Targeting Framework* (ITF) adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat sejumlah alasan mengapa menggunakan kerangka kebijakan moneter ITF:
  - a) ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan sasaran inflasi secara eksplisit, masyarakat akan memahami arah inflasi. Sebaliknya dengan sasaran *base money*, apalagi jika hubungannya dengan inflasi tidak jelas, masyarakat lebih sulit mengetahui arah inflasi ke depan.
  - b) ITF memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank Indonesia.
  - c) ITF bersifat *forward looking* sesuai dengan dampak kebijakan pada inflasi yang memerlukan *time lag*.
  - d) ITF meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan moneter, serta mendorong kredibilitas kebijakan moneter. Aspek transparansi dan akuntabilitas serta kejelasan akan tujuan ini merupakan aspek-aspek tata kelola yang baik (*good governance*) dari sebuah bank sentral yang telah diberikan independensi.
  - e) ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang beredar, output dan inflasi. Sebaliknya, ITF merupakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan sejumlah variable informasi tentang kondisi perekonomian.
  - f) Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa negara yang menerapkan ITF berhasil menurunkan inflasi tanpa meningkatkan output.
- 2) Penerapan ITF bukan berarti bahwa bank sentral hanya menaruh perhatian pada inflasi saja, melainkan juga memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Hal yang perlu diingat bahwa fokus kepada inflasi tidak berarti membawa perekonomian kepada kondisi yang sama sekali tanpa inflasi (*zero inflation*).
- 3) Inflasi rendah dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi berkorelasi positif dengan fluktuasinya. Ketika inflasi tinggi, fluktuasinya juga meningkat, sehingga masyarakat merasa tidak pasti dengan laju inflasi yang akan terjadi di masa mendatang. Akibatnya, suku bunga jangka panjang akan meningkat karena

tingginya risiko akibat inflasi. Perencanaan usaha menjadi lebih sulit, dan minat investasi pun menurun. Ketidakpastian inflasi ini cenderung membuat investor lebih memilih investasi jangka pendek daripada investasi riil jangka panjang.

Rancangan pelaksanaan ITF yang dikembangkan Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter adalah sebagai berikut:

1) Sasaran Inflasi

Sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Penetapan sasaran inflasi tersebut mempertimbangkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Indikator Kebijakan Moneter

Dalam merumuskan kebijakan moneter, Bank Indonesia selalu melakukan analisis dan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi, khususnya prakiraan inflasi, pertumbuhan ekonomi, komponen-komponen moneter, perkembangan sektor ekonomi, dan keuangan secara keseluruhan. Demikian pula, Bank Indonesia selalu dan terus memperhatikan langkah-langkah kebijakan ekonomi yang ditempuh Pemerintah.

3) Operasi Pengendalian Moneter

Pengendalian moneter dilakukan dengan menggunakan instrumen: (i) Operasi Pasar Terbuka (OPT), (ii) Giro Wajib Minimum (GWM), (iii) Fasilitas Diskonto (*Discount Facility*), dan (iv) Himbuan Moral (*Moral Suasion*). Uraian lebih jelas tentang masing-masing instrumen akan dijelaskan pada Bab 6.

## **b. Peran Pemerintah dalam Mengendalikan Inflasi**

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sasaran inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Kerjasama Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1) *Memorandum of Understanding (MoU)*

Koordinasi dengan Pemerintah menjadi bagian yang paling penting dalam penetapan dan pencapaian target inflasi. Koordinasi juga dimaksudkan agar kebijakan moneter Bank Indonesia sejalan dengan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian dengan tetap menjaga tugas dan wewenang masing-masing.

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dalam penetapan sasaran inflasi disesuaikan dengan MoU yang telah disepakati

Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia menyampaikan usulan sasaran inflasi kepada Pemerintah selambat-lambatnya bulan Mei pada tahun sebelum periode sasaran inflasi berakhir. Apabila terjadi kondisi yang luar biasa sehingga sasaran inflasi yang telah ditetapkan menjadi tidak realistis dan perlu direvisi, Bank Indonesia akan menyampaikan usulan perubahan sasaran inflasi setelah berkoordinasi dengan Pemerintah.

## 2) Koordinasi Kebijakan

Dalam penentuan target inflasi, Pemerintah memiliki peran yang cukup besar karena tidak semua sumber inflasi di bawah kendali Bank Indonesia. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam hal penentuan upah minimum regional, kenaikan gaji pegawai negeri, kebijakan-kebijakan lain yang terkait dengan ekonomi, seperti kebijakan bidang produksi sektoral, perdagangan dalam negeri dan tata niaga impor. Kebijakan-kebijakan pemerintah nonekonomi juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan ekonomi, sehingga pada akhirnya akan berpengaruh terhadap besarnya tingkat inflasi yang terjadi.

Adanya komitmen bersama antara Pemerintah dan Bank Indonesia yang jelas akan menjadikan sasaran inflasi lebih rasional dan bisa dicapai dengan baik. Jika sasaran inflasi ini dianggap rasional oleh pelaku pasar, artinya Pemerintah dan Bank Indonesia dianggap akan mampu mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga para pelaku pasar akan menyamakan prakiraan inflasi mereka dengan angka target inflasi. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah dan Bank Indonesia akan lebih mudah menstabilkan inflasi dalam jangka menengah dan panjang.

## 3) Tim Pengendalian Inflasi

Bank Indonesia dan Pemerintah membentuk Tim Pengendalian Inflasi (TPI) yang bertugas untuk memberikan usul mengenai sasaran inflasi, mengevaluasi sumber-sumber dan potensi tekanan terhadap inflasi serta dampaknya terhadap pencapaian target inflasi, merekomendasikan pilihan kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi, serta melakukan sosialisasi tentang sasaran dan upaya pencapaian sasaran inflasi kepada masyarakat. Koordinasi Tim difokuskan pada upaya mengurangi beban ekonomi biaya tinggi. Selain itu, diarahkan untuk mendorong kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka menekan inflasi.

Dengan berlakunya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sejak tahun 2001, pemerintah daerah maupun dinas terkait di daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam melakukan kebijakan pengendalian inflasi dari sisi penawaran. Pengendalian

### Pojok Inflasi

Tim Pengendalian Inflasi terdiri atas Tim Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

inflasi daerah dapat dilakukan dengan kerjasama dan koordinasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dengan Pemerintah Daerah dan Dinas terkait. Dengan adanya upaya pengendalian inflasi, baik secara nasional maupun daerah, diharapkan inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai.

Bank Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) melakukan perjanjian kesepahaman dengan beberapa pemerintah daerah untuk membentuk tim atau penguatan tim jika sudah ada, guna pengendalian inflasi daerah. Tujuan umum pembentukan atau penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) adalah untuk menurunkan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga turun pada tingkat yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (a) Menurunkan laju inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan inflasi nasional yang rendah dan stabil
- (b) Meningkatkan kerjasama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam pengendalian inflasi di daerah
- (c) Memantau dan mengendalikan inflasi di daerah dengan rekomendasi langkah-langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor.

#### 4) Rapat Koordinasi Penyusunan RAPBN dan Sidang Kabinet

Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah juga dilakukan dalam penetapan asumsi-asumsi makro sebagai bahan penyusunan RAPBN, baik melalui rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan (dan instansi terkait) maupun dalam pembahasan dengan DPR. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah mengenai kebijakan di bidang perekonomian lainnya dilakukan dalam sidang kabinet maupun pertemuan-pertemuan lainnya sesuai dengan perkembangan dan permasalahan yang terjadi.

Kegiatan pengendalian inflasi, baik yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia akan berjalan dengan baik jika terpenuhi beberapa prasyarat sebagai berikut:

- a) Komunikasi Kebijakan  
Kebijakan moneter dikomunikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengaruh kebijakan moneter dalam membentuk ekspektasi atau prakiraan tentang masa depan dan pencapaian sasaran inflasi. Komunikasi juga dilakukan sebagai bentuk transparansi dalam pengambilan kebijakan moneter, penjelasan pencapaian sasaran inflasi, kerangka kerja dan langkah-langkah kebijakan moneter yang telah dan akan ditempuh, serta hal-hal yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia.

b) Akuntabilitas

Kebijakan moneter yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban kebijakan moneter disampaikan kepada DPR untuk meningkatkan kredibilitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Pertanggungjawaban dapat dilakukan secara tertulis maupun penjelasan langsung atas laporan kebijakan moneter dalam bentuk laporan kebijakan moneter (*Monetary Policy Report*) atau laporan inflasi (*Inflation Report*) secara triwulan dan laporan mengenai aspek-aspek tertentu kebijakan moneter yang dipandang perlu. Laporan kebijakan moneter disampaikan pula kepada Pemerintah dan masyarakat luas dalam rangka transparansi dan koordinasi.

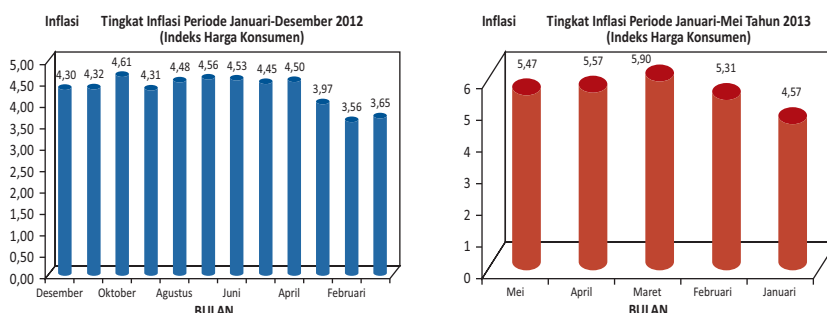
Apabila sasaran inflasi untuk suatu tahun tidak tercapai, Bank Indonesia menyampaikan usulan penjelasan kepada Pemerintah sebagai bahan penjelasan Pemerintah bersama Bank Indonesia secara terbuka kepada DPR dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya.

**Per Januari-Desember 2012**

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Desember 2012	4.30 %
November 2012	4.32 %
Oktober 2012	4.61 %
September 2012	4.31 %
Agustus 2012	4.58 %
Juli 2012	4.56 %
Juni 2012	4.53 %
Mei 2012	4.45 %
April 2012	4.50 %
Maret 2012	3.97 %
Februari 2012	3.56 %
Januari 2012	3.65 %

**Per Januari-Mei 2013**

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Mei 2013	5.47 %
April 2013	5.57 %
Maret 2013	5.90 %
Februari 2013	5.31 %
Januari 2013	4.57 %



Sumber : www.bi.go.id

**Grafik 5.3**

**Laporan Inflasi (Indeks Harga Konsumen) Berdasarkan Perhitungan Inflasi Tahunan**

Uji Kompetensi	
1.	Setiap Pemerintah memutuskan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu berimbang pada kenaikan harga barang-barang secara umum. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan pemerintah agar dampak dari kenaikan BBM tidak mengakibatkan inflasi yang tinggi!
2.	Jelaskan kembali dengan bahasa sendiri apa yang dimaksud dengan inflasi! dan sebutkan ciri-cirinya!
3.	Terdapat tiga faktor penyebab utama inflasi. Jelaskan!
4.	Jelaskan perbedaan antara inflasi inti dengan inflasi noninti!
5.	Jelaskan minimal tiga dampak Inflasi terhadap perekonomian! Berikan contohnya!
6.	Jelaskan peran pemerintah dan bank sentral dalam mengendalikan inflasi!
7.	Jika harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2013 Rp10.000,00 per unit, sedangkan harga pada tahun dasar Rp7.000,00 per unit. Hitunglah Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2013!
8.	Berdasarkan soal nomor 7, jika di ketahui IHK tahun 2012 sebesar 137, maka hitunglah laju inflasi tahun 2013!

## SIMPULAN (SUMMARY)

- Angka Indeks adalah angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk angka, sedangkan indeks harga (*price index*) adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya.
- Indeks harga terdiri atas Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), Indeks Harga Produsen (IHP) Indeks harga yang diterima petani, Indeks harga yang dibayar petani dan Indeks Harga Saham.
- Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.
- Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Produsen (IHP) dan GNP Deflator dapat digunakan untuk menghitung laju inflasi.
- Bank Indonesia sebagai Otoritas Moneter bertugas untuk mengendalikan inflasi. Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi menggunakan *Inflation Targeting Framework* (ITF).
- ITF merupakan sebuah kerangka kebijakan moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada publik mengenai target inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan.
- Permintaan uang adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai. Adapun penawaran uang adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu.

## REFLEKSI (REFLECTION)

Apakah *learning goals* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk internet, di antaranya Anda dapat mengunjungi *website* Bank Indonesia dengan alamat [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan *website* Badan Pusat Statistik (BPS) dengan alamat [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).



## GLOSARIUM (GLOSSARY)

Angka Indeks	:	Angka perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk angka.
Indeks Harga ( <i>Price Index</i> )	:	Suatu ukuran yang menunjukkan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada harga dari satu periode ke periode lainnya.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	:	Indeks yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang diminta konsumen dari waktu ke waktu.
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)	:	Indeks harga yang mengukur rata-rata perubahan harga antarwaktu dari suatu paket jenis barang pada tingkat perdagangan besar atau penjualan secara partai besar.
Indeks Harga yang Diterima Petani	:	Indeks harga yang berhubungan dengan pengorbanan (harga pokok) yang telah dikorbankan dengan hasil diterima petani.
Indeks Harga yang Dibayar Petani	:	Indeks harga yang meliputi pembelian/biaya konsumsi dan pembelanjaan untuk biaya produksi pertaniannya.
Indeks Harga Saham	:	Indeks harga yang mengukur perubahan harga saham di pasar modal.
Inflasi	:	Gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.
Inflasi Tarikan Permintaan ( <i>Demand Pull Inflation</i> )	:	Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran secara umum atau produksi barang-barang.
Inflasi Dorongan Biaya ( <i>Cost Push Inflation</i> )	:	Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Hal tersebut menyebabkan perusahaan mengurangi penawaran barang dan jasa ke pasar.
Permintaan uang	:	Kebutuhan masyarakat terhadap uang tunai.
Penawaran uang	:	Jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu.

## PENILAIAN

### 1. Tes tertulis :

Dalam bentuk objektif dan uraian: untuk menilai kemampuan kognitif materi tentang indeks harga dan inflasi serta penawaran dan permintaan uang dalam bentuk objektif dan uraian.

### 2. Penilaian portofolio :

Menilai kemampuan menganalisis hasil temuan indeks harga dan inflasi, penawaran dan permintaan uang.

### 3. Unjuk kerja :

Menilai kemampuan menyajikan hasil analisis dan simpulan.

## PENUGASAN

### 1. Tugas Terstruktur

- Buatlah kelompok belajar, satu kelompok terdiri atas 5-7 siswa
- Berkunjunglah ke kantor BPS Kab/Kota atau ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia
- Mintalah data inflasi daerah (Kab/Kota) selama 1 tahun terakhir (inflasi per bulan)
- Mintalah informasi tentang tata cara perhitungan inflasi daerah (Kab/Kota) dan dampak inflasi terhadap perkembangan ekonomi di daerah (Kab/Kota)
- Diskusikan dan analisislah data lapangan yang Anda dapatkan dan buatlah laporan tertulis minimal 7 halaman A4
- Kumpulkan dua minggu setelah pelaksanaan Ulangan KD 3.6 kepada guru ekonomi

### 2. Tugas Mandiri

Buatlah kliping tentang dampak inflasi terhadap perekonomian minimal 5 halaman, setiap keping kliping berikan komentar. Hasilnya, berikan kepada guru ekonomi sebagai tugas mandiri!

### **7 Cara Ajarkan Sopan Santun Pada Anak**

1. Hormat-menghormati
2. Ajarkan kata-kata sopan sejak dini
3. Teladan sopan santun
4. Ajarkan memanggil nama
5. Tetap perhatikan anak
6. Jangan paksakan sopan santun
7. Koreksi secara sopan

Sumber : <http://www.tabloidnova.com/Nova/Keluarga/Anak/7-Cara-Ajarkan-Sopan-Santun-Pada-Anak>

Halaman ini sengaja dikosongkan



# BAB 6

## KEBIJAKAN MONETER DAN KEBIJAKAN FISKAL

### KOMPETENSI INTI:

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan **prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat** dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## KOMPETENSI DASAR

1. Mendeskripsikan kebijakan moneter dan fiskal
2. Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu :

1. Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat;
2. Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif dan mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan di Indonesia;
3. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli dan kritis sebagai pelaku ekonomi;
4. Mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal;
5. Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

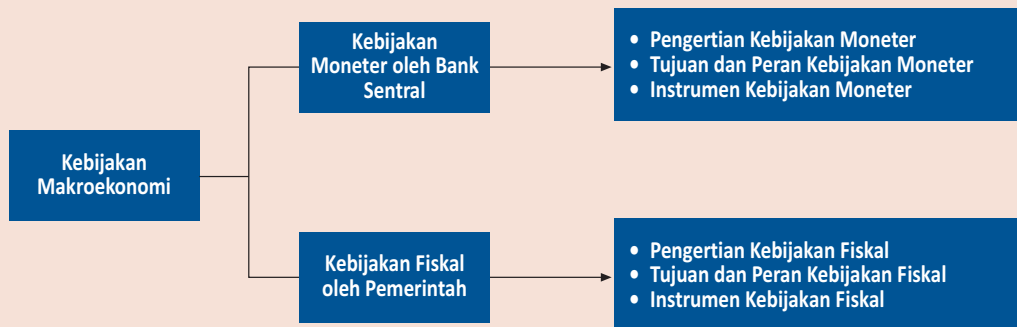
## ALOKASI WAKTU

3 x 4 Jam Pelajaran (12 JP / 3 Pertemuan)

## PENDEKATAN DAN ALTERNATIF MODEL PEMBELAJARAN:

1. Pendekatan Pembelajaran:
  - a. Pendekatan Belajar Sains (*observing, questioning, experimenting, associating, communicating*)
  - b. Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM)
  - c. Pendekatan Kontekstual (*Contextual Teaching and Learning/CTL*)
2. Alternatif Model Pembelajaran:
  - a. *Jigsaw*
  - b. *Snowball Throwing*
  - c. *The Power of Two*
  - d. Model lainnya yang relevan

## PETA KONSEP (CONCEPT MAP)



## KATA KUNCI (KEY WORDS)

Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Fiskal Ekspansif, Kebijakan Fiskal Kontraktif, Giro Wajib Minimum, Himbauan Moral, Operasi Pasar Terbuka, Fasilitas Diskonto.

Setelah Anda mempelajari unit sebelumnya tentang indeks harga dan inflasi, tentu Anda sudah memahami mengapa inflasi perlu dikendalikan. Dalam rangka mengendalikan inflasi, otoritas moneter yang dalam hal ini bank sentral memiliki tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sasaran tunggal kebijakan moneter adalah inflasi. Di sisi lain, dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, yang salah satunya ditandai dengan rendahnya tingkat inflasi, pemerintah membuat kebijakan yang disebut dengan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dari sisi permintaan.

Untuk memperdalam pemahaman Anda, bab ini akan lebih dalam menjelaskan tentang kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dan kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah.

### Pojok Moneter

- Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.
- Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

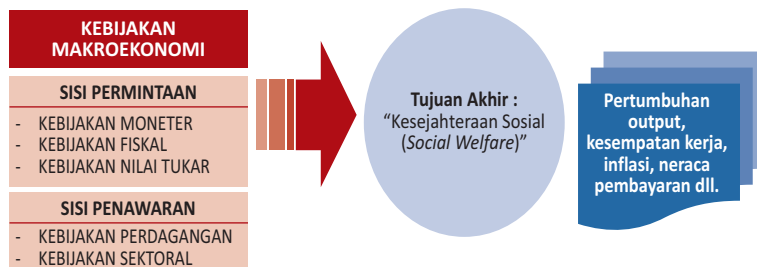
## A. KEBIJAKAN MONETER

### 1. Pengertian Kebijakan Moneter

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan uang dirasakan sangat penting dan tidak ada bagian kehidupan manusia yang tidak terkait dengan uang. Namun demikian, jumlah uang yang beredar di luar kendali dapat menimbulkan pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong kenaikan harga, dan dalam jangka panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan terjadi, yang pada akhirnya akan berdampak pada penurunan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut melatarbelakangi otoritas moneter dalam membuat kebijakan pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian yang dikenal dengan kebijakan moneter.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Anda apa yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter dapat diartikan juga sebagai kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar.

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro dari sisi permintaan, selain kebijakan fiskal dan kebijakan nilai tukar. Kebijakan moneter di setiap negara dikendalikan oleh otoritas moneter yaitu bank sentral. Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter dikendalikan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Untuk melihat posisi kebijakan moneter dalam konteks kebijakan makro ekonomi Indonesia perhatikan Bagan 6.1 sebagai berikut:



Sumber : Bank Indonesia

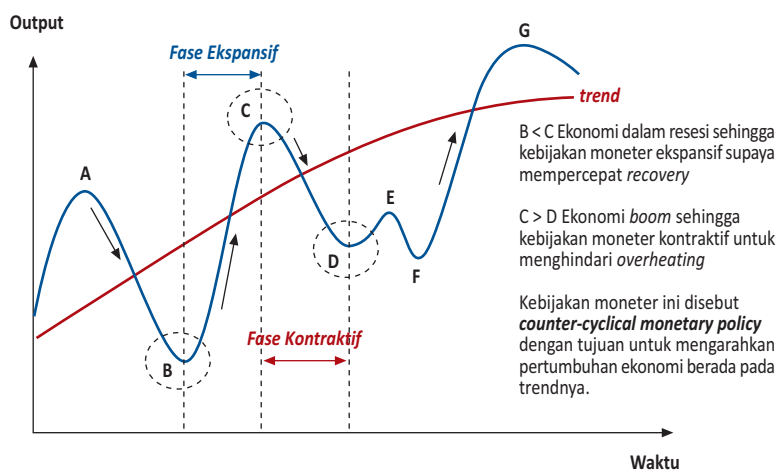
Bagan 6.1 Kebijakan Moneter sebagai Bagian dari Kebijakan Makroekonomi

#### Pojok Moneter

Tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Bab III Pasal 8



Secara umum dikenal dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.



Sumber : Bank Indonesia

**Grafik 6.1**  
**Siklus Kegiatan Ekonomi**

Kebijakan moneter dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya siklus kegiatan ekonomi sebagaimana tampak pada Grafik 6.1 di atas. Berdasarkan grafik tersebut tampak bahwa perkembangan ekonomi mengalami pasang surut (siklus). Pada periode tertentu tumbuh pesat, tetapi pada periode lainnya tumbuh lambat. Untuk itu, pemerintah dan atau otoritas moneter melakukan kebijakan stabilisasi ekonomi makro agar perekonomian dapat tumbuh berkesinambungan. Intinya, sisi permintaan dan sisi penawaran dikelola sedemikian rupa, sehingga mengarah pada keseimbangan (*equilibrium*). Kebijakan moneter, sebagai bagian dari pengelolaan stabilisasi ekonomi makro, diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi (*business cycle*). Kebijakan moneter pada saat *boom* tentunya berbeda dengan pada saat perekonomian melambat (*depression* atau *slump*). Pada saat *boom*, kebijakan moneter biasanya cenderung kontraktif, sementara pada saat depresi, kebijakan moneter biasanya cenderung ekspansif.

- Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar.
- Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui penurunan jumlah uang beredar.

Strategi kebijakan moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia tergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan kerangka operasional kebijakan moneter.



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 6.2**  
**Kebijakan Moneter Ekspansif dan Kontraktif oleh Bank Indonesia**

Efektivitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara uang beredar dengan variabel ekonomi utama, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Dari sejumlah literatur, diketahui bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi adalah sempurna, sedangkan hubungan antara pertumbuhan uang beredar atau inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah nol. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan moneter hanya akan berdampak pada inflasi, dan tidak banyak pengaruhnya terhadap ekonomi riil.

Adapun pengaruh jangka pendek dari uang beredar menunjukkan bahwa kebijakan moneter menyebabkan pergerakan aktivitas ekonomi riil yang sedikit menaik dan kemudian menurun (*hump-shaped*). Artinya, pelonggaran (pengetatan) kebijakan moneter dapat sedikit meningkatkan (menurunkan) pertumbuhan ekonomi riil dalam jangka sangat pendek dan kemudian pengaruhnya akan menghilang dalam jangka panjang.

### Pojok Moneter

Untuk mencapai tujuannya, sejak Juli 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi yang rendah dan stabil sebagai sasaran utama kebijakan moneter. Kerangka tersebut dikenal dengan istilah *Inflation Targeting Framework* (ITF).

## 2. Tujuan dan Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter

### a. Tujuan Kebijakan Moneter

Di Indonesia, tujuan kebijakan moneter sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (Undang-Undang Bank Indonesia) Pasal 7 adalah

untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah mengandung dua aspek, yaitu (a) Kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, dan (b) Kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karena itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkat tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar dan suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik Rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah.

## b. Peran Bank Indonesia dalam Kebijakan Moneter

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia berperan sebagai pengambil kebijakan tunggal dalam kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter. Stabilitas nilai uang merupakan tujuan kebijakan moneter yang dibuat dan dilaksanakan Bank Indonesia. Dalam pelaksanaannya Bank Indonesia mempunyai peran mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- 1) Jika Bank Sentral menginginkan adanya penambahan jumlah uang beredar di masyarakat, maka Bank Sentral akan membeli surat-surat berharga dari bank-bank umum berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan dari Pemerintah (Surat Berharga Negara/SBN dan Surat Utang Negara/SUN). Sebaliknya, jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, maka Bank Sentral akan menjual surat-surat berharga kepada bank umum dan masyarakat.

### Pojok Moneter

**Volatilitas** adalah standar deviasi dari perubahan nilai suatu instrumen keuangan dengan jangka waktu spesifik; digunakan untuk menghitung risiko dari instrumen keuangan pada suatu periode waktu umumnya secara tahunan.

### Pojok Moneter

- SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-12 bulan) dengan sistem diskonto/bunga.
- SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RI sesuai masa berlakunya.

## Pojok Moneter

- Uang Primer /M0 (uang inti/ *base money*) merupakan kewajiban otoritas moneter kepada masyarakat dalam bentuk uang kartal (uang kertas dan logam) dan dana giro perbankan yang disimpan di bank sentral. Selain itu, apabila bank sentral menetapkan suatu rasio cadangan wajib sekunder dalam bentuk surat-surat berharga, maka nilai surat-surat berharga tersebut juga dikategorikan sebagai uang primer.
- M1 (uang beredar dalam arti sempit/ *narrow money*) merupakan kewajiban otoritas moneter dan perbankan (sistem moneter) kepada masyarakat dalam bentuk uang primer dan dana giro masyarakat yang disimpan di perbankan komersial.
- M2 (uang beredar dalam arti luas/*broad money*) merupakan kewajiban otoritas moneter dan perbankan (sistem moneter) kepada masyarakat dalam bentuk M1 dan uang kuasi (deposito dan tabungan).

## Pojok Moneter

Suku bunga PUAB merupakan harga yang terbentuk dari kesepakatan pihak yang meminjam dari meminjamkan dana.

- 2) Jika Bank Sentral ingin menambah jumlah uang beredar yang ada di masyarakat, Bank Sentral menurunkan tingkat diskonto dan suku bunga pinjaman yang diberikan kepada bank-bank umum, sehingga biaya/bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum menjadi lebih murah. Pada gilirannya bank-bank umum dapat memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dengan suku bunga yang rendah. Jika suku bunga kredit perbankan turun, permintaan masyarakat terhadap kredit perbankan akan naik, dan ini akan menyebabkan uang beredar bertambah.
- 3) Jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, Bank Sentral akan mewajibkan bank-bank umum untuk menaikkan tingkat cadangan minimumnya. Dengan meningkatnya cadangan minimum ini, akan mengurangi tabung giro yang dapat diciptakan oleh bank-bank, dan dengan sendirinya akan menurunkan jumlah uang beredar dan sebaliknya.

### c. Kerangka Kebijakan Moneter

Pada umumnya kerangka kebijakan moneter terdiri atas instrumen, sasaran operasional, sasaran antara, dan sasaran akhir. Sasaran antara diperlukan karena untuk mencapai sasaran akhir yang ditetapkan, terdapat tenggang waktu antara pelaksanaan kebijakan moneter dan hasil pencapaian sasaran akhir. Oleh karena itu, diperlukan adanya indikator-indikator yang lebih segera dapat dilihat hasilnya untuk mengetahui indikasi kebijakan yang biasa disebut sasaran antara. Sasaran antara yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran akhir.

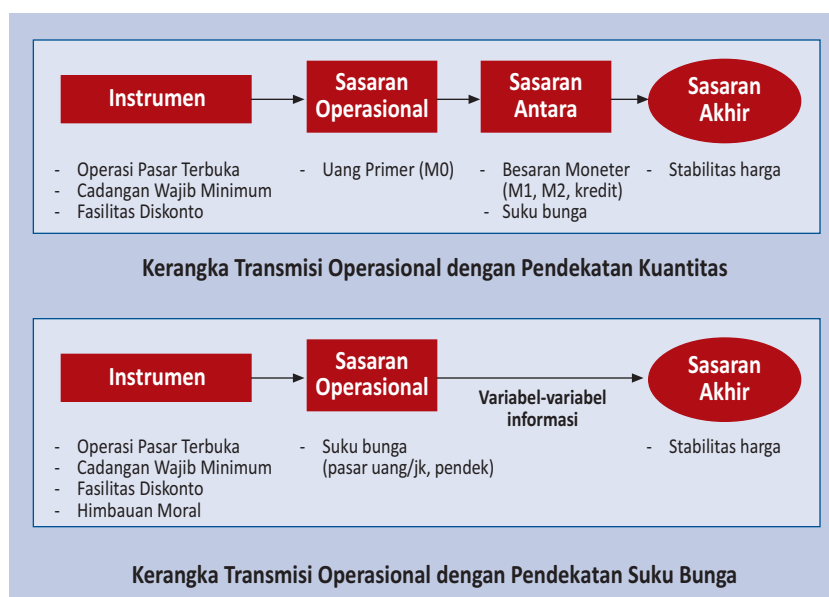
Beberapa pilihan sasaran antara yang dapat digunakan antara lain besaran moneter seperti M1, M2 atau kredit dan suku bunga. Selanjutnya untuk mencapai sasaran antara, bank sentral memerlukan sasaran-sasaran yang bersifat operasional agar proses transmisi dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sasaran operasional yang dipilih harus memiliki kestabilan hubungan dengan sasaran antara dan dapat dikendalikan otoritas moneter, serta informasi tersedia lebih awal daripada sasaran antara.

Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan. Beberapa pilihan sasaran operasional yang dapat digunakan antara lain adalah uang primer (M0) dan suku bunga jangka pendek.

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya.

Sementara itu, instrumen moneter adalah instrumen yang dimiliki oleh bank sentral yang dapat digunakan untuk mempengaruhi sasaran-sasaran operasional yang telah ditetapkan. Beberapa pilihan instrumen yang digunakan antara lain adalah operasi pasar terbuka (*open market operation*), cadangan wajib minimum (*reserve requirement*), fasilitas diskonto (*discount facility*), dan himbauan moral (*moral suasion*).

Rangkaian langkah-langkah bank sentral dari penentuan dan prakiraan sasaran akhir, pemantauan variabel-variabel ekonomi-keuangan yang dijadikan dasar perumusan kebijakan moneter, sampai pelaksanaan pengendalian moneter di pasar uang untuk mencapai sasaran akhir disebut **kerangka operasional kebijakan moneter**. Kerangka operasional kebijakan moneter tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Sumber : Diolah dari berbagai sumber

**Bagan 6.3**  
**Kerangka Operasional Kebijakan Moneter**

### 3. Instrumen Kebijakan Moneter

Berdasarkan Bagan 6.3 di atas, secara umum instrumen yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah sebagai berikut:

#### a. Operasi Pasar Terbuka

Operasi Pasar Terbuka adalah kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar

## Pojok Moneter

Di Indonesia, salah satu instrumen yang sering digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Kepada setiap pemilik SBI, Bank Indonesia memberikan balas jasa berupa pendapatan bunga. Jika Bank Sentral bertujuan mengurangi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral akan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kepada bank-bank umum, agar likuiditas (*reserve*) bank-bank berkurang, sehingga kemampuan bank-bank memberikan pinjaman menurun. Tindakan ini disebut kontraksi moneter. Sebaliknya, untuk menambah jumlah uang beredar, Bank Indonesia akan membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari bank-bank umum. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bank-bank memberikan pinjaman, sehingga jumlah uang beredar meningkat.

atau suku bunga jangka pendek. Suku bunga acuan yang digunakan dalam operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia disebut BI Rate. BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada masyarakat umum.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

### b. Giro Wajib Minimum

Giro wajib minimum adalah ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid (*reserve*) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Semakin kecil persentase tersebut, semakin besar kemampuan bank memanfaatkan likuiditasnya (*reserve-nya*) untuk memberikan pinjaman dalam jumlah yang lebih besar. Sebaliknya, semakin besar persentasenya, semakin berkurang kemampuan bank untuk memberikan pinjaman.

Cadangan wajib minimum ini bisa dijaga dalam bentuk kas atau dalam bentuk rekening giro di bank sentral. Biasanya cadangan dibedakan dalam dua bentuk, yakni cadangan primer dan cadangan sekunder. Cadangan wajib minimum lebih mengacu kepada cadangan primer. Sementara itu, cadangan sekunder merupakan tambahan, biasanya terdiri atas surat-surat berharga.

Persentase cadangan wajib minimum memengaruhi daya ekspansi kredit. Jika bank sentral menurunkannya, maka daya ekspansi kredit bank umum akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Sebaliknya, jika persentasenya dinaikkan, maka daya ekspansi kredit bank umum menurun dan jumlah uang beredar berkurang.

### c. Fasilitas Diskonto

Fasilitas diskonto adalah kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian (*mismatch*) pengelolaan dana yang bersifat sementara (*discount window*). Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang, sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk menambah jumlah uang, bank sentral menurunkan tingkat bunga bagi bank umum, dan sebaliknya menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

#### d. **Himbauan Moral (*Moral Suasion*)**

Bank sentral dapat melakukan himbauan moral terhadap perbankan. Biasanya himbauan moral merupakan pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro. Informasi tersebut untuk dijadikan masukan bagi bank-bank umum dalam pengelolaan aset dan kewajibannya. Instrumen ini digunakan untuk mendukung efektifitas kebijakan moneter lainnya yang dilakukan bank sentral.

<b>Uji Kompetensi</b>	
1.	Jelaskan yang dimaksud dengan kebijakan moneter!
2.	Jelaskan tujuan dilakukannya kebijakan moneter!
3.	Seperti apa peran Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter!
4.	Gambarkan dan jelaskan kerangka operasional kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia!
5.	Sebutkan dan jelaskan minimal 2 instrumen kebijakan moneter!

## **B. KEBIJAKAN FISKAL**

### **1. Pengertian Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran (*spending*) dan penerimaan (*income*) yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan (*taxation*). Kebijakan fiskal dapat diartikan juga sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi yang dilakukan pemerintah untuk memengaruhi perekonomian dengan cara memengaruhi pasar barang atau sektor riil.

Pengeluaran (*spending*) dan penerimaan (*income*) pemerintah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga kebijakan fiskal selalu berkaitan erat dengan tindakan pemerintah dalam mengelola APBN. Kebijakan fiskal secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga sebagai berikut:

#### **a. Kebijakan Fiskal Defisit**

Kebijakan fiskal defisit adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah (*spending*) melebihi penerimaannya (*income*).

### **b. Kebijakan Fiskal Surplus**

Kebijakan fiskal surplus adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah (*spending*) lebih kecil dari penerimaannya (*income*).

### **c. Kebijakan Fiskal Berimbang**

Kebijakan fiskal berimbang adalah kebijakan fiskal dimana pengeluaran pemerintah (*spending*) sama dengan penerimaannya (*income*).

## **2. Tujuan dan Peran Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal**

### **a. Tujuan Kebijakan Fiskal**

Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunkan pengangguran dengan cara membuka kesempatan kerja melalui kegiatan pemerintah berupa belanja barang, jasa, dan proyek. Dana untuk pembelanjaan barang, jasa, dan proyek dimaksud berasal dari pajak dan sumber pembiayaan lainnya, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan sebagian laba BUMN.
- 2) Menjaga stabilitas harga. Pemerintah membuat kebijakan dengan menentukan harga terendah dan harga tertinggi suatu komoditas seperti menentukan harga gabah kering giling petani dan harga minyak goreng curah.
- 3) Mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak dan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandar udara.
- 4) Mengendalikan tingkat inflasi dengan menetapkan kebijakan penerapan tarif pajak tertentu.
- 5) Menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis global, seperti subsidi, menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan mengendalikan pengeluaran pemerintah.
- 6) Mendistribusikan pendapatan nasional dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan melalui pengenaan tarif pajak progresif.

### **b. Peran Pemerintah dalam Kebijakan Fiskal**

Kebijakan fiskal dilakukan pemerintah dengan jalan memperbesar atau memperkecil pengeluaran/konsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerintah (Tr) dan jumlah pajak (Tx), sehingga dapat



memengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

### 3. Instrumen Kebijakan Fiskal

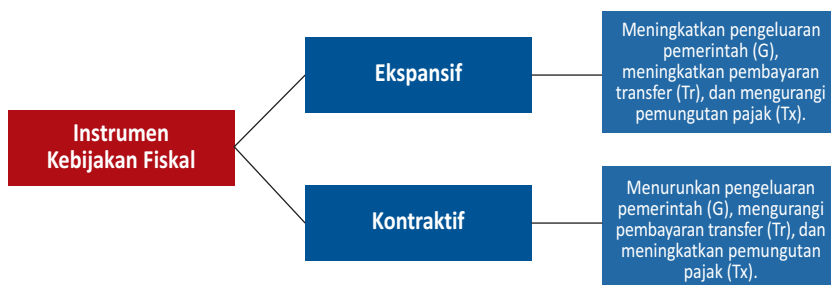
Secara umum, instrumen kebijakan fiskal terdiri atas pengeluaran pemerintah (*government expenditure*), transfer pemerintah (*transfer payment/tr*), dan pajak (*tax*). Dengan tiga instrumen tersebut implementasinya dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:

#### a. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan fiskal ekspansif yaitu kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian/pendapatan nasional dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah (G), meningkatkan pembayaran transfer (Tr), dan mengurangi pemungutan pajak (Tx). Kebijakan ini dilakukan apabila perekonomian berada dalam kondisi yang lesu, yang ditandai dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan nasional aktual lebih kecil daripada pendapatan nasional potensial.

#### b. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal kontraktif yaitu kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk menurunkan gangguan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah (G), mengurangi pembayaran transfer (Tr), dan meningkatkan pemungutan pajak (Tx). Kebijakan ini dilakukan apabila perekonomian berada dalam kondisi pasar tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat, yang ditandai dengan permintaan agregat (keseluruhan) melebihi penawaran agregatnya ( $AD > AS$ ) dan tingkat inflasi yang tinggi.



Sumber : Bank Indonesia

**Bagan 6.4**  
**Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kontraktif oleh Pemerintah**

### Uji Kompetensi

1. Membayar pajak merupakan salah satu wujud kepedulian seorang warga negara terhadap pembangunan bangsanya. Menurut Anda, bagaimana caranya agar pengelolaan pajak dapat dilakukan dengan jujur!
2. Ada pepatah mengatakan “ orang bijak taat membayar pajak”. Bagaimana menurut Anda atas ungkapan pepatah tersebut!
3. Jelaskan yang dimaksud dengan kebijakan fiskal!
4. Jelaskan tujuan dilakukannya kebijakan fiskal!
5. Seperti apa peran pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan fiskal!
6. Jelaskan perbedaan kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif!
7. Jelaskan hubungan kebijakan fiskal dengan APBN!

### SIMPULAN (SUMMARY)

- Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.
- Tujuan kebijakan moneter diantaranya yaitu; Menjaga stabilitas ekonomi; Menjaga stabilitas harga; Meningkatkan kesempatan kerja; Memperbaiki Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran.
- Bank Indonesia sebagai penentu dan pelaksana kebijakan moneter memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Kestabilan nilai Rupiah mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin pada laju inflasi, dan kestabilan nilai mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar.
- Instrumen moneter yang digunakan oleh bank sentral dalam penetapan kerangka operasional kebijakan moneter dapat dikelompokkan kedalam dua pendekatan, yaitu pendekatan kuantitas dan pendekatan suku bunga.
- Instrumen yang termasuk dalam pendekatan kuantitas terdiri atas Operasi Pasar Terbuka, Cadangan Wajib Minimum, dan Fasilitas Diskonto.

- Instrumen yang termasuk dalam pendekatan suku bunga yaitu Operasi Pasar Terbuka, Cadangan Wajib Minimum, Fasilitas Diskonto dan Himbauan Moral.
- Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran (*spending*) dan penerimaan (*income*) yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan (*taxation*).
- Tujuan pemerintah melakukan kebijakan fiskal adalah menurunkan pengangguran, menjaga stabilitas harga, mendorong investasi melalui pemberian insentif pajak, dan mendistribusikan pendapatan nasional.
- Instrumen kebijakan fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua yakni Kebijakan Fiskal Ekspansif dan Kebijakan Fiskal Kontraktif.

### REFLEKSI (REFLECTION)

Apakah *learning goals* yang diharapkan dari bab ini sudah dapat Anda capai? Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajar Anda, bertanyalah kepada narasumber, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Diantaranya Anda dapat mengunjungi *website* Bank Indonesia dengan alamat [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). dan *website* Kementerian Keuangan dengan alamat [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id). atau *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).

## GLOSARIUM (*Glossary*)

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Fasilitas Diskonto	:	Kredit yang di berikan oleh bank sentral kepada suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas yang disebabkan oleh ketidaksesuaian ( <i>mismatch</i> ) pengelolaan dana yang bersifat sementara ( <i>discount window</i> ).
Giro Wajib Minimum	:	Ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid ( <i>reserve</i> ) sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya.
Kebijakan Moneter	:	Kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter (bank sentral) dalam rangka mengendalikan variabel-variabel moneter (uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga) untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan.
Kebijakan Fiskal	:	Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran ( <i>spending</i> ) dan penerimaan ( <i>income</i> ) yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan ( <i>taxation</i> ).
<i>Moral Suasion</i>	:	Himbauan moral, pernyataan bank sentral (misalnya oleh Gubernur Bank Indonesia) yang bersifat mengarahkan atau memberi informasi yang lebih bersifat makro.
Operasi Pasar Terbuka	:	Kegiatan bank sentral dalam melakukan jual beli surat-surat berharga jangka pendek, hal tersebut dilakukan dalam rangka mengatur jumlah uang beredar atau suku bunga jangka pendek.
Pajak	:	Kontribusi wajib rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dan ditetapkan undang-undang
Penetapan Suku Bunga	:	Salah satu cara yang dapat dilakukan bank sentral dalam rangka melaksanakan kebijakan moneter.
Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	:	Surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek (1-12 bulan) dengan sistem diskonto/ bunga.
Surat Utang Negara (SUN)	:	Surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara RI sesuai masa berlakunya.
Surat Berharga Negara (SBN)	:	Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara

## PENILAIAN

### 1. Tes Tulis :

Menilai ranah pengetahuan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam bentuk objektif dan uraian.

### 2. Penilaian Portofolio :

Menilai kemampuan menyusun laporan dan menyajikan hasil analisis dan simpulan

### 3. Unjuk Kerja :

Menilai kemampuan menyusun laporan dan menyajikan hasil analisis dan simpulan.

## PENUGASAN

### 1. Tugas Terstruktur

- Buatlah kelompok belajar, satu kelompok terdiri atas 5-7 siswa
- Lakukan survei tentang dampak kebijakan moneter yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap stabilitasi ekonomi, dan stabilitas harga di daerah Anda!
- Diskusikan dan analisislah data lapangan yang kelompok Anda dapatkan dan buatlah laporan tertulis minimal 5 halaman A4
- Kumpulkan dua minggu setelah pelaksanaan Ulangan KD 3.7 kepada guru ekonomi

### 2. Tugas Mandiri

- Bukalah [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.depkeu.go.id](http://www.depkeu.go.id)
- Carilah informasi tentang kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dijalankan Pemerintah satu tahun terakhir!
- Analisis dan buat laporan tertulis hasil pencarian dan analisis Anda
- Sampaikan kepada guru ekonomi Anda sebagai tugas mandiri!

## VALUES EXPLORER

### 7 Tips Melatih Anak Bertanggung Jawab

1. Beri beberapa tanggung jawab.
2. Biarkan dia belajar mengambil keputusan.
3. Latihan menjalankan tugas.
4. Memberi contoh baik.
5. Manfaatkan buku.
6. Dukung si kecil lewati situasi sulit.
7. Tunjukkan kepadanya gambaran yang lebih besar.

Sumber : vivanews.com

# INDEKS

## A

Agunan 27, 48  
Alat Pembayaran 3, 75, 76, 77, 100, 101  
Angka Indeks 131, 154, 155  
Anjungan Tunai Mandiri 60  
APBN 168, 169, 170, 172  
Arus Kas 53  
Aset 43, 58, 66

## B

Bagi Hasil 47, 54  
*Bancassurance* 124  
Bank Sentral 3, 9, 10, 22, 25, 144, 56, 57, 58,  
59, 60, 64, 71, 72, 77, 86, 143, 148, 150, 23,  
24, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 171,  
172, 66  
Berinvestasi 111, 121, 122, 123, 124, 125  
Bunga Bank 126

## C

*Call Centre* 119, 121, 126

## F

Fasilitas Diskonto 163

## G

Giro Wajib Minimum 144

## I

Indeks Harga 11, 12, 19, 22, 124, 130, 132, 133,  
134, 140, 141, 154, 155, 156, 134  
Indeks Harga 130, 131, 132, 133, 154, 155  
Indeks Harga Konsumen 132, 133, 140, 141,  
154  
Inflasi 3, 11, 12, 19, 22, 56, 59, 61, 91, 130,  
131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,  
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149,  
150, 151, 154, 155, 156, 130, 159, 161, 162,  
163, 167, 169  
Inflasi 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138,  
139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,  
149, 150, 152, 154, 155  
*Internet Banking* 126  
Investasi 12, 26, 27, 29, 35, 37, 39, 40, 44, 54,  
110, 121, 122, 123, 124, 125, 135, 143, 144,  
162, 169, 171

## K

Kebijakan Fiskal 3, 12, 60, 158, 159, 168, 169,  
170, 171, 174  
Kebijakan Moneter 3, 11, 12, 22, 25, 56, 57, 58,  
59, 60, 61, 68, 70, 77, 81, 133, 136, 142,  
143, 144, 145, 147, 154, 158, 159, 160, 161,  
162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 143, 171,  
173, 174

Kredit Langsung 165, 167, 171, 172

## L

Lembaga Keuangan 127  
Lembaga Penjamin Simpanan 119, 124  
LKNB 2, 3, 24, 25, 49, 50, 52, 53, 55, 68, 70,  
72

## M

Menabung 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122,  
123, 124, 126  
*Mobile Banking* 127  
*Moral suasion* 163

## O

Operasi Pasar Terbuka 79  
Otoritas Jasa Keuangan 2, 9, 10, 22, 23, 24,  
25, 61, 65, 24

## P

Pagu Kredit 165  
Pajak 169, 170, 171, 172, 178  
Penawaran Uang 130, 148, 150, 152, 153, 154  
Penetapan Suku Bunga 164, 167, 171, 173  
Pengelolaan Keuangan 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121,  
122, 123, 124, 127, 128  
Permintaan Uang 148, 151, 152, 154, 155  
*Phone Banking* 119, 121, 127  
Piutang 127

## S

Saham 127  
Sistem Pembayaran 3, 9, 10, 22, 25, 57, 58,  
59, 60, 61, 68, 70, 75, 76, 77, 78, 79, 80,  
81, 82, 83, 84, 90, 108,  
*SMS Banking* 119, 121, 127  
Surat Berharga 127

## T

Tabungan 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35,  
110, 118, 119, 120, 121, 124, 127, 152,  
163

## U

Uang 3, 19, 25, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 39, 42, 44, 45, 48, 49, 53, 107, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 66, 67, 70, 72, 77, 78,  
80, 81, 118, 84, 119, 85, 86, 87, 88, 89,  
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 119,  
120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 130,  
131, 139, 140, 142, 148, 149, 150, 151,  
152, 153, 154, 155, 156, 159, 160, 161,  
162, 163, 164, 165, 166, 167, 171, 95,  
150, 97, 153  
Utang 115, 127, 128

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Manan, Muhammad. 1993. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf
- Azis, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam: Analiss Mikro & Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akbar, Aidil. 2013. *Easy Planning: Hidup Sejahtera Sekarang dan Nanti*. Jakarta: Noura Books (Mizan Publika)
- Ascarya. 2004. *Instrumen-instrumen Pengendalian Moneter*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Ascarya dan Yumanita, Diana. 2005. *Bank Syariah: Gambaran Umum*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bimantoro, Suarpika dan Bahroem, Syahrul. 2003. *Organisasi Bank Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia
- Chapra, Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Chandra, Bong. 2012. *Unlimited Wealth: 18 Hari Menuju Kebebasan Financial*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Deliarnov. 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press
- Ekawarna dan Fachruddiansyah. 2010. *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: GP Pres
- Firmansyah, Herlan et.al. 2011. *Advanced Learning Economics*. Bandung : Facil Grafindo
- Firmansyah, Herlan et.al. 2013 *Anvenced Learning Economics 1 for Grade X High School Social Sciences Programme Based on Curriculum 2013*, Bandung: Facil Grafindo
- Sugiyono, F.X. dan Ascarya. 2003. *Seri Kebanksentralan: Kelembagaan Bank Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia
- Gozali, Ahmad. 2005. *Serba Serbi Kredit Syariah; Jangan ada Bunga Diantara Kita*. Jakarta: Elex Komputindo
- Isnawan, Gajar. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Laskar Aksara
- B., Johnson Elaine. 2002. *CTL Contextual Teaching dan Learning*. Bandung: Kaifa
- Kadir, Abdul, Widodo R, Priyo dan Suryani, Guruh. 2008. *Penerapan Kebijakan Moneter dalam Kerangka Infaltion Targeting di Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia
- Karim, Adiwarmarman. 2009. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali



- . 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers
- . 2012. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2000. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- . 2011. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- . 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi*. Bandung: Rajawali Press
- Komalasari, Kokom. 2010. *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Refika Aditama
- Lipsey, S., dan Purvis. 1994. *Economics*. USA: Harper International Edition
- Manurung, Mandala. 1999. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: FE UI
- Manurung, Adler Haymans. 2013. *Otoritas Jasa Keuangan: Pelindung Investor*. Jakarta: PT. Adler Manurung Press
- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Jakarta: Hikmah
- Raharja, Pratama dan Manurung, Mandala. 1999. *Teori Ekoomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI
- Billas, Richard A. 1985. *Microeconomic Theory*. 2<sup>nd</sup> ed. Singapore: McGraw-Hill
- Dornbush, R., Fischer, S., dan Startz, R. 2008. *Makroekonomi Edisi Bahasa Indonesia (Edisi ke 10)*. Jakarta: Media Global Edukasi
- Pindyck, Robert S dan Rubinfeld, Daniel L. 2003. *Mikro Ekonomi Edisi Kelima*. Jakarta: Indeks
- Serfianto, R, et. al, 2012. *Untung dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debet, dan Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia
- Sukirno, Sadono. 2000. *Mikroekonomi*. Kuala Lumpur: Aneka Publisher
- Samuelson, Paul A. dan Nordhaus, William D. 1989. *Economics*. Mc.Graw-Hill, Int.Ed., 13th ed
- Singleton, John. 2009. *Central Banking in the Twentieth Century*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Solikin dan Warjiyo, Perry. 2004. *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: PPSK Bank Indonesia
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Rasyid, Suherman. 2009. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press
- Susilo, Sri, et. al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Susilo, Sri, et. al. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat
- Suseno dan Astiyah, Siti. 2008. *Inflasi*. Jakarta: Bank Indonesia
- Mulyati, Sri Tri Subari, et al. 2003. *Seri Kebanksentralan: Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia

Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah. 2005. *Buku Saku Perbankan Syariah*  
Warjiyo, Perry. 2004. *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia*.  
Jakarta : PPSK Bank Indonesia

**Dokumen :**

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

Direktorat Pengedaran Uang Bank Indonesia. 2011. *Buku Panduan Uang Rupiah; Ciri-ciri Keaslian, Standar Visual Kualitas Rupiah dan Daftar Ruiah yang Dicabut dan Ditarik Dari Peredaran*. Jakarta: Bank Indonesia

-----, 2004. *Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia

-----, 2012. *Bank Sentral Republik Indonesia : Sebuah Pengantar*. Jakarta : PPSK Bank Indonesia (tidak diterbitkan)

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. *Bank Syariah untuk Kita Semua*. Jakarta: Bank Indonesia

Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia. 2011 *Outlook Perbankan Syariah 2012*. Jakarta: Bank Indonesia

**Undang-Undang (UU):**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

**Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru Pendidikan Dasar dan Menengah

**Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI):**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/PBI/2012 tentang Transfer Dana  
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/35/DASP tanggal 22 Desember 2006 perihal Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Percetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/23/DASP tanggal 27 Juni 2013 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana

**Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI):**

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 01/IV/2000 tentang Giro

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 02/IV/2000 tentang Tabungan

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 03/IV/2000 tentang Deposito

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 04/IV/2000 tentang *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 05/IV/2000 tentang Jual Beli *Salam*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 06/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna'*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 07/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 08/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 09/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 10/IV/2000 tentang *Wakalah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 11/IV/2000 tentang *Kafalah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 12/IV/2000 tentang *Hawalah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 19/IV/2001 tentang *Al-Qardh*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 21/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 25/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 53/III/2006 tentang *Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 54/X/2006 tentang *Syariah Card*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor 67/III/2008 tentang *Anjak Piutang Syariah*

**Internet :**

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

[www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



# 1. PETA MATERI EKONOMI SMA/MA KURIKULUM 2013

## Kelas X

KD	Materi Pembelajaran		Waktu
	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	
3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi 4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi	Konsep Ilmu Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian Ilmu ekonomi</li> <li>• Pembagian Ilmu ekonomi</li> <li>• Prinsip ekonomi</li> </ul>	2 x 3 jp
3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya 4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya	Masalah Ekonomi dan Cara Mengatasinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inti masalah ekonomi/Kelangkaan</li> <li>• Pilihan</li> <li>• Biaya peluang</li> <li>• Skala prioritas</li> <li>• Pengelolaan keuangan</li> <li>• Permasalahan pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa)</li> <li>• Sistem ekonomi</li> </ul>	4 x 3 jp
3.3 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi 4.3 Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi	Pelaku Kegiatan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi : Rumah Tangga Konsumsi (konsumen), Rumah Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri.</li> <li>• Peran pelaku kegiatan ekonomi</li> <li>• Model diagram interaksi antar pelaku ekonomi/ <i>circulair flow</i> diagram</li> </ul>	3 x 3 jp
3.4 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian 4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian	Pasar dalam Perekonomian  Permintaan dan Penawaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pasar</li> <li>• Peran pasar dalam perekonomian</li> <li>• Bentuk-bentuk pasar (<i>output</i>) dan ciri-cirinya</li> <li>• Pengertian permintaan dan penawaran</li> <li>• Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran</li> <li>• Kurva permintaan dan penawaran</li> <li>• Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran)</li> <li>• Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya</li> <li>• Proses terbentuknya harga keseimbangan</li> <li>• Pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas</li> <li>• Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran</li> </ul>	6 x 3 jp
3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank  Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian bank</li> <li>• Fungsi bank</li> <li>• Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank</li> <li>• Pengertian lembaga keuangan non bank</li> <li>• Fungsi lembaga keuangan non bank</li> <li>• Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk lembaga keuangan non bank</li> </ul>	6 x 3 jp

KD	Materi Pembelajaran		Waktu
	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	
4.5 Menyajikan peran dan produk bank, lembaga keuangan non bank, Bank Sentral dan Otoritas jasa Keuangan (OJK)	Bank Sentral  Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian bank sentral</li> <li>• Fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia</li> <li>• Stabilitas sistem keuangan</li> <li>• Pengertian OJK</li> <li>• Fungsi, tugas, dan wewenang OJK</li> </ul>	
3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran	Sistem Pembayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian sistem pembayaran</li> <li>• Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran</li> <li>• Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia</li> </ul>	4 x 3 jp
4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran	Alat Pembayaran Tunai (Uang)  Alat Pembayaran Nontunai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sejarah uang</li> <li>• Pengertian uang</li> <li>• Fungsi, jenis dan syarat uang</li> <li>• Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia</li> <li>• Unsur pengaman uang rupiah</li> <li>• Jenis-jenis alat pembayaran nontunai</li> </ul>	
3.7 Mendeskripsikan konsep manajemen	Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian manajemen</li> <li>• Fungsi-fungsi manajemen</li> <li>• Unsur-unsur manajemen</li> <li>• Bidang-bidang manajemen</li> <li>• Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah</li> </ul>	3 x 3 jp
4.7 Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah			
3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaannya	Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian koperasi</li> <li>• Asas koperasi</li> <li>• Tujuan koperasi</li> <li>• Prinsip-prinsip koperasi</li> <li>• Jenis-jenis koperasi</li> <li>• Peran koperasi</li> <li>• Perangkat organisasi koperasi</li> <li>• Sumber permodalan koperasi</li> <li>• Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi</li> <li>• Prosedur pendirian koperasi</li> </ul>	6 x 3 jp
4.8 Menerapkan konsep koperasi dalam pengelolaan koperasi/ koperasi siswa	Pengelolaan Koperasi		
<b>Jumlah jam pelajaran</b>			<b>102 jp</b>

## Kelas XI

KD	Materi Pembelajaran		Waktu
	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	
3.1 Mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara mengatasinya  4.1 Menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya.	Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pembangunan ekonomi</li> <li>• Perencanaan pembangunan ekonomi</li> <li>• Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi</li> <li>• Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi</li> <li>• Menilai prestasi pembangunan ekonomi</li> <li>• Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang</li> <li>• Kebijakan dan strategi pembangunan</li> <li>• Pengertian pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Cara mengukur pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Teori pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	4 x 4 jp
3.2 Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia  4.2 Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia	Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja</li> <li>• Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja</li> <li>• Sistem upah</li> <li>• Pengangguran</li> </ul>	3 x 4 jp
3.3 Mendeskripsikan pendapatan nasional  4.3 Menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional	Pendapatan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pendapatan nasional</li> <li>• Manfaat pendapatan nasional</li> <li>• Komponen-komponen pendapatan nasional</li> <li>• Metode perhitungan pendapatan nasional</li> <li>• Pendapatan perkapita</li> </ul>	4 x 4 jp
3.4 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan  4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan	APBN  APBD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian APBN</li> <li>• Fungsi dan tujuan APBN</li> <li>• Sumber-sumber penerimaan negara</li> <li>• Jenis-jenis pengeluaran negara</li> <li>• Mekanisme penyusunan APBN</li> <li>• Pengaruh APBN terhadap perekonomian</li> <li>• Pengertian APBD</li> <li>• Fungsi dan Tujuan APBD</li> <li>• Sumber-sumber penerimaan daerah</li> <li>• Jenis-jenis pengeluaran daerah</li> <li>• Mekanisme penyusunan APBD</li> <li>• Pengaruh APBD terhadap perekonomian</li> </ul>	4 x 4 jp
3.5 Menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak  4.5 Mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak	Perpajakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pajak</li> <li>• Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN</li> <li>• Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya</li> <li>• Asas pemungutan pajak</li> <li>• Jenis-jenis pajak</li> <li>• Sistem pemungutan pajak di Indonesia</li> <li>• Alur administrasi perpajakan di Indonesia</li> <li>• Objek dan cara pengenaan pajak</li> <li>• Tantangan pemungutan pajak</li> <li>• Simulasi fungsi dan manfaat pajak</li> </ul>	4 x 4 jp



KD	Materi Pembelajaran		Waktu
	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	
3.6 Menganalisis indeks harga dan inflasi	Indeks Harga dan Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian indeks harga</li> <li>• Tujuan perhitungan indeks harga</li> <li>• Metode perhitungan Indeks harga</li> <li>• Pengertian Inflasi</li> <li>• Penyebab Inflasi</li> <li>• Jenis-jenis inflasi</li> <li>• Menghitung Inflasi</li> <li>• Dampak dan cara mengendalikan inflasi</li> </ul>	3 x 4 jp
4.6 Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi	Permintaan dan Penawaran Uang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori permintaan dan penawaran uang</li> <li>• Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran uang</li> </ul>	
3.7 Mendeskripsikan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal	Kebijakan Moneter	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian kebijakan moneter</li> <li>• Tujuan dan peran kebijakan moneter</li> <li>• Instrumen kebijakan moneter</li> </ul>	3 x 4 jp
4.7 Mengevaluasi peran dan fungsi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal	Kebijakan Fiskal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian kebijakan fiskal</li> <li>• Tujuan dan peran kebijakan fiskal</li> <li>• Instrumen kebijakan fiskal</li> </ul>	
3.8 Menganalisis peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia	Pelaku Ekonomi dalam Sistem Perekonomian Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian BUMN, BUMS dan Koperasi</li> <li>• Peran BUMN, BUMS dan Koperasi dalam perekonomian</li> <li>• Bentuk-bentuk BUMN, BUMS dan Koperasi</li> <li>• Kebaikan dan Kelemahan BUMN, BUMS dan Koperasi</li> </ul>	3 x 4 jp
4.8 Menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia			
3.9 Mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian	Pasar Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pasar modal</li> <li>• Peran pasar modal</li> <li>• Lembaga penunjang pasar modal</li> <li>• Instrumen/produk</li> <li>• Mekanisme transaksi</li> <li>• Investasi di pasar modal</li> </ul>	4 x 4 jp
4.9 Menyimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal			
		<b>Jumlah jam pelajaran</b>	<b>102 jp</b>

## Kelas XII

KD	Materi Pembelajaran		Waktu
	Materi Pokok	Sub Materi Pokok	
3.1 Mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional	Perdagangan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian perdagangan Internasional</li> <li>Manfaat perdagangan Internasional</li> <li>Faktor pendorong dan penghambat perdagangan Internasional</li> <li>Teori perdagangan Internasional</li> <li>Kebijakan perdagangan internasional</li> <li>Tujuan kebijakan perdagangan internasional</li> <li>Neraca perdagangan</li> </ul>	2 x 4 jp
4.1 Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional			
3.2 Menganalisis kerjasama ekonomi internasional	Kerjasama Ekonomi Internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian kerjasama ekonomi internasional</li> <li>Manfaat kerjasama ekonomi internasional</li> <li>Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi</li> <li>Lembaga-lembaga ekonomi Internasional</li> </ul>	2 x 4 jp
4.2 Menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional			
3.3 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi	Akuntansi sebagai Sistem Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian akuntansi</li> <li>Pemakai informasi akuntansi</li> <li>Karakteristik pemakai informasi akuntansi</li> <li>Kualitas informasi akuntansi</li> <li>Prinsip dasar akuntansi</li> <li>Bidang-bidang akuntansi</li> <li>Profesi akuntan</li> <li>Etika profesi akuntan</li> </ul>	2 x 4 jp
4.3 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi			
3.4 Mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi	Persamaan Dasar Akuntansi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep persamaan dasar akuntansi</li> <li>Mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal</li> <li>Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi</li> </ul>	2 x 4 jp
4.4 Menerapkan konsep persamaan dasar akuntansi			
3.5 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa	Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik perusahaan jasa</li> <li>Tahap pencatatan</li> <li>Tahap pengikhtisaran</li> <li>Tahap pelaporan</li> </ul>	6 x 4 jp
4.5 Mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa			
3.6 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang	Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik perusahaan dagang</li> <li>Transaksi perusahaan dagang</li> <li>Akun-akun pada perusahaan dagang</li> <li>Tahap pencatatan</li> <li>Tahap pengikhtisaran</li> <li>Tahap pelaporan</li> </ul>	10 x 4 jp
4.6 Mempraktikkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang			
<b>Jumlah jam pelajaran</b>			<b>96 jp</b>

Catatan:

1. Penilaian *Anecdotal Record* digunakan untuk menilai ranah sikap spiritual (KI\_1) dan sikap sosial (KI\_2) siswa selama proses pembelajaran
2. Bentuk penilaian ini dapat diterapkan setiap bulan atau triwulan untuk mengontrol ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial

## 2. SILABUS MATA PELAJARAN EKONOMI KURIKULUM 2013

### SILABUS MATA PELAJARAN EKONOMI (PEMINATAN)

**Satuan Pendidikan** : SMA / MA

**Kelas** : X (SEPULUH)

**Kompetensi Inti** :

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Mensyukuri sumber daya sebagai karunia Tuhan YME dalam rangka pemenuhan kebutuhan 1.2 Mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan produk bank dan lembaga keuangan non bank serta dalam pengelolaan koperasi					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, mandiri, kritis dan analitis dalam mengatasi permasalahan ekonomi</p> <p>2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, mandiri, adil, berani, peduli dalam melakukan kegiatan ekonomi</p>					
<p>3.1 Mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi</p> <p>4.1 Menyajikan konsep ilmu ekonomi</p>	<p>Konsep ilmu ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian ilmu ekonomi</li> <li>• Pembagian ilmu ekonomi</li> <li>• Prinsip ekonomi</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan prinsip ekonomi dari berbagai sumber belajar yang relevan.</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan prinsip ekonomi.</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi dan prinsip ekonomi dari berbagai sumber yang relevan.</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara pengertian ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, dan prinsip ekonomi.</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Hasil analisis dan simpulan tentang konsep dasar ilmu ekonomi dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang konsep ekonomi dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi menyajikan konsep ilmu ekonomi</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan dan bahan presentasi tentang konsep ilmu ekonomi</p>	6 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa cetak/ elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.2 Menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p> <p>4.2 Melaporkan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p>	<p>Masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inti masalah ekonomi/ kelangkaan</li> <li>Pilihan</li> <li>Biaya peluang</li> <li>Skala prioritas</li> <li>Pengelolaan keuangan</li> <li>Permasalahan pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa)</li> <li>Sistem ekonomi</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca tentang inti masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, cara mengatasi masalah pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa), dengan menggunakan sistem ekonomi yang berlaku dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan inti masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, cara mengatasi masalah pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa) dengan menggunakan sistem ekonomi yang berlaku</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/ informasi tentang inti masalah ekonomi/kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, cara mengatasi masalah pokok ekonomi (apa, bagaimana, untuk siapa) dengan menggunakan sistem ekonomi yang berlaku dari berbagai sumber yang relevan.</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait dan menentukan hubungan antara inti masalah ekonomi/ kelangkaan, pilihan, biaya peluang, skala prioritas, pengelolaan keuangan, cara mengatasi masalah pokok ekonomi untuk mendapatkan simpulan dan membuat rencana pemecahan masalah ekonomi</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Hasil analisis dan simpulan masalah ekonomi serta cara mengatasinya dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang masalah ekonomi dan cara mengatasinya dalam bentuk objektif dan uraian.</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi laporan hasil analisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai hasil pembuatan tugas menyusun skala prioritas kebutuhan dan pengelolaan keuangan (personal, keluarga, dan kegiatan usaha)</p> <p>Menilai tugas studi kasus tentang kelangkaan ekonomi yang ada di daerah sekitar</p>	12 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/ elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.3 Menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi  4.3 Menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi	<p>Pelaku kegiatan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi : Rumah Tangga Konsumsi (konsumen), Rumah Tangga Produksi (produsen), Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri.</li> <li>• Peran pelaku kegiatan ekonomi</li> <li>• Model diagram interaksi antarpelaku ekonomi/ <i>circulair flow diagram</i></li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi (Rumah Tangga Konsumsi, Rumah Tangga Produksi, Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri), peran pelaku kegiatan ekonomi, model diagram interaksi pelaku ekonomi/ <i>circulair flow diagram</i> dari itu, berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi (Rumah Tangga Konsumsi, Rumah Tangga Produksi, Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri), peran pelaku kegiatan ekonomi, model diagram interaksi pelaku ekonomi/ <i>circulair flow diagram</i></p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/ informasi tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, peran pelaku kegiatan ekonomi, model diagram interaksi pelaku ekonomi/ <i>circulair flow diagram</i> dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh bacaan dan dari sumber-sumber terkait serta menentukan hubungan antara pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, peran pelaku kegiatan ekonomi, model diagram interaksi pelaku ekonomi/ <i>circulair flow diagram</i> untuk mendapatkan simpulan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Hasil analisis dan simpulan tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam bentuk objektif dan uraian:</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi menyajikan peran pelaku kegiatan ekonomi</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan dan bahan presentasi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dan model diagram interaksi pelaku ekonomi (<i>circulair flow diagram</i>)</p>	9 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• Media cetak/ elektronik</li> <li>• Narasumber</li> <li>• Bila memungkinkan dapat mengakses data dari internet, contoh: <a href="http://dodiksuwisno.blogspot.com/2012/11/perilaku-dan-produsen-kelas-x.html">http://dodiksuwisno.blogspot.com/2012/11/perilaku-dan-produsen-kelas-x.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.4 Mendeskripsikan konsep pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian</p> <p>4.4 Melakukan penelitian tentang pasar dan terbentuknya harga pasar dalam perekonomian</p>	<p>Pasar dalam perekonomian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian pasar</li> <li>Peran pasar dalam perekonomian</li> <li>Bentuk-bentuk pasar (output) dan ciri-cirinya</li> </ul> <p>Permintaan dan penawaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian permintaan dan penawaran</li> <li>Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran</li> <li>Kurva permintaan dan penawaran</li> <li>Pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran)</li> <li>Hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya</li> <li>Proses terbentuknya harga keseimbangan</li> <li>Pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas</li> <li>Faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca peran pasar dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar (output) dan ciri-cirinya, pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran), hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya, proses terbentuknya harga keseimbangan, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas, faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan tentang peran pasar dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar (output) dan ciri-cirinya, pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran), hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya, proses terbentuknya harga keseimbangan, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas, faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran.</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang peran pasar dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar (output) dan ciri-cirinya, pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang pasar dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Penilaian proyek:</b> Menilai tugas melakukan penelitian sederhana tentang peran pasar dalam perekonomian</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan hasil penelitian sederhana tentang peran pasar dalam perekonomian (barang dan jasa)</p>	24 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>Media cetak/elektronik</li> <li>Bila memungkinkan dapat mengakses data dari internet, contoh: <a href="http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html">http://adit10411165.blogspot.com/2012/01/konsep-dasar-struktur-pasar-dalam.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>penawaran, pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran), hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya, proses terbentuknya harga keseimbangan, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas, faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran dari beberapa sumber yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta membuat hubungan antara peran pasar dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar (output) dan ciri-cirinya, pengertian permintaan dan penawaran, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran, kurva permintaan dan penawaran, pergerakan di sepanjang kurva dan pergeseran kurva (permintaan dan penawaran), hukum permintaan dan penawaran serta asumsi-asumsinya, proses terbentuknya harga keseimbangan, pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas, faktor-faktor yang memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran.</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan hasil penelitian tentang peran pasar dan terbentuknya harga di pasar barang dan jasa melalui berbagai bentuk media (tulisan dan lisan)</p>			



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.5 Mendeskripsikan bank, lembaga keuangan non bank, bank sentral dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian bank</li> <li>Fungsi bank</li> <li>Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank</li> </ul>	<b>Mengamati:</b> Pengertian bank dan lembaga keuangan non bank, fungsi bank dan lembaga keuangan non bank, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, pengertian bank sentral, fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, stabilitas sistem keuangan, pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan <b>Menanya:</b> Bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang pengertian bank dan lembaga keuangan non bank, fungsi bank dan lembaga keuangan non bank, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, pengertian bank sentral, fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, stabilitas sistem keuangan, pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang OJK <b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi pengertian bank dan lembaga keuangan non bank, fungsi bank dan lembaga keuangan non bank, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, pengertian bank sentral, fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, stabilitas sistem keuangan, pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang OJK dari berbagai sumber belajar yang relevan <b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta menghubungkannya antara pengertian bank dan lembaga keuangan	<b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang bank dan lembaga keuangan non bank dalam bentuk objektif dan uraian <b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan mendemonstrasikan peran dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan OJK <b>Penilaian produk :</b> Menilai laporan dan bahan presentasi tentang peran dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, bank sentral, dan OJK	15 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>Media cetak/elektronik</li> <li><a href="http://www.bi.go.id">www.bi.go.id</a></li> <li><a href="http://www.ojk.go.id">www.ojk.go.id</a></li> <li><a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a></li> <li><a href="http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm">http://www.bimbie.com/otoritas-jasa-keuangan.htm</a> (bila memungkin)</li> <li>Undang-Undang Nomor 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009</li> <li>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK</li> <li>Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan</li> <li>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah</li> <li>Buku penunjang lain tentang kebanksentralan</li> </ul>
4.5 Menyajikan peran dan produk bank, lembaga keuangan non bank, Bank Sentral dan Otoritas jasa Keuangan (OJK)	Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian lembaga keuangan non bank</li> <li>Fungsi lembaga keuangan non bank</li> <li>Jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk lembaga keuangan non bank</li> </ul> Bank Sentral <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian bank sentral</li> <li>Fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia</li> <li>Stabilitas sistem keuangan</li> </ul> Otoritas Jasa Keuangan (OJK) <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian OJK</li> <li>Fungsi, tugas, dan wewenang OJK</li> </ul>				

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>bukan bank, fungsi bank dan lembaga keuangan non bank, jenis, prinsip kegiatan usaha, dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, pengertian bank sentral, fungsi, tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, stabilitas sistem keuangan, pengertian OJK, fungsi, tugas, dan wewenang OJK berdasarkan data/informasi yang sudah dikumpulkan</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Laporan dan mempresentasikannya dalam bentuk lisan dan tulisan tentang peran dan produk bank dan lembaga keuangan non bank, peran dan fungsi bank sentral serta OJK</p>			
3.6 Mendeskripsikan sistem pembayaran dan alat pembayaran	<p>Sistem Pembayaran dan Alat Pembayaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian sistem pembayaran</li> <li>Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran</li> <li>Penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia, sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis dan syarat uang, unsur pengaman uang rupiah oleh Bank Indonesia, dan jenis-jenis alat pembayaran nontunai dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia, sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis dan syarat uang, unsur pengaman uang rupiah, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, dan jenis-jenis alat pembayaran nontunai.</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang sistem pembayaran dan alat pembayaran dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan dan bahan penyajian tentang sistem pembayaran, alat pembayaran, dan unsur pengaman uang rupiah</p>	12 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>Media cetak/elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang</li> <li>Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah</li> </ul>
4.6 Menyimulasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran	<p>Uang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sejarah uang</li> <li>Pengertian uang</li> <li>Fungsi, jenis dan syarat uang</li> <li>Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia</li> <li>Unsur pengaman uang rupiah</li> </ul> <p>Alat pembayaran nontunai</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis-jenis alat pembayaran nontunai</li> </ul>				

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia, sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis dan syarat uang, unsur pengaman uang rupiah, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, dan jenis-jenis alat pembayaran nontunai dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta menghubungkannya tentang pengertian sistem pembayaran, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran, penyelenggaraan sistem pembayaran nontunai oleh Bank Indonesia, sejarah uang, pengertian uang, fungsi, jenis dan syarat uang, unsur pengaman uang rupiah, pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia, dan jenis-jenis alat pembayaran nontunai berdasarkan data/informasi yang sudah dikumpulkan</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Laporan dalam bentuk lisan dan tulisan, menyajikan, serta mengomunikasikan sistem pembayaran dan alat pembayaran di depan kelas.</p>			

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.7 Mendeskripsikan konsep manajemen  4.7 Menerapkan konsep manajemen dalam kegiatan sekolah	Manajemen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian manajemen</li> <li>• Fungsi-fungsi manajemen</li> <li>• Unsur-unsur manajemen</li> <li>• Bidang-bidang manajemen</li> <li>• Penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah</li> </ul>	<p><b>Mengamati :</b> Membaca pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang manajemen dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta menentukan hubungannya tentang pengertian manajemen, fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, bidang-bidang manajemen, dan penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah berdasarkan data/informasi yang sudah dikumpulkan</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan laporan tentang rancangan penerapan teori manajemen dalam kegiatan siswa di sekolah dan mempresentasikannya dalam bentuk tulisan dan lisan</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang hakikat manajemen dalam bentuk objektif dan uraian.</p> <p><b>Penilaian proyek:</b> Menilai kemampuan mempraktikkan teori manajemen dalam kegiatan siswa di sekolah</p>	9 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• Media cetak/elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.8 Mendeskripsikan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi  4.8 Menerapkan konsep koperasi dan pengelolaan koperasi	<p>Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian koperasi</li> <li>Asas koperasi</li> <li>Prinsip-prinsip koperasi</li> <li>Tujuan koperasi</li> <li>Jenis-jenis koperasi</li> <li>Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi</li> </ul> <p>Pengelolaan koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peran koperasi</li> <li>Perangkat organisasi koperasi</li> <li>Sumber permodalan koperasi</li> <li>Prosedur pendirian koperasi</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca pengertian koperasi, asas koperasi, prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, peran koperasi, perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, dan prosedur pendirian koperasi dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan tentang pengertian koperasi, asas koperasi, prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, peran koperasi, perangkat organisasi koperasi, sumber permodalan koperasi, dan prosedur pendirian koperasi</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian koperasi, asas koperasi, prinsip-prinsip koperasi, tujuan koperasi, jenis-jenis koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi, peran koperasi sekolah, perangkat organisasi koperasi sekolah, sumber permodalan koperasi sekolah, dan prosedur pendirian koperasi sekolah dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data serta menghubungkannya tentang pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, prinsip-prinsip koperasi, fungsi dan peran koperasi, jenis-jenis usaha koperasi, perangkat organisasi koperasi dan koperasi sekolah, sumber permodalan koperasi dan koperasi sekolah, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi dan koperasi sekolah, prosedur pendirian koperasi/koperasi sekolah, membuat rencana</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang hakikat koperasi dalam bentuk objektif dan uraian:</p> <p><b>Penilaian proyek:</b> Menilai kemampuan dalam mempraktikkan pengelolaan koperasi sekolah melalui KOPSIS.</p>	15 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud Kurikulum 2013</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>Media cetak/elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian</li> <li>Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor SKB 125/M/KPTS/X/1984, Nomor 0447/U/1984, dan Nomor 71 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Sekolah.</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>pendirian/pengembangan koperasi sekolah/koperasi siswa (KOPSIS), dan simulasi pendirian koperasi sekolah/koperasi siswa dari berbagai sumber belajar yang relevan.</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Mengomunikasikan rencana penerapan konsep koperasi dalam praktik pengelolaan Koperasi Siswa (KOPSIS)</p>			

Catatan:

Penilaian *Anecdotal Record* digunakan untuk menilai ranah sikap spiritual dan sikap sosial siswa selama proses pembelajaran. Bentuk penilaian ini dapat diterapkan setiap bulan atau triwulan untuk mengontrol ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial.

## SILABUS MATA PELAJARAN EKONOMI (PEMINATAN)

**Satuan Pendidikan** : SMA/MA  
**Kelas** : XI (SEBELAS)  
**Kompetensi Inti** :

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
- KI 3 : Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Mensyukuri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia untuk kesejahteraan rakyat 1.2 Mengamalkan nilai-nilai agama dalam peranannya sebagai pelaku ekonomi 2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kreatif, dan mandiri dalam upaya mengatasi permasalahan					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>pembangunan di Indonesia</p> <p>2.2 Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan kritis sebagai pelaku ekonomi</p>					
<p>3.1 Mendeskripsikan konsep pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, permasalahan dan cara mengatasinya</p> <p>4.1 Menyajikan temuan permasalahan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi serta cara mengatasinya.</p>	<p>Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pembangunan ekonomi</li> <li>• Perencanaan pembangunan ekonomi</li> <li>• Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi</li> <li>• Faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi</li> <li>• Menilai prestasi pembangunan ekonomi</li> <li>• Masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang</li> <li>• Kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi</li> <li>• Pengertian pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Cara mengukur pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Teori pertumbuhan ekonomi</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks atau sumber lain yang relevan tentang pengertian pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, menilai prestasi pembangunan ekonomi, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan tentang pengertian pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang pengertian</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi laporan hasil analisis masalah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai cara mengatasi masalah pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk laporan atau laporan hasil diskusi</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket Ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa cetak/elektronik</li> <li>• <a href="http://www.scribd.com/doc/41287922/Konsep-Pertumbuhan-Dan-Pembangunan-Ekonomi">http://www.scribd.com/doc/41287922/Konsep-Pertumbuhan-Dan-Pembangunan-Ekonomi</a></li> <li>• <a href="http://www.bappenas.go.id">www.bappenas.go.id</a></li> <li>• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</li> </ul>



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>pembangunan ekonomi, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, perencanaan pembangunan ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, cara mengukur pertumbuhan ekonomi, dan teori pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sumber yang relevan (bila mungkin melalui internet)</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan dan sumber-sumber terkait serta membuat hubungannya untuk mendapatkan simpulan dan menemukan cara mengatasi masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil analisis dan temuan dalam bentuk tulisan tentang cara mengatasi masalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi</p>			
<p>3.2 Menganalisis permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia</p> <p>4.2 Menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan di Indonesia</p>	<p>Ketenagakerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja</li> <li>Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja</li> <li>Sistem upah</li> <li>Pengangguran</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi laporan hasil analisis masalah ketenagakerjaan</p> <p><b>Penilaian Produk:</b> Menilai cara mengatasi permasalahan</p>	12 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket Ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja dan angkatan kerja, upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, dan pengangguran melalui berbagai bacaan dan/atau <i>browsing</i> internet.</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan dan sumber-sumber terkait serta membuat hubungannya untuk mendapatkan simpulan dan menemukan cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan hasil analisis atau hasil observasi tentang cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk tulisan maupun lisan</p>	ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk laporan penugasan atau laporan hasil diskusi		
3.3. Mendeskripsikan pendapatan nasional  4.3 Menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional	Pendapatan Nasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pendapatan nasional</li> <li>• Manfaat pendapatan nasional</li> <li>• Komponen-komponen pendapatan nasional</li> <li>• Metode perhitungan pendapatan nasional</li> <li>• Pendapatan perkapita</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang konsep, manfaat, komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dari berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang konsep pendapatan nasional, manfaat, komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang konsep, manfaat, komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita melalui berbagai bacaan.</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang pendapatan nasional dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyajikan perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menghitung pendapatan nasional berdasarkan tugas yang disusun guru (studi kasus)</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket Ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa dan media cetak/elektronik</li> <li>• Bila memungkinkan dapat menggunakan internet untuk mengakses data, misalnya : <a href="http://media.amirulindonesia.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-metode-perhitungan.html">http://media.amirulindonesia.blogspot.com/2012/06/konsep-dan-metode-perhitungan.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><b>Mengasosiasi:</b> menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan dan dari sumber-sumber terkait untuk dapat menyajikan konsep, manfaat, komponen dan metode perhitungan pendapatan nasional</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang hasil perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita</p>			
<p>3.2 Mendeskripsikan APBN dan APBD dalam pembangunan</p> <p>4.4 Mengevaluasi peran APBN dan APBD terhadap pembangunan</p>	<p>APBN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian APBN</li> <li>Fungsi dan tujuan APBN</li> <li>Sumber-sumber penerimaan negara</li> <li>Jenis-jenis pengeluaran negara</li> <li>Mekanisme penyusunan APBN</li> <li>Pengaruh APBN terhadap perekonomian</li> </ul> <p>APBD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian APBD</li> <li>Fungsi dan Tujuan APBD</li> <li>Sumber-sumber penerimaan daerah</li> <li>Jenis-jenis pengeluaran daerah</li> <li>Mekanisme penyusunan APBD</li> <li>Pengaruh APBD terhadap perekonomian</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang konsep APBN dan APBD serta melihat APBN dan APBD tahun berjalan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang APBN dan APBD dalam pembangunan</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang APBN dan APBD melalui berbagai bacaan (referensi) dan/atau <i>browsing</i> internet.</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis secara kritis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan dan sumber-sumber terkait serta membuat hubungannya untuk dapat menjelaskan peran APBN dan APBD dalam pembangunan</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil analisis dan evaluasi tentang peran APBN dan APBD melalui berbagai media (lisan dan tulisan)</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang APBN dan APBD dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kegiatan dikusi kelompok tentang peran APBN dan APBD</p> <p><b>Penilaian Produk:</b> Menilai hasil evaluasi peran APBN dan APBD</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket Ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> <li><a href="http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html">http://gadisrafidha.blogspot.com/2011/11/tugas-ekonomi-mengenai-apbn-dan-apbd.html</a></li> <li>Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23</li> <li>Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</li> <li>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah</li> <li>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.5 Menganalisis peran, fungsi, dan manfaat pajak  4.5 Mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak	<p>Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian pajak</li> <li>Fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN</li> <li>Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya</li> <li>Asas pemungutan pajak</li> <li>Jenis-jenis pajak</li> <li>Sistem pemungutan pajak di Indonesia</li> <li>Alur administrasi perpajakan di Indonesia</li> <li>Objek dan cara pengenaan pajak</li> <li>Tantangan pemungutan pajak</li> <li>Simulasi fungsi dan manfaat pajak</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang pengertian pajak, fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek dan cara pengenaan pajak, tantangan pemungutan pajak, simulasi fungsi dan manfaat pajak</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan tentang pengertian pajak, fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek dan cara pengenaan pajak, dan tantangan pemungutan pajak.</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang pengertian pajak, fungsi dan manfaat pajak serta hubungannya dengan APBN, perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya, asas pemungutan pajak, jenis-jenis pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia, alur administrasi perpajakan di Indonesia, objek dan cara pengenaan pajak, tantangan pemungutan pajak, simulasi fungsi dan manfaat pajak melalui berbagai bacaan (referensi)</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan dan sumber-sumber terkait serta membuat hubungannya untuk dapat mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak.</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil analisis dan evaluasi dalam bentuk tulisan dan lisan tentang peran, fungsi dan manfaat pajak</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif materi tentang perpajakan dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyimulasikan fungsi, manfaat pajak, dan besaran pajak dalam APBN/APBD</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai kemampuan mengevaluasi peran, fungsi dan manfaat pajak dalam pembangunan</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> <li>Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)</li> <li>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan</li> <li>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.6 Menganalisis indeks harga dan inflasi</p> <p>4.6 Menyajikan temuan hasil analisis indeks harga dan inflasi</p>	<p>Indeks Harga dan Inflasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengertian indeks harga</li> <li>Tujuan perhitungan indeks harga</li> <li>Metode perhitungan indeks harga</li> <li>Pengertian inflasi</li> <li>Penyebab inflasi</li> <li>Jenis-jenis inflasi</li> <li>Menghitung inflasi</li> <li>Dampak dan cara mengendalikan inflasi</li> </ul> <p>Permintaan dan Penawaran Uang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Teori permintaan dan penawaran uang</li> <li>Faktor - faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca indeks harga dan inflasi, permintaan dan penawaran uang dari berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan klarifikasi yang berkaitan dengan indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/ informasi dan mencari hubungannya tentang indeks harga dan inflasi, permintaan dan penawaran uang, dari berbagai sumber belajar yang relevan dan/atau internet (bila memungkinkan)</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis secara kritis dan menyimpulkan hasil analisis tentang indeks harga, inflasi, permintaan dan penawaran uang, serta membuat hubungannya</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyusun laporan dan mempresentasikan hasil analisis/mengkritisi dalam bentuk lisan dan tulisan tentang indeks harga dan inflasi, penawaran dan permintaan uang</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai ranah pengetahuan materi tentang indeks harga dan inflasi serta penawaran dan permintaan uang dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyajikan hasil analisis dan simpulan</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan hasil temuan indeks harga dan inflasi, penawaran dan permintaan uang</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket ekonomi Kemendikbud Kurikulum 2013</li> <li>Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan (Buku Panduan Guru tentang Ekonomi SMA/MA Muatan Kebanksentralan yang diterbitkan Bank Indonesia dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan)</li> <li>Media massa cetak/ elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
3.9 Mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian 4.9 Menyimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal	Pasar Modal <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian pasar modal</li> <li>• Peran pasar modal</li> <li>• Lembaga penunjang pasar modal</li> <li>• Instrumen/ produk</li> <li>• Mekanisme transaksi</li> <li>• Investasi di pasar modal</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca pengertian pasar modal, peran pasar modal, lembaga penunjang, instrumen/produk, mekanisme transaksi dan investasi di pasar modal dari berbagai sumber belajar yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian pasar modal, peran pasar modal, instrumen/produk, mekanisme transaksi dan investasi di pasar modal dari berbagai sumber belajar</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi berkaitan dengan pengertian pasar modal, peran pasar modal, instrumen/ produk, mekanisme transaksi dan investasi di pasar modal</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menyimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal setelah menganalisis dan menyimpulkan informasi/data yang dikumpulkan serta membuat hubungannya</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan hasil simulasi mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang pasar modal dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyimulasikan mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan hasil simulasi mekanisme perdagangan saham dan investasi di pasar modal</p>	16 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa cetak/elektronik</li> <li>• Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal</li> </ul>

Catatan:

Penilaian *Anecdotal Record* digunakan untuk menilai ranah sikap spiritual dan sikap sosial siswa selama proses pembelajaran. Bentuk penilaian ini dapat diterapkan setiap bulan atau triwulan untuk mengontrol ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial.

## SILABUS MATA PELAJARAN EKONOMI (PEMINATAN)

**Satuan Pendidikan : SMA / MA**

**Kelas : XII (DUA BELAS)**

**Kompetensi Inti :**

- KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
- KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI 4 : Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
1.1 Mensyukuri karunia Tuhan YME atas keragaman dan keunggulan antarbangsa 1.2 Mensyukuri hakikat akuntansi sebagai sistem informasi keuangan 2.1 Bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, responsif dan proaktif dalam melakukan					

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
perdagangan dan kerjasama ekonomi internasional, serta dalam melakukan kegiatan tahapan akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang					
3.1 Mendeskripsikan konsep dan kebijakan perdagangan internasional  4.1 Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional	Perdagangan Internasional <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian perdagangan internasional</li> <li>• Manfaat perdagangan internasional</li> <li>• Faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional</li> <li>• Teori perdagangan internasional</li> <li>• Kebijakan perdagangan internasional</li> <li>• Tujuan kebijakan perdagangan internasional</li> <li>• Neraca perdagangan</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca dari berbagai sumber belajar yang berkaitan dengan pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, tujuan kebijakan perdagangan internasional, dan neraca perdagangan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, tujuan kebijakan perdagangan internasional, dan neraca perdagangan</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian perdagangan internasional, manfaat perdagangan internasional, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori perdagangan internasional, kebijakan perdagangan internasional, tujuan kebijakan perdagangan internasional, dan neraca perdagangan dari berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi :</b> Mengevaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional dalam bentuk</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang perdagangan internasional dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan menyampaikan hasil evaluasi dampak kebijakan dan simpulan perdagangan internasional</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai hasil evaluasi dampak kebijakan perdagangan internasional</p>	8 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• <i>Wardayadi.wordpress.com</i>.</li> <li>• <i>www.anneahira.com</i> (penunjang)</li> <li>• Media massa cetak/elektronik</li> <li>• <a href="http://okayana.blogspot.com/2009/08/pengertian-perdagangan-internasional.html">http://okayana.blogspot.com/2009/08/pengertian-perdagangan-internasional.html</a></li> </ul>



Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>laporan setelah menganalisis dan menyimpulkan informasi/ data yang dikumpulkan serta membuat hubungannya</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan hasil evaluasi dan simpulan tentang dampak kebijakan ekonomi internasional dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>			
<p>3.2 Menganalisis kerjasama ekonomi internasional</p> <p>4.2 Menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional</p>	<p>Kerjasama Ekonomi Internasional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian kerjasama ekonomi internasional</li> <li>• Manfaat kerjasama ekonomi internasional</li> <li>• Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional</li> <li>• Lembaga-lembaga ekonomi internasional</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional dari berbagai sumber belajar</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi internasional dari beberapa sumber</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menyajikan hasil analisis dan simpulan serta membuat/ mencipta hubungannya tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi Internasional setelah mengumpulkan informasi/ data.</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> menilai kemampuan kognitif tentang kerjasama internasional dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai laporan dan bahan presentasi tentang kerjasama ekonomi internasional</p>	8 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket ekonomi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku ekonomi penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa cetak/elektronik</li> <li>• Bila memungkinkan dapat menggunakan internet untuk mengakses data, misalnya <a href="http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/kebijakan-perdagangan-internasional.html">http://ssbelajar.blogspot.com/2012/03/kebijakan-perdagangan-internasional.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><b>Mengomunikasikan:</b> Menyampaikan hasil analisis dan simpulan tentang pengertian kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, dan lembaga-lembaga ekonomi Internasional dalam berbagai bentuk media (lisan dan tulisan)</p>			
<p>3.3 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi</p> <p>4.3 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi</p>	<p>Akuntansi sebagai Sistem Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengertian akuntansi</li> <li>• Pemakai Informasi akuntansi</li> <li>• Karakteristik pemakai informasi akuntansi</li> <li>• Kualitas informasi akuntansi</li> <li>• Prinsip dasar akuntansi</li> <li>• Bidang-bidang akuntansi</li> <li>• Profesi akuntan</li> <li>• Etika profesi akuntan</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik, kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan dari laporan keuangan dan berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi tentang pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan melalui berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang pengertian akuntansi, pemakai informasi akuntansi, karakteristik kualitas informasi akuntansi, prinsip dasar akuntansi, bidang-bidang akuntansi, profesi akuntan dan etika profesi akuntan</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang akuntansi sebagai sistem informasi dalam bentuk objektif dan uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/presentasi hasil analisis akuntansi sebagai sistem informasi</p>	8 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku paket Akuntansi Kemendikbud</li> <li>• Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>• Media massa cetak/elektronik</li> <li>• <a href="http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2011/01/akuntansi-sebagai-sistem-informasi.html">http://ardiyansarutobi.blogspot.com/2011/01/akuntansi-sebagai-sistem-informasi.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan / mempresentasikan hasil analisis dalam bentuk tulisan tentang akuntansi sebagai sistem informasi</p>			
<p>3.4 Mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi</p> <p>4.4 Menerapkan konsep persamaan dasar akuntansi</p>	<p>Persamaan Dasar Akuntansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Konsep persamaan dasar akuntansi</li> <li>Mekanisme debit kredit dan aturan saldo normal</li> <li>Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang konsep persamaan dasar akuntansi</p> <p><b>Menanya:</b> Bertanya dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang konsep persamaan dasar akuntansi</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai referensi/media terkait dengan konsep persamaan akuntansi</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait tentang konsep persamaan akuntansi, untuk menciptakan cara, format atau sistem dalam melakukan pencatatan pada persamaan akuntansi</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil analisis transaksi dan penerapannya dalam persamaan dasar akuntansi</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai ranah pengetahuan tentang konsep persamaan dasar akuntansi dalam bentuk uraian</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Kemampuan menyajikan laporan konsep persamaan dasar akuntansi</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai hasil laporan konsep persamaan dasar akuntansi</p>	8 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket Akuntansi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> </ul>
<p>3.5 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan jasa</p> <p>4.5 Mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa</p>	<p>Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik perusahaan jasa</li> <li>Tahap pencatatan</li> <li>Tahap pengikhtisaran</li> <li>Tahap pelaporan</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca buku teks tentang karakteristik perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan jasa (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dari berbagai sumber</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan dan berdiskusi untuk mendapatkan klarifikasi tentang karakteristik perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan jasa (pencatatan)</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data dan informasi melalui berbagai referensi/media tentang karakteristik perusahaan</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang siklus akuntansi perusahaan jasa dalam bentuk objektif dan uraian.</p> <p><b>Unjuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/penyusunan/ presentasi laporan hasil analisis siklus akuntansi perusahaan jasa</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai kemampuan mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa dalam bentuk laporan keuangan</p>	36 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket Akuntansi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>jasa dan siklus akuntansi perusahaan jasa (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan)</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh tentang karakteristik perusahaan jasa dan siklus akuntansi perusahaan jasa (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dari bacaan dan sumber-sumber lain yang relevan, untuk menciptakan cara, format atau sistem dalam membuat siklus akuntansi perusahaan jasa</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil praktik siklus akuntansi perusahaan jasa (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dalam bentuk tulisan</p>			
<p>3.6 Menganalisis siklus akuntansi perusahaan dagang</p> <p>4.6 Mempraktikkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang</p>	<p>Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik perusahaan dagang</li> <li>Transaksi perusahaan dagang</li> <li>Akun-akun pada perusahaan dagang</li> <li>Tahap pencatatan</li> <li>Tahap pengikhtisaran</li> <li>Tahap pelaporan</li> </ul>	<p><b>Mengamati:</b> Membaca tentang karakteristik perusahaan dagang, transaksi perusahaan dagang, akun-akun dan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dari berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Menanya:</b> Mengajukan pertanyaan tentang karakteristik perusahaan dagang, transaksi perusahaan dagang, akun-akun dan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dari berbagai sumber</p> <p><b>Mengeksplorasi:</b> Mengumpulkan data/informasi tentang karakteristik dan siklus akuntansi perusahaan dagang (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dari berbagai sumber yang relevan</p> <p><b>Mengasosiasi:</b> Menganalisis dan menyimpulkan informasi/data yang dikumpulkan serta mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan dagang (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan), untuk menciptakan cara, format atau</p>	<p><b>Tes tertulis:</b> Menilai kemampuan kognitif tentang akuntansi perusahaan dagang dalam bentuk objektif /uraian</p> <p><b>Untuk kerja:</b> Menilai kemampuan diskusi/penyusunan/ presentasi laporan hasil analisis siklus akuntansi perusahaan dagang</p> <p><b>Penilaian produk:</b> Menilai kemampuan mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan dagang dalam bentuk laporan keuangan</p>	28 JP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buku paket Akuntansi Kemendikbud</li> <li>Buku-buku akuntansi penunjang yang relevan</li> <li>Media massa cetak/elektronik</li> <li>Bila memungkinkan dapat menggunakan internet untuk mengakses data, misalnya <a href="http://pan2du.blogspot.com/2011/11/akuntansi-perusahaan-dagang.html">http://pan2du.blogspot.com/2011/11/akuntansi-perusahaan-dagang.html</a></li> </ul>

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
		<p>sistem dalam membuat siklus akuntansi perusahaan dagang</p> <p><b>Mengomunikasikan:</b> Melaporkan hasil praktik siklus akuntansi perusahaan dagang (pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan) dalam berbagai bentuk tulisan atau media.</p>			

Catatan:

Penilaian *Anecdotal Record* digunakan untuk menilai ranah sikap spiritual dan sikap sosial siswa selama proses pembelajaran .  
Bentuk penilaian ini dapat diterapkan setiap bulan atau triwulan untuk mengontrol ketercapaian sikap spiritual dan sikap sosial.

## BIODATA PENULIS



Herlan Firmansyah lahir di Cianjur, 07 Juli 1981. Pendidikan formal mulai dari SD sampai SMA ditempuhnya di Cianjur. Adapun pendidikan jenjang S1 (lulus 2004) dan S2 (lulus 2008) di tempuhnya di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Setiap harinya ia bekerja sebagai pengajar ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cianjur dan dosen mata kuliah teori ekonomi mikro dan makro di Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Suryakencana (UNSUR) Cianjur dan Politeknik Piksi Ganesha Cianjur.

Selain sebagai pendidik, ia aktif di berbagai organisasi yang diantaranya menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FAI Universitas Suryakencana (UNSUR) , Ketua Umum Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK) Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Wilayah Jawa Barat periode 2010-2015, Sekretaris Bidang Pendidikan ICMI ORDA Cianjur 2010-2015, Sekretaris dan Direktur Program Gertas Foundation tahun 2012-2017, Bidang Litbang Persatuan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Cianjur, Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Penulis Indonesia (API) periode 2008-2011, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Asosiasi Guru Penulis (AGP) – PGRI Provinsi Jawa Barat, Ketua Umum Koperasi Mahasiswa Bumi Siliwangi UPI Bandung periode 2003-2005. Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) Pusat Jakarta Sebagai Sekretaris Umum Tahun 2005-2006, Anggota Pengawas tahun 2007 dan Ketua Pengawas 2008-2011. Penulis juga merupakan Tim Penyusun Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Ekonomi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Adapun buku yang pernah ditulisnya diantaranya Buku *IPS untuk kelas I s.d VI SD*, Penerbit Indrajaya Jakarta tahun 2008 (Lolos Penilaian PUSBUK/BSNP dan Depag Jakarta). Buku *IPS untuk SMP kelas VII-IX*, Penerbit Djatnika Bandung tahun 2008 (Lolos Penilaian Depag dan BSNP Jakarta). Buku *Economic 1 Advance Learning Untuk SMA/MA*, Penerbit Grafindo, 2010, Bandung. Buku *Economic 2 Advance Learning Untuk SMA/MA*, Penerbit Grafindo, 2010, Bandung. Buku *Economic 3 Advance Learning Untuk SMA/MA*, Penerbit Grafindo, 2010, Bandung. Buku *Filfsafat Ilmu Pendidikan Agama*, Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung. Buku *Meretas Pendidikan Nilai*, Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung. Buku *Malapraktik Pendidikan, Demokrasi dan Birokrasi*, Penerbit Arfino Raya, 2010, Bandung (Penyunting). Buku *Alangkah Lucunya Sekolah Negeri Ini*, Penerbit Progressio-Sygma, 2010, Bandung. Buku *Bank Umum untuk SMK* tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP.

Buku *Pasar Modal untuk SMK* tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP. Buku *Koperasi Simpan Pinjam untuk SMK* tahun 2012 lulus penilaian PUSBUK-BSNP, serta artikel-artikel pada Harian Umum Pikiran Rakyat, Republika, Koran Aspirasi, Metro Puncak, Majalah ISMA MAN Cianjur dan [www.duniaguru.com](http://www.duniaguru.com). Kritik dan saran dapat ditujukan kepada email penulis: [islamania\\_erlan@yahoo.co.id](mailto:islamania_erlan@yahoo.co.id).

## BIODATA



Nama : Drs. Wiji Purwanta, M.Pd  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Dan Tgl Lahir: Klaten, 5 Juni 1959  
N I P : 195906051989021001  
Agama : Islam  
Pendidikan : S2 Teknologi Pendidikan UNJ  
Alamat Rumah : Villa Melati Mas Blok G XI no. 27  
Serpong  
Telpon / Hp : 021-5374044 / 08129645732  
Email : Wiji\_purwanta@plasa.com  
asosiasigurueko@yahoo.com  
Unit Kerja : Sudin Dikmen Jakarta Selatan  
Alamat Unit Kerja: Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Gd Walikota Jaksel Lt 11 Jl Prapanca  
Raya no.9 Kebayoran Baru, Jakarta  
Selatan 12170  
Telp / Fax : 021-7256847  
Website : <http://www.asosiasiguruekonomi.org>  
Kota : Jakarta Selatan  
Provinsi : DKI JAKARTA

### Pengalaman kerja:

1. Guru Ekonomi SMAN 33 Jakarta Barat selama 23 tahun
2. Ketua MGMP Ekonomi DKI Jakarta tahun 2000 sampai sekarang
3. Ketua Asosiasi Guru Ekonomi Indonesia tahun 2007 sampai sekarang
4. Tim Pengembang KTSP Direktorat Pembinaan SMA tahun 2004 sampai sekarang
5. Tim Pengembang Kurikulum 2004 Direktorat Dikmenum
6. Tim Penulis Ujian Nasional matapelajaran Ekonomi
7. Tim penulis soal SIMAK Universitas Indonesia 2009 sampai sekarang
8. Tim penilai Program Induksi Tendik Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013



9. Tim Penilai mutasi guru Tendik Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta 2013
10. Tim Penyusun Bahan Ajar berbasis TIK Direktorat Pembinaan SMA 2005
11. Pembina Olimpiade Ekonomi Nasional tahun 2004 sampai sekarang
12. Guru berprestasi DKI Jakarta tahun 2005
13. Penulis buku ekonomi PT. Pradnya Paramita jilid I, II dan II
14. Penulis buku ekonomi PT. Yudistira jilid I, II dan II
15. Penulis buku Akuntansi PT. Bina Mulia jilid I, dan II
16. Penulis buku ekonomi PT. Pradnya Paramita jilid I, II dan II
17. Penulis buku Ekonomi SMA PT. Tunas Melati jilid I, II, dan III
18. Penulis buku Pengantar Pasar Modal PT. Empat Sekawan
19. Penulis modul ekonomi Pustekom
20. Pembina Teknis sekolah Indonesia di luar negeri (Sinagpore, Malaysia dan Bangkok)
21. Dewan jury lomba kenetra ilmuan Bangkok 2005
22. Peserta TOT Ekonomi di Mexico City tahun 2007
23. Peserta TOT Ekonomi di Indonesia tahun 2008
24. Pengawas Sekolah wilayah Jakarta Selatan 2010 sampai sekarang
25. Pengurus APSI Provinsi DKI Jakarta 2013
26. Tim pengembang Kurikulum 2013

Jakarta, 23 April 2013

Drs. Wiji Purwanta, M.Pd

Halaman ini sengaja dikosongkan



## TIM PENYUSUN

### BANK INDONESIA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

---

#### **Penasehat**

*Deputi Gubernur Bank Indonesia*

Ronald Waas

---

#### **Penanggung Jawab**

*Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Uang*

Lambok Antonius Siahaan

*Direktur Eksekutif Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral*

Iskandar Simorangkir

*Direktur Departemen Pengelolaan Uang*

Eko Yulianto

*Direktur Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral*

Wahyu Dewati

---

#### **Narasumber Bank Indonesia**

Eko Yulianto, Wijayanti Yuwono, Sri Darmadi Soedibyo, Priyo R. Widodo, Sithowati Sandrarini, Erma Kusumawati, Veny Tamarind, Cecep M. Hakim, Bambang Suroso, Chatarina Anintyarini, Doni Septadijaya, Nuraini Yuanita, R. Aga Nugraha

---

#### **Tim Review Bank Indonesia**

Wijayanti Yuwono, Ronald L. Toruan, Priyo R. Widodo, Akhis R. Hutabarat, Uzersyah, Sithowati Sandrarini, Tonny Noor Tjahjono, Ermawati Kusumawati, Rolan E. Samosir, Felicia V.I. Barus, Cicilia Anggadewi Harun, Bambang Suroso, Chatarina Anintyarini, Heriman Budi Subangun, Rahadi Arudji T.D, Tri Adi Riyanto, Prabu Dewanto, Leni Novita Aritonang.

---

#### **Tim Review Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Hery Widyanstomo, Hermansoemantrie, Suharyadi, Veronica

---

---

**Tim Penguji Keterbacaan Buku**

Guru Ekonomi SMA Malang

Guru Ekonomi SMA Kota Banda Aceh

---

**Tim Pilot Project Pengembangan Silabus Ekonomi MA Provinsi Jawa Barat**

Herlan Firmansyah S.Pd.M.Pd, R.A Andriani Lestari S.Pd, Lela Solihah SE, MS.i

Indra Regawa S.Pd, MM, Drs. Ujang Supandi, Drs. Yazid Bustomy

---

**Tim Penulis**

Herlan Firmansyah

Wiji Purwanta

---

**Fotografer**

Abdul Haris

---

**Lay Outer**

Udin Jaenudin, Sunarto

---



